BAPPERIDA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa



Perubahan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
5. Perubahan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2026 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil sampai triwulan II tahun berkenaan;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
   f. bab VI memuat penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
   a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.

(2) Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026 NOMOR 16

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang..... I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.9
1.4 Maksud dan Tujuan..... I.10
1.4.1 Maksud I.10
1.4.2 Tujuan I.10
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD..... I.11

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN II.1
2.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran sampai Triwulan I Tahun 2026 . II.1
2.2 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 202..... II.10
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi..... II.10
2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka II.12
2.2.3 Rasio Gini II.13
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia II.15
2.2.5 Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem II.16
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II.76
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah II.76
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.87
2.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan II.89
2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang ... II.94
2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II.98

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III.1
3.1 Perubahan Karangka Ekonomi Daerah..... III.2
3.1.1. Evaluasi Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026..... III.2
3.1.2 Perkembangan dan Realisasi Indikator Ekonomi Makro Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 ..... III.4
3.1.3 Analisis Penyimpangan/Kesenjangan antara Asumsi RKPD Awal dengan Perkembangan Riil..... III.6
3.1.4 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah pada Sisa Tahun Anggaran 2026..... III.7
3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah III.8
3.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah III.10
3.2.2 Perubahan Belanja Daerah..... III11
3.2.3 Perubahan Pembiayaaan Daerah..... III.15

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV.1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026..... IV.1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 ..... IV.3

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV.7
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV.12
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembanguan Nasional Tahun 2026 ..... IV.12

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V.1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2027 ..... V.1

BAB VI PENUTUP VI.1
6.1 Kesimpulan VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 ..... II.2
Tabel 2.2 Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Makanan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021-2025 ..... II.17
Tabel 2.3 Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021–2025 ..... II.17
Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2026 Triwulan I..... II.23
Tabel 2.5 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 ..... II.98
Tabel 2.6 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 ..... II.100
Tabel 2.7 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 ..... II.107
Tabel 2.8 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 ..... II.108
Tabel 2.9 Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 ..... II.109
Tabel 2.10 Realisasi Capaian SPM Bidang Bidang Sosial Tahun 2025 .... II.107
Tabel 3.1 Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dalam RKPD Awal Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai III.3
Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024-2028 ..... III.5
Tabel 3.3 Analisis Penyimpangan/Kesenjangan Asumsi RKPD Awal dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026 ..... .III.7
Tabel 3.4 Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... .III.10
Tabel 3.5 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp) III.11
Tabel 3.6 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai..... III.13
Tabel 3.7 Perkembangan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2028 Kabupaten Kepulauan Mentawai III.14
Tabel 3.8 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai III.16
Tabel 3.9 Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2028 Kabupaten Kepulauan Mentawai III.17
Tabel 3.10 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai III.18
Tabel 3.11 Perubahan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai..... III.18
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV.2
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029..... IV.3
Tabel 4.3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026..... IV.6
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 - 2029 ..... IV.7
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026..... IV.9
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama Pembangunan IV.9

Tabel 4.7 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2026 ..... IV.11
Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026 ..... IV.12
Tabel 4.9 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1 ..... IV.12
Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2 ..... IV.14
Tabel 4.11 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3 ..... IV.24
Tabel 4.12 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4 ..... IV.28
Tabel 4.13 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5 ..... IV.34
Tabel 4.14 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6 ..... IV.36
Tabel 4.15 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 ..... IV.39
Tabel 4.16 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8 ..... IV.42
Tabel 4.17 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2026..... IV.48
Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2026..... IV.49
Tabel 4.19 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2026 ..... IV.50
Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2026 ..... IV.52
Tabel 4.21 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2026 ..... IV.54
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2026 ..... IV.56
Tabel 4.23 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2026 ..... IV.57
Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2026 ..... IV.58
Tabel 4.25 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026 ..... IV.60
Tabel 4.26 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026 ..... IV.62
Tabel 4.27 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026 ..... IV.63
Tabel 4.28 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026 ..... IV.63
Tabel 4.29 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2026 ..... IV.64
Tabel 4.30 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2026 ..... IV.65
Tabel 4.31 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Air Bersih Tahun 2026 ..... IV.65
Tabel 4.32 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Air Bersih Tahun 2026 ..... IV.66
Tabel 4.33 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ..... IV.68
Tabel 4.34 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ..... IV.69
Tabel 4.35 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026 ..... IV.71

Tabel 4.36 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026 ..... IV.72
Tabel 4.37 Dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional IV.73
Tabel 4.38 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi TAPD IV.192
Tabel 4.39 Daftar Calon Penerima Bantuan Hibah Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2026 ..... IV.207
Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... V.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai II.11
Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kepulauan Mentawai II.13
Gambar 2.3 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai II.14
Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai II.15
Gambar 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.18
Gambar 2.6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan EkstremKabupaten Kepulauan Mentawai..... II.19
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021-2025 .... II.20
Gambar 2.8 Sebaran Keluarga Miskin Ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ..... II.21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus yang bersifat adaptif terhadap permasalahan serta isu strategis yang berkembang. Pencapaian indikator ekonomi makro dan penyesuaian arah kebijakan nasional menuntut keselarasan dan konsistensi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026. Namun, dinamika pelaksanaan pembangunan serta situasi kondisi Daerah tahun lalu dan berkenaan khususnya dampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026 melalui Perubahan RKPD Tahun 2026.

Penyusunan dokumen tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah dokumen penyesuaian perencanaan daerah tahun 2026 yang tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan II sekaligus berfungsi sebagai pedoman perangkat daerah menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Perubahan RKPD memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan

maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD juga menjadi ruang bagi Daerah untuk menyesuaikan atau mengalokasikan belanja darurat atau dalam situasi bencana, terutama bencana banjir dan tanah longsor yang telah terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada akhir tahun 2025. Tepatnya pada tanggal 27 November 2025 Bupati Kepulauan Mentawai secara resmi menetapkan status keadaan darurat bencana hidrometeorologi dengan Surat Keputusan Nomor 360-386-2025 dan BMKG wilayah Sumatera Barat menetapkan sejumlah wilayah sebagai area dengan risiko tinggi yaitu Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan dan Lima Puluh Kota. Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di akhir tahun 2025 mengakibatkan kerusakan infrastruktur fisik dan melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sehingga perlu penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi hingga tahun 2026.

A. Alasan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2026

Pelaksanaan pembangunan tahun 2026 yang sedang berjalan menunjukkan perkembangan yang sangat dinamis, hal ini dapat dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam merespon kebutuhan Daerah terkhususnya pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Kepulauan Mentawai. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan triwulan II tahun 2026 terdapat beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu:

a. Kondisi Kebencanaan
   a) Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-242 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-13 Tahun 2026 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
   b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

b. Bantuan Keuangan
   a) Surat Sekretaris Presiden RI Nomor: B-08/ KSN/ SP/ KK.14.00/ 12/ 2025 perihal Penyampaian Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk Provinsi Terdampak Bencana Alam.
   b) Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900.1-788-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Penanggulangan Bencana Alam Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah disesuaikan beberapa kali, terakhir dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900.1-875-2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahap Ketiga untuk Penanggulangan Bencana Alam Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.
   c) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/4277/SJ perihal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana.

c. Evaluasi dan Optimalisasi Pembangunan
   a) Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900.1.15.3/ 85/ APKD/ BPKAD-2026 perihal Percepatan Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2026 guna Mendukung Pelaksanaan PORPROV Sumatera Barat ke-16 Tahun 2026.
   b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 serta Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi daerah tertentu di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

c) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.10.11/4615/SJ perihal Persetujuan Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera.

d) Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 hingga Triwulan II yang menunjukkan hasil yang belum maksimal yaitu dengan realisasi sebesar 40,56% dengan kategori sangat rendah sehingga perlu optimalisasi program untuk mencapai rencana target pembangunan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian realisasi tahun berjalan adalah antara lain:

   1) Masih berlangsungnya proses pengisian struktur organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Triwulan I, sehingga berdampak terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara umum.
   2) Terjadinya pergeseran anggaran ke-1 sampai dengan 4 yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodir kebutuhan mendesak dan transfer ke daerah untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi, Bantuan Presiden dan Bantuan Khusus Keuangan.
   3) Belum finalnya proses pengadaan barang dan jasa untuk program strategis terutama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana setelah transfer keuangan daerah disalurkan ke kas Daerah.

e) Penyesuaian terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 terutama dalam pemanfaatan SiLPA di tahun berjalan.

f) Penyesuaian Belanja pada tahapan perubahan RKPD Tahun 2026 atas Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

B. Kebutuhan Perubahan untuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berjalan

Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan apabila pada tahun berjalan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Tujuannya adalah agar program, kegiatan dan anggaran tetap relevan dengan kondisi aktual. Berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan yang perlu di fokuskan kepada pencapaian visi misi pada tahun berjalan pada triwulan II

khususnya pada indikator kinerja yang tidak mencapai target. Kebutuhan perubahan untuk mengakomodir program dan kegiatan, antara lain:

1. Program penanganan pasca bencana hidrometeorologi seperti rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi perumahan masyarakat yang terdampak serta pembangunan fasilitas umum.
2. Mengakomodir pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
3. Kebutuhan mendesak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran dan dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian pembangunan Daerah yang lebih efektif dan efisien maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
17. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
34. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 11).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Hubungan antara dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD Tahun 2025-2029. RKPD menjadi operasionalisasi dari rencana jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD. Program dan kegiatan dalam dokumen perubahan RKPD harus mengacu pada prioritas dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD menjadi acuan penyusunan perubahan RKPD, maka penyusunan perubahan Dokumen perubahan RKPD harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD. Dokumen perubahan RKPD juga harus selaras dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hubungan RPJMD dan RKPD menciptakan sinergi dan kesinambungan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. RPJMD memberikan arah jangka menengah, sementara RKPD menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka pendek.

2. Dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan dan menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
3. Dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebagai satu kesatuan dalam memberikan kontribusi pembangunan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Keselarasan program prioritas dan target pembangunan makro disusun sebagai bagian target imperatif untuk memastikan kesamaan langkah dan tujuan pencapaian visi misi dan target pembangunan untuk tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2026 dimaksudkan agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, terlaksananya sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antarwilayah dan antarsektor, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk mengakomodir perubahan asumsi dasar ekonomi Daerah, dan kebijakan nasional.

1.4.2. Tujuan

Adapun penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 mempunyai tujuan antara lain:

1. Penjabaran tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

2. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah.
3. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antarwilayah, antarkewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
4. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
5. Pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran , Prioritas dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penyusunan RKPD

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen perubahan RKPD;

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan; menjelaskan tahapan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2026, evaluasi pencapaian kinerja tujuan dan sasaran serta juga menjelaskan permasalahan pembangunan per urusan pemerintahan.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini berisikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, Asta Cita

dan Penelaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan hingga triwulan II.

BAB VI Penutup; menegaskan bahwa perubahan RKPD Tahun 2026 adalah pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan perubahan rencana kerja melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama triwulan III dan IV tahun 2026.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pembangunan triwulan II disusun untuk melihat perkembangan kinerja pembangunan pada tahun 2026 yang telah berjalan yang menjadi dasar optimalisasi strategi, penyesuaian asumsi makro dan arah kebijakan dalam pencapaian target pembangunan di tahun berjalan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD dalam hal ini pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dapat tercapai. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi yang dilakukan tersebut akan ditindaklanjuti agar dicari solusi yang tepat dan dijadikan dasar perbaikan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan berdaya serta berhasil guna, tentunya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi, dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD perlu dilakukan perubahan.

2.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran sampai Triwulan II Tahun 2026

Perencanaan pembangunan tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang berisikan indikator target pencapaian pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. Realisasi pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga triwulan II tahun 2026 menggunakan pencapaian pembangunan melalui data rilis tahun 2025, hal ini disebabkan perhitungan realisasi indikator pembangunan belum keluar/rilis per triwulan tahun berkenaan untuk setiap kabupaten khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Ket	Target Tahun 2026	Proyeksi Capaian Triwulan II
Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif dan Berkualitas								
Tujuan 1	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,80	67,62	Tercapai	67,34	Dapat tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Satdik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-Sekolah Dasar						
		- Literasi Membaca	Persen	45,00	41,13	Tidak Tercapai	48,90	Dapat Tercapai
		- Numerasi	Persen	12,00	38,82	Tercapai	13,94	Dapat Tercapai
		Persentase Satdik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-SMP						
		- Literasi Membaca	Persen	47,00	47,1	Tercapai	47,45	Dapat Tercapai
		- Numerasi	Persen	40,00	39,20	Tidak Tercapai	40,4	Dapat Tercapai
		Rata Lama sekolah	Tahun	8,09	8,21	Tercapai	8,22	Dapat Tercapai
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	13,17	Tercapai	12,93	Dapat Tercapai
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	5,00	10,18	Tercapai	10,50*	Dapat Tercapai
		Indeks Perkembangan Anak Usia Dini	Indeks	84,40	0,00	Belum Rilis	84,8	Dapat Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Persen	71,33	71,40	Tercapai	71,46	Dapat Tercapai
		Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	208	200	Tercapai	200*	Dapat Tercapai
		Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita)	Persen	31,90	26,30	Tercapai	26,00	Dapat Tercapai
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	56	38	Tidak Tercapai	62	Dapat Tercapai
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)*	Persen	84	74	Tidak Tercapai	84	Dapat Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya Produktivitas Masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan	Persen	98,50	99,15	Tercapai	98,50	Dapat Tercapai

Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Ket	Target Tahun 2026	Proyeksi Capaian Triwulan II
	yang Inklusif	Kesehatan nasional						
		Tingkat Kemiskinan	Persen	13,56	13,22	Tercapai	12,72	Dapat Tercapai
		Jumlah Penduduk Miskin	Orang	12.751	13.740	Tidak Tercapai	13.000	Dapat Tercapai
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	41,74	47,8	Tercapai	43,62	Dapat Tercapai
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	14,21	12,54	Tidak Tercapai	13,00	Dapat Tercapai
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	125	0	Tidak Tercapai	180	Tidak Tercapai
Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah								
Tujuan 1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	Pendapatan Per Kapita ADHB	Rp. Juta	75,77	70,07	Tidak Tercapai	84,34	Tidak Tercapai
		Pendapatan Per Kapita ADHK	Rp. Juta	38,33	35,60	Tidak Tercapai	40,09	Tidak Tercapai
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,42	2,93	Tidak Tercapai	6,01	Tidak Tercapai
		Rasio Gini	Indeks	0,265	0,291	Tidak Tercapai	0,264	Dapat Tercapai
		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,37	2,81	Tidak Tercapai	3,43	Tidak Tercapai
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,37	0,34	Tidak Tercapai	0,40	Dapat Tercapai
		Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	7.299	7.451	Tercapai	7.411	Dapat Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	Persen	47,34	48,12	Tercapai	48,13	Dapat Tercapai
		Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/ Orang	200,58	197,47	Tidak Tercapai	201,59	Dapat Tercapai
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	1,92	-		2,03	
		Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Indeks	0,369	0,157	Tidak Tercapai	0,372	Dapat Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Indeks	0,39	2,5	Tercapai	0,79	Tercapai
		Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	Persen	18,96	19,09	Tercapai	19,72	Tercapai

Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Ket	Target Tahun 2026	Proyeksi Capaian Triwulan II
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	Persen	9,47	10,03	Tidak Tercapai	8,89	Dapat Tercapai
		Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	30,85	29,54	Tidak Tercapai	31,2	Dapat Tercapai
		Total Kredit/PDRB	Persen	9,16	7,90	Tidak Tercapai	9,66	Dapat Tercapai
		Proporsi PDRB Jasa Keuangan	Persen	0,1184	0,12	Tercapai	0,1185	Dapat Tercapai
		Total dana Pihak Ketiga / PDRB	Persen	2,82	4,53	Tercapai	5,63	Dapat Tercapai
		Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp/kapita)	Rp/ Kapita	1.116.564	501.854	Tidak Tercapai	1.341.520	Tidak Tercapai
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persen	0,29	0,53	Tercapai	0,6	Tidak Tercapai
Sasaran 3	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,24	1,53	Tidak Tercapai	1,21	Tidak Tercapai
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	80,01-81,39	78,83	Tidak Tercapai	80,32-81,93	Dapat Tercapai
		Rasio Kewirausahaan	Rasio	1,99	1,99	Tercapai	2,12	Dapat Tercapai
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	19,98	19,98	Tercapai	21,18	Dapat Tercapai
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	83,85	94,69	Tercapai	95,00*	Dapat Tercapai
Misi 3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan								
Tujuan 1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	52,62	-	Belum Rilis	55	Dapat Tercapai
		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	48,2	42,31	Tidak Tercapai	55,28	Tidak Tercapai
Sasaran 1	Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif	Konsumsi listrik per kapita	kwh/ kapita	280	245	Tidak Tercapai	310	Tidak Tercapai
		Persentase kawasan/wilayah pertumbuhan yang terhubung	Persen	55,00	70	Tercapai	55,00	Dapat Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif	Kapasitas Air Baku	M^3/ detik	0,01	0,0146	Tercapai	0,012	Dapat Tercapai
		Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan	Persen	8,00	12,74	Tercapai	9,50	Dapat Tercapai
Tujuan 2	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	0	0	Belum Rilis	1	Tercapai

Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Ket	Target Tahun 2026	Proyeksi Capaian Triwulan II
Sasaran 1	Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persen	5,25	6,97	Tercapai	5,75	Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Persen	44,33	49,51	Tercapai	47,29	Tercapai
		RT dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	75,82	79,06	Tercapai	76,14	Tercapai
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	3,16	-	Belum Rilis	4,11	Tidak Tercapai
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	16,79	6,94	Tidak Tercapai	20,8	Tidak Tercapai
Misi 4 Mewujudkan ketahanan sosial. budaya dan ekologi								
Tujuan 1	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	64,00	88,23	Tercapai	65	Tercapai
Sasaran 1	Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	Persen	25,00	25,00	Tercapai	50	Dapat Tercapai
Sasaran 2	Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	58,62	67,62	Tercapai	61,12	Tercapai
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,848	0,841	Tidak Tercapai	0,848	Dapat Tercapai
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	60,3	-	Belum rilis	64,5	Dapat Tercapai
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,66	-	Belum rilis	66,85	Dapat Tercapai
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,00	-	Belum Rilis	56,70	Dapat Tercapai
Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana								
Tujuan 1	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,1	81,24	Tercapai	80,34	Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Indeks tutupan lahan	Indeks	95,91	84,10	Tidak Tercapai	95,95	Tidak Tercapai
		Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	16,79	6,94	Tidak Tercapai	20,8	Tidak Tercapai
		Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	37,99	30,46	Tidak Tercapai	42,59	Dapat Tercapai
Sasaran 2	Menurunnya risiko terhadap dampak bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	189,39	201,41	Tidak Tercapai	189,38 - 188,11	Tidak Tercapai
Misi 6 Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia								
Tujuan 1	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Rasio	0,97	0,89	Tidak Tercapai	0,99	Dapat Tercapai

Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Ket	Target Tahun 2026	Proyeksi Capaian Triwulan II
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	9.030	10,177	Tercapai	9.263	Dapat Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah	Persentase retribusi terhadap PAD	Persen	6,01	33,79	Tercapai	6,32	Dapat Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	Rasio	1,031	1,031	Tercapai	1,021	Dapat Tercapai
Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan								
Tujuan 1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70,87	70,87	Tercapai	71,00	Dapat Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	60,54	-	Belum rilis	61,61	Dapat Tercapai
		Tingkat Partisipasi Pemilih	Persen	81	75	Tidak Tercapai	82	Tidak Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Tingkat Kriminalitas	Persen	5.20	3,21	Tercapai	5.12	Tidak Tercapai
Misi 8 Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya								
Tujuan 1	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,46	-	Belum Rilis	2,52	Tidak Tercapai
		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	0	-	Belum Rilis	1.4	Tidak Tercapai
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	2,60	2,251	Tidak Tercapai	2,70	Dapat Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Survei penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	70,23	-	Belum Rilis	71,23	Dapat Tercapai
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	82,82	-	Belum Rilis	82,98	Dapat Tercapai
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,54	97,06	Tercapai	72,49	Dapat Tercapai
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45,78	47,21	Tercapai	46,16	Dapat Tercapai
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,28	-	Belum Rilis	3,29	Dapat Tercapai
Tujuan 10	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio	8,09	7,7	Tidak Tercapai	11,12	Dapat Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,59	7,591	Tercapai	10,21	Dapat Tercapai
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,16	0,191	Tercapai	0,17	Dapat Tercapai
		ROA BUMD		0,404	(1,284)	Tidak Tercapai	0,410	Tidak Tercapai

Sumber : data diolah (berbagai sumber)

Perkembangan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang diasumsikan pada realisasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026, dari sebanyak 10 tujuan dan 21 sasaran dengan total 89 indikator di dapat bahwa sebanyak 40 indikator tercapai, 36 indikator tidak tercapai dan 13 indikator tidak ada nilai/belum dinilai (NA/*not available*). Secara umum pencapaian indikator pembangunan masih sangat rendah yaitu sebesar 44,94 persen.

a. Pencapaian kinerja Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif, responsif dan berkualitas terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran dan 20 indikator kinerja. Pencapaian tahun 2025 menunjukkan sebanyak 12 indikator tercapai, 1 indikator belum rilis dan 7 indikator yang belum tercapai. Indikator yang rendah yang belum tercapai antara lain literasi membaca di tingkat SD, numerasi tingkat SMP, Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*), angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*), jumlah penduduk miskin, persentase disabilitas bekerja di sektor formal, jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan. Capaian indikator yang masih rendah khususnya pada urusan kesehatan seperti Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau melakukan pemeriksaan kesehatan ke layanan atau ke petugas kesehatan. Masyarakat masih menganggap penyakit TBC merupakan aib dan dapat dikucilkan oleh tetangga atau teman di lingkungan tinggalnya. Untuk indikator jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan masih rendah karena keluarga disabilitas masih merasa mampu untuk merawat sehingga keaktifan pelaporan dan penanganan disabilitas pada unit layanan masih rendah.
b. Pencapaian kinerja Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran dan 25 indikator kinerja. Pencapaian misi ini di tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih sangat rendah, yaitu sebanyak 15 indikator yang belum tercapai dan 10

indikator tidak tercapai. Beberapa target indikator yang belum tercapai seperti Pendapatan Per Kapita ADHB, Pendapatan Per Kapita ADHK, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Zakat Nasional (IZN), Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB, Total Kredit/PDRB. Rendahnya capaian indikator ini secara umum disebabkan oleh kondisi ekonomi Daerah yang masih sangat tergantung pada *raw material*/sumber daya alam yang belum diolah sehingga belum menjadi nilai tambah, kondisi bencana yang dialami di sebagian besar wilayah di Kepulauan Mentawai serta rendahnya aktivitas pembangunan baik yang didorong dari belanja pemerintah, investasi serta kebutuhan dasar yang masih didatangkan dari luar Mentawai.

c. Pencapaian kinerja Misi 3 Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan terdiri dari 2 tujuan, 4 sasaran dan 12 indikator. Pencapaian kinerja tahun 2025 pada misi ini menunjukkan sebanyak 7 indikator tercapai, 3 indikator tidak tercapai dan 2 indikator yang belum rilis angkanya. Indikator yang belum tercapai seperti Indeks Masyarakat Digital Indonesia, Konsumsi listrik per kapita, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai seperti untuk telekomunikasi belum tersedia secara merata dan berkualitas jaringan internet baik melalui swasta maupun pemerintah. Untuk listrik, infrastruktur yang tersedia masih terbatas pada wilayah kecamatan dan desa sekitarnya. Begitu juga dengan pengelolaan sampah yang masih belum memadai, dikarenakan tempat pengelolaan sampah yang belum tersedia sehingga operasional yang berjalan hingga saat ini hanya sebatas pada pengangkutan sampah.

d. Pencapaian kinerja Misi 4 Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi terdiri dari 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja. Pencapaian misi ini di tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum optimal, yaitu dari 7 indikator kinerja yang direncanakan terdapat 3 target indikator kinerja yang tercapai, 1 target indikator kinerja yang belum tercapai dan 3 indikator kinerja yang belum rilis hasilnya dari kementerian/lembaga terkait. Indikator kinerja yang belum rilis antara lain Indeks Perlindungan Khusus Anak, Indeks Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Pemuda, tentu harapannya hasil yang diperoleh tahun 2025 sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator Indeks Ketimpangan Gender yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh belum adanya perwakilan perempuan pada lembaga legislatif serta masih rendahnya peran dan keterwakilan perempuan pada ruang-ruang publik khususnya menjadi pimpinan unit organisasi.

e. Pencapaian kinerja Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana terdiri dari 1 tujuan, 2 sasaran dan terdapat 5 indikator kinerja. Pencapaian kinerja pada misi 5 masih sangat rendah, yaitu dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan hanya 1 indikator kinerja yang tercapai sedangkan 4 indikator kinerja lainnya tidak tercapai. Indikator tersebut antara lain indeks tutupan lahan, persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah dan Indeks Risiko Bencana (IRBI). Rendahnya capaian kinerja pada misi ini disebabkan oleh belum optimalnya pencegahan dan mitigasi kebencanaan di Daerah, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak atau risiko bencana, masih adanya perluasan kawasan untuk pengembangan permukiman dan ekonomi yang dilakukan masyarakat atau badan usaha.

f. Pencapaian kinerja Misi 6 Mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia terdiri atas 1 tujuan, 2 sasaran dan terdiri atas 4 indikator kinerja. Pencapaian kinerja pada misi 6 menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu dari 4 target indikator kinerja terdapat 3 indikator kinerja yang tercapai dan 1 indikator kinerja yang belum tercapai yaitu indikator kinerja rasio PDRB akomodasi mamin, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya wisatawan mancanegara yang tidak turun kapal sehingga tidak menggunakan jasa akomodasi dan makan minum di darat. Wisatawan mancanegara menggunakan jasa travel kapal pesiar dengan jasa akomodasi dan makan minum yang termasuk di dalamnya dan tidak dihitung sebagai akomodasi makan minum dalam PDRB Kepulauan Mentawai.

g. Pencapaian kinerja Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan terdiri atas 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja. Pencapaian kinerja pada misi 7 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai, 2 indikator kinerja yang

tercapai dan 1 indikator kinerja yang hasilnya belum rilis dari kementerian/lembaga terkait yaitu indikator Indeks Pembangunan Hukum (IPH).

h. Pencapaian kinerja Misi 8 Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya terdiri dari 12 indikator kinerja. Pencapaian kinerja pada misi 8 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu dari 12 indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 4 indikator kinerja yang tercapai, 3 indikator kinerja yang tidak tercapai dan 5 indikator kinerja belum rilis dari kementerian/lembaga terkait. Indikator yang tidak tercapai antara lain nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, ROA BUMD. Untuk indikator rasio kemandirian keuangan yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum maksimal dalam operasionalnya. Capaian indikator RoA BUMD yang masih sangat rendah, hal ini disebabkan belum ada kontribusi yang nyata dari Perumda yang telah berdiri terhadap deviden yang diberikan kepada pemerintah daerah.

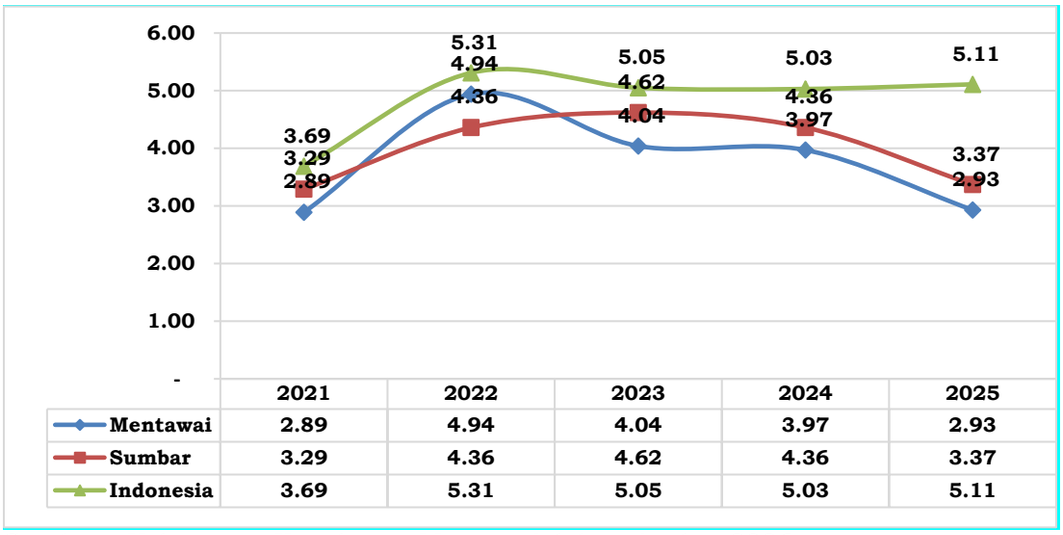
2.2 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026.

Gambaran capaian indikator makro pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2026 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio menggunakan pencapaian pembangunan melalui data rilis tahun 2025, hal ini disebabkan perhitungan realisasi indikator pembangunan belum keluar/rilis per triwulan tahun berkenaan untuk setiap kabupaten khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Gambar 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Mentawai	2.89	4.94	4.04	3.97	2.93
Sumbar	3.29	4.36	4.62	4.36	3.37
Indonesia	3.69	5.31	5.05	5.03	5.11

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2026

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan tren kenaikan, terkhususnya setelah pasca kejadian COVID-19 yang melanda pada tahun 2021. Kenaikan dalam sisi permintaan domestik dengan terbukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut menyumbang kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari -2,89 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,94 persen pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan kenaikan secara regional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari 3,29 persen tahun 2021 meningkat menjadi 4,36 persen pada tahun 2022 dan secara nasional dari 3,69 persen tahun 2020 meningkat menjadi 5,31 persen pada tahun 2021.

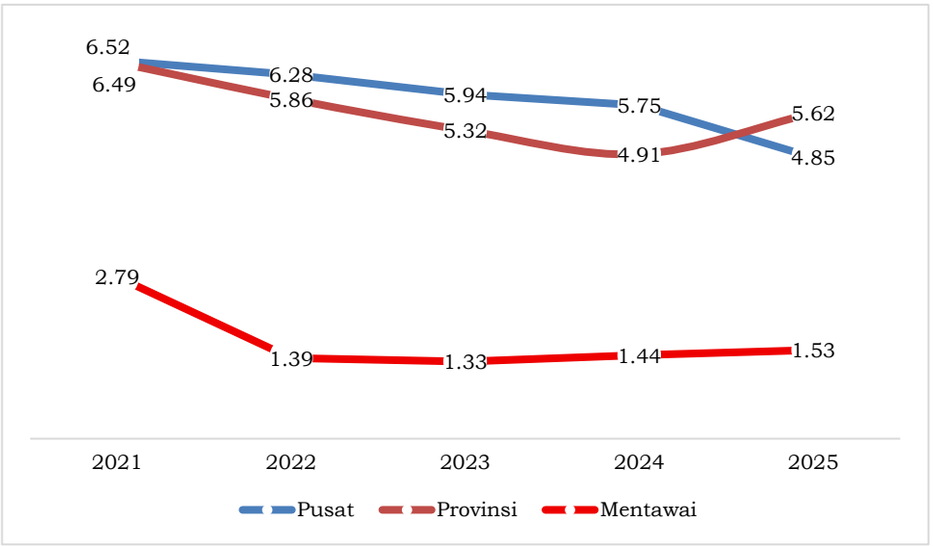
Kenaikan produksi barang dan jasa pasca COVID-19 secara masif memengaruhi positif pada sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Mentawai, ini dapat terlihat pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Mentawai mencapai 4,04 persen dan menjadi pertumbuhan cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025). Namun, di tahun 2024 dan 2025 mengalami *decline* yaitu menjadi 3,97 persen (2024) dan 2,93 persen (2025) khususnya untuk sektor akomodasi/makan minuman, pertanian kehutanan dan perikanan sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2024 dan penurunan pada sektor pertambahan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi/makan minuman, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib pada tahun 2025.

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan persentase orang yang mencari kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menghambat pembangunan karena mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Contoh pengangguran terbuka antara lain lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung, seseorang sarjana dengan kualifikasi tertentu yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.2 menunjukkan tren penurunan dengan persentase angka yang sangat kecil, yaitu TPT pada tahun 2021 sebesar 2,79 persen dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 1,39 persen.

Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami penurunan di 1,33 persen dan di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,44 persen. Namun, pada tahun 2025 meningkat menjadi sebesar 1,53 persen. Angka ini menginterpretasikan bahwa sangat rendahnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah struktur perekonomian masyarakat Mentawai yang bertumpu pada sektor primer sehingga masyarakat akumulatif dinyatakan bekerja dalam durasi waktu tertentu atau tidak dalam kondisi menganggur mencari pekerjaan. Pencapaian TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat begitu juga jika dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional. Namun hal ini tidak sejalan dengan tingginya angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mencapai kurang lebih 13,22 persen.

Gambar 2.2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2026

Gambar 2.2 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan penurunan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2021-2025. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai paling kecil dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat dan Nasional.

2.2.3 Rasio Gini

Indeks Gini, juga dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah.

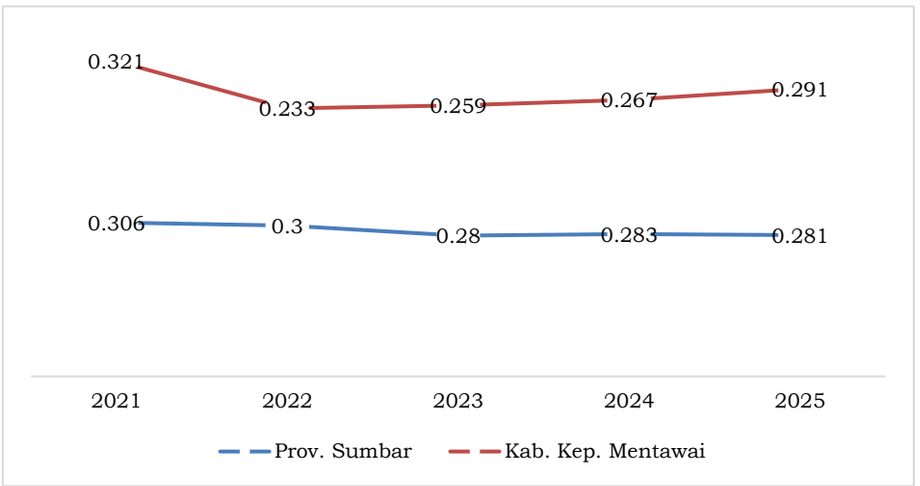
Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan, pengukuran indeks ini sangat penting dalam pembangunan karena menunjukkan seberapa merata pendapatan di suatu wilayah atau daerah, dan ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kemajuan pembangunan. Pembangunan yang merata dan inklusif membutuhkan pemerataan pendapatan, di mana Indeks Gini yang rendah dapat membantu mewujudkannya, Pemerataan pendapatan dapat mendorong peningkatan produktivitas karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan

sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat dari indikator Indeks Gini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan relatif masih terjaga di bawah 0,4 yaitu dengan kategori ketimpangan rendah. Secara numerik, nilai Indeks Gini di Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan yaitu dari 0,273 pada tahun 2021 menjadi 0,291 pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif merata (bahkan di bawah 0,3) dan tidak ada masyarakat yang dominan dalam menguasai sumber daya/pendapatan.

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Demikian halnya juga tren penurunan Indeks Gini juga dialami oleh Provinsi Sumatra Barat yaitu dari 0,306 pada tahun 2021 mengalami penurunan hingga tahun 2025 nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menjadi 0,281. Namun, dalam skala Nasional, upaya penurunan Indeks Gini masai relatif stagnan pada kisaran 0,38 tentu upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

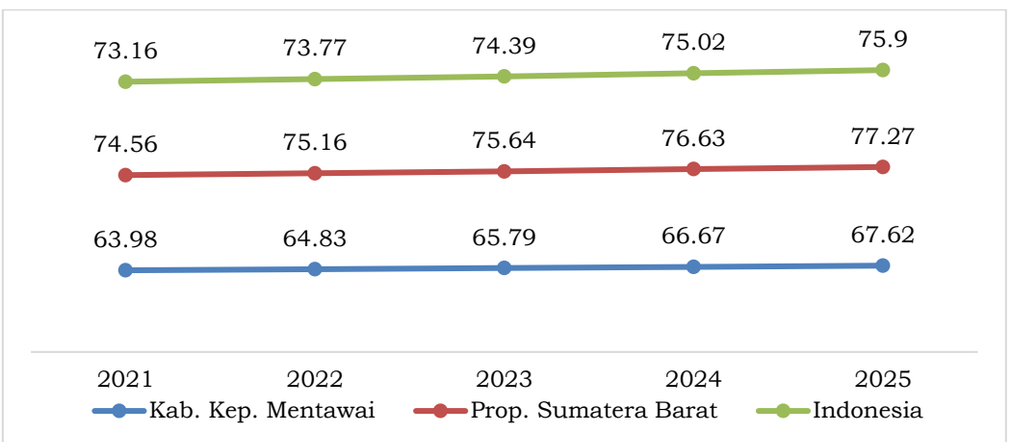
2.2.4Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan di daerah, dan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*), tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, Meier dalam Kuncoro, 2010). Untuk menyempurnakan tujuan pembangunan tersebut, muncul konsep pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) mengenai pembangunan manusia ialah suatu proses memperluas pilihan-pilihan penduduk *(a process enlarging people's choices*). Ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat (*longevity*), berpendidikan/ berpengetahuan (*knowledge*), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (*living standard*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Komponen penyusunan IPM adalah:

- Umur harapan hidup saat lahir mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan.
- Pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak.

Gambar 2.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambar 2.4 menunjukkan IPM Kabupaten

Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 63,98 mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 64,83 dan di tahun 2025 menjadi sebesar 67,62. Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2021-2022 dengan kenaikan 0,85 poin sedangkan tahun 2022-2023 kenaikan 0,96 poin dan tahun 2023-2024 dengan kenaikan 0,88 poin tahun 2024-2025 dengan kenaikan sebesar 0,95 poin. Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.

2.2.5Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan menciptakan kesenjangan, mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat menghambat investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan *basic need aproach*. Penghitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menetapkan angka garis kemiskinan yang kemudian menjadi acuan (dasar) dalam menentukan jumlah penduduk miskin, indek kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Ada dua faktor yang memengaruhi angka garis kemiskinan, yakni harga kebutuhan pokok makanan dan non-makanan. Fluktuasi harga kebutuhan pokok makanan berkontribusi

sebesar 60-70%, sebesar 30-35% ditentukan oleh harga beras. Semakin tinggi harga makanan maka akan semakin tinggi GK. Faktor non-makanan mempengaruhi garis kemiskinan hanya sekitar 30-40 % saja, tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Jadi kenaikan harga elektronik, sepeda motor, mobil, dan sejenisnya tidak terlalu berpengaruh pada perubahan angka garis kemiskinan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, rata-rata harga kebutuhan pokok makanan mengalami peningkatan. Harga kebutuhan pokok makanan yang dimaksud adalah: beras, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.

Tabel 2.2
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Makanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

NO	Komuditi	Harga Rata-Rata/Tahun (Rp)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Beras Premium	15.933	16.124	18.058	18.758	18.042
2	Beras Medium	13.922	13.958	15.067	17.516	16.053
3	Bawang Merah	32.385	40.125	35.133	42.000	44.321
4	Bawang Putih Bonggol	32.388	33.686	38.971	42.581	42.149
5	Cabai Merah Keriting	42.323	58.832	49.717	50.645	60.593
6	Daging Sapi Murni	130.698	149.810	156.175	160.000	155.029
7	Daging Ayam Ras	34.112	37.766	38.783	43.006	43.993
8	Telur Ayam Ras	23.818	25.761	29.683	33.776	31.630
9	Gula Pasir Lokal	14.839	15.123	15.775	18.000	189.059
10	Minyak Goreng Curah	16.103	17.171	16.233	16.000	16.730
11	Tepung Terigu	11.440	12.440	13.658	14.000	13.382

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Beras sebagai faktor terbesar dalam menentukan garis kemiskinan terus saja naik dari tahun ke tahun. Tapi perlu juga diingat bahwa beras bukan satu-satunya makanan pokok di Mentawai. Sebagian dari masyarakat Mentawai mengkonsumsi Sagu dan keladi sebagai kebutuhan pokok, khususnya masyarakat pulau Siberut. Dari segi non makanan bisa dilihat dari Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) realatif berfluktuasi. Namun tetap cenderung memperlihatkan tren peningkatan. Tabel berikut menggambarkan peningkatan harga konstruksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.3
Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
1	2021	124,97
2	2022	129,04
3	2023	121,25

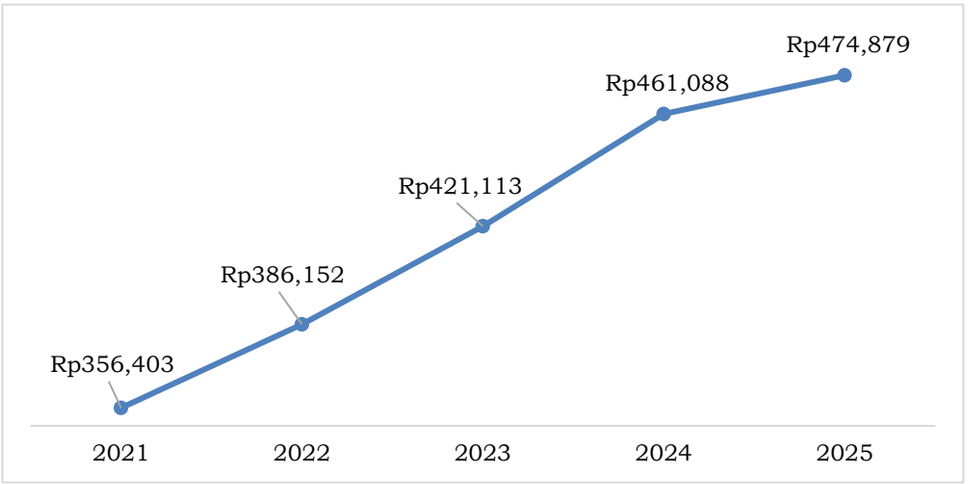
4	2024	118,65
5	2025	117,65

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka Tahun 2026

Gambaran singkat dari perkembangan harga tersebut merupakan alasan logis dari meningkatnya garis kemiskinan. Diketahui bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir angka garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai terus saja meningkat. Tahun 2021 Garis Kemiskinan Mentawai adalah Rp.356.403 dan kemudian di tahun 2025 tembus di angka Rp. 474.879. Artinya, masyarakat yang jumlah pengeluarannya di bawah Rp.474.879/ kapita/ bulan dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Angka garis kemiskinan bisa saja berubah mengikuti atau menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok (makanan dan non makanan). Fluktuasi harga kebutuhan pokok identik dengan inflasi. Menjaga untuk tidak terjadinya peningkatan inflasi sama dengan menjaga untuk tidak naiknya angka garis kemiskinan. Dengan begitu, peningkatan angka garis kemiskinan bisa diartikan sebagai kegagalan pemerintah dalam menjaga inflasi. Pemerintah masih belum cermat dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah harus lebih cermat untuk menjaga agar tidak terjadinya kenaikan inflasi.

Gambar 2.5
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



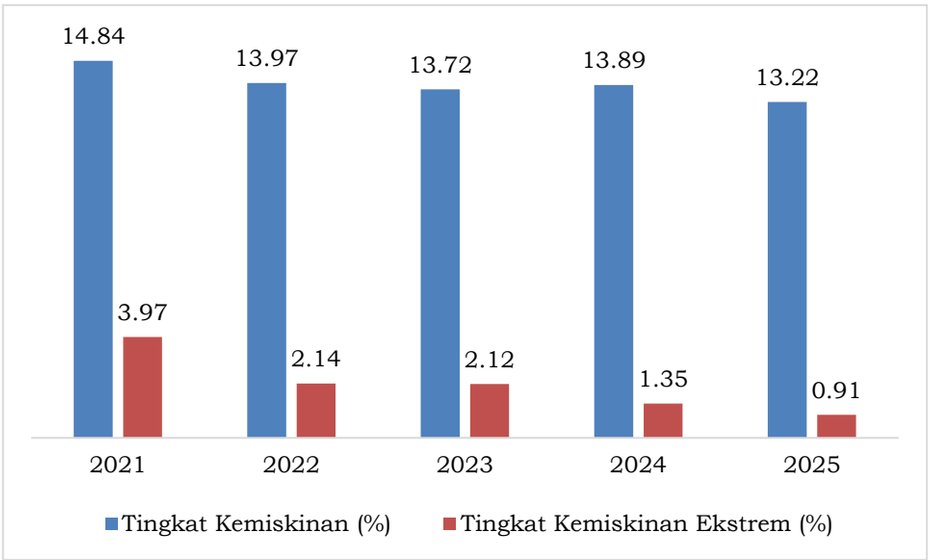
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka Tahun 2026

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan pola penurunan, namun sangat lambat dan belum signifikan. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84, tahun berikutnya turun dan di tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan. Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 13,22 persen.

Hal yang mendasar menjadi indikasi belum signifikannya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah terkait

perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan (updating) baik *exclusion error* dan *inclusion error* data dan belum terintegrasinya program penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Di sisi lain, target kemiskinan harus segera diatasi adalah penuntasan/pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah tingkat kemiskinan ekstrem yang dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*).

Gambar 2.6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



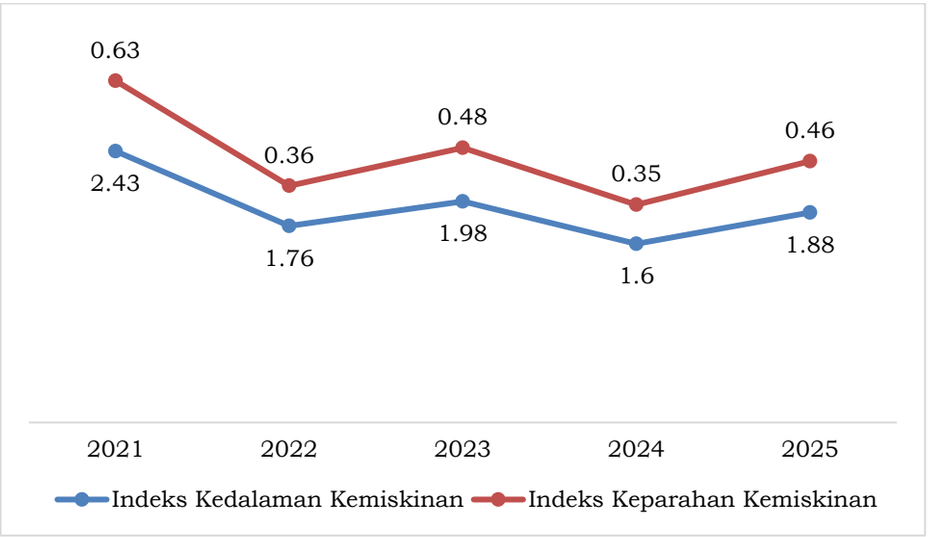
Sumber : BPS, 2026 (diolah)

Pada perspektif dan asumsi umum bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berkorelasi positif, artinya peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan suatu daerah dan sebaliknya. Hal ini senada dengan Todaro (2003), pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam memengaruhi pada tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi faktual (paradoks) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di mana tingkat pengangguran yang rendah yaitu 1,53 persen tahun 2025 (terendah di Provinsi Sumatera Barat) namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 13,22 persen tahun 2025 (tertinggi di Provinsi Sumatera Barat). Fenomena ini tentunya perlu kajian mendalam untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan asumsi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya yang bekerja di

sektor primer menjadi fokus dan lokus pembangunan sehingga apa yang dikerjakan (yang bekerja) bisa memberikan efek dan dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat jarak antara kemampuan pengeluaran masyarakat miskin dengan kemiskinan maka digunakan indeks kedalaman kemiskinan. Semakin jauh antara keduanya maka semakin dalam indeks kemiskinan. Indkes keparahan kemiskinan adalah perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar diantara masyarakat miskin itu sendiri. Semakin tinggi kesenjangan antar masyarakat miskin maka semakin parah kemiskinan tersebut.

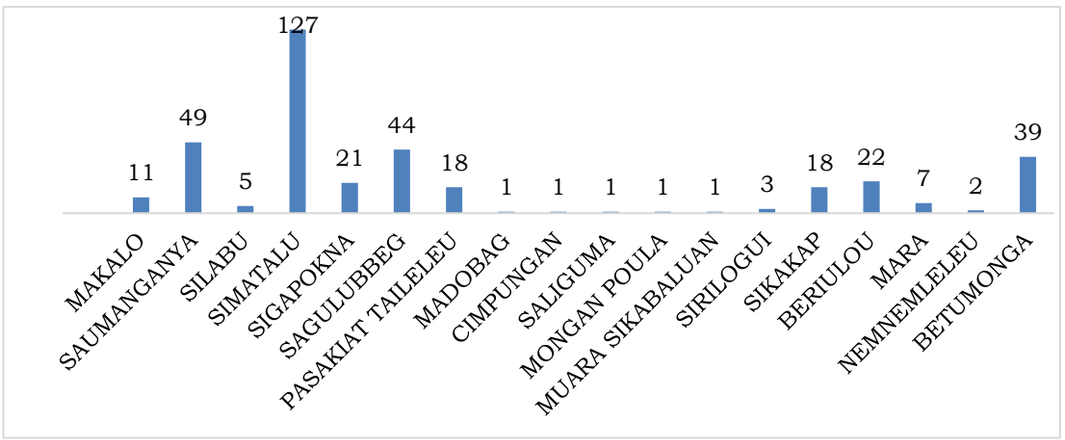
Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

Semakin tinggi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan maka akan semakin sulit penanggulangannya. Artinya indeks kedalaman dan keparahan ini menjadi salah satu indikator tingkat kesulitan dalam penanggulangannya. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 43 desa. Masing-masing desa memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan di masing-masing desa relatif berbeda. Begitu juga dengan pilihan intervensi kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga akan berbeda. Tabel berikut memperlihatkan sebaran penduduk miskin ekstrem tahun 2025.

Gambar 2.8
Sebaran Keluarga Miskin Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025



Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Mentawai, meski tinggi namun cenderung memperlihatkan tren penurunan. Pada tahun 2025, Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan verifikasi data penduduk miskin ekstrem. Hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa sebanyak 371 keluarga (2.128 jiwa) di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dalam kondisi miskin ekstrem. Hasil verifikasi tersebut telah ditetapkan melalui SK Bupati Kepulauan Mentawai dengan nomor 100.3.3.2-387 Tahun 2025. Jumlah keluarga miskin ekstrem paling banyak dari hasil verifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati tersebut berada di Desa Simatalu.

Desa Simatalu, Saumanganya, Sagulubbeg, Betumonga, dan Beriulou merupakan desa-desa yang berada di kawasan pesisir. Desa-desa tersebut adalah desa-desa yang kondisi geografisnya relatif sulit untuk diakses. Berdasarkan DTSEN, jumlah masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada pada desil 1 adalah sebanyak 4.753 keluarga (19.131 jiwa). Sebanyak 1.728 jiwa diantaranya adalah penduduk lansia. Dan sebanyak 34 keluarga adalah keluarga disabilitas.

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2026 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2026 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026. Perbandingan jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2026, serta perbandingan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026. Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2026

diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 40,56 persen dengan predikat sangat rendah. Data capaian kinerja RKPD hingga triwulan II tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2026 Triwulan II

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7500	Orang	590.000.000.000	1800	174.550.155.126	1800	200.008.417.590	1800	107.617.194.537	100,00	53,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	bulan	360.000.000	12	56.275.000	12	63.000.000	3	16.411.091	25,00	26,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15	Paket	2.300.000.000	9	2.083.211.900	14	1.967.758.405	0	60.955.000	0,00	3,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5	Paket	2.000.000.000	0	0	1	340.102.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600	peserta didik	2.000.000.000	150	648.915.705	100	366.500.000	100	35.909.000	100,00	9,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satdik Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karier	800	Orang	3.000.000.000	150	758.620.650	250	1.350.000.000	150	606.219.800	60,00	44,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	544	Satdik	1.200.000.000	136	106.708.365	136	147.932.300	0	60.064.800	0,00	40,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	544	Satdik	800.000.000	136	255.782.376	136	125.000.000	60	55.803.435	44,12	44,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	544	Satdik	900.000.000	0	0	136	221.707.500	136	130.532.000	100,00	58,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50	Dokumen	600.000.000	1	175.277.195	10	61.497.000	0	8.132.000	0,00	13,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	23	kegiatan	600.000.000	1	20.333.200	4	100.000.000	2	18.334.000	50,00	18,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Fasilitasi KomUnitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah KomUnitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50	kegiatan	1.200.000.000	1	162.144.000	10	250.000.000	3	20.520.000	30,00	8,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian layanan pendampingan bagi Satdik untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi Satdik untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	16	kegiatan	600.000.000	0	45.494.000	4	50.202.000	2	27.363.000	50,00	54,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang BeRTambah	15	Ruang	15.000.000.000	4	2.852.187.965	2	808.740.500	0	26.258.000	0,00	3,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	500	peserta didik	1.200.000.000	0	0	136	245.000.000	80	40.507.000	58,82	16,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satdik yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	56000	peserta didik	1.200.000.000	14000	94.154.600	14000	150.000.000	14000	68.446.300	100,00	45,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	42	Ruang	18.000.000.000	11	4.250.247.615	8	1.722.047.200	0	49.282.800	0,00	2,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45316	peserta didik	62.391.504.000	11329	15.481.094.371	14000	16.318.500.000	14000	8.260.500.000	100,00	50,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9	Unit	9.300.000.000	5	744.934.517	5	3.817.746.000	0	25.474.200	0,00	0,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9	Paket	800.000.000	2	1.113.366.685	14	551.651.000	0	1.165.000	0,00	0,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah PeRTama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah PeRTama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000	peserta didik	30.657.500.000	5114	7.643.699.456	5000	7.838.260.000	5000	2.532.309.066	100,00	32,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600	peserta didik	4.200.000.000	100	122.329.400	50	184.957.400	30	8.204.000	60,00	4,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satdik Sekolah Menengah PeRTama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400	Orang	1.200.000.000	250	651.617.603	400	1.558.516.000	300	593.449.133	75,00	38,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah PeRTama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan	140	Satdik	900.000.000	35	113.864.929	35	73.298.000	6	6.886.600	17,14	9,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah PeRTama	Jumlah Sekolah Menengah peRTama yang Mengelola Dana BOS	250	sekolah	200.000.000	34	51.958.500	35	99.963.600	35	81.131.400	100,00	81,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	102	Dokumen	500.000.000	12	263.021.500	34	199.591.000	25	89.624.000	73,53	44,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	kegiatan	2.400.000.000	3	2.012.720.501	10	1.276.130.000	6	195.619.157	60,00	15,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Dididik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	140	peserta didik	600.000.000	35	96.211.085	35	199.863.600	35	112.291.400	100,00	56,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	Paket	800.000.000	1	2.366.465.474	2	2.507.645.846	0	268.745.800	0,00	10,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9	Unit	1.600.000.000	2	534.617.800	20	224.107.250	20	161.623.408	100,00	72,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	400	Orang	450.000.000	30	199.558.000	20	97.716.500	20	69.980.500	100,00	71,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satdik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	Orang	800.000.000	100	324.526.784	110	234.250.200	55	105.532.600	50,00	45,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200	Satdik	500.000.000	116	104.392.600	114	281.400.000	70	66.621.000	61,40	23,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	360	Satdik	5.000.000.000	107	1.858.087.734	114	2.763.730.000	114	614.002.000	100,00	22,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80	Dokumen	400.000.000	12	55.758.100	10	116.520.000	5	53.240.000	50,00	45,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	700	Siswa	620.000.000	300	76.562.900	40	142.536.000	20	63.720.000	50,00	44,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan													

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satdik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220	Orang	200.000.000	50	72.862.005	50	88.553.700	0	31.300.000	0,00	35,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44	Satdik	400.000.000	13	69.761.400	14	56.377.000	7	56.051.400	50,00	99,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	44	Satdik	6.000.000.000	13	1.483.567.000	14	1.661.790.000	14	727.488.200	100,00	43,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	48	Dokumen	860.000.000	12	12.990.000	8	69.687.000	4	23.631.400	50,00	33,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM													
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2	Dokumen	400.000.000	0	0	1	400.000.000	0	49.685.300	0,00	12,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KESEHATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1308	Orang	67.952.261.856	1303	67.952.261.856	395	79.339.708.817	197	40.942.906.669	49,81	51,60	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	9	Rekening	91.800.000	5	91.800.000	36	64.000.000	18	32.190.017	50,00	50,30	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORang AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rakit dan prasarana pendukung yang dibangun	3	Unit	371.440.000	2	11.251.248.183	1	371.440.000	1	125.146.500	50,00	33,69	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi	30	Unit	1.084.611.935	15	150.000.000	5	1.084.611.935	0	11.135.600	0,00	1,03	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis obat, vaksin ,bahan habis pakai yang tersedia	322	jenis	4.562.892.000	223	7.904.581.190	18	4.562.892.000	0	2.376.649.214	1,11	52,09	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	JenisBahan Habis Pakai yang tersedia	20	Unit	200.000.000	18	7.018.644.220	15	200.000.000	0	4.401.200	0,00	2,20	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dipelihara	15	Unit	290.024.000	13	582.305.000	10	290.024.000	1	24.405.200	8,00	8,41	Dinas Kesehatan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Layanan kesehatan yang dikunjungi	15	buah	1.081.400.000	15		15	1.081.400.000	0	266.132.700	0,00	24,61	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000	Orang	220.383.000	9500	494.421.462	2600	220.383.000	65	30.980.200	2,50	14,06	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000	Orang	225.728.000	9500	1.705.863.000	65	225.728.000	5	39.500.000	7,69	17,50	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	13000	Orang	451.308.000	9500	716.271.000	2364	451.308.000	0	38.111.800	0,00	8,44	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000	Orang	100.000.000	9500	339.999.925	35	100.000.000	0	19.839.500	0,00	19,84	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	25	Orang	50.000.000	10	150.000.000	5	50.000.000	1	13.092.700	20,00	26,19	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75	Orang	100.000.000	60	299.999.980	15	100.000.000	1	58.676.617	6,67	58,68	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	95	Orang	100.000.000	80	180.000.000	5	100.000.000	1	36.317.009	20,00	36,32	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita HipeRTensi	Jumlah Orang dengan penderita hipeRTensi mendapat pelayanan sesuai standar	105	Orang	100.000.000	95	209.615.370	65	100.000.000	2	37.872.809	3,08	37,87	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang dengan Diabetes mellitus medpata pelayanan Kesehatan sesuai standar	95	Orang	50.000.000	60	110.000.000	50	50.000.000	0	7.556.210	0,00	15,11	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	20	Orang	100.000.000	18	190.000.000	10	100.000.000	0	16.047.000	0,00	16,05	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60	Orang	150.000.000	40	350.000.000	30	150.000.000	0	47.548.960	0,00	31,70	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayana Kesehahtan sesuai standar	25	Orang	50.000.000	18	176.000.000	10	50.000.000	0	29.962.800	1,00	59,93	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen yang tersedia	50	Orang	25.000.000	30	186.220.000	25	25.000.000	0	3.346.600	0,00	13,39	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	10	Orang	433.653.000	5	100.000.000	15	433.653.000	0	158.956.500	1,33	36,66	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen yang tersedia	20	Dokumen	420.188.838	15	495.188.838	15	420.188.838	4	8.032.200	26,67	1,91	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen yang tersedia	8	Dokumen	207.123.000	8	287.123.000	5	207.123.000	1	41.044.000	10,00	19,82	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen yang tersedia	2	Dokumen	35.000.000	2	135.000.000	1	35.000.000	0	31.186.800	10,00	89,11	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen yang tersedia	290	Orang	212.258.000	200	845.660.500	9	212.258.000	1	16.070.300	11,11	7,57	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen yang tersedia	3500	Dokumen	6.105.583.200	105	9.796.284.400	100	6.105.583.200	60	4.412.874.000	60,00	72,28	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Dokumen yang tersedia	4	Dokumen	147.520.000	3	222.930.000	2	147.520.000	0	40.897.035	0,00	27,72	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen yang tersedia	20	Dokumen	3.196.010.166	15	1.506.212.433	12	3.196.010.166	0	131.727.900	0,00	4,12	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen yang tersedia	150	Dokumen	286.754.000	40	655.845.000	37	286.754.000	4	50.128.190	10,81	17,48	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan HIV ODHIV	Jumlah Dokumen yang tersedia	2	Dokumen	65.056.000	0	0	2	65.056.000	0	27.885.400	0,00	42,86	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen yang tersedia	2	Dokumen	90.000.000	0	0	2	90.000.000	0	47.042.200	0,00	52,27	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen yang tersedia	1	Dokumen	80.000.000	0	0	1	80.000.000	0	16.394.840	0,00	20,49	Dinas Kesehatan
Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen yang tersedia	1	Dokumen	892.549.000	0	0	1	892.549.000	0	80.284.000	0,00	8,99	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersedia	140	Dokumen	731.442.000	132	863.472.000	75	731.442.000	0	206.711.990	0,00	28,26	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat													

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Tradisional (UMOT)													
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen yang tersedia	6	Dokumen	76.394.111	5	50.060.000	3	76.394.111	0	4.200.000	0,00	5,50	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman TeRTentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT													
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman TeRTentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri RT	Jumlah Dokumen yang tersedia	60	Dokumen	117.946.000	46	97.744.900	25	117.946.000	0	27.461.800	0,00	23,28	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RT													
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri RT yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri RT Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	500	Produk	3.656.628.456	0	0	100	131.149.000	0	12.982.660	0,00	9,90	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen yang tersedia	75	Dokumen	70.900.000	56	189.605.000	15	70.900.000	0	18.505.000	0,00	26,10	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORang AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Operasional Pelayanan Puskesmas Mapaddegat	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	2.085.668.596	0	0	12	2.085.668.596	1	0	8,33	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.581.627.753	0	0	12	1.581.627.753	1	0	8,33	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	857.125.465	0	0	12	857.125.465	0	13.500.000	1,67	1,58	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Siberut	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.585.318.390	0	0	12	1.585.318.390	2	0	16,67	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.417.854.000	0	0	12	1.417.854.000	1	0	8,33	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.265.091.040	0	0	12	1.265.091.040	0	9.650.000	1,67	0,76	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Sikabaluan	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.653.699.762	0	0	12	1.653.699.762	0	0	0,83	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.216.355.584	0	0	12	1.216.355.584	3	56.688.800	25,00	4,66	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.331.237.500	0	0	12	1.331.237.500	1	39.000.000	8,33	2,93	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.162.377.651	0	0	12	1.162.377.651	1	0	8,33	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	898.755.994	0	0	12	898.755.994	1	16.462.400	8,33	1,83	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	862.314.000	0	0	12	862.314.000	3	0	25,00	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sigapokna	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	911.439.035	0	0	12	911.439.035	3	63.391.150	25,00	6,96	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.924.880.256	0	0	12	1.924.880.256	1	0	8,33	0,00	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya	Jumlah Dokumen yang tersedia	100	Dokumen	1.328.719.253	0	0	12	1.328.719.253	1	0	4,17	0,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan sesuai kebutuhan	30	Jenis	129.100.000	6	25.802.000	6	25.820.000	0	7.728.000	0,00	29,93	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tabung Gas yang terisi	300	tabung	90.000.000	60	17.960.000	60	18.000.000	15	4.309.500	25,00	23,94	Rumah Sakit Umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	Jumlah jenis ATK yang tersedia	85	Jenis	425.000.000	17	67.075.080	17	84.710.800	17	82.441.920	100,00	97,32	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Paket keRTas dan cover yang disediakan sesuai kebutuhan	5	Paket	200.000.000	1	25.684.800	1	40.000.000	1	4.990.400	100,00	12,48	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah benda pos (materai) yang disediakan sesuai kebutuhan	2000	lembar	20.000.000	320	3.200.000	400	4.000.000	400	4.000.000	100,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Alat Kebersihan perabot kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	105	Jenis	729.680.000	21	99.683.550	21	145.936.000	21	142.583.940	100,00	97,70	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Paket makanan dan minuman rapat yang disediakan sesuai kebutuhan	2250	Paket	108.000.000	30	6.198.000	450	22.960.000	240	10.146.000	53,33	44,19	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, air, dan listrik yang tersedia dan dibayarkan sesuai kebutuhan	15	NoPel	2.354.000.000	3	481.363.688	3	470.800.000	3	244.075.280	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan	Jumlah bahan bakar minyak yang disediakan sesuai kebutuhan	68035	Liter	737.350.000	13607	147.470.000	13890	150.300.000	3845	41.893.610	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah kendaraan dinas operasional/ Laporanangan yang dipelihara sesuai standar	50	Unit	750.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	3	40.428.840	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORang AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pelayanan kesehatan PERORang AN sesuai standar (UKP)												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan/dipenuhi sesuai standar (Ruang pelayanan, alat kesehatan, sarana prasarana)												
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan Alat Penunjang Kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	875	Unit	600.000.000	175	119.380.489	175	120.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah peralatan sumber tenaga (genset, UPS, dll) yang dipelihara sesuai standar	5	Unit	240.000.000	1	79.772.370	1	40.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah alat keDokumenteran umum yang dipelihara sesuai standar	675	Unit	700.000.000	135	137.232.630	135	140.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah instalasi air bersih/air baku yang dipelihara sesuai standar	5	Unit	390.000.000	1	149.334.238	1	60.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah instalasi air kotor/limbah yang dipelihara sesuai standar	5	Unit	250.000.000	1	49.977.750	1	53.400.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah instalasi mesin oksigen/gas medis yang dipelihara sesuai standar	5	Unit	980.000.000	1	180.257.895	1	200.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara sesuai standar	1	Paket	1.000.000.000	1	220.825.009	1	200.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang dibangun/dikembangkan	4	Paket	3.600.000.000	0	0	1	900.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Belanja Obat-Obatan-Obat	20	Paket	4.890.349.880	4	977.798.159	4	1.474.794.731	2	981.968.627	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20	Paket	7.900.910.165	4	1.579.953.595	4	1.436.281.241	3	1.353.538.130	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Natura dan Pakan-Natura	5	Paket	670.125.000	1	133.980.640	1	134.025.000	0	3.570.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5	Paket	657.112.190	1	131.326.124	1	131.657.337	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5	Paket	177.200.000	1	34.080.000	1	35.440.000	1	20.000.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan rujukan yang diberikan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5 Paket	100.000.000	1	17.900.000	1	17.400.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat yang dibentuk sesuai kebutuhan	5 Paket	213.000.000	1	34.200.000	1	42.600.000	1	16.250.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Dokumen pengelolaan dan peRTanggungjawaban keuangan yang disusun	35 Orang	800.160.000	7	153.120.000	7	156.720.000	0	52.580.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5 Paket	315.670.000	1	35.746.600	1	87.500.000	1	15.331.400	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Sewa TranspoRT and Storage Equipment for Liquid	5 Paket	125.000.000	1	24.975.000	1	25.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20 Paket	390.000.000	4	78.000.000	4	136.320.000	1	64.000.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	5 Paket	1.531.200.000	1	306.138.000	1	306.240.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60 Paket	644.000.000	4	22.500.000	16	155.000.000	4	40.000.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RT-Alat RT-Alat Pendingin	5 Paket	152.500.000	1	30.450.000	1	45.750.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5 Paket	164.250.000	1	30.100.500	1	32.850.000	1	10.025.200	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Biasa	490 Laporan	1.539.680.000	98	307.921.099	100	326.360.000	42	122.280.761	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Tetap	16 Laporan	56.400.000	0	0	4	11.280.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	28 Orang	240.000.000	0	0	7	72.000.000	7	36.000.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	4 Orang	80.000.000	0	0	1	24.000.000	1	12.000.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	328 Orang	3.320.000.000	0	0	82	996.000.000	82	492.000.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	64 Orang	560.000.000	0	0	16	168.000.000	16	84.000.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72 Orang	237.600.000	0	0	18	59.400.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Dokumen kajian lingkungan yang disusun	3 Paket	300.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Dokumen perencanaan arsitektur yang disusun	3 Paket	285.000.000	0	0	1	95.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan bangunan gedung yang disusun	2 Paket	160.000.000	0	0	1	80.000.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Jumlah Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20 Paket	5.600.000.000	2	213.285.100	1	1.086.370.000	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang didistribusikan/didayagunakan sesuai kebutuhan layanan											
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia berdasarkan jenis dan	150 Orang	33.830.707.916	30	5.593.916.000	30	7.174.827.979	30	2.461.775.000	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	kompetensi											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan penyusunan perencanaan dan evaluasi											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	108.262.000	0		4	27.065.500	1	12.276.500	25,00	45,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	428 Orang	44.132.138.770	72	6.441.966.293	89	9.856.902.902	89	5.031.521.498	100,00	51,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi umum perangkat daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	13.200.000	0	0	1	3.300.000	0	2.955.000	0,00	89,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	282.179.200	0	0	1	70.544.800	0	34.762.600	0,00	49,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	48.000.000	0	0	1	12.000.000	0	4.437.000	0,00	36,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	60.000.000	0	0	1	15.000.000	0	2.150.000	0,00	14,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporanoran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	657.168.000	0	0	12	164.292.000	6	39.174.782	50,00	23,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporanoran Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	496.780.000	12	91.680.000	12	101.275.000	6	46.708.494	50,00	46,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporanoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	741.960.000	12	489.300.000	1	50.490.000	0	24.945.000	0,00	49,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Keandalan BMD											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit	539.972.000	0	0	25	134.993.000	5	52.204.607	20,00	38,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan	4 Laporan	200.000.000	0	0	1	50.000.000	0	3.954.739	0,00	7,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 Unit	131.800.000	0	0	65	32.950.000	10	13.351.000	15,38	40,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku											
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Ancaman Abrasi, Banjir dan Longsor											
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	32 Dokumen	1.132.108.000	0	0	8	283.027.000	1	20.362.496	12,50	7,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Terpenuhinya Layanan Irigasi											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Kabupaten/Kota													
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	17	KM	2.064.613.000	4	393.938.000	3,3	419.925.000	0	16.101.484	0,00	3,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tinggal Beakses Air Minum												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat												
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	16	Dokumen	184.000.000	0	0	4	46.000.000	0	2.424.000	0,00	5,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36	Unit	7.106.223.723	8	3.617.162.900	7	2.090.000.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	38	Unit	7.106.223.723	10	2.628.541.094,50	7	1.091.058.157,00	3	305.265.668	42,86	27,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase RT ramah lingkungan												
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem dan Pengelolaan Persampahan												
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	33	Ton	1.760.000.000	0	0	8,33	440.000.000	0	6.703.500	0,00	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase RT Bersanitasi												
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya MCK Individual bagi Masyarakat												
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah RT yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1106	RT	2.056.129.445	50	357.606.245	264	424.630.800	0	21.098.270	0,00	4,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4	Dokumen	879.160.000	0	0	1	219.790.000	0	9.489.000	0,00	4,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Lingkungan yang teRTata												
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tesedianya Bangunan Gedung Daerah siap Pakai												
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	13.026.853.564	4	1.391.250.700	4	3.842.940.716	1	1.945.000	25,00	0,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	124	Dokumen	1.200.918.400	4	205.634.400	30	248.821.000	0	15.128.200	0,00	6,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap												
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten												
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	35	Dokumen	6.927.840.089	3	2.182.835.801	8	2.115.999.780	0	59.658.965	0,00	2,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	62	KM	138.144.062.928	7	17.495.284.528	14	50.002.420.410	3	9.673.096.201	19,35	19,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	58	KM	48.474.633.880	2	3.008.777.082	14	36.840.996.110	0	1.255.442.700	3,41	3,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	134	Meter	25.396.661.563	50	2.411.660.135	21	21.854.222.672	4	4.000.371.100	18,30	18,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	79	KM	14.579.791.935	4	3.305.640.159	19	3.064.739.019	1	124.754.973	4,07	4,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW												
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan/atau RRTR Kabupaten yang ditetapkan dan Disosialisasikan												
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.352.027.601	1	398.150.118,50	1	301.763.900	0	40.599.600	0,00	13,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM serta PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	140	Orang	10.736.011.182	31	2.337.259.000	93	3.744.954.543	93	1.883.074.415	100,00	50,28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	60	Orang	167.400.000	18	16.650.000	12	33.480.000	6	19.650.000	50,00	58,69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	Paket	8.525.000	5	2.871.000	1	1.705.000	1	1.699.000	50,00	99,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	50	Paket	325.940.828	49	18.743.200	1	32.957.000	1	30.015.000	100,00	91,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	5	Paket	25.045.000	5	9.528.400	1	5.009.000	1	3.680.000	100,00	73,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14	Laporanoran	119.735.207	5	15.472.252	12	36.286.000	12	34.998.000	100,00	96,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporanoran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	15	Paket	393.000.000	2	55.079.182	2	57.000.000	2	25.980.304	100,00	45,58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas jabatan	10	Unit	147.925.000	3	27.429.658	2	29.585.000	2	27.194.642	100,00	91,92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional	30	Unit	209.565.000	3	124.501.524	6	41.913.000	3	35.367.161	50,00	84,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	Unit	24.550.000	3	12.073.800	10	4.910.000	5	2.463.200	50,00	50,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota													
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	500	Orang	653.473.477	2	163.944.470	100	275.162.500	20	19.673.736	20,00	7,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	secara tatap muka lepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya											
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pengadaaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota	4 Unit	91.524.361	0	0	4	1.483.671.500	1	31.418.400	25,00	2,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100 Orang	283.132.375	6	778.043.243	4	952.000.000	2	564.717.287	50,00	59,32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana												
Pencarian, PeRTolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	500 Orang	653.473.477	6	224.060.240	200	298.531.000	100	63.999.974	50,00	21,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1000 Paket	829.439.998	6	562.911.245	200	531.747.999,52	20	84.201.560	10,00	15,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana												
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsinyang dilegalkan	5 Laporanoran	653.473.481	2	7.574.400	2	271.078.110	1	110.639.200	50,00	40,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM serta PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	195 Orang	8.162.349.623	30	3.309.824.776	38	4.852.524.847	38	2.606.953.022	100,00	53,72	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	2 Paket	9.880.000	1	9.320.000	1	560.000	1	560.000	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan peralatan RT	Tersedianya isi ulang gas	2 Paket	25.900.000	1	25.300.000	1	600.000	1	300.000	100,00	50,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	8 Paket	61.082.800	4	30.496.400	4	30.586.400	1	5.078.000	25,00	16,60	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	4 Paket	32.393.600	2	8.000.000	2	24.393.600	1	1.964.400	50,00	8,05	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 Laporanoran	47.118.000	12	30.332.000	12	16.786.000	2	4.634.400	16,67	27,61	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya Rekening listrik, air,penambahan daya listrik	4 Rekening	48.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	8.701.301	100,00	36,26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	3 Unit	46.000.000	1	23.000.000	2	23.000.000	2	16.356.481	100,00	71,12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional	14 Unit	96.620.000	7	48.310.000	7	48.310.000	5	23.270.000	71,43	48,17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	30	Unit	13.040.000	15	7.270.000	15	5.770.000	7	2.650.000	46,67	45,93	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN													
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KeteRTiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan KeteRTiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan teRTib	6	Kasus	507.755.000	1	249.755.000	5	258.000.000	2	152.726.000	40,00	59,20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan KeteRTiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui PeneRTiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan teRTib	2	Laporanoran	142.069.800	1	92.075.800	1	49.994.000	1	28.130.000	100,00	56,27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemadaman kebakaran	1000	Orang	1.056.083.700	500	906.083.700	500	150.000.000	10	37.658.000	2,00	25,11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan peLaporanoran tugas pelayanan												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5	Dokumen/ Laporanoran	43.000.000	2	724.800	2	660.000	0	290.000	0,00	43,94	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Administrasi keuangan Perangkat daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar												
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Orang	15.173.769.590	29	3.090.416.569	36	3.779.307.283	73	1.891.617.238	202,78	50,05	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	111.000.000	1	22.200.000	1	11.100.000	2	9.250.000	200,00	83,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	17.500.000	1	2.055.000	1	1.810.000	0	1.297.000	0,00	71,66	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	10	Paket	28.681.562	2	25.693.600	5	31.453.700	2	25.115.000	40,00	79,85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	2	Paket	5.000.000	6	1.108.200	2	1.872.500	0	302.000	0,00	16,13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasai SKPD	5	Lap	280.000.000	1	36.001.925	1	37.588.000	0	16.573.500	0,00	44,09	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Lap	270.000.000	1	52.612.409	1	58.400.000	0	33.902.297	0,00	58,05	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan PERОrang AN dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan PERОrang AN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 Unit	155.000.000	0	0	1	1.275.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	125.000.000	3	33.817.265	4	13.535.000	2	9.564.296	50,00	70,66	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	100.000.000	7	6.055.000	5	2.030.000	4	1.420.000	80,00	69,95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	159.000.000	1	35.000.000	2	20.000.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penurunan PMKS											
Pemberdayaan Sosial KomUnitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan											
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Persentase masyarakat KAT yang mendapatkan Fasilitas	375 Keluarga	231.941.857	70	52.909.000	20	75.000.000	0	40.415.600	0,00	53,89	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dilatih											
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yg mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kab/Kota	150 Keluarga	140.000.000	20	89.536.200	7	24.975.000	7	24.820.000	100,00	99,38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota		5 Lembaga	120.000.000			7	25.025.000	7	24.021.000	100,00	95,99	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran											
Rehabilitasi dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis Di luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan											
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yg mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi menimal kewenangan Kab/Kota	600 Orang	650.000.000	0	0	40	216.500.000	25	194.417.500	62,50	89,80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	300.000.000	4	75.880.550	20	100.000.000	0	14.796.400	0,00	14,80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kab/kota	250 Orang	386.073.664	390	509.117.172	40	258.599.000	25	165.199.600	62,50	63,88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial											
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase data fakir miskin yang valid											
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejateraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	60 Orang	360.000.000	30	86.400.900	50	22.180.000	20	11.392.000	40,00	51,36	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran											
perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan											
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa	590 Orang	620.000.000	249	210.870.901	100	20.011.000	40	7.125.000	40,00	35,61	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	tanggap daruraRT (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota											Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana											
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabuapaten	100 Orang	225.000.000	0	0	20	4.910.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERITAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja berseRTifikat kompetensi											
	Tingkat produktivitas tenaga kerja											
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Meningkatnya pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi											
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	160 Orang	2.615.309.844	32	758.844.084	16	156.388.000	16	21.465.400	100,00	13,73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	5 Unit	1.307.654.922	0	46.560.000	1	443.612.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS BipaRTit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)											
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja											
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS BipaRTit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	250.000.000	12	16.112.200	10	22.877.000	2	6.566.000	20,00	28,70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peran serta perempuan dibidang politik, ekonomi, social, budaya											
Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota	Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG											
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten	250 %	260.000.000	10	5.557.020	60	32.914.000	20	10.373.600	33,33	31,52	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan											
Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	280 Lmbg	179.184.351	60	269.585.802	1	552.801.100	0	195.306.690	0,00	35,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Pencanangan Kecamatan Layak Anak											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA											
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat AdvokasKebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Lmbg	448.000.000	2	165.558.600	3	50.000.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kab/kota	1 Organisasi	70.000.000	0	0	35	32.424.000	35	29.332.500	100,00	90,47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan											
pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak											
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	15 Keg	30.000.000	30	168.922.100	30	183.336.500	37	67.318.500	123,33	36,72	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UPTD PPA												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu											
Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab kep mentawai											
Layanan Pendampingan korban bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota. Kabupaten/Kota	kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab kep mentawai	25 Orang	114.573.082	2	36.819.450	60	20.000.000	26	5.762.900	43,33	28,81	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan											
Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota											
Layanan pengaduan atau penjangkauan bagi anak korban kekeraan tingkat kabupaten/kota	Sub kegiatanLayanan pengaduan atau penjangkauan bagi anak korban kekeraan tingkat kabupaten/kota	35 Orang	240.000.000	7	86.094.220	60	125.000.000	35	81.645.600	58,33	65,32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terbuatnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	30 Dokumen	10.982.000,00		0	6	10.982.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Pegawai Negeri	170 Orang	18.290.144.795	24	2.772.439.532	34	3.834.770.962	17	2.590.248.227	50,00	93,43	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	terbayarnya honorarium PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	10 Dokumen	113.400.000	3	22.679.500	2	22.680.000	1	4.950.000	50,00	21,83	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	60 Paket	30.012.500	17	6.002.500	12	6.002.500	6	1.950.000	50,00	32,49	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Penyediaan bahan logistik kantor	terlasaksananya atk dan makan minum pegawai, kebersihan	60 Paket	1.514.628.875	4	112.012.053	12	302.925.775	6	23.070.000	50,00	20,60	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	60 Paket	134.463.500	2	23.222.400	12	26.892.700	1	10.720.400	8,33	46,16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	60 Laporan	360.640.000	12	25.919.000	12	72.128.000	6	36.702.800	50,00	141,61	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	15 Laporan	310.000.000	2	62.000.000	3	62.000.000	1,0	35.705.051	33,33	57,59	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	20 Unit	16.680.000	1	31.830.000	4	33.360.000	1	12.695.705	25,00	39,89	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	7 jenis	1.720.906.250	4	100.000.000	10	10.029.025	5	0	125,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Pelayanan Pencatatan Sipil												
Bintek pencatatan sipil	meningkatnya masyarakat memiliki Dokumen pencatatan sipil	300 jenis	1.000.000.000	5	765.011.800	4	200.000.000	2	0	50,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Indeks Desa Membangun											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya persentase teRTibnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	122.486.000	1	43.353.080	2	9.000.000	2	6.765.000	100,00	75,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya persentase teRTibnya administrasi keuangan perangkat daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Bulan	13.225.212.619	24	5.561.086.874	12	4.336.642.229	6	2.207.318.657	50,00	50,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	187.440.000	24	48.600.000	12	22.200.000	4	7.400.000	33,33	33,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya persentase teRTib administrasi umum perangkat daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	102.400.000	2	12.774.500	2	999.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Bulan	270.908.348	24	174.889.428	12	53.795.000	6	15.581.000	50,00	28,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Bulan	108.519.300	24	58.651.880	12	14.150.018	6	2.883.600	50,00	20,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Bulan	332.133.000	24	216.942.643	12	19.426.000	6	17.544.664	50,00	90,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tupoksi perengkat daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Bulan	182.600.000	24	55.889.553	12	37.800.000	6	12.312.996	50,00	32,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tupoksi perengkat daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Bulan	26.696.500			12	12.240.000	6	5.272.068	50,00	43,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	132.900.000	24	119.465.340	1	16.800.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Item	18.050.000	3	7.390.000	6	4.140.000	2	1.200.000	33,33	28,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	18.050.000	3	7.390.000	1	6.999.792	1	6.999.000	100,00	99,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa											
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	60 bln	347.119.000	23	47.374.157	43	30.000.000	9	22.753.800	20,93	75,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	27 kali	64.973.400	5	23.001.800	5	45.000.000	5	35.676.631	100,00	79,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16 Dokumen	219.996.000	6	188.231.140	13	44.999.000	13	43.098.710	100,00	95,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)											
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Mayarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan											
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Bulan Bhakti Gotong Royong	1 kali	150.000.000			1	350.251.080	0	63.776.900	0,00	18,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	32 Dokumen	1.849.029.000	13	1.089.609.409	6	299.998.780	1	36.411.000	16,67	12,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Indeks Desa Membangun											
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR) dan Angka kelahiran Remaja 15-19 Tahun (ASFR)											
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Terkendalinya PeRTambahan Jumlah Penduduk											
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	48 lap	174.100.000	15	27.942.000	12	25.800.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	150 lap	361.000.000	38	47.354.133	12	25.200.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) dan Persentase Unmeed											
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal											
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK/Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang Dilakukan	48 Bulan	980.482.000	20	441.109.500	12	150.000.000	6	3.240.000	50,00	2,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi / stake holder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	8 Kali	613.579.900	4	196.304.100	43	40.000.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di seluruh Fasilitas peleyanan KB											
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Saranan Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Saranan Penunjang Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	40 bln	53.200.000	6	1.800.000	12	18.900.000	1	300.000	8,33	1,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Keserta an Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Keserta an Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	60 Kali	900.481.000	12	279.638.000	353	143.954.000	148	70.747.000	41,93	49,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keserta an Ber-KB	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB											
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dashat di Kampung KB	10 Unit	59.631.650	0	0	6	60.000.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan ketahanan Keluarga											
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera											
Penyediaan Biaya Opeasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	156 TPK	515.900.000	42	118.500.000	36	32.250.000	9	6.000.000	25,00	18,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan											Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera											
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita	Jumlah keluarga berisiko stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita) yang mendapat pendampingan	156 TPK	515.900.000	42	118.500.000	52	343.200.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	76 Orang	11.338.620.188	39	4.042.339.601	19	2.834.655.047	19	1.484.756.599	100,00	52,38	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	144.000.000	2	48.180.000	1	22.200.000	1	9.250.000	100,00	41,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	52.240.000	2	28.056.000	1	7.175.000	1	3.765.000	100,00	52,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yng diadakan	20 Paket	440.000.000	9	205.256.295	5	43.187.000	3	40.432.700	60,00	93,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	8 Paket	260.000.000	6	95.861.800	2	22.902.000	1	9.021.800	50,00	39,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	605.594.000	65	302.679.658	25	67.006.000	10	61.423.734	40,00	91,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	16 Laporan	384.000.000	6	204.859.800	4	144.553.000	1	56.876.440	25,00	39,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangakat Daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan PEROrang AN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	319.968.000	2	146.173.032	1	60.134.900	1	5.794.102	100,00	9,64	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	40 Unit	120.000.000	38	61.184.000	10	9.390.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah											
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah											
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut :1.terferifikasi dewan pers. 2. terdaftar dinas Kominfo. 3.aktif dalam kegiatan relasi media	16 media	162.627.204	0	0	4	585.000.000	2	394.323.472	50,00	67,41	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	144 media	162.627.204	1	339.345.514	36	133.923.000	5	31.401.400	13,89	23,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	241.089.100	1	86.909.231	1	38.000.000	1	3.398.447	100,00	8,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo											
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi											
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah											
Penyediaan Akses Internet	Jumlah PD yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	140 OPD	209.739.766	28	0	36	1.893.258.000	32	715.971.691	88,89	37,82	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan /atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi dan fasilitasi promosi Literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	5 Dokumen	12.199.018.176	0	0	1	109.519.000	0	35.537.600	0,00	32,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	127 Orang /bulan	14.328.570.885	23	2.519.287.441	26	2.984.069.212	26	1.522.608.436	100,00	51,02	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58 Dokumen	132.380.000	10	26.280.000	4	28.680.000	2	9.950.000	50,00	34,69	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	214.186.200	6	32.708.934	6	33.122.000	3	22.714.000	50,00	68,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	21 Paket	92.356.000	13	14.419.000	2	12.200.000	1	5.892.000	50,00	48,30	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	400.204.600	14	44.789.191	12	50.098.000	6	42.992.647	50,00	85,82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	190.000.000	12	27.760.176	1	38.000.000	1	11.615.996	50,00	30,57	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak Kendaraan PERОrang AN Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	335.600.000	13	55.835.223	3	45.900.000	1	12.897.428	33,33	28,10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	151	Unit usaha	7.180.037.400	46	2.251.926.037	26	1.657.000.000	26	397.762.655	100,00	24,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Dokumen	1.800.000.000	1	156.534.800	1	450.000.000	0	112.117.152	0,00	24,91	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Tahun	186.029.600	1	73.012.000	1	46.507.400	1	46.413.400	100,00	99,80	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	16.113.600	1	21.700.000	4	4.028.400	2	2.000.000	50,00	49,65	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	40	Laporan	600.200.000	12	118.876.000	10	150.050.000	5	134.473.802	50,00	89,62	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Tahun	528.000.000	1	78.000.000	12	132.000.000	6	33.545.515	50,00	25,41	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan operasional perkantoran												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	48	Unit	180.008.000	2	73.962.000	12	45.002.000	6	30.835.300	50,00	68,52	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	170.800.000	5	0	1	42.700.000	1	29.245.000	100,00	68,49	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan												
Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota													
Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Pemuda dan Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Tersedianya Dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki muntei dan maileppet	4	Dokumen	6.735.091.200	2	428.570.500	1	1.683.772.800	1	400.262.800	100,00	23,77	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN													
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satdik Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satdik Dasar	1	Dokumen	880.000.000	2	216.661.950	1	220.000.000	1	210.193.600	100,00	95,54	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25	Event	1.400.000.000	0	0	1	500.001.000	1	26.906.000	100,00	5,38	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1	Dokumen	300.000.000	0	0	1	300.000.000	1	263.186.618	100,00	87,73	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet												
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	8	Dokumen	1.399.940.000	2	64.256.800	2	349.985.000	1	206.356.747	50,00	58,96	Dinas Pariwisata dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	layanan perangkat daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang	13.531.161.014	32	2.805.861.337	49	3.323.930.935	49	1.670.493.296	100,00	50,26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Orang	200.000.000	12	19.800.000	12	42.600.000	3	11.790.000	25,00	27,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Paket	40.000.000	1	5.266.000	1	2.602.500	0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	325.000.000	5	89.829.800	5	68.547.800	2	17.230.000	40,00	25,14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket	50.000.000	2	12.099.200	2	8.913.700	1	1.000.000	50,00	11,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	480.000.000	15	49.658.320	15	60.010.000	11	45.551.423	73,33	75,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah											
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	300.000.000	36	66.264.099	36	88.800.000	17	29.305.298	47,22	33,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	50 Unit	60.000.000	9	46.584.631	6	38.275.000	3	7.138.095	50,00	18,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	60.000.000	29	15.810.000	8	5.400.000	1	832.000	12,50	15,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan											
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan											
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	250.000.000	2	23.895.900	100	22.129.000	48	9.801.300	48,00	44,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha											
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi Investasi											
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75 Kegiatan Usaha	179.028.030	9	28.464.000	3	22.645.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	9 objek	2.000.000.000	3	266.728.400	5	400.000.000	2	173.442.896	40,00	43,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 objek	1.200.000.000	4	123.683.800	10	670.000.000	3	149.802.731	30,00	22,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												
Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	35 objek	2.600.000.000	0	0	10	350.000.000	0	7.857.000	0,00	2,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	103 Orang / bulan	13.518.893.795	21	2.011.130.439	36	2.655.553.240	36	1.328.506.185	100,00	50,03	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	250.000.000	1	22.200.000	1	61.080.000	1	29.050.000	100,00	47,56	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 Paket	245.340.503	3	25.568.000	3	25.224.100	1	1.646.000	33,33	6,53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	65 Paket	85.000.000	13	7.068.000	13	10.000.000	4	800.000	30,77	8,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	600.000.000	36	35.736.414	36	29.928.000	9	17.732.685	25,00	59,25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10 Laporan	60.000.000	2	6.835.170	2	52.000.000	2	21.500.807	100,00	41,35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	75.000.000	10	12.796.250	13	5.000.000	8	800.000	61,54	16,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	75 Unit	30.000.000	15	6.368.000	15	2.840.000	4	0	26,67	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat seRTifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145 Orang	246.758.200	5	20.345.300	3	29.755.000	2	28.432.500	66,67	95,56	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-	7 Perpus takaan	8.196.977.478	1	3.059.513.888	1	813.987.496	1	586.693.729	100,00	72,08	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
menjadi Kewenangan Dawrah Kabupaten/ Kota	tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satdik Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satdik	145	Lokus	902.721.000	25	74.740.870	20	135.113.500	8	15.198.200	40,00	11,25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP													
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota													
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	79500	Berkas	240.714.800	60	35.082.800	60	25.095.500	12	8.161.200	20,00	32,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	216	Berkas	300.000.000	0	0	54	25.966.000	14	17.179.800	25,93	66,16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap												
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota												
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yg Meningkat Kapasitasnya	2500	Orang	25.000.000.000	530	4.489.502.775	50	530.150.000	70	113.461.100	140,00	21,40	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya												
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil												
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	80	Kelompok	13.000.000.000	2	59.167.750	17	382.642.420	17	64.900.000	100,00	16,96	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan												
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil												
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	Dokumen	250.000.000	1	5.220.000	1	5.000.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota												
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Ton	1.000.000.000	0	0	110	119.000.000	0	3.512.400	0,00	2,95	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288	Orang	18.114.444.356	41	3.866.056.008	72	4.528.611.089	43	2.194.755.006	59,72	48,46	Dinas Pariwisata dan Olahraga
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya operasional Perkantoran	48	Dokumen	78.680.000	1	514.580.000	12	19.670.000	3	11.240.000	25,00	57,14	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisata												
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Laporan	73.380.000	1	960.752.250	1	18.345.000	1	11.142.600	100,00	60,74	Dinas Pariwisata dan Olahraga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Promosi	1.808.000.000	0	0	2	452.000.000	1	167.644.500	50,00	37,09	Dinas Pariwisata dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif												
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	4 Orang	376.720.000	35	270.587.000	1	94.180.000	0	0	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Pertanian												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan ASN											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	70 Orang	29.902.977.128	86	10.526.155.099	14	8.829.452.479	8	4.662.607.982	57,14	52,81	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelola Kegiatan	12 Bulan	390.400.000	2	28.080.000	5	106.080.000	5	45.200.000	100,00	42,61	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yg Tersedia	280 Paket	159.000.000	56	47.285.800	56	24.464.500	30	16.118.800	53,57	65,89	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yg Tersedia	60 Paket	175.000.000	8	14.859.200	5	3.000.000	3	1.956.000	60,00	65,20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg Tersedia	35 Paket	144.400.000	5	27.800.000	7	10.050.000	3	5.600.000	42,86	55,72	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang Dilakukan	325 Laporan	1.400.000.000	52	75.851.581	12	41.587.000	12	41.217.354	100,00	99,11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik dan Komunikasi yang Dibayarkan	12 Laporan	437.500.000	1	349.782.967	1	417.000.000	6	154.484.274	600,00	37,05	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.041.034.200	12	260.258.550	12	260.258.550	3	37.029.050	25,00	14,23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharan	25 Unit	100.000.000	4	63.283.000	11	92.540.000	2	28.545.540	18,18	30,85	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.000.000	0	0	5	20.197.000	1	4.107.000	20,00	20,33	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Holltikultura dan Peternakan											
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	60 Laporan	9.842.839.045	0	0	12	3.523.745.030	0	255.542.836	0,00	7,25	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi Peta LP2B												
Pengembangan Prasarana Pertanian													
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		5	Dokumen	3.000.000.000	0	0	1	671.991.000	1	252.199.680	100,00	37,53	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Pembangunan Prasarana Pertanian													
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13	Unit	11.245.233.242	6	1.717.613.000	7	2.187.201.961	2	217.064.121	28,57	9,92	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan												
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan												
Penguatan Kelembagaan penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	226	Unit	300.000.000	0	0	1	84.882.000	0	21.124.262	0,00	24,89	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	199.999.900	0	0	1	199.999.900	0	14.488.450	25,00	7,24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						-							
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		0											
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Laporan	394.467.000	1	43.235.000	12	65.000.000	6	41.157.100	50,00	63,32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dcan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440	Orang	40.634.921.172	283	29.074.947.716	110	12.874.958.606	88	6.601.529.730	80,00	51,27	Sekretariat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	504.000.000	33	326.690.210	12	681.135.100	7	343.435.150	58,33	50,42	Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	16	Paket	1.281.326.400	12	2.636.158.850	4	748.485.225	2	326.299.705	50,00	43,59	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	433.880.000	3	483.542.413	1	144.374.000	0	40.709.640	0,00	28,20	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	1.330.348.000	36	2.972.546.396	12	977.645.580	4	287.036.574	33,33	29,36	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	1.821.962.000	36	2.336.769.481	12	577.576.000	11	466.143.950	91,67	80,71	Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	1.674.024.000	34	2.994.664.072	12	772.770.119	8	521.985.230	66,67	67,55	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan	48	Laporan	1.993.800.000	32	1.359.062.804	12	524.629.464	6	290.562.641	50,00	55,38	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	Listrik yang disediakan											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	1.558.457.515	23	1.411.762.579	8	494.499.005	5	324.637.387	62,50	65,65	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	24.772.600.000	73	15.864.062.373	25	1.745.056.693	13	1.032.807.469	52,00	59,18	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	7.842.240.000	7	4.526.851.974	4	1.281.490.000	2	581.524.794	50,00	45,38	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	16 Unit	719.920.000	12	1.110.520.619	4	140.109.912	2	92.317.330	50,00	65,89	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	1.913.784.416	4	1.226.944.117	2	613.838.494	2	293.233.782	100,00	47,77	Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Disediakan	112 Paket	444.000.000	83	587.613.411	28	140.000.000	19	97.841.250	67,86	69,89	Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	4 Orang	3.719.369.429	3	3.989.109.563	2	1.057.784.000	2	1.069.009.803	100,00	101,06	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan wallkil Kepala Daerah	3 Orang	160.000.000	1	11.152.550	2	100.000.000	0	4.440.000	0,00	4,44	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												
Penyediaan Kebutuhan RT Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan RT Kepala Daerah yang disediakan	48 Paket	1.365.382.200	36	1.774.315.009	12	354.900.000	8	237.585.500	66,67	66,94	Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan RT Wakil Kepala Daerah	48 Paket	1.244.000.000	1	474.289.300	12	311.000.000	6	166.928.400	50,00	53,67	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi												
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	144 Dokumen t	1.013.729.000	78	457.516.314	36	104.320.000	5	15.218.200	13,89	14,59	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	524.449.000	3	234.848.803	1	38.042.000	0	5.095.800	0,00	13,40	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	144 Dokumen t	701.583.480	72	259.447.271	36	50.078.200	18	25.634.800	50,00	51,19	Sekretariat Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen t	258.034.730	6	96.385.961	3	15.497.800	0	2.206.700	0,00	14,24	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	507.232.000	3	264.198.122	1	42.062.000	0	30.494.800	0,00	72,50	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48 Laporan	682.687.000	34	958.098.183	12	137.540.500	4	45.349.138	33,33	32,97	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48 Laporan	734.273.067	31	827.683.583	12	49.839.000	4	16.412.527	33,33	32,93	Sekretariat Daerah
PenDokumen tasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan PenDokumen tasian Tugas Pimpinan	48 Laporan	718.010.400	34	741.200.743	12	62.471.980	6	30.567.895	50,00	48,93	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
Administrasi Tata Pemerintahan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	16	Dokumen t	729.064.000	12	357.637.831	4	160.000.000	4	56.170.300	100,00	35,11	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	120	Kecamatan	477.663.600	57	680.937.122	1	330.000.000	0	35.124.200	0,00	10,64	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	16	Dokumen t	990.159.600	11	625.670.728	1	100.000.000	0	71.536.108	0,00	71,54	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat													
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	Dokumen	5.993.481.600	19	11.627.747.285	2	1.359.818.270	1	1.079.181.876	50,00	79,36	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga,Pariwisata,Pendididkan,Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan Trantibum Linmas	12	Dokumen	12.905.384.000	27	8.646.297.390	3	1.198.409.450	1	273.469.566	33,33	22,82	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum													
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	60	Dokumen	928.486.200	38	649.439.481	7	97.538.800	3	49.063.800	42,86	50,30	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	Kasus	2.579.492.000	13	1.441.690.883	3	197.167.000	1	102.503.900	33,33	51,99	Sekretariat Daerah
PenDokumen tasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang DiDokumen tasi	16	Dokumen	620.163.200	11	273.535.200	1	15.294.200	0	3.214.500	0,00	21,02	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerjasama Daerah													
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	Dokumen	8.063.000.000	3	4.927.429.246	1	319.578.000	0	59.226.842	0,00	18,53	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian													
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif	12	Orang	215.241.704	6	1.031.719.522	2	132.911.200	0	46.571.787	0,00	35,04	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	40	Dokumen t	250.500.000	14	200.525.750	8	92.092.200	0	9.424.400	0,00	10,23	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan													
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dokumen t	442.266.800	2	323.285.151	1	43.000.000	0	10.990.800	0,00	25,56	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	501.999.600	2	354.695.420	1	67.152.000	0	36.108.700	0,00	53,77	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	933.661.600	2	803.265.152	1	134.840.000	0	22.134.200	0,00	16,42	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa	48	Dokumen	1.100.221.600	29	839.972.229	12	217.118.000	2	46.310.215	16,67	21,33	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	48	Dokumen	1.402.568.000	24	1.035.844.507	12	276.835.000	1	22.275.400	8,33	8,05	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	320	Orang	572.544.000	87	421.525.891	80	306.047.000	42	160.809.602	52,50	52,54	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam													
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, PeRTanahan	4	Dokumen	556.218.000	1	192.199.861	1	29.996.200	0	6.406.100	0,00	21,36	Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah													

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Administrasi Keauangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205	Orang	19.161.835.376	33	3.335.444.815	77	3.734.296.226	77	1.857.530.873	100,00	49,74	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	Dokumen	866.686.421	1	152.200.000	12	150.810.000	6	66.370.000	50,00	44,01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5	Tahun	111.437.616	1	18.858.000	1	11.690.000	1	3.130.000	100,00	26,78	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	10	Paket	622.893.360	2	174.148.600	1	72.680.000	1	63.621.999	100,00	87,54	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	15	Paket	1.382.424.086	5	256.976.029	4	185.230.100	2	122.363.300	50,00	66,06	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	5	Paket	580.191.281	2	62.703.500	1	39.750.000	1	1.435.000	100,00	3,61	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	635.558.935	6	124.563.300	3	66.312.000	2	66.043.400	66,67	99,59	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Kendaraan Dinas	meningkatnya pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah	2	Unit	796.000.000			1	36.280.000	1	32.920.000	100,00	90,74	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mabel	5	Paket	868.452.382	2	164.855.590	4	44.836.800	3	30.804.000	75,00	68,70	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	5	Tahun	690.255.761	3	206.079.093	1	114.000.000	1	48.582.692	100,00	42,62	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30	Unit	1.175.736.032	3	193.261.270	6	145.990.000	3	88.373.845	50,00	60,53	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110	Unit	538.739.055	12	30.709.500	11	40.500.000	4	20.208.342	36,36	49,90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	225	Unit	316.992.055	43	40.475.556	40	39.250.000	12	11.775.140	30,00	30,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD													
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	100	Orang	54.109.870.928	20	8.949.600.478	20	9.226.212.350	20	4.283.434.377	100,00	46,43	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	5	Paket	1.656.727.915	2	282.000.000	1	165.680.000	1	164.058.000	100,00	99,02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
General Cekup Anggota DPRD	Tersedianya General Cek Up Anggota DPRD	100	Orang	1.105.126.250	0	0	20	61.000.000	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD													
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD													
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda yang dihasilkan DPRD	10	Laporan	1.354.892.633	0	0	2	194.180.000	1	18.007.700	50,00	9,27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	60	Perda	5.495.115.039	8	150.645.156	12	369.306.000	4	172.544.050	33,33	46,72	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan	Terlaksananya Penyelenggara	10	Laporan	1.566.177.934	2	104.954.500	2		1	93.915.320	50,00	46,66	Sekretariat Dewan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	Rancangan Peraturan Daerah						201.270.000					Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Kebijakan Anggaran												
Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	147.667.656	1	12.456.000	1	15.147.900	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PembahasanPerubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 Dokumen	147.667.656	1	12.630.000	1	15.147.800	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	5 Dokumen	1.477.925.294	1	191.725.361	1	180.216.800	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	5 Dokumen	1.503.598.766	1	193.038.685	1	180.406.800	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan PeRTanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan PeRTanggung Jawaban APBD	5 Dokumen	1.775.314.483	1	187.579.400	1	190.188.800	0	0	0,00	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan												
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah dan Hukum	15 Laporan	1.990.992.160	4	267.004.835	3	196.354.000	2	138.907.400	66,67	70,74	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	3.199.151.766	4	241.619.649	3	196.354.000	2	152.471.800	66,67	77,65	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	1.996.697.375	5	281.937.350	3	196.354.000	2	149.637.200	66,67	76,21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Laporan	2.076.527.663	4	297.630.480	3	196.354.000	2	171.302.000	66,67	87,24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Laporan	2.899.006.735	4	204.476.023	3	196.354.000	1	54.513.200	33,33	27,76	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Laporan Keterangan PeRTanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Laopran Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	988.398.535			1	193.012.800					
Peningkatan Kapasitas DPRD												
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	30 Laporan	6.064.893.643	5	1.566.063.451	3	1.202.272.000	2	525.372.790	66,67	43,70	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	25 Laporan	1.923.106.500	4	300.000.000	5	300.000.000	5	125.000.000	100,00	41,67	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat												
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	25 Laporan	5.092.847.558	6	1.117.700.200	3	805.542.000	2	557.536.800	66,67	69,21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	15 Dokumen	18.946.080.275	3	2.956.237.000	3	3.227.919.400	2	922.118.000	66,67	28,57	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Tugas DPRD												
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Laporan	6.647.867.810	6	1.796.090.894	3	1.342.007.000	2	1.320.866.375	66,67	98,42	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
PERENCANAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	204 ASN	12.547.089.720	35	3.908.237.272	51	4.173.818.198	51	2.189.185.195	100,00	52,45	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	88.000.000	1	22.200.000	1	22.200.000	0	9.250.000	0,00	41,67	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	16 Paket	43.000.000	1	60.999.000	4	5.000.000	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	Kantor yang Disediakan											Inovasi Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	185.000.000	3	85.403.107	3	46.600.000	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	36.000.000	6	8.012.600	5	8.000.000	3	4.226.400	60,00	52,83	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	435.000.000	36	227.828.424	24	78.000.000	20	74.844.712	83,33	95,95	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.000.000	36	287.271.091	3	348.950.000	3	164.149.153	100,00	47,04	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	443.289.958	2	29.998.866	2	96.441.000	1	52.383.389	50,00	54,32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	320.000.000	11	60.672.779	20	110.526.000	11	62.392.000	55,00	56,45	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	4 Unit	650.000.000	1	166.384.654	1	10.000.000	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah											
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD											
Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 Berita Acara	645.000.000	1	40.682.900	1	24.864.600	1	24.068.200	100,00	96,80	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8 Berita Acara	1.592.000.000	2	224.387.800	1	248.307.600	1	219.513.860	100,00	88,40	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	16 Dokumen	1.970.000.000	4	579.544.037	2	84.800.200	0	22.510.100	0,00	26,54	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah												
Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan	144 Orang	660.000.000	36	231.709.162	36	6.402.600	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kecamatan yang akan dilakukan monitoring	5 Laporan	800.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung											
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	382.812.410	1	12.131.000	2	15.000.000	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	388.703.677	1	36.264.616	2	425.000.000	0	27.871.389	0,00	6,56	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8	Laporan	382.812.410	1	28.466.425	2	30.000.000	0	19.156.600	0,00	63,86	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan	Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	Laporan	382.812.410	1	43.687.000	2	30.000.000	0	8.760.000	0,00	29,20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KEUANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	219.920.000	3	48.389.000	3	43.984.000	0	22.323.000	0,00	50,75	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	305	Orang	205.882.289.194	61	25.436.430.196	61	41.176.457.839	61	14.333.503.783	100,00	34,81	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Dokumen	1.954.200.000	12	520.424.000	12	390.840.000	3	184.990.000	25,00	47,33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	Paket	413.073.220	20	37.810.000	20	82.614.644	2	19.995.000	10,00	24,20	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	595.196.155	4	225.335.550	4	119.039.231	1	39.776.000	25,00	33,41	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	10	Paket	1.013.140.000	2	242.742.750	2	202.628.000	0	132.099.000	0,00	65,19	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	Paket	405.192.000	4	63.943.000	4	81.038.400	1	56.998.600	25,00	70,34	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20	Dokumen	45.000.000	4	14.800.000	4	9.000.000	0	1.600.000	0,00	17,78	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	Laporan	1.890.545.000	2	508.543.166	2	378.109.000	1	160.606.759	50,00	42,48	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	20	Laporan	4.845.750.000	4	765.430.989	4	969.150.000	1	265.717.399	25,00	27,42	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	468.750.000	12	393.831.000	12	93.750.000	2	63.000.000	16,67	67,20	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan PEROrang AN dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10	Unit	991.700.000	0	0	2	198.340.000	0	102.948.003	0,00	51,90	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	Unit	187.000.000	4	155.685.000	4	37.400.000	1	21.518.232	25,00	57,54	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	50	Unit	1.860.382.335	10	92.810.000	10	372.076.467	2	73.420.000	20,00	19,73	Badan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	10 Dokumen	197.451.000	2	61.927.600	2	39.490.200	0	19.537.000	0,00	49,47	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	10 Dokumen	194.986.000	2	56.487.600	2	38.997.200	0	28.797.200	0,00	73,84	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2.890.041.000	2	647.475.808	2	578.008.200	0	73.921.657	0,00	12,79	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	4.217.256.000	2	670.154.752	2	843.451.200	0	490.813.348	0,00	58,19	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlaah Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	5 Dokumen	2.235.655.000	1	129.580.125	1	447.131.000	0	129.523.000	0,00	28,97	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Dokumen	199.766.400	1	22.075.000	1	39.953.280	0	19.460.000	0,00	48,71	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60 Laporan	285.999.400	12	73.449.122	12	57.199.880	3	21.410.416	25,00	37,43	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2d dengan instansi terkait	25 Dokumen	1.688.575.000	5	62.669.117	5	337.715.000	1	160.558.416	20,00	47,54	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	180 Laporan	308.834.000	36	24.332.400	36	61.766.800	10	24.655.800	27,78	39,92	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan PeRTanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan PeRTanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	30 Laporan	256.289.000	6	0	6	51.257.800	1	3.983.200	16,67	7,77	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	1.352.721.000	6	47.330.600	6	270.544.200	1	169.177.796	16,67	62,53	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PeRTanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran PeRTanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang PeRTanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran PeRTanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	328.851.000	2	42.994.200	2	65.770.200	0	4.084.600	0,00	6,21	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Laporan	19.872.727.935	1	1.595.671.852	1	3.974.545.587	1	342.536.000	100,00	8,62	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	5	Laporan	502.176.528.000	1	92.363.773.096	1	100.435.305.600	1	20.536.564.753	100,00	20,45	Badan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terDokumen tasi dengan baik												
Pengelolaan Barang Milik Daerah													
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Dokumen	352.505.500	2	37.121.920	2	70.501.100	1	38.729.900	50,00	54,94	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5	Laporan	971.837.000	1	10.685.000	1	194.367.400	0	45.088.200	0,00	23,20	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	180	Laporan	4.324.760.000	36	286.260.000	36	864.952.000	1	208.715.300	2,78	24,13	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	Dokumen	6.012.358.500	2	18.855.200	2	1.202.471.700	0	275.938.053	0,00	22,95	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Laporan	473.514.000	1	28.618.200	1	94.702.800	0	31.045.800	0,00	32,78	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5	Laporan	728.769.000	1	73.954.000	1	145.753.800	0	52.917.100	0,00	36,31	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KEUANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kierja Perangkat Daerah												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	140	Orang	9.055.930.992	0	0	35	2.263.982.748	32	1.433.023.578	91,43	63,30	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	16	Dokumen	35.043.200	0	0	4	8.760.800	0	0	0,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	28	Paket	39.991.200	0	0	7	9.997.800	2	8.643.000	28,57	86,45	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20	Paket	40.000.000	0	0	5	10.000.000	1	5.700.000	20,00	57,00	Badan Pendapatan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	Laporan	246.600.000	0	0	12	61.650.000	3	48.008.352	25,00	77,87	Badan Pendapatan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	16	Unit	999.961.988	0	0	4	249.990.497	1	14.599.450	25,00	5,84	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	Laporan	99.700.000	0	0	12	24.925.000	1	4.400.000	8,33	17,65	Badan Pendapatan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	8	Unit	116.100.000	0	0	2	29.025.000	0	15.171.576	0,00	52,27	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	8	Unit	118.000.000	0	0	2	29.500.000	1	3.368.100	50,00	11,42	Badan Pendapatan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah												
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah												
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	32	Dokumen	600.663.200	0	0	8	150.165.800	1	52.980.110	12,50	35,28	Badan Pendapatan Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	551.997.520	0	0	1	137.999.380	0	62.973.955	0,00	45,63	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12	Dokumen	664.282.800	0	0	3	166.070.700	2	50.331.300	66,67	30,31	Badan Pendapatan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB2P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	87.304	Objek Pajak	2.140.264.510	0	0	21826	535.066.128	10000	88.387.500	45,82	16,52	Badan Pendapatan Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan Verifikasi	48	Dokumen	205.476.800	0	0	12	51.369.200	9	26.306.900	75,00	51,21	Badan Pendapatan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah/ Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	48	Dokumen	799.984.840	0	0	12	199.996.210	12	41.426.100	100,00	20,71	Badan Pendapatan Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleseian Keberatan Pajak Daerah	8	Dokumen	199.630.400	0	0	2	49.907.600	2	10.556.000	100,00	21,15	Badan Pendapatan Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	48	Dokumen	799.995.000	0	0	12	199.998.750	10	70.245.100	83,33	35,12	Badan Pendapatan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	48	Laporan	858.374.000	0	0	12	214.593.500	8	32.580.000	66,67	15,18	Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAIN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	180	ASN	6.718.924.390	36	3.320.305.195	36	3.870.655.187	74	2.011.086.715	205,56	51,96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	337.685.317	1	13.200.000	1	19.800.000	3	8.250.000	300,00	41,67	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	15	Paket	60.635.683	5	4.248.500	1	2.005.000	1	515.000	100,00	25,69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya alat tulis kantor	500	Jenis	325.103.000	100	50.081.300	100	65.020.600	20	1.984.000	20,00	3,05	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan barang cetakan dan penggandan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	330	Jenis	686.166.556	65	10.135.000	40	8.000.000	20	1.315.600	50,00	16,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	114	Jenis	1.729.608.611	105	38.601.000	10	26.310.000	3	8.263.700	30,00	31,41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	66	Rekening	1.569.508.477	36	115.555.000	3	113.910.000	13	29.512.536	433,33	25,91	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan PERОrang AN dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	72 Unit	425.005.877	63	40.797.000	1	39.152.000	1	22.569.441	100,00	57,65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	500 PNS	920.116.000	200	29.650.300	30	12.647.000	30	7.078.400	100,00	55,97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mutasi dan Promosi ASN												
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen tasi hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	500 PNS	4.595.250.000	125	1.179.042.217	500	359.887.000	200	209.244.086	40,00	58,14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 PNS	654.098.000	600	63.985.700	40	12.028.400	0	0	0,00	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi ASN												
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjut	20 Orang	1.394.297.115	4	404.646.997	4	42.660.000	2	10.500.000	50,00	24,61	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	50 Orang	430.000.000	0	0	10	12.490.000	3	7.547.400	30,00	60,43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah											
Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan												
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen	330.051.683	0	0	1	25.000.000	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	4 Dokumen	330.051.683	1	471.128.363	1	325.079.000	0	41.208.179	0,00	12,68	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan PengembanganLingkungan Hidup	1 Dokumen	354.000.000	0	0	1	354.000.000	0	0	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
INSPEKTORAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	215 Orang / Bulan	24.250.000.000	36	4.315.099.999	51	4.700.000.000	51	2.540.918.926	100,00	54,06	Inspektorat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Orang	500.000.000	12	95.340.000	7	100.000.000	3	29.200.000	42,86	29,20	Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	215 Orang	1.000.000.000	10	309.414.706	40	200.000.000	1	25.079.063	2,50	12,54	Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3			4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	75	Paket	50.000.000	1	7.896.220	15	10.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Penyediaan Peralatan RT	Jumlah Paket RT yang disediakan	30	Paket	21.000.000	1	3.360.000	2	5.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	27	Paket	142.000.000	3	134.631.063	3	35.000.000	2	12.543.000	66,67	35,84	Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	40.000.000	2	14.986.700	1	7.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	10	Dokumen	75.000.000	1	20.856.500	2	15.000.000	1	600.000	50,00	4,00	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	1.000.000.000	12	988.975.614	12	200.000.000	6	209.799.216	50,00	104,90	Inspektorat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5	Unit	1.188.000.000	0	0	1	300.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	25	Unit	560.000.000	0	0	2	200.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	25	Unit	448.000.000	8	113.218.615	5	88.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Lainnya yand disediakan	10	Paket	500.000.000			1	100.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	15	Jenis	300.000.000	36	75.747.725	3	100.000.000	1	21.016.250	33,33	21,02	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	20	Jenis	750.000.000	12	548.631.000	4	150.000.000	3	180.445.637	75,00	120,30	Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	75	Unit	100.000.000	1	16.914.996	15	20.000.000	2	8.454.264	13,33	42,27	Inspektorat
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	60	Unit	200.000.000	6	33.952.526	15	40.000.000	4	2.962.000	26,67	7,41	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	40	Unit	105.000.000	3	26.160.878	8	25.000.000	2	3.200.000	25,00	12,80	Inspektorat
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5	Unit	250.000.000	1	122.997.645	1	50.000.000	0	4.999.000	0,00	10,00	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
Penyelenggaraan Pengawasan Internal													
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20	Laporan	500.000.000	12	38.029.000	4	100.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20	Laporan	500.000.000	12	38.080.000	4	100.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	655	Laporan	1.301.000.000	108	182.801.000	131	260.000.000	5	36.576.400	3,82	14,07	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	185	Laporan	250.000.000	37	22.773.000	37	50.000.000	5	6.561.800	13,51	13,12	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	110	Laporan	1.370.000.000	37	226.650.100	22	280.000.000	18	161.367.600	81,82	57,63	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	10 Kesepakatan	1.000.000.000	2	291.781.439	2	200.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	617.000.000	4	122.671.794	2	118.000.000	0	6.652.400	0,00	5,64	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan TeRTentu												
Penanganan Penyelesaian Kerugaian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugaian Negara/ daerah yang ditangani	10 Laporan	1.000.000.000	0	0	2	200.000.000	1	98.242.400	50,00	49,12	Inspektorat
Pengawasan Dengan Tujuan TeRTentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan TeRTentu	40 Laporan	1.000.000.000	12	295.429.519	8	200.000.000	2	45.368.900	25,00	22,68	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan												
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	20 Rekomendasi	169.600.000	0	0	4	40.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	20 Rekomendasi	270.000.000	2	91.575.800	4	50.000.000	1	10.153.424	25,00	20,31	Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi												
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	50 Perangkat Daerah	280.000.000	4	66.687.200	10	50.000.000	2	8.747.400	20,00	17,49	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	130 Perangkat Daerah	250.000.000	10	29.519.000	26	50.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pnecegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	250.000.000	5	193.204.500	2	50.000.000	0	4.100.000	0,00	8,20	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Darah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	250.000.000	2	32.128.100	2	50.000.000	0	0	0,00	0,00	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN SIBERUT UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	30 Lap	74.107.820	5	18.400.000	6	14.950.000	1	3.070.000	16,67	20,54	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Oarng yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang	11.273.269.850	25	2.166.446.817	25	2.489.197.016	25	1.817.800.042	100,00	73,03	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	912.650.000	12	101.180.000	12	67.200.000	6	62.610.000	50,00	93,17	Kecamatan Siberut Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	36 Jenis	11.412.500	9	2.412.500	9	2.412.500	7	3.285.000	77,78	136,17	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	133.727.100	3	31.868.500	3	31.909.800	2	21.399.000	66,67	67,06	Kecamatan Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	10.920.000	2	1.974.000	2	1.744.400	2	1.283.000	100,00	73,55	Kecamatan Siberut Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	512.630.000	1	62.670.000	1	69.358.000	1	57.590.000	100,00	83,03	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Bln	60.000.000	12	15.370.000	12	26.400.000	5	16.450.000	41,67	62,31	Kecamatan Siberut Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrang an Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	77.800.000	1	20.030.000	1	19.520.000	2	9.100.000	200,00	46,62	Kecamatan Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	18.000.000	5	19.170.000	5	11.170.000	22,38	6.950.000	447,63	62,22	Kecamatan Siberut Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	61.840.000	4	2.840.000	4	2.840.000	1	650.000	25,00	22,89	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Utara											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	24 Lap	207.635.900	1	14.355.000	4	11.255.000	2	4.800.000	50,00	42,65	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketelibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang BerPartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga	146.750.000	10	21.589.000	10	17.734.200	5	29.326.000	50,00	165,36	Kecamatan Siberut Utara
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 Lap	268.521.800	12	9.295.000	12	8.630.000	6	6.000.000	50,00	69,52	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	400 Orang	213.324.184	100	17.702.500	100	71.491.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	152.115.000	1	13.508.000	1	3.985.000	1	0	100,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Layanan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	488.326.160	1	18.400.000	1	14.950.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Utara
KECAMATAN SIBERUT TENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	58.200.000	2	18.000.000	4	14.550.000	2	10.500.000	50,00	72,16	Kecamatan Siberut Tengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Siberut Tengah	1104 Orang	5.775.856.280	144	1.180.158.691	276	1.443.964.070	138	729.640.675	50,00	50,53	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	48 Dokumen	167.680.000	12	111.167.700	12	41.920.000	7	38.250.000	58,33	91,25	Kecamatan Siberut Tengah
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	4 Paket	5.300.000	6	4.715.000	1	1.325.000	1	1.325.000	100,00	100,00	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	40 jenis	58.120.000	84	42.538.000	10	14.530.000	8	6.427.000	80,00	44,23	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	8 Jenis	2.400.000	5	7.921.600	2	800.000	1	638.000	50,00	79,75	Kecamatan Siberut Tengah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	48 laporan	190.468.000	8	44.175.000	8	47.617.000	6	25.605.000	75,00	53,77	Kecamatan Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	96 Laporan	33.600.000	15	4.000.000	12	8.400.000	7	3.480.000	58,33	41,43	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	400 Jiwa	47.400.000	185	11.250.000	100	11.850.000	40	4.500.000	40,00	37,97	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	48 lembaga	58.400.000	2	11.033.000	2	14.600.000	2	14.500.000	100,00	99,32	Kecamatan Siberut Tengah
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	4 laporan	28.800.000	1	7.440.000	1	7.200.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan	Terlaksananya HUT-RI	400 0rang	153.300.000	100	76.628.000	100	38.325.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan											
Pasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	48 Dokumen	96.000.000	4	29.340.000	4	24.000.000	1	6.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Siberut Tengah
KECAMATAN SIBERUT BARAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD Kec Sib Barat											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Perangkat Daerah	48 Laporan	333.089.500	12	19.950.000	12	19.950.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	1020 Orang	6.716.075.735	204	1.343.215.147	204	1.343.215.147	86	544.114.316	42,16	40,51	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	1.308.932.000	12	92.950.000	12	92.950.000	2	11.065.000	16,67	11,90	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	48 Laporan	35.755.000	12	3.383.000	12	3.383.000	1	660.000	8,33	19,51	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	48 Laporan	248.353.800	12	32.052.200	12	32.052.200	1	1.034.000	8,33	3,23	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	48 Laporan	21.141.330	12	1.606.600	12	1.606.600	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor	48 Laporan	650.023.000	12	46.843.000	12	46.843.000	1	9.965.000	8,33	21,27	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah											
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	22 Unit	315.033.800	5	55.033.800	5	0	0	0	0	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	168.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	1	1.479.000	8,33	4,93	Kecamatan Siberut Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	20 Unit	93.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	0	0	0,00	0	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD Kecamatan Siberut Barat											
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat											
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	2000 Laporan	308.437.500	400	15.025.000	400	15.025.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalamPembangunan Tingkat Kecamatan											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	Pemberdayaan Masyarakat											
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berPartisipasi dalam forum Musrenbang	75 lembaga	150.008.000	15	10.385.000	15	10.385.000	15	247.000	100	2	Kecamatan Siberut Barat
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	5 Laporan	127.635.000	1	2.548.000	1	2.548.000	0	0	0,00	0	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD 1945 , Pelestariaan Bheneka Tunggal Ika serta mempeRTahankan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestariaan Bheneka Tunggal Ika	400 Orang	340.914.000	100	1.200.000	100	1.200.000	0	0	0	0,00	Kecamatan Siberut Barat
Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	126.183.000	1	2.548.000	1	2.548.000	0	0	0	0,00	Kecamatan Siberut Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Siberut Barat Pada tepat waktu											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa se-kecamatan Siberut Barat											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan aset desa	75 Dokumen	421.200.000	15	21.525.000	15	21.525.000	0	0	0	0,00	Kecamatan Siberut Barat
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kecamatan Siberut Barat Daya	72 Kali	193.000.000	4	11.505.000	72	31.190.000	9	1.540.000	12,50	4,94	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	4.900.820.880	154	1.078.920.277	350	1.409.927.216	150	711.341.186	42,86	50,45	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang	165.000.000	40	114.057.700	40	63.025.000	29	10.114.900	72,50	16,05	Kecamatan Siberut Barat Daya
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Paket	20.000.000	4	3.200.000	4	6.997.500	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan	16 Paket	200.000.000	16	27.053.900	16	28.619.600	9	5.195.200	56,25	18,15	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Laporan	42.362.000	16	2.208.540	16	2.300.800	2	343.000	12,50	14,91	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	460.000.000	16	51.666.200	16	74.067.000	9	21.741.500	56,25	29,35	Kecamatan Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	48 Rekening	48.000.000	12	12.000.000	12	18.000.000	3	2.753.500	25,00	15,30	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat											
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	3 Desa	180.000.000	3	3.530.000	3	9.230.000	0	790.000	0,00	8,56	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang BerPartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22 Lembaga	140.000.000	10	25.072.000	1	13.912.000	1	4.415.000	100,00	31,74	Kecamatan Siberut Barat Daya
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3 Desa	140.000.000	3	5.806.000	3	9.230.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat								0			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta Pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4 Kali	400.000.000		42.795.000	4	4.850.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	4 Laporan	100.000.000		6.033.000	4	9.160.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	3 Desa	240.000.000		25.585.000	3	10.950.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya
KECAMATAN SIBERUT SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	16 Kali	103.760.000			4	25.940.000	1	10.935.000	25,00	42,15	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang	8.620.653.284			23	2.178.828.568	23	1.141.647.419	100,00	52,40	Kecamatan Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200 Dokumen	133.600.000			12	33.400.000	2	15.722.000	16,67	47,07	Kecamatan Siberut Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Jenis	10.308.000			15	2.577.000	4	728.750	26,67	28,28	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik yang disediakan	28 Paket	159.494.000			17	39.873.500	5	17.288.000	29,41	43,36	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	24 Jenis	11.920.000			8	2.980.000	2	1.010.000	25,00	33,89	Kecamatan Siberut Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	72 Kali	184.400.000			12	46.100.000	3	23.188.000	25,00	50,30	Kecamatan Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening listrik dan Internet	48 kali	81.600.000			12	20.400.000	3	5.833.750	25,00	28,60	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan PEROrang AN dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan PERORang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	125.880.000			4	31.470.000	1	10.558.750	25,00	33,55	Kecamatan Siberut Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	11.040.000			2	2.760.000	2	1.460.000	100,00	52,90	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat											
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	400 Orang	50.640.000			100	12.660.000	0	1.350.000	0,00	10,66	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Kali	94.692.000			1	23.673.000	1	22.923.000	100,00	96,83	Kecamatan Siberut Selatan
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4 Kali	57.360.000			1	14.340.000		2.400.000	0,00	16,74	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	7 Kali	44.352.000			1	11.088.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	4 Dokumen	34.980.000			1	8.745.000	0	1.500.000	0,00	17,15	Kecamatan Siberut Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	74.360.000			1	18.590.000	0	6.445.000	0,00	34,67	Kecamatan Siberut Selatan
KECAMATAN SIPORA UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	45.000.000	4	47.693.000	12	19.752.000	5	9.357.000	41,67	47,37	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Utara	64 Orang	1.850.000.000	15	1.484.886.748	16	1.943.380.038	70	999.344.305	437,50	51,42	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	353 Dokumen	69.720.000	6	17.280.000	12	17.280.000	6	7.200.000	50,00	41,67	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	24 Paket	3.000.000	8	7.875.000	6	2.975.000	6	2.975.000	100,00	100,00	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Peralatan RT	Jumlah Peralatan RT yang tersedia	1 Paket	1.200.000	2	5.050.000	5	1.500.000	3	900.000	60,00	60,00	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	100 Jenis	19.668.600	278	36.146.300	25	17.458.000	26	17.458.000	104,00	100,00	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kantor yang Disediakan	1200 kotak	10.705.000	250	8.520.000	440	6.000.000	122	3.270.000	27,73	54,50	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah perabot kantor yang tersedia	32 Jenis	2.760.800	0	5.735.000	12	3.884.400	12	3.874.600	100,00	99,75	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Natura dan Pakan Natura yang tersedia	20 Jenis	2.705.000	3	6.348.000	10	4.157.000	7	2.469.000	70,00	59,39	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	32 Jenis	9.374.987	5	15.225.000	15	8.075.600	11	6.325.600	73,33	78,33	Kecamatan Sipora Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	244 laporan	55.000.000	26	44.190.000	25	43.429.000	12	29.273.200	48,00	67,40	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	48 Laporan	36.000.000	12	22.870.946	12	35.600.000	6	11.788.291	50,00	33,11	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	6.850.000	3	4.800.000	7	6.850.000	3	3.500.000	42,86	51,09	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PERОrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Transportasi yang dipelihara	4 Unit	45.000.000	4	40.000.000	2	31.270.000	2	22.900.000	100,00	73,23	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	7.310.000	8	5.850.000	5	4.020.000	5	4.020.000	100,00	100,00	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	25.000.000	1	6.249.000	1	6.864.000	1	6.864.000	100,00	100,00	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Nonperizinan yang diurus	414 Dokumen	25.000.000	41	10.695.000	85	13.498.800	50	13.498.000	58,82	99,99	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	48 lembaga	25.000.000	2	15.016.000	1	16.446.000	1	16.436.000	100,00	99,94	Kecamatan Sipora Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	48 laporan	25.000.000	12	10.942.800	12	19.881.200	6	9.715.200	50,00	48,87	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan											
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	30.000.000	6	30.735.000	6	12.795.000	6	12.795.000	100,00	100,00	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	72 Dokumen	30.000.000	18	27.360.000	18	17.832.000	12	17.832.000	66,67	100,00	Kecamatan Sipora Utara
KECAMATAN SIPORA SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Dokumen	148.140.000	12	125.310.000	12	16.800.000	0	3.300.000	0,00	19,64	Kecamatan Sipora Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Selatan	115 Orang	9.123.360.299	23	6.412.756.176	23	2.495.697.169	23	1.243.950.824	100,00	49,84	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	210 Orang	209.220.000	42	165.550.000	42	28.800.000	0	2.700.000	0,00	9,38	Kecamatan Sipora Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Paket	19.550.500	5	16.071.000	5	4.554.500	0	1.075.000	0,00	23,60	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	25.000.000	1	50.528.396	1	10.000.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	206.647.600	3	176.602.850	3	20.039.000	0	4.468.000	0,00	22,30	Kecamatan Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	130 Kali	290.752.000	26	225.662.044	26	41.364.000	0	21.286.800	0,00	51,46	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya pengadaan kendaraan Dinas											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	15 Unit	49.710.000	3	39.070.000	3	28.000.000	0	3.000.000	0,00	10,71	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	60 Bulan	102.000.000	12	70.000.000	12	30.000.000	0	6.000.000	0,00	20,00	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Laporan	113.162.000	1	92.771.700	1	15.006.000	0	3.300.000	0,00	21,99	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Dalam Forum Pembangunan											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	5 Laporan	91.636.400	1	44.456.400	1	14.004.000	0	4.104.000	0,00	29,31	Kecamatan Sipora Selatan
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan	104.999.900	1	83.877.900	1	15.000.000	0	1.222.000	0,00	8,15	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan masyarakat											
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Dokumen Keuangan Desa	5 Laporan	183.725.200	1	162.194.100	1	20.000.000	0	5.300.000	0,00	26,50	Kecamatan Sipora Selatan
KECAMATAN PAGAI UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Pagai Utara Utara	70 Bulan	8.902.464.705	0	0	14	1.637.197.044	8	858.283.878	57,14	52,42	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	70 bulan	2.265.284.000	0	0	12	33.900.000	6	18.598.000	50,00	54,86	Kecamatan Pagai Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	48 Jenis	349.548.550	0	0	12	55.320.600	6	25.720.700	50,00	46,49	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	30 Jenis	48.679.200	0	0	1	648.000	1	648.000	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	850 hari	363.660.000	0	0	12	54.111.000	7	24.309.300	58,33	44,92	Kecamatan Pagai Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	60 Bulan	360.000.000	0	0	24	12.000.000	6	3.000.000	25,00	25,00	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	5 Kali	155.000.000	0	0	1	27.488.400	2	11.498.400	200,00	41,83	Kecamatan Pagai Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	36 Desa	225.000.000	0	0	3	13.500.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	36 Desa	225.000.000	0	0	9	14.400.000	1	1.800.000	11,11	12,50	Kecamatan Pagai Utara
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fungsi Kontrol dan fungsi Evaluasi serta Pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	36 Desa	70.800.000	0	0	9	17.700.000	2	6.000.000	22,22	33,90	Kecamatan Pagai Utara
KECAMATAN PAGAI SELATAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 Laporan	350.352.779	48	52.670.000	12	32.845.000	6	21.785.000	50,00	66,33	Kecamatan Pagai Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	8.551.238.608	13	1.295.328.740	17	1.660.309.595	17	855.381.553	100,00	51,52	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96 Dokumen	552.732.600	50	92.531.000	12	59.908.000	6	39.061.000	50,00	65,20	Kecamatan Pagai Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.410.000	1	985.000	1	685.000	1	0	100,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik yang disediakan	20 Paket	115.362.472	4	21.023.000	4	19.115.000	2	4.451.000	50,00	23,29	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	6.280.000	1	1.580.000	1	940.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	468.870.000	36	88.870.000	12	71.114.000	6	36.110.100	50,00	50,78	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening listrik dan Internet	60 Laporan	66.520.000	8	1.367.401	12	10.800.000	6	2.941.000	50,00	27,23	Kecamatan Pagai Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	31.020.000	4	4.904.000	5	5.170.000	2	1.900.000	40,00	36,75	Kecamatan Pagai Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	64.187.500	7	8.965.000	8	6.255.000	2	715.000	25,00	11,43	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pengendalian Layanan Masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat											
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28 Orang	85.680.458	12	13.700.000	4	8.410.000	1	0	25,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang BerPartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42 Lembaga	183.199.796	7	11.088.000	7	7.450.000	7	6.126.000	100,00	82,23	Kecamatan Pagai Selatan
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	10 Laporan	161.088.000	0	0	2	2.400.000		0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Umum di Kecamatan											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
	daerah											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	500 Orang	370.282.000	100	3.282.000	100	4.800.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28 Dokumen	172.418.090	9	1.440.000	4	8.750.000	1	1.200.000	25,00	13,71	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	80 Dokumen	985.392.270	16	50.329.000	16	35.725.000	8	13.980.000	50,00	39,13	Kecamatan Pagai Selatan
KECAMATAN SIKAKAP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah											
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64 Laporan	290.000.000		0	16	5.250.000	0	3.000.000	0,00	57,14	Kecamatan Sikakap
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	104 Orang	11.366.707.040	0	0	25	2.555.771.519	3	1.350.496.518	12,00	52,84	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	717.845.410	0	0	12	90.660.000	3	55.729.000	25,00	61,47	Kecamatan Sikakap
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	38 Paket	36.737.060	0	0	3	1.942.500	0	1.258.500	0,00	64,79	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	258 Paket	454.066.100	0	0	3	63.829.000	3	32.327.200	100,00	50,65	Kecamatan Sikakap
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	405.272.375	0	0	12	56.831.900	12	37.897.100	100,00	66,68	Kecamatan Sikakap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	140.289.300	0	0	12	15.000.000	3	8.290.048	25,00	55,27	Kecamatan Sikakap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Peralatan	34.736.800	0	0	2	3.850.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	48 Laporan	192.059.550	0	0	12	5.240.000	0	5.100.000	0,00	97,33	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan											
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang BerPartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	12 Lembaga	191.237.225	0	0	3	25.726.500	3	23.926.500	100,00	93,00	Kecamatan Sikakap
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	110.384.655	0	0	3	3.844.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	386.547.075	0	0	100	80.284.000	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Sikakap
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	116.386.285	0	0	6	10.330.000	3	4.198.000	50,00	40,64	Kecamatan Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	218.768.557	0	0	9	15.780.000	3	6.450.000	33,33	40,87	Kecamatan Sikakap
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	75 Pegawai	12.177.746.684	12	933.773.422	25	1.890.611.307	48	942.290.427	192,00	49,84	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	58 Jenis	45.725.000	5	3.725.000	8	3.100.000	0	0	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	355 Jenis	729.563.780	70	50.897.520	47	32.045.400	25	15.073.000	53,19	47,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	55 Jenis	188.553.060	11	7.652.400	4	8.750.000	2	1.250.000	50,00	14,29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48 Kali	937.004.000	6	34.451.006	6	28.592.000	5	27.383.241	83,33	95,77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya Rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	120 Rekening	101.400.000	12	20.327.394	24	24.000.000	5	11.848.164	20,83	49,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PEROrang AN Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya kendaraan dinas	6 Unit	85.000.000	1	17.510.000	1	8.125.000	1	3.080.000	100,00	37,91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	117 Unit	640.000.000	6	9.620.000	10	6.700.000	0	0	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOOGI PANCASIA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Peaksanaan Bidang ideoogiPancasia dan Karakter Kebangsaan												
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Parsentase Penguatan Idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	400 Orang	2.000.000.000	40	2.000.000	20	207.000.000	20	56.186.834	100,00	27,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pembentukan Paskibraka	Terlaksananya perekrutan Paskibra	504 Orang	7.294.267.213	54	1.432.426.676	30	700.000.000	30	81.461.975	100,00	11,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN Partai POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA serta BUDAYA POLITIK												
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan ,Perwakilan dan Partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah ,serta Pemantauan Situasi Politik												
Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	998 Kali	3.680.000.000	8	628.454.771	8	690.000.000	7	588.973.000	87,50	85,36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Organisasi KEMASYARAKATAN												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Peaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evauasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya pengawasan ormas	164 kali	1.700.000.000	5	46.115.200	1	27.184.000	1	9.440.182	100,00	34,73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA												
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya												
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	56 Orang	850.000.000	6	65.017.100	2	26.986.106	0	0	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	16 kali	1.000.000.000	5	81.929.600	2	33.455.400	1	4.290.000	50,00	12,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	16 kali	740.000.000	5	36.580.591	1	29.386.000	0	0	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2025 s/d 2029		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi Triwulan II Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3		4		5		6		7=6/5x100		
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Peaksanaan Pemantapan Kewajiban Nasiona dan Penganan Konfik Sosial												
Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	20 kali	550.000.000	2	58.179.420	2	33.186.000	1	15.171.000	50,00	45,72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah koordinasi bidang kebijakan dini daerah	10 kecamatan	650.000.000	2	71.347.224	2	38.466.200	1	12.795.600	50,00	33,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terpantauanaya tenaga kerja asing	20 Kali	1.000.000.000	2	27.194.547	1	38.580.400	0	1.880.000	0,00	4,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terpantauanaya tenaga kerja asing	24 kali	1.026.982.000	2	156.923.776	1	460.000.000	0	21.108.742	0,00	4,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Rata-Rata Capaia Kinerja (%)	40,56	34,64	
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Masih berlangsungnya proses pengisian struktur organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Triwulan I, sehingga berdampak terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara umum.
2. Terjadinya pergeseran anggaran ke-1 sampai dengan 4 yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodir kebutuhan mendesak dan transfer ke daerah untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi, Bantuan Presiden dan Bantuan Khusus Keuangan.
3. Belum finalnya proses pengadaan barang dan jasa untuk program strategis terutama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana setelah transfer keuangan daerah disalurkan ke kas Daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai pada Triwulan II Tahun 2026 didapat bahwa capaian kinerja pelaksanaan RKPD sebesar 40,56 persen dengan kategori capaian sangat rendah. Berbagai faktor penghambat belum maksimalnya pencapaian kinerja program prioritas antara lain:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang. Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

a. cakupan masalah yang luas.
b. permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
c. memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Permasalahan pembangunan daerah akan dirinci berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah, antara lain:

a. Masih rendahnya kualitas pembangunan dan daya saing manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kuantitas dan kualitas pendidikan masih sangat rendah	Akses layanan pendidikan yang terbatas	Letak geografis kepulauan dan jarak perkampungan (rumah) yang sangat jauh dengan fasilitas pendidikan
			Sarana dan prasarana yang belum memadai (kondisi fisik bangunan, mobiler yang beberapa satuan pendidikan belum tersedia, alat peraga pendidikan), MCK.
			Konektivitas ke layanan pendidikan yang tidak ada (harus melalui jalur laut)
			Asrama siswa tidak tersedia
			Pendidikan masih mahal buat masyarakat miskin (beli perlengkapan sekolah)
		Mutu pendidikan masih rendah	Tenaga pendidik yang terbatas, tidak tersebar merata (menumpuk di pusat kecamatan)
			Guru masih berkualifikasi dibawah S1
			Masih banyak guru yang belum memiliki sertifikat pendidik
			Tidak adanya insentif bagi tenaga pendidikan di daerah tidak diminati (terpencil).
			Sarana pendukung layanan pendidikan masih terbatas seperti internet, komputer, perlengkapan laboratorium,
2	Kuantitas dan kualitas kesehatan masih sangat rendah	Akses layanan kesehatan yang terbatas	Layanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat khususnya di *remote* area dikarenakan konektivitas yang hanya dilalui jalur laut seperti pada Desa Sinaka dan Desa Sagulubbeg.
			Biaya pendukung kesehatan yang masih tinggi (jalur laut)
			Sarana dan prasarana kesehatan kondisi rusak berat.
			Masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat (masih berobat pada sikerei)
		Kualitas Kesehatan yang rendah	Masih kekurangan dokter umum dan dokter spesialis
			Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
			Tenaga kesehatan yang tidak tersebar merata
			Alat kesehatan yang terbatas, bahkan untuk layanan kesehatan di

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			puskesmas pembantu tidak tersedia
			Masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat masyarakat
3	Masih tingginya persentase masyarakat miskin	Program Perlindungan sosial yang terbatas dan tidak optimal	Belum maksimalnya jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin
			Belum adanya jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin (perlengkapan sekolah gratis, transportasi sekolah gratis, transportasi umum gratis), masih banyak masyarakat miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan.
			Pendataan masyarakat miskin yang belum tuntas.
		Peningkatan kapasitas masyarakat miskin belum optimal	Pembelian bantuan yang tidak tepat sasaran
			Pendampingan yang tidak dilakukan
			Pemberdayaan yang tidak berkelanjutan
			Pelatihan yang terbatas dan tidak kontiniu

b. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Pendapatan dan produktivitas masyarakat	Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai	Masih bertumpu pada tanaman keras dan tua
			Rendahnya diversifikasi pangan
			Sumber daya ekonomi (modal) petani dan nelayan yang terbatas.
			Belum rendahnya perkembangan produktivitas pangan lokal
		Hasil produksi pertanian yang masih rendah	Minimnya pendampingan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
			Pengetahuan petani dan nelayan yang masih rendah
			Perlengkapan pertanian dan perikanan masih tradisional dan skala kecil
			Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses pengolahan pertanian dan perkebunan.
		Keterhubungan dengan pasar yang belum ada	Hasil panen yang tidak bisa dijual sehingga hasil pertanian/perikanan terbuang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Sarana dan Prasarana yang belum memadai	Jalan usaha tani yang belum tersedia
			Irigasi yang terbatas
			Alat pertanian yang belum ada
			Sarana pendukung pertanian berbiaya mahal
		Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat	Masyarakat masih terbiasa dengan tanaman keras seperi cengkih, kelapa, pala yang perawatannya minim.
			Sektor pertanian dan perkebunan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
			Mulai bergesernya pola mata pencarian masyarakat khususnya kaum milenial ke atas, tidak tertarik di sektor pertanian dan perikanan.
2	Belum adanya Investasi, sektor ekonomi dan Hilirisasi masih skala rumah tangga	Infrastruktur Investasi masih terbatas dan tidak memadai	Konektivitas daerah masih rendah baik darat, laut dan udara
			Proses perizinan masih cukup sulit
			Layanan dasar (air bersih, listrik) belum memadai
		Rantai pasok komoditas masih rendah	Produksi pertanian, perkebunan dan perikanan tidak stabil dan belum memenuhi skala ekonomi
			Moda transportasi untuk logistik masih terbatas dan terkendala
		Belum memenuhi kelayakan bisnis	Biaya produksi yang cukup besar
			Sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai adalah kawasan hutan (82 persen)
			Antusias masyarakat akan investasi masih rendah.
		Akses pasar yang belum ada	Komoditas pertanian hanya untuk kebutuhan lokal, ekspansi usaha belum ada
			Rendahnya informasi pasar komoditas oleh masyarakat
			Belum adanya *offtaker* yang dapat menampung hasil industri pengolahan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
			Belum adanya perlindungan usaha pertanian masyarakat.
3	Masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Kemampuan dan keahlian masyarakat yang terbatas	Minimnya pelatihan *skill* kewirausahaan bagi masyarakat
			Pelatihan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			konsisten
			Belum terhubungnya konsep pelatihan dengan dunia usaha
		Akses finansial yang masih rendah	Masih rendahnya akses keuangan bagi masyarakat untuk berusaha
			Tingginya suku bunga yang diberikan dan pengurusan yang rumit
		Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja	Terbatasnya pelatihan keterampilan/*skill* bagi perempuan
			Edukasi pemberdayaan perempuan masih rendah dan tidak berkelanjutan
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia kerja/bisnis masih rendah	Pelatihan *e-commerce* masih terbatas
			Pemahaman dan pemanfaatan digitalisasi pemasaran masih rendah
		Akses pasar kerja masih rendah	Pelatihan yang dilakukan belum sesuai dengan pasar kerja yang tersedia
			Belum adanya kerja sama dengan dunia usaha
		Masih rendahnya partisipasi kaum disabilitas dalam dunia kerja	Pelatihan dan peningkatan keahlian belum menyasar kaum disabilitas
			Belum adanya regulasi penguatan kaum disabilitas
			Belum ada kuota bagi kaum disabilitas untuk mengakses dunia kerja

c. Masih rendahnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Konektivitas wilayah masih rendah	Infrastruktur yang tersedia belum merata dan belum memadai	Biaya kemahalan konstruksi yang tinggi di Kepulauan Mentawai
			Wilayah pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang terpencar dan saling berjauhan
			Material konstruksi yang didatangkan dari luar Mentawai
			Sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai kawasan hutan (82 persen)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemeliharaan infrastruktur yang belum optimal
		Keterhubungan antar wilayah masih terbatas	Jalan yang sepenuhnya belum terhubung antar kecamatan
			Moda transportasi yang belum melayani seluruh wilayah (desa)
2	Masih rendahnya pemanfaatan air baku untuk kehidupan produktif	Infrastruktur air baku belum memadai	Tingginya biaya konstruksi air baku
			Wilayah air baku berada pada kawasan
			Belum terintegrasinya pemanfaatan air baku dengan sektor lainnya (pertanian, perikanan, layanan dasar)
			Masih rendahnya kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat

d. Masih rendahnya kawasan sebagai basis kemajuan wilayah yang didukung PSU berkualitas dan berwawasan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Desa dengan kategori Desa Mandiri	Belum optimalnya pengentasan kawasan kumuh	Masyarakat mendiami kawasan kumuh sudah lama (beranak cucu)
			Adanya pembiaran penambahan rumah dikawasan kumuh
			Belum terdapat strategi teknis dan upaya relokasi atau penanganan kawasaan kumuh yang terintegrasi
			Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat
			Belum tersedianya permukiman baru
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan masih rendah	Masih rendahnya konsistensi penganggaran untuk PSU
			Masih rendahnya kuantitas dan kualitas PSU yang tersedia
			Integrasi layanan dasar (air bersih, sanitasi) di kawasan permukiman masih rendah
		Rendahnya pemberdayaan masyarakat khususnya kaum milenial (pemuda)	Masih terbatasnya ruang kreasi pemuda di setiap desa
			Masih rendahnya peran BUMDes dalam mengelola potensi desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Terbatasnya akses pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat khususnya para pemuda dan perempuan

e. Masih rendahnya harmonisasi kehidupan masyarakat berbasis sosial budaya dan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat	Rendahnya kesadaran pentingnya menjaga identitas dan nilai Budaya Mentawai	Rendahnya rasa kebanggaan beberapa orang/masyarakat menggunakan bahasa dan atribut Mentawai
			Masih terbatasnya pengajaran muatan lokal disatuan pendidikan
			Masih rendahnya penampilan sanggar kesenian atau festival budaya Mentawai di setiap desa
			Akulturasi budaya yang didominasi oleh budaya di luar Mentawai
		Rendahnya pemberdayaan masyarakat adat atau UMA	Belum adanya alokasi anggaran dalam pemberdayaan masyarakat adat atau UMA
			Masih rendahnya peningkatan kapasitas masyarakat adat/UMA untuk mengelola hasil hutan atau kehidupan ekonominya
		Masih rendahnya dukungan layanan publik dan dasar di kawasan UMA dan masyarakat adat	Jarak MHA dan UMA yang berjauhan sehingga memerlukan anggaran yang besar
			Letak geografis yang terpisah laut dan sungai sehingga memerlukan biaya besar dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat adat dan UMA
2	Masih rendahnya pembangunan kehidupan keluarga dan masyarakat yang inklusif dan berwawasan lingkungan	Masih rendahnya perlindungan terhadap anak dan perlindungan perempuan serta kesetaraan gender	Melemahnya peran keluarga dan komunitas adat sebagai wahana pewarisan nilai budaya
			Kurangnya penerapan prinsip PUG dalam pembangunan daerah
			Masih rendahnya pemahaman bagi masyarakat dan keluarga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tentang hak-hak anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan
			Pemahaman bahwa perempuan mengurus dapur masih tinggi
			Edukasi keluarga masih rendah
			Lemahnya literasi digital dan media sosial bagi keluarga

f. Masih rendahnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendah pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Masih rendahnya pemanfataan izin lingkungan dalam pembangunan	Masih terbatasnya informasi tahapan dan proses pengurusan izin lingkungan
			Masih rendahnya kepatuhan dalam pengurusan izin lingkungan
			Belum adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak mengurus izin lingkungan
			Belum tersedianya sumber daya manusia dalam menguji kualitas air, udara, tanah dan lahan
			Masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan pengujian lingkungan
			Peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan belum optimal
2	Masih tingginya risiko terhadap dampak bencana	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan risiko bencana	Belum tersedianya pusat informasi kebencanan di kawasan rawan bencana
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebencanaan (masyarakat daerah pesisir, bangunan di tanah yang lereng, rumah di kawasan sungai)
			Masih terbatasnya sosialisasi dan penggunaan alat peraga kebencanaan kepada masyarakat
			Masih terbatasnya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dan kelembagaan dalam PRB
		Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal	Masih tingginya eksploitasi kawasan rawan bencana (pengambilan pasir, terumbu karang, bakau)
			Masih rendahnya kolaborasi antar pihak dalam menjaga dan melestarikan kawasan rawan bencana
			Masih adanya penerbitan ijin di kawasan rawan bencana
			Masih lemahnya tindakan penertiban bangunan atau aktivitas di kawasan rawan bencana
		Masih miniminya infrastruktur kebencanaan	Struktur topografi Mentawai yang cenderung landai sehingga memerlukan infrastruktur shelter dalam jumlah yang banyak dan berbiaya mahal
			Masih banyaknya jalur evakuasi yang tidak dibangun
			Masih banyaknya jalur evakuasi yang tidak dirawat
			Kepulauan Mentawai yang sangat luas dan garis pantai yang panjang sehingga membutuhkan biaya mitigasi kebencanaan yang besar.

g. Masih rendahnya pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Pengelolaan destinasi wisata daerah belum maksimal	Belum tersusunnya Rencana Induk Pariwisata Daerah
			Belum tersedianya studi kelayakan dan *masterplan* destinasi wisata strategis dan prioritas
			Masih rendahnya konektivitas menuju destinasi wisata
			Belum tersedianya amenitas yang memadai
			Fasilitas penunjang, seperti penginapan, sanitasi, dan area publik, masih banyak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			belum memadai
			Belum tersedianya pengelolaan destinasi pariwisata yang handal
			Belum adanya pengembangan desa wisata yang terstruktur dan yang terkelola dengan baik
		Mesih rendahnya kontribusi masyarakat dan peran pelaku pariwisata	Masih rendahnya sikap ramah tamah (*hospitality*) terhadap wisatawan
			Masih rendahnya pelatihan pelaku wisata khususnya pemberian sertifikasi bagi pelaku wisata
			Belum adanya standardisasi dalam penyajian makanan, minuman dan akomodasi di kawasan wisata
2	Masih rendahnya kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi masyarakat	Produk ekonomi kreatif belum mampu bersaing	Masih terbatasnya pelatihan peningkatan nilai produk ekonomi kreatif
			Sertifikasi produk ekonomi kreatif masih sangat rendah
			Masih rendahnya pendampingan pelaku usaha ekonomi kreatif
			Terbatasnya akses para pelaku usaha ekonmoi kreatif dalam mengakses perbankan
			Masih tingginya biaya produksi bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif
			Masih terbatasnya wadah pematangan bisnis (inkubator bisnis)bagi pemula di usaha ekonomi kreatif
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan Inovasi dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif	Terbatasnya kemampuan para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan usaha
			Masih rendahnya kolaborasi antar pelaku usaha ekonomi kreatif
			Masih minimnya fasilitasi promosi menggunakan media digital
			Masih rendahnya ruang kreasi dan inovasi produk ekonomi kreatif

h. Masih rendahnya penerapan kehidupan masyarakat yang beradab, tenteram dan imparsial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Masih tingginya pelanggaran hukum dan lemahnya penegakan perda	Masih terbatasnya informasi hukum dan peraturan yang disampaikan kepada masyarakat
			Belum adanya penegakan yang terukur bagi masyarkaat yang telah melanggar
			Adanya pembiaran oleh penegak hukum dan penegak perda
			Rendahnya literasi hukum dan peraturan bagi masyarakat
		Masih lemahnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tidak bekerjanya sistem keamanan lingkungan
			Masih lemahnya peran keluarga dalam membina anggota keluarga sehingga masih ada diluar di jam istirahat malam
			Masih rendahnya sosialisasi dan advokasi hukum bagi anak sekolah, remaja dan masyarakat
			Minimnya forum dialog antaragama dan antarkelompok sosial.

i. Masih rendahnya pelaksanaan birokrasi yang prima

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan	Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan digitalisasi
			Masih terbatasnya sumber daya manusia dan lembaga di Kepulauan Mentawai dalam menyediakan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan
			Rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah
			Belum adanya peta jalan pengembangan digitalisasi pemerintahan
			Masih pada berada di zona nyaman
		Masih rendahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam penjenjangan karir

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih tingginya ketimpangan kualitas ASN
			Masih rendahnya kinerja ASN
			Belum optimalnya penerapan transformasi kelembagaan berbasis kinerja
2	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Masih rendahnya penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik pemerintahan	SDM yang terbatas
			Belum terbangun ekosistem inovasi pada perangkat daerah
			Masih terbiasa dengan budaya birokrasi berbelit-belit
			Belum terlaksananya akuntabilitas kinerja pelayanan publik
			Masih rendahnya integrasi data digitalisasi antar perangkat daerah
3	Masih rendahnya pendapatan daerah	Manajemen pengelolaan pendapatan daerah belum terpadu dan optimal	Belum diterapkannya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
			Masih rendahnya sosialisasi sumber-sumber pendapatan daerah bagi pelaku usaha, wajib pajak, dan masyarakat
			Masih rendahnya kolaborasi antar sekttor dan antar instansi dalam penegakan
			Belum terdapatnya lembaga pengelolaan pendapatan daerah
			Belum tersedianya SDM pengelolaan pendapatan daerah yang bersertifikat
			Belum optimalnya penerapan insentif dan disinsentif pajak

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Keterlambatan pelaksanaan rekon data sekolah baik SD dan SMP serta letak dan jarak sekolah yang berjauhan dan sebagian besar tidak dapat diakses internet.

2) Masih perlunya pendataan ulang pemanfaatan sisa dana alokasi umum peruntukan bidang Pendidikan yang digunakan di tahun berjalan.
3) Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian kinerja internal perangkat daerah dalam proses pelaksanaan program urusan pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih perlunya pendataan ulang pemanfaatan sisa dana alokasi umum peruntukan bidang Pendidikan yang digunakan di tahun berjalan.
2) Belum optimalnya sosialisasi perilaku hidup sehat kepada masyarakat.
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana layanan kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Penyusunan kelengkapan administrasi/ dokumen pengadaan barang dan jasa yang cukup banyak sehingga memerlukan sumber daya dan waktu yang optimal.
2) Lokasi Pembangunan jalan berada pada Kawasan hutan sehingga perlu menyurati pihak terkait untuk pengelolaan Kawasan hutan.
3) Ruas penanganan jalan kabupaten yang sangat panjang sedangkan alokasi pendanaan relatif terbatas sehingga belum maksimalnya pencapaian kinerja penyelenggaraan jalan.
4) Penyesuaian alokasi anggaran untuk satu jenis pekerjaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pergeseran untuk pemakaian TKD (transfer keuangan daerah) dalam penanganan daerah bencana.
5) Penyaluran dana Pembangunan untuk daerah terdampak bencana dilakukan bertahap dan tidak pada awal tahun berjalan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait rumah layak huni sehingga perlu sosialisasi untuk perbaikan rumah layak huni.
2) Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola sehingga membutuhkan waktu sosialisasi dan proses kerjasama swakelola dengan masyarakat (administrasi).
3) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Pendanaan untuk penegakan ketertiban dan ketentraman umum bersifat insidensial atau sesuai dengan rencana penegakan Perda dan ketertiban umum
3) Penanganan bencana bersifat insidensial artinya ketika ada bencana lalu program penanganannya berjalan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih maksimalnya pengelolaan dan updating data DTKS.
2) Masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial sebelum penetapan penerima manfaat *by name by address*.
3) Belum terpenuhinya data masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran sehingga perlu rekonsilisasi data, verifikasi dan pemutakhiran.

2.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlu dilakukan pendataan dan verifikasi calon tenaga kerja yang akan dilatih.

2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/*skill* tenaga kerja.
4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan sehingga belum terjalin kerja sama dengan badan usaha/lembaga penyedia jasa tenaga kerja.
5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan *enterprenuer* ke dunia usaha, permodalan dan pasar.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat sehingga masih enggan untuk melapor terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlu percepatan penyusunan administrasi pengadaan barang dan jasa serta kelengkapan dokumen untuk belanja hibah kepada kelompok masyarakat.
2) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasaraan yang belum memadai dan

peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.

3) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
4) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah.
2) Jangkauan wilayah yang cukup sulit sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang optimal dalam menjangkau perekaman dan penerbitan administrasi kependudukan masyarakat.
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
2) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa.
3) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerja sama desa.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait informasi kependudukan.
2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya badan usaha yang melakukan operasional pelayaran antar pulau di wilayah Kepulauan Mentawai sehingga belum optimalnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau).
2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayaran yang tersedia.
3) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya *grand design* pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif.
2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
2) Sulitnya mengurus kerja sama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya SDM keolahragaan.
2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
3) Belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan.
4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah.
2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
3) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
4) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.

2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya indeks kegemaran membaca masyarakat.
2) Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling

q. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.

3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).
4) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayanan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
3) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani).
4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
3) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
4) Minimnya SDM penera alat UTTP.

5) Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.
6) Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet).
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan.

2.3.5 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Regulasi pedoman penyusunan perencanaan terbit setelah RKPD mau ditetapkan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan membutuhkan usaha lagi untuk menyelaraskan.
2) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;
3) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karier ASN.
2) *Assesment* kinerja belum berbasis sistem informasi.
3) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
4) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
5) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
6) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya.
7) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
8) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti yang berkualitas.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Masih rendahnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.
4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan target capaian kinerja program prioritas maka beberapa langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi belanja dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2026.
2. Realokasi dan refokusing program/kegiatan dan sub kegiatan dalam yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja program prioritas melalui penambahan, pergeseran ataupun dengan menghapus belanja yang sudah atau belum memberikan dampak pada pencapaian target kinerja.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja secara berkala di masing-masing perangkat daerah melalui rapat dan asistensi permasalahan pembangunan.
4. Fokus pada program yang mengarah kepada Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *quick win* serta visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjaga keselarasan dengan pemerintah pusat.

2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2024, seluruh jenis pelayanan dasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini			80.34
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	2.226	1.845	56,42

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	44.5	23	51.69
	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	20.4	18.08	88.63
2	Pendidikan Dasar			97.37
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	11.417	15.718	137.67
	SD (2026)			
	1. Kemampuan literasi	51.3	41.13	80.18
	2. Kemampuan numerasi	50.6	38.82	76.72
	3. Indeks iklim keamanan	70	67.1	95.86
	4. Indeks iklim kebhinekaan	69.5	60.92	87.65
	5. Indeks iklim inklusivitas	59.4	54.43	91.63
	SMP (2026)			87.34
	1. Kemampuan literasi	55.2	47.1	85.33
	2. Kemampuan numerasi	53.8	39.2	72.86
	3. Indeks iklim keamanan	65.3	62.32	95.44
	4. Indeks iklim kebhinekaan	69	62.31	90.30
	5. Indeks iklim inklusivitas	57.9	53.71	92.76
3	Pendidikan Kesetaraan			35.12
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	4700	1556	33.11
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	33.9	14.63	43.16
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA		70.94%

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Pendidikan tahun 2025 antara lain:

a. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah yaitu 70,94 persen.
b. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang sekolah dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.
c. Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi).
d. Belum maksimalnya kinerja Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan begitu juga dengan pembinaan kepada OPD pengampu SPM.

Tabel 2.6
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			45,89 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	1.682	718	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1682	718	
	2. Tablet tambah darah/MMS (*Multiple Micronutrients Supplementation*) (180 tablet x jumlah ibu hamil)	302.760	129.240	
	3. Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	1.682	718	
	4. Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	1.682	464	
	5. Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	1.682	718	
	6. Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	253	311	
	7. Alat deteksi risiko Ibu Hamil : *Skrining triple* eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	1.682	597	
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	1.682	718	
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1.682	147	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.682	718	
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	113	50	
	12. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi	24	20	
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	208	208	
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	248	248	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	25	25	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	22	22	
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	687	294	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			57,53 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	1.351	717	
	1. Formulir partograf	1.351	717	
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	1.351	717	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1.682	745	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.682	745	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	24	20	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	208	208	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	248	248	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	25	25	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	22	22	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			55,25 %

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	1427	743	
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (*prefilled syringe*)	1427	448	
	2. Vitamin K1 Injeksi	1.427	731	
	3. Salep/tetes mata antibiotik	1.427	731	
	4. Formulir bayi baru lahir	1.427	731	
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	4.281	2162	
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1.427	743	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.427	743	
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	24	20	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	208	208	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	248	248	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	25	25	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	11	11	
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	22	22	
	14. Kader Kesehatan	1.309	374	
4	Pelayanan Kesehatan Balita			41,71 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	8182	3026	
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	8182	3026	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	8182	3026	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8182	3026	
	4. Vitamin A Biru	723	663	
	5. Vitamin A Merah	5814	6088	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	1947	659	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	1947	726	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	1947	448	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	1947	713	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	1947	579	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	1963	384	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	1963	365	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	14600	9200	
	14. Peralatan Anafilaktik	285	285	
	15. Formula terapi gizi buruk	35	35	
	16. Tenaga medis : Dokter	22	18	
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	208	208	
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	248	248	
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	22	22	
	20. Guru PAUD	323	323	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	21. Kader kesehatan	1.309	347	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			93,76 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	15.922	15.922	
	1.Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	15.922	15.922	
	2.Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	15.922	15.922	
	3.Kuesioner skrining kesehatan	15.922	15.922	
	4.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	15.922	15.922	
	5.Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	171	171	
	6.Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	460.304	239.878	
	7.Alat pemeriksaan Hb	30	16	
	8.Strip Hb sasaran remaja putri kelas	460.304	1.375	
	9.Media promosi kesehatan	171	15	
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	5887	0	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	34	8	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	208	208	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	248	248	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	22	22	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	25	25	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	11	11	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	0	0	
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	1.309	1.309	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			26.66 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	624.920	15.447	
	1.Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	15	15	
	2.Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	15	15	
	3.Alat : Tensimeter	15	15	
	4.Alat : Glukometer	15	15	
	5.Alat : Alat pemeriksa Hb	15	15	
	6.Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	15	15	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	7.Alat : KIT IVA Tes	15	15	
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	15	15	
	9.Kit Opthalmologi komunitas	15	15	
	10. Kuesioner PUMA	15	15	
	11. Alat Pelayanan KB	15	45	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	15	15	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	15	15	
	c. Vasektomi set	15	15	
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	15	15	
	13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	15	15	
	14. Tenaga medis : Dokter	15	15	
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	15	15	
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	15	15	
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	15	15	
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	15	15	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	15	15	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			74,08 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	10.744	7.263	
	1.Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	15	15	
	2.Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	15	15	
	3.Alat pemeriksaan kolesterol	15	15	
	4.Bahan medis Habis Pakai: *strip* uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	15	15	
	5.Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / *Activity Daily Living* (ADL Barthel)	15	15	
	6.Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	15	15	
	7.Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	15	15	
	8.Tenaga medis : Dokter	15	15	
	9.Tenaga kesehatan : Bidan	15	15	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	15	15	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	15	15	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	15	15	
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	15	15	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			62,91 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	6.433	3.357	
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	15	15	
	2. Obat Hipertensi	15	15	
	3. Tensimeter	15	15	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	15	15	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	15	15	
	6. Tenaga medis : Dokter	15	15	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	15	15	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	15	15	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	15	15	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	15	15	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	15	15	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	15	15	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			80,53 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	300	227	
	1. Obat Diabetes Melitus	15	15	
	2. Fotometer atau Glukometer	15	15	
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	15	15	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	15	15	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	15	15	
	6. Tenaga medis : Dokter	15	15	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	15	15	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	15	15	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	15	15	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	15	15	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	15	15	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	15	15	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			97,24 %

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	58	56	
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	15	15	
	2. Penyediaan Psikofarmaka	15	15	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	15	15	
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	15	15	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	15	15	
	6. Tenaga medis : Dokter	15	15	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	15	15	
	8. Tenaga profesional lainnya	15	15	
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	15	15	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			63,26 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	2.560	1.427	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	16	16	
	11. Reagen Zn TB	1.300	1.300	
	12. Masker bedah dan Masker N95	1.300	1.300	
	13. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2.000	2.000	
	14. Katrid tes cepat molekuler	651	651	
	15. Formulir pencatatan dan pelaporan	16	16	
	16. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	50	50	
	17. Tuberkulin	42	42	
	18. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	171	171	
	19. Tenaga kesehatan : Perawat	26	26	
	20. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	24	24	
	21. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	19	19	
	22. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	6	6	
	23. Tenaga kesehatan : Radiografer	1.425	1.425	
	24. Kader Kesehatan	0	0	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human*			84.43 %

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Immunodeficiency Virus)			
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	740	596	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	740	740	
	2. Tes cepat HIV/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) pertama	740	740	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	740	740	
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	740	740	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	42	42	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	171	171	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	171	171	
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	19	19	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat			
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan			
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MUDA		65.27 %

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2025 yakni :

a. Masih banyak remaja usia produktif belum merasa perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan remaja sehingga partisipasi kunjungan ke layanan kesehatan masih rendah.
b. Aksesibilitas kunjungan layanan kesehatan hingga ke dusun yang masih terbatas dan memerlukan biaya yang mahal menjadi kendala melakukan layanan kesehatan luar gedung untuk pelayanan kesehatan khususnya untuk penduduk usia lanjut.
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya khususnya yang terindikasi TBC ke layanan kesehatan. Pada umumnya masyarakat malu dan merasa menjadi perhatian masyarakat jika didiagnosa mengidap penyakit TBC.

Tabel 2.7
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			83,44%
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	22.857	22.857	
	Jaringan Perpipaan : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	1.200	1.200	
	Jaringan Perpipaan : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	1.100	1.100	
	Bukan Jaringan Perpipaan : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	14.881	14.881	
	Bukan Jaringan Perpipaan : Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	13.000	13.000	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			94,83%
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	22.856	22.000	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T): Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	11.120	0	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua: 1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah	11.231	0	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota.			
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	11871	14.120	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Madya		89.14 %

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2025 yakni :

a. Belum maksimalnya kinerja pengelolaan air minum pada SPAM yang tersedia.
b. Jaringan SPAM yang tersedia sudah banyak yang rusak (bocor) sehingga perlu pemeliharaan atau pembangunan dengan biaya yang relatif mahal.
c. Pengelolaan BPSPAM/KPSPAM belum maksimal sehingga jaringan air bersih skema Pamsimas belum dapat dinikmati oleh masyarakat.
d. Sebaran rumah masyarakat yang membutuhkan sanitasi terpencar sehingga membutuhkan operasional yang besar dalam pembangunan sanitasi dalam kawasan permukiman.
e. Spesifikasi teknis pembangunan sanitasi rumah tangga yang belum memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat.
f. Pola hidup masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sanitasi (jamban) dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.8
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			80%
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	1.050	1.050	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	29	0	
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	
	Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	352	
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			100%
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	30	30	
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	10	10	
	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni			
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Utama		90,00 %

Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah 90 persen karena tidak ada bencana alam dan melanjutkan program rehabilitasi rumah korban bencana. Penanganan korban bencana hidrometeorologi yang berlangsung pada akhir tahun 2025 menjadi perhatian pembangunan dan rehabilitasi dilaksanakan di tahun 2026 sehingga belum menjadi bagian dari perhitungan capaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat di tahun 2025.

Tabel 2.9
Realisasi Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota			49,70 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	55	25	
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	5	0	
	2. Pemenuhan Standar	2	2	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/ perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023			
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	402	0	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1	1	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	8	0	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	15	0	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			82,50%
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	100	190	
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana	0	0	
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.089	536	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			83,37%
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	100	100	
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	0	0	
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	30	60	
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	665	110	
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	604	0	
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana	383	324	
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	194	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			0%
	Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM			
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR				
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			15%

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	15000	0	
	a. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.	5000	4000	
	b. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.	5000	4000	
	c. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran.	10	5	
	d. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia.	100	60	
	e. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran.	1000	900	
	f. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.	1000	900	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Belum Tuntas		40%

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 adalah :

a. Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal pada mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum.
b. Dalam pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang ada.
c. Masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan.

Tabel 2.10
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			23,72 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	4	4	
	a. Layanan data dan pengaduan	480	4	
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	480	4	
	c. Penyediaan permakanan	480	4	
	d. Penyediaan sandang	480	4	
	e. Penyediaan alat bantu	480	4	
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	480	4	
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	480	4	
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	480	4	
	i. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	480	0	
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	480	4	
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	480	4	
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	480	0	
	m. Layanan rujukan	480	0	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			9,86 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	8	8	
	a. Layanan data dan pengaduan	480	8	
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	480	8	
	c. Penyediaan permakanan	480	8	
	d. Penyediaan sandang	480	8	
	e. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	480	8	
	f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	480	8	
	g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	5	8	
	h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	0	
	i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	480	8	
	j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	5	8	
	k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	0	
	l. Layanan rujukan	480	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			15,35 %
	Penerima layanan dasar sampai dengan kondisi saat ini	54	54	
	a. Layanan data dan pengaduan	480	54	
	b. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	480	54	
	c. Penyediaan permakanan	480	54	
	d. Penyediaan sandang	480	54	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	e. Penyediaan alat bantu	480	54	
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan	480	54	
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	480	54	
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	480	54	
	i. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	480	0	
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	480	54	
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	480	54	
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	480	0	
	m. Layanan rujukan	480	0	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			71.88 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			16,67%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Belum Tuntas		23.83 %

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2025 adalah :

a. Kendala dalam pengumpulan data diantaranya cakupan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga harus dijangkau menggunakan transportasi antarpulau. Selain itu juga terdapat kendala terkait akses ke daerah yang cenderung terpelosok dan jumlah personil yang masih kurang cukup.
b. Berdasarkan data yang dihimpun, seharusnya masih banyak penerima pelayanan dasar di luar target yang benar-benar membutuhkan bantuan pelayanan dasar namun tidak sejalan dengan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi pelayanan dasar terhadap semua klaim luar panti.
c. Sarana dan prasarana yang seharusnya aktif namun sedang dalam kondisi kurang aktif saat ini seperti puskessos di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang mendukung terealisasinya pelayanan dasar di masyarakat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi paruh tahun terhadap dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan. Bab ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap asumsi kerangka ekonomi makro yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026, perkembangan realisasi indikator ekonomi makro daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, serta perkembangan kebijakan fiskal nasional dan regional yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Muatan dalam bab ini menjadi dasar analitis bagi perumusan kembali arah kebijakan pembangunan daerah pada sisa tahun anggaran berjalan, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara capaian riil di lapangan dengan target-target normatif yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

Secara metodologis, evaluasi kerangka ekonomi dan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan komparatif antara asumsi dasar RKPD Tahun 2026 dengan data realisasi terkini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hasil pemeriksaan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dokumen resmi kebijakan transfer fiskal dari Pemerintah Pusat. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengidentifikasi secara objektif indikator-indikator yang masih sejalan dengan target awal dan indikator-indikator yang memerlukan penyesuaian kebijakan, sehingga perubahan yang dilakukan benar-benar didasarkan pada bukti (*evidence-based policy*) dan bukan sekadar penyesuaian administratif.

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan strategis, yaitu: pertama, adanya perkembangan realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang berbeda dari proyeksi awal; kedua, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai sumber penerimaan pembiayaan; ketiga, kebutuhan penyesuaian pagu belanja untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,

penanggulangan bencana, dan pencapaian target pembangunan manusia; dan keempat, penyelarasan program dan kegiatan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Asta Cita serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memandang perlu untuk melakukan perubahan atas RKPD Tahun 2026 agar perencanaan pembangunan daerah tetap responsif, akuntabel, dan berbasis data riil terkini.

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada tahun berjalan dan proyeksinya ke depan, yang meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat ketimpangan pendapatan (rasio gini), indeks pembangunan manusia, serta indeks kualitas lingkungan hidup. Perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, perkembangan realisasi capaian indikator makro ekonomi daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026, serta proyeksi perkembangan ekonomi hingga tahun anggaran 2026.

3.1.1 Evaluasi Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 menggunakan sejumlah asumsi dasar kerangka ekonomi makro daerah, antara lain asumsi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 6,01 persen, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp84,34 juta, tingkat kemiskinan sebesar 12,72 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1,21 persen, rasio gini sebesar 0,264, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,65, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 80,34. Asumsi-asumsi tersebut disusun dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025, tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Evaluasi terhadap asumsi tersebut menjadi penting mengingat perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai pada dua tahun terakhir

menunjukkan tren perlambatan, yaitu dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,97 persen pada Tahun 2024 menjadi 2,93 persen pada Tahun 2025. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan konektivitas antarpulau, ketergantungan tinggi terhadap sektor primer (pertanian, perikanan, dan kehutanan) yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan bencana, serta belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah. Dengan demikian, asumsi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01 persen pada RKPD Tahun 2026 perlu dievaluasi secara cermat berdasarkan perkembangan riil hingga triwulan II Tahun 2026.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	target 2026 pada RKPD perubahan provinsi	Target Perubahan RKPD Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi	6,01	6,01
Pendapatan Per Kapita ADHB	84.34	84,34
Pendapatan Per Kapita ADHK	40.09	40,09
Indeks Pembangunan Manusia	67.35	67,34
Angka Harapan Hidup	71.47	71,46
Harapan Lama Sekolah	12.93	12,93
Rata Lama sekolah	8.22	8,22
Pengeluaran Per Kapita	7411	7.411
Tingkat Kemiskinan	12.72	12,72
Jumlah Penduduk Miskin	12.124	13.000
Rasio Gini	0.265	0,264
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,37	1,21

Sumber: RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 (sebelum perubahan).

Indikator makro pembangunan daerah adalahukurankuantitatif yang digunakan untuk menilai kemajuandankeberhasilan pembangunan suatu

daerah. Indikator makropembangunan memberikan gambaran kondisi daerah secaraumumyang memberikan dampak secara luas kepada masyarakat. Indikatormakro melibatkan kontribusi lintas sektor dan lintas pemangkukepentingan. Indikator makro pembangunan seperti PertumbuhanEkonomi, PDRB ADHK dan ADHB Per Kapita, PDRB(ADHB) perkapita, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusiamerupakan gambaran target pencapaian pembangunansebagai

3.1.2 Perkembangan dan Realisasi Indikator Ekonomi Makro Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Beberapa indikator seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbaikan yang konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sementara indikator lain seperti tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini masih menunjukkan tekanan yang perlu diwaspadai. Tabel 3.2 menyajikan gambaran umum perkembangan indikator makro ekonomi daerah dari Tahun 2024 (realisasi), Tahun 2025 (realisasi), Tahun 2026 (target awal dan realisasi sampai dengan triwulan II).

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2024-2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026	Perubahan RKPD 2026
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Juta Rp	67,34	70,07	84,34	71,85*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,67	67,62	67,65	67,70*
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,97	2,93	6,01	3,20*
Tingkat Kemiskinan	%	13,89	13,22	12,72	13,05*
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,44	1,53	1,21	1,48*
Rasio Gini (Tingkat Ketimpangan)	Indeks	0,267	0,291	0,264	0,285*
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,01	81,24	80,34	81,30*

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029, (diolah)

3.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2024 tercatat sebesar 1,44 persen dan meningkat menjadi 1,53 persen pada Tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang bersifat padat karya musiman, sementara sektor industri pengolahan belum berkembang optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan estimasi sementara sampai dengan triwulan II Tahun 2026, TPT diperkirakan berada pada kisaran 1,48 persen, masih di atas target akhir tahun sebesar 1,21 persen. Pemerintah Daerah melalui program peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan, dan hilirisasi usaha mikro menjadi usaha kecil menengah, serta pemerataan infrastruktur konektivitas antarpulau, optimis dapat menekan TPT mendekati target pada akhir Tahun 2026.

3.1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren positif dari 66,67 pada Tahun 2024 menjadi 67,62 pada Tahun 2025, didorong oleh perbaikan akses layanan kesehatan, peningkatan fasilitas pendidikan, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Estimasi sementara triwulan I Tahun 2026 menunjukkan IPM pada kisaran 67,70, telah melampaui target akhir tahun sebesar 67,65. Capaian positif ini mengindikasikan bahwa program prioritas dan unggulan memberikan dampak nyata terhadap kualitas sumber daya manusia daerah. Dengan tren perbaikan yang konsisten. Sejalan dengan penguatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta penambahan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.

3.1.2.3 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai menurun dari 13,89 persen pada Tahun 2024 menjadi 13,22 persen pada Tahun 2025, didorong oleh pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kecamatan, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Estimasi sementara sampai dengan triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan pada kisaran 13,05 persen, masih di atas target akhir tahun sebesar 12,72 persen. Pemerintah Daerah tetap optimis mampu mendekati target melalui program bantuan sosial dan

perlindungan sosial tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari desil 1 sampai desil 5, penguatan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan UMKM, serta pemerataan akses pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan jalan desa.

3.1.2.4 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat dari 0,267 pada Tahun 2024 menjadi 0,291 pada Tahun 2025, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif akibat pembangunan infrastruktur yang belum merata antarwilayah, hilirisasi komoditas yang belum optimal, serta distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata. Estimasi sementara triwulan I Tahun 2026 menunjukkan rasio gini pada kisaran 0,285, masih di atas target akhir tahun sebesar 0,264.

3.1.2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun 2021-2025 menunjukkan tren fluktuatif namun secara umum berada pada predikat baik, yaitu dari 82,24 pada Tahun 2021, meningkat menjadi 83,08 pada Tahun 2022, dan 83,17 pada Tahun 2023, sempat menurun menjadi 81,01 pada Tahun 2024, kemudian meningkat kembali menjadi 81,24 pada Tahun 2025. Estimasi sementara triwulan I Tahun 2026 menunjukkan IKLH pada kisaran 81,30, telah melampaui target akhir tahun sebesar 80,34. Perbaikan ini didorong oleh penguatan pengelolaan sampah melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle serta optimalisasi bank sampah di tingkat desa dan kecamatan.

3.1.3 Analisis Penyimpangan/Kesenjangan antara Asumsi RKPD Tahun 2026 dengan Perkembangan Riil

Berdasarkan perbandingan antara asumsi RKPD Tahun 2026 dengan perkembangan realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2026, teridentifikasi adanya kesenjangan (gap) pada seluruh indikator makro ekonomi daerah. Kesenjangan terbesar terjadi pada indikator laju pertumbuhan ekonomi, yaitu selisih 2,81 poin persentase antara target 6,01 persen dengan estimasi realisasi 3,20 persen, yang mengindikasikan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada RKPD tahun 2026 bersifat terlalu optimistis dibandingkan dengan kondisi riil perekonomian daerah yang

masih dalam tahap pemulihan pascaperlambatan Tahun 2025. Tabel 3.3 berikut menyajikan analisis kesenjangan secara rinci.

Tabel 3.3
Analisis Penyimpangan/Kesenjangan Asumsi RKPD Tahun 2026 dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai

Indikator Makro	Target RKPD 2026	Realisasi TW I 2026	Selisih (Gap)	Status	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	3,20	-2,81	Belum Tercapai	Perlu akselerasi sektor unggulan pada TW II-IV
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	84,34	71,85	-12,49	Belum Tercapai	Dipengaruhi capaian LPE yang belum optimal
Tingkat Kemiskinan (%)	12,72	13,05	+0,33	Mendekati Target	Tren penurunan konsisten, on-track
TPT (%)	1,21	1,48	+0,27	Mendekati Target	Perlu percepatan penyerapan tenaga kerja
Rasio Gini	0,264	0,285	+0,021	Mendekati Target	Perlu pemerataan Pembangunan antar wilayah
IPM	67,65	67,70	+0,05	Tercapai	Target sudah terlampaui pada TW I
IKLH	80,34	81,30	+0,96	Tercapai	Target sudah terlampaui pada TW I

Sumber: Hasil analisis Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026.

Kesenjangan pada indikator laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita perlu menjadi perhatian utama karena kedua indikator tersebut merupakan indikator inti kerangka ekonomi makro yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan. Sebaliknya, indikator kemiskinan, TPT, dan rasio gini menunjukkan status "mendekati target" yang mengindikasikan bahwa arah kebijakan sosial ekonomi daerah pada dasarnya sudah tepat sasaran namun memerlukan percepatan pelaksanaan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV Tahun 2026. Sementara itu, IPM dan IKLH telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan manusia dan lingkungan hidup daerah. Analisis kesenjangan ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pada Perubahan RKPD Tahun 2026, khususnya dalam penyesuaian alokasi belanja untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pada sisa tahun anggaran.

3.1.4 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah hingga Tahun Anggaran 2026

Prospek perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga Tahun Anggaran 2026 diperkirakan akan mengalami perbaikan bertahap

seiring dengan realisasi belanja modal untuk infrastruktur konektivitas, peningkatan aktivitas sektor pariwisata pada musim kunjungan wisatawan surfing di semester II, serta panen raya komoditas pertanian dan hasil tangkapan perikanan pada triwulan III dan IV. Selain itu, percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa pada semester II juga diperkirakan memberikan dorongan tambahan terhadap perekonomian daerah melalui belanja infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan struktural yang khas bagi wilayah kepulauan terluar seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang perlu diantisipasi, yaitu:

1. Keterbatasan konektivitas antar pulau yang menyebabkan tingginya biaya logistik dan distribusi barang, sehingga memengaruhi daya saing produk lokal dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
2. Kerentanan wilayah terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, tsunami, banjir, dan abrasi pantai, yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan infrastruktur publik sewaktu-waktu.
3. Ketergantungan tinggi terhadap moda transportasi laut yang terbatas jadwal dan kapasitasnya, sehingga rentan terhadap cuaca ekstrem terutama pada musim angin barat.
4. Keterbatasan infrastruktur dasar kelistrikan dan telekomunikasi di sejumlah pulau dan dusun terluar yang menghambat pengembangan usaha mikro dan digitalisasi ekonomi.
5. Ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga perubahan kebijakan transfer nasional berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.
6. Perubahan iklim yang berdampak pada pola tangkapan perikanan dan produktivitas pertanian, khususnya perkebunan kelapa dan nilam sebagai komoditas unggulan daerah.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pemerintah Daerah merumuskan sejumlah langkah strategis pada sisa Tahun Anggaran 2026, antara lain: percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan dan dermaga penyeberangan untuk memperkuat konektivitas antarpulau; penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana berbasis masyarakat di seluruh desa pesisir; percepatan elektrifikasi dan

perluasan jaringan telekomunikasi di wilayah terluar melalui program Mentawai Terang; diversifikasi sumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi retribusi pariwisata dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD; serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, perekonomian daerah pada akhir Tahun 2026 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran 4,0-4,5 persen, meskipun masih di bawah target awal RKPD sebesar 6,01 persen.

3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

Kerangka keuangan daerah merupakan gambaran kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang tercermin dari kondisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Perubahan kerangka keuangan daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan I Tahun 2026, informasi resmi mengenai perubahan pagu transfer dari Pemerintah Pusat, hasil audit sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kebutuhan penyesuaian belanja untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, menunjukkan fluktuasi dari kategori sedang pada Tahun 2021 hingga kategori sangat tinggi pada Tahun 2023, kemudian menurun menjadi kategori tinggi pada Tahun 2024 dan kategori rendah pada Tahun 2025. Penurunan kategori KFD pada Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 3.4
Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Tinggi
2023	1,730	Sangat Tinggi
2024	1,384	Tinggi
2025	0,024	Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025.

3.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 diarahkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD, serta upaya memperoleh pendapatan transfer yang optimal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Perubahan pendapatan daerah Tahun 2026 secara total mengalami peningkatan dari Rp 718.989.926.854 pada APBD murni menjadi Rp 831.444.304.854 pada Perubahan APBD, atau bertambah sebesar Rp 112.454.378.000 (15,64 persen), yang seluruhnya bersumber dari peningkatan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan PAD diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

Untuk memberikan gambaran tren jangka menengah, Tabel 3.5 menyajikan perkembangan realisasi pendapatan daerah Tahun 2024-2025, target dan realisasi Tahun 2026.

Tabel 3.5
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Awal)	Realisasi TW II 2026	Perubahan Target 2026
Pendapatan Asli Daerah	53.053.048.383	58.635.422.650	92.743.767.869	35.790.238.624	92.743.767.869
Pendapatan Transfer	864.468.015.943	701.954.509.573	613.692.550.986	388.443.223.424	724.146.928.986
Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.945.022.383	12.952.006.706	12.553.608.000	5.127.077.734	14.553.608.000
JUMLAH PENDAPATAN	925.466.086.709	773.541.938.929	718.989.926.854	429.360.539.782	831.444.304.855

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024-2025 (audited/unaudited), Laporan Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2026, dan Perubahan APBD Tahun 2026, (diolah).

Data pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp 925.466.086.709 pada Tahun 2024 menjadi Rp 773.541.938.929 pada

Tahun 2025, atau tumbuh rata-rata sebesar 5,58 persen per tahun. Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II Tahun 2026 mencapai 429.360.539.782 atau sekitar 16,34 persen dari target awal, yang merupakan capaian wajar mengingat pola penerimaan dana transfer yang umumnya terkonsentrasi pada triwulan II hingga IV. Tumbuh sebesar 5,00 % dari perubahan APBD tahun 2026, seiring dengan perkiraan peningkatan pendapatan tranfers dan optimalisasi PAD.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak mengalami perubahan dari target awal, yaitu tetap sebesar Rp 92.743.767.868 dengan rincian Pajak Daerah sebesar Rp 25.084.673.049 Retribusi Daerah sebesar Rp 28.937.054.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 18.476.655.254 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 20.245.385.565. Tidak adanya perubahan pada pos PAD mengindikasikan bahwa proyeksi awal penerimaan PAD dinilai masih realistis dan dapat dicapai berdasarkan hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026, mengingat sumber utama PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari retribusi daerah, disusul oleh pajak daerah yang dipungut berdasarkan *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai diarahakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan mengingat tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih relatif tinggi. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan beberapa strategi : intensifikasi PAD, eksentifikasi PAD, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan investasi, penguataan tata kelola pendapatan dan digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengalami perubahan paling signifikan, yaitu meningkat dari Rp 613.692.550.985 menjadi Rp 724.146.928.985 atau bertambah sebesar Rp 110.454.378.000,00 (18,00 persen). Peningkatan ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bertambah dari Rp

590.550.805.000 menjadi Rp 699.505.183.000 (bertambah Rp 108.954.378.000), mencakup penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Desa sesuai keputusan resmi Kementerian Keuangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp 23.141.745.985 menjadi Rp 24.641.745.985 atau bertambah Rp 1.500.000.000 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp 2.000.000.000 dari semula Rp 12.553.608.000 menjadi Rp14.553.608.000 yang seluruhnya bersumber dari Pendapatan Hibah yang sebelumnya tidak dianggarkan (Rp0,00) menjadi Rp 2.000.000.000 pada Perubahan APBD, sedangkan pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp 12.553.608.000.

Tabel 3.6
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92.743.767.868	92.743.767.868	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.084.673.049,50	25.084.673.049	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	28.937.054.000	28.937.054.000	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.476.655.254	18.476.655.254	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.245.385.565	20.245.385.565	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	613.692.550.985	724.146.928.985	110.454.378.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	590.550.805.000	699.505.183.000	108.954.378.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.141.745.985	24.641.745.985	1.500.000.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.553.608.000	14.553.608.000	2.000.000.000
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.553.608.000,00	12.553.608.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	718.989.926.854	831.444.304.854	112.454.378.000

Sumber: Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

3.2.2 Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2026 disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat untuk pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting. Perubahan belanja daerah Tahun 2026 meningkat signifikan dari Rp 718.989.926.854 menjadi Rp 898.627.651.208 atau bertambah sebesar Rp 179.637.724.353 (24,98 persen), yang dibiayai dari peningkatan pendapatan transfer dan pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.7
Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2024-2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Awal)	Realisasi TW II 2026	Perubahan Target 2026
Belanja Operasi	531.200.400.000	560.870.115.000	589.562.654.054	263.928.915.294	665.398.455.719
Belanja Modal	32.100.500.000	35.740.800.000	39.037.405.001	16.759.537.069	143.186.564.284
Belanja Tidak Terduga	980.200.000	1.450.600.000	1.850.000.000	394.536.000	4.046.444.216
Belanja Transfer	76.230.100.000	82.140.900.000	88.539.867.800	20.783.146.437	102.252.157.513
JUMLAH BELANJA	640.511.200.000	680.202.415.000	718.989.926.853	301.866.134.800	914.883.21.732

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024-2025, Laporan Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2026, dan Perubahan APBD Tahun 2026, (diolah)

Peningkatan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 terutama didorong oleh lonjakan Belanja Modal yang meningkat dari Rp 39.037.405.000 menjadi Rp 143.186.564.284 atau bertambah Rp 101.604.970.588 (260 persen), mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, jalan, jaringan, dan irigasi. Belanja Operasi juga meningkat dari Rp 589.562.654.054 menjadi Rp 665.398.55.719 (bertambah Rp 75.85.801.666 atau 10,86 persen), sedangkan Belanja Tidak Terduga meningkat signifikan sebesar 114,84 persen sebagai antisipasi kebutuhan penanggulangan bencana yang menjadi karakteristik kerentanan wilayah kepulauan.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meningkat dari Rp 589.562.654.053 menjadi Rp 665.398.455.719 Komponen Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan

paling signifikan, dari Rp 157.913.306.922 menjadi Rp 226.223.235.044 (bertambah Rp 68.309.928.122), sejalan dengan peningkatan kebutuhan operasional program prioritas daerah. Sebaliknya, Belanja Pegawai mengalami sedikit penyesuaian ke bawah dari Rp 418.744.801.131 menjadi Rp 425.714.400.895 (bertambah Rp6.969.599.764) sebagai hasil efisiensi belanja pegawai. Belanja Hibah meningkat dari Rp 8.754.546.000 menjadi Rp 9.169.571.384 dan Belanja Bantuan Sosial meningkat dari Rp150.000.000 menjadi Rp 218.889.301, sedangkan Belanja Subsidi tetap sebesar Rp 4.072.359.093.

b. Belanja Modal

Belanja Modal mengalami peningkatan tertinggi di antara seluruh jenis belanja, terutama pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang meningkat dari Rp 26.989.245.880 menjadi Rp 110.428.743.252 (bertambah Rp 83.39.497.372), mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur konektivitas antarpulau dan antarwilayah. Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat dari Rp 577.525.000 menjadi Rp 11.897.990.011 (bertambah Rp 11.320.465.011), Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat dari Rp10.806.634.120 menjadi Rp 19.342.664.358 (bertambah Rp 8.969.949.382), serta teralokasi baru Belanja Modal Tanah sebesar Rp 305.426.932 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp 101.808.977 yang sebelumnya tidak dianggarkan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga meningkat dari Rp 1.850.000.000 menjadi Rp 4.046.444.216 atau bertambah Rp 2.124.545.587 (114,84 persen). Peningkatan pos ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan tanggap darurat bencana alam mengingat karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan abrasi pantai, sekaligus untuk mendukung program rehabilitasi pasca bencana banjir yang telah terjadi pada wilayah tertentu.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer meningkat dari Rp 88.539.867.800 menjadi Rp 102.252.157.513 atau bertambah Rp 11.895.437.800 (13,44 persen), yang seluruhnya bersumber dari peningkatan Belanja Bantuan Keuangan dari Rp

83.137.695.100 menjadi Rp 96.752.260.734 sedangkan Belanja Bagi Hasil tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp 5.499.896.780.

Tabel 3.8
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.1	Belanja Operasi	589.562.654.053	665.398.455.719	75.835.801.666
5.1.01	Belanja Pegawai	418.744.801.131	425.714.400.895	6.969.599.764
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.913.306.922	226.223.235.044	68.309.928.122
5.1.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000	4.072.359.093	72.359.093
5.1.05	Belanja Hibah	8.754.546.000	9.169.571.384	415.025.385
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	218.889.301	68.889.301
5.2	Belanja Modal	39.037.405.000	143.186.564.284	101.604.970.588
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	305.426.932	305.26.932
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.806.634.120	19.342.664.358	8.969.949.382
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	577.525.000	11.897.990.011	11.320.465.011
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.989.245.880	110.428.743.252	83.439.497.372
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	664.000.000	664.000.000	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	101.808.977	101.808.977
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.850.000.000	4.046.444.216	2.124.545.587
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.850.000.000	4.046.444.216	2.124.545.587
5.4	Belanja Transfer	88.539.867.800	102.252.157.513	11.895.437.800
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.402.172.700	5.499.896.780	97.724.080
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	83.137.695.100	96.752.260.734	13.614.565.634
	JUMLAH BELANJA DAERAH	718.989.926.853	914.883.621.732	191.460.755.641

Sumber: Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

3.2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, belanja daerah yang meningkat sebesar Rp 179.637.724.353 tidak sepenuhnya dapat ditutupi oleh peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 112.454.378.000 sehingga terjadi defisit yang harus ditutup melalui peningkatan penerimaan pembiayaan daerah, khususnya dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

a. Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, perhitungan dan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya menjadi dasar utama perhitungan penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD. Hasil pemeriksaan sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 92.613.686.400,92 meningkat dari proyeksi awal sebesar Rp 67.183.346.353 atau bertambah sebesar 25.430.340.047. Peningkatan SiLPA ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan atas peningkatan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026, khususnya untuk mendanai percepatan belanja modal infrastruktur dan penguatan belanja tidak terduga.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan (Rp0,00), sehingga seluruh penerimaan pembiayaan sebesar Rp 92.613.686.400,92 merupakan pembiayaan neto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian, proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) pada akhir Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan nihil (Rp0,00), yang mengindikasikan bahwa seluruh sumber daya keuangan daerah dialokasikan secara optimal untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.9
Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rp)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Awal)	Perubahan Target 2026
Penerimaan Pembiayaan (SiLPA TA Sebelumnya)	54.320.100.000	61.750.400.000	67.183.346.354	92.613.686.400,92
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
Pembiayaan Netto	54.320.100.000	61.750.400.000	67.183.346.354	92.613.686.400,92
SiLPA Tahun Berkenaan	61.750.400.000	67.183.346.354	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024-2025, Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun 2026, diolah.

Tabel 3.10
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	92.613.686.400,92	25.430.340.047
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0	92.613.686.400,92	25.430.340.047
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0	92.613.686.400,92	25.430.340.047
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Tabel 3.10, kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2026 diarahkan pada: (1) penyesuaian penerimaan pembiayaan yang diutamakan bersumber dari SiLPA berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan (2) pemanfaatan SiLPA tahun berjalan sebagai pedoman dasar pengambilan kebijakan perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SiLPA tahun berjalan bersifat positif/surplus, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkannya untuk menambah program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas, sedangkan apabila bersifat negatif, Pemerintah Daerah akan mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan kewajiban daerah serta mengurangi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas.

Tabel 3.11
Perubahan Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Indikator	RKPD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026	Selisih
1	Program	106	109	3
2	Kegiatan	180	193	13
3	Sub Kegiatan	439	484	45

Berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Tahun 2026, terjadi perubahan jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 3.11 di atas. Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2026 semula sebanyak 106 program, mengalami penambahan sebanyak 3 program menjadi 109 program dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Pada tingkat Kegiatan, jumlah semula sebanyak 180

kegiatan bertambah sebanyak 13 kegiatan menjadi 193 kegiatan. Sementara itu, jumlah Sub Kegiatan mengalami penambahan yang paling signifikan, yaitu sebanyak 45 sub kegiatan, dari semula 439 sub kegiatan menjadi 484 sub kegiatan.

Penambahan jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut mencerminkan adanya kebutuhan pembangunan daerah yang berkembang sepanjang tahun berjalan, yang belum terakomodasi dalam RKPD Tahun 2026 murni. Penambahan pada tingkat Sub Kegiatan yang lebih besar dibandingkan tingkat Program dan Kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar penyesuaian dilakukan pada level operasional pelaksanaan, yaitu berupa perluasan cakupan pelaksanaan kegiatan yang sudah ada melalui penambahan sub kegiatan baru, selain adanya kegiatan dan program yang benar-benar baru untuk mengakomodasi kebijakan prioritas maupun kebutuhan mendesak yang muncul pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, perubahan struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ini merupakan bentuk penajaman perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan riil di lapangan, sekaligus tetap berpedoman pada prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan tetap memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 didasarkan pada beberapa pertimbangan pokok, yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan PPAS, khususnya terkait kapasitas riil keuangan daerah, realisasi pendapatan, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mempengaruhi pagu indikatif perangkat daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan pergeseran kebijakan prioritas pembangunan daerah, termasuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang harus disinkronkan dalam pelaksanaan program di daerah.
3. Keadaan darurat dan/atau kebutuhan mendesak, termasuk kondisi kebencanaan dan karakteristik geografis kepulauan yang memerlukan respons cepat di luar perencanaan awal.

4. Hasil evaluasi capaian kinerja triwulan berjalan, di mana kegiatan/sub kegiatan yang capaiannya tidak optimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dilakukan penyesuaian, baik berupa pengurangan, penghentian, maupun pengalihan ke kegiatan lain yang lebih mendesak.
5. Adanya program/kegiatan baru dari kebijakan nasional atau provinsi yang harus diakomodasi dalam RKPD Perubahan Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi vertikal perencanaan pembangunan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dokumen RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam merumuskan secara teknis implementasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Visi Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera. Sebagai penjabaran tahun ke-2 RPJMD Tahun 2025-2029, dokumen RKPD sebagai wujud operasional perencanaan tahunan dalam merumuskan sasaran prioritas pembangunan yang disusun untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah. Penguatan infrastruktur daerah untuk peningkatan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode pertama dan perencanaan tahun 2025 menjadi perencanaan tahun pertama. Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang terbentuk pada pembukaan UUD 1945. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi Pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario

pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN Tahun 2025–2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 mempertimbangkan arahan Presiden, evaluasi kebijakan tahun 2024-2025, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2026 ditetapkan yaitu:

"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif""

Tema ini dipandang sebagai langkah dan tahapan pencapaian target sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Upaya dan langkah tersebut melalui pencapaian sasaran Pembangunan tahun 2026 antara lain:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,3
PDRB per Kapita	US$	5.870
Tingkat Kemiskinan	%	6,50 – 7,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,44 – 4,96
Rasio Gini	Nilai	0,377 – 0,380
Indeks Modal Manusia	Nilai	0,57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,67

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	37,14
Inflasi	%	1,5-3,5

sumber: RKP 2025

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Modal Manusia, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta menjaga inflasi pada posisi yang aman dan stabil.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Visi Pembangunan Sumatera Barat terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 diperlukan sebagai implementasi setiap misi setiap tahunnya melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029

VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan Merata dan Kesehatan yang Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia 2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3: Nagari/Desa sebagai	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi

VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
basis Kemajuan	Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	desa/nagari berbasis potensi lokal. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi.	1. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah. 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas. 3. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi daerah.
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana.	1. Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan. 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1. Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan. 3. Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas.
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah. 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan Usaha Kecil.
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. 2. Meningkatnya kualitas layanan publik. 3. Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2024 dan 2025, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dan

bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni:

"Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Perkuatan Fondasi

   Maksud: Memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis, seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

   Tujuan: Menyediakan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.

b. Transformasi Sektor Strategis

   Maksud: Mengubah dan modernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional atau daerah. Contohnya:

   a) Sektor pertanian dan perikanan: Ditransformasikan dengan pendekatan berbasis teknologi (pertanian cerdas atau *smart farming*).
   b) Sektor pariwisata: Dikembangkan ke arah berbasis ekowisata dan budaya lokal.
   c) Sektor industri kecil/UMKM : Diarahkan pada penguatan industry kecil/UMKM berbasis nilai tambah lokal dan ramah lingkungan.

   Tujuan: Meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut di tingkat nasional maupun internasional sekaligus memastikan bahwa sektor tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

c. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

   Maksud: Pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya.

   Tujuan: Mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hasil pembangunan.

d. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Maksud: Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang.

a) Lingkungan: Mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pendekatan ramah lingkungan (*green economy*).
b) Sosial: Menjaga stabilitas dan harmoni sosial melalui pemerataan manfaat pembangunan.
c) Ekonomi: Mengembangkan model bisnis dan kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang. Adapun sasaran pembangunan dalam Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2026

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7
2	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	69,59
3	Indeks Gini (Rasio)	0,281
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,92
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34
6	IPM - Angka Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	77,48 74,83 14,62 9,58 12.074
7	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,6
8	Inflasi (%)	2,45-3,55

Sumber: RPJMD Prop. Sumatera Barat 2025-2029

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan sebagai langkah yang utuh dalam pencapaian visi dan isi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Kebijakan pembangunan tahun 2026 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam upaya pencapaian pentahapan pembangunan jangka menengah (RPJMD 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPD 2025-2045). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (transformasi sosial) dan infrastruktur ekonomi berbasis komoditas unggulan (transformasi ekonomi) menjadi pondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026

VISI Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Mutu Pendidikan. 2. Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat. 3. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif.
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 2. Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi. 3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif. 2. Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif.
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya Desa Mandiri. 2. Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan.
Misi 4: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	1. Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat. 2. Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan.
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	1. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan. 2. Menurunnya risiko

VISI Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
		terhadap dampak bencana.
Misi 6: Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah. 2. Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum. 2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani.
	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pembangunan ekonomi tahun 2026 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi dan sebagai pijakan awal menuju Mentawai Emas 2045 dengan memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan baik nasional maupun regional, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan yaitu:

"*Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*"

Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, menggali potensi daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, menjadi efek pengganda untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2026, memiliki makna antara lain:

1. Menyediakan dan memfasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi masyarakat sebagai prasyarat untuk mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan.

3. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata/ ekonomi kreatif di dalam dan antar sektor ekonomi.

Pembangunan daerah tahun 2026 yang fokus pada tema pembangunan tahunan, namun pada prinsipnya dengan tidak mengabaikan komitmen dan upaya yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi dan *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan target pembangunan daerah merujuk pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dan untuk target pembangunan yang telah tercapai di tahun sebelumnya atau tahun berjalan maka perumusan target sasaran dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan dokumen perencanaan atau dilakukan proyeksi.

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	84,34
Pertumbuhan Ekonomi	%	6,01
IPM	Indeks	67,34
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,46
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,22
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93
Pengeluaran Per Kapita	Rp.Ribu	7.411
Tingkat Kemiskinan	%	12,72
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,21
Gini Rasio	%	0,264

Sumber : RPJMD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2029

Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Pembangunan

Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Target 2026 Pada RKPD Perubahan Provinsi	Target Perubahan RKPD Tahun 2026
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,31	80,34
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	4,11	4,11
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	20,80	20,8

Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Target 2026 Pada RKPD Perubahan Provinsi	Target Perubahan RKPD Tahun 2026
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	42,59	42,59
Konsumsi listrik per kapita	307	310
Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalance off Undernourishment) (%)	8,89	0
Kapasitas Air Baku	0,012	0,012
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan	9,50	9,50
Indeks Risiko Bencana (IRBI)	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,40	0,40
Angka Harapan Hidup	71.47	71,46
Angka Kematian Ibu	208	200*
Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita)	22,25	26,00
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	62	62
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)*	84	84
Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	98,50	98,50
Persentase Satdik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-SMP		
- Literasi Membaca	47,45	47,45
- Numerasi	40,4	40,4
Persentase Satdik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-Sekolah Dasar		
- Literasi Membaca	48,90	48,90
- Numerasi	13,94	13,94
Rata Lama sekolah	8.22	8,22
Harapan Lama Sekolah	12.93	12,93
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	5,12	10,50*
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	84,55	95,00*
Tingkat Kemiskinan	12.72	12,72
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,62	43,62
Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	15,71	13,00
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,848	0,848
Indeks Perlindungan Anak	66,846	66,85
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	2,03	2,03
Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi	0	0
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	180	180
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Indeks Reformasi Hukum	72,49	72,49
Indeks Pelayanan Publik	3,29	3,29
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,52	2,52
Indeks Pemerintahan Digital	1,4	1.4
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Indeks Inovasi Daerah	46,16	46,16
Rasio PDRB Industri Pengolahan	0,79	0,79
Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,99	0,99
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	0,005	9.263
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,021	1,021
Rasio Kewirausahaan	2,12	2,12
Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,201	0,372
ROA BUMD	0,41	0,410
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,37	1,21

Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran)	Target 2026 Pada RKPD Perubahan Provinsi	Target Perubahan RKPD Tahun 2026
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	21,18	21,18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80,32- 81,93	80,32- 81,93
Indeks Inovasi Daerah	46,16	46,16
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	31,2	31,2
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	47,25	0
Proporsi Kontribusi PDB Kota terhadap Provinsi	0	0
Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	47,29	47,29
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,17	0,17
Tingkat Inflasi (%)	0	0
Total dana Pihak Ketiga / PDRB	5,63	5,63
Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp/kapita)	1.341.520	1.341.520
Total Kredit/PDRB	9,66	9,66
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0,31	0,6

Sumber : RPJMD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2029

Indikator Kinerja Utama(IKU) berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang sekaligus menjadi "janji pembangunan" pemerintah daerah kepada masyarakat. IKU memberikan gambaran konkret tentang hasil yang diharapkan dari akumulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, serta menjadi dasar bagi evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.7
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema RKP Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026
Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif	Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Keselarasan tema pembangunan terlihat dari upaya bersama bagaimana mewujudkan transformasi khususnya pada sektor ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis komoditas unggulan daerah untuk peningkatan nilai tambah yang didukung dengan pembangunan sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia *re-skilling/up-skilling*, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi.

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	5.870 US$	69,59	84,34
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8-6,3	5,7	6,01
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5-7,5	4,92	12,72
Rasio Gini	Rasio	0,377–0,380	0,281	0,264
Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia	Persen	0,57	06/77,48	67,34
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44 – 4,96	5,34	1,21

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.9
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82,12–85,66
Indeks HAM	Indeks	2,80

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4)

internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi, dan penegakan hak asasi manusia.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.10
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Asia Power Index (*Military Capability*)	Indeks	17
Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	Indeks	65,8
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	68,0
Global Cybersecurity Index	Indeks	95
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	6,55
Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,82
Kapasitas tampungan air	m3/kapita	60,16
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	42,24
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	41
Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	71,01
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	28,00 (17,00 terdaur ulang)
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,47
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,67
Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	 % %	 27,35 19,07

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential* force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara

Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan *choke point*, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut.

Arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan

profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy*, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/ prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi *aset soft power* Indonesia.

Arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan *Triangular*, (2) *Integrated National Financing Framework*, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi *Trade, Tourism, Investment* (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.

Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses aksesi Indonesia ke *Organization for Economic Co-operation and Development*.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas

cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewable*s) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/ distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi

bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multi komoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang

membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse,* dan *recycle*, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan). Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat alam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme

pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *public private people partnership* dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan

hutan. Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait *carbon trade* dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi

perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem *mangrove*, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budi daya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan penguatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan,

serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.11
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	%	3,15
Rasio Kewirausahaan	%	3,18
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	%	1,12
Rasio PDB Pariwisata	%	4,60-4,70
Devisa Pariwisata	(miliar USD)	22,0-24,7
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,4-8,0
Aset Perbankan/PDB	%	64,51
Aset Dana Pensiun/PDB	%	7,63
Aset Asuransi/PDB	%	9,30
Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	%	59,90
Total Kredit/PDB	%	38,46
Inklusi Keuangan	%	91,50

Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul *transhipment* sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di

Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wira usaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan *start-up*; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku

kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings*, *incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*).

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang *unbankable* menjadi koperasi *bankable*; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial

dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses *fintech*, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut.

Tabel 4.12
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas c. Harapan lama sekolah (tahun)	 Nilai Nilai Nilai Tahun Tahun	 396 404 416 9,45 13,37
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	35,36
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	68,50
Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	 % Peringkat	 0,31 52
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 – 4,96
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,40-59,31
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,68
Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	 per 100.000 KH (%)	 109 17,50
Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	252
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,7
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	7383
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,421
Indeks Perlindungan Anak	Indeks	72,33
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	67,24
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,11-92,21
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	%	10,80–11,94

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi.

Arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, antara lain:

a. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b)

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

b. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing

global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic*s; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan Iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

c. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan *stunting*; (c) mencegah terjadinya *stunting* pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit

menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih pro rakyat, pro tenaga kesehatan, pro fasilitas kesehatan, dan pro pengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia,

dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, *schistosomiasis*, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan *surveilans*, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi *pre-market*, penguatan pengawasan siber, dan *farmakovigilans*; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

d. Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan *resiliensi* anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diproses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m)

mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun non formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

e. Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete program*) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.13
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Rasio PDB Industri Pengolahan	%	21,20
Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	29,40
Ekspor Barang dan Jasa	%	22,7
Biaya Logistik (% PDB)	%	13,30

Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut).

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (*innovatif financing*) dan optimalisasi insentif fiskal/non fiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi.

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan

global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat pusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi *backbone* dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama; (3) penguatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; serta (h) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, dapat dilihat dari pencapaian target pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.14
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0-0,5
Proporsi Penduduk Kelas Menengah	%	18,2
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	39,99
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	10,40
Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional	%	44,34
Persentase desa mandiri	%	23,91
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	68,66
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	%	57,7
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	%	30

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.
b. Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa.
c. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota.
d. Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan.

e. Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.
f. Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa.
g. Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan).
h. Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan.
i. Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra desa.
j. Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa).
k. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan.
l. Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran.
m. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui:

a. Pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan.
b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai

domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda).

c. Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi.
d. Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro.
e. Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.

Arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2026 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi

sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Keberhasilan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dirumuskan dalam pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.15
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Return on Asset (ROA) BUMN	%	3,26
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Indeks	94
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks	72,8
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	%	1,70
Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	Rasio	12,17-13,35
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	40
Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,70
Rasio Perpajakan terhadap PDB	%	10,46-11,40
Tingkat Inflasi	%	2,5-1

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan *Data Base* Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga

negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

Arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.

Arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia

yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik. Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan

(pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang yang kredibel). Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan yang difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba, serta (f) meningkatkan kemampuan *surveillance* dan intelijen pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

8. Memperkuat Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2026 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.16
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,99
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	77,14
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat	%	0,136

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Bencana Relatif terhadap PDB		
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	66,15

Arah kebijakan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang difokuskan pada:

1. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non formal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.
2. Melestarikan budaya, melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan

termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

3. Penanganan bencana, melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang difokuskan kepada penguatan sektor strategis dalam peningkatan ekonomi daerah, selain itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 juga disusun mempertimbangkan ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2026 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yakni :

1. Transformasi sektor strategis difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
   a. Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan target sebesar Rp.81.970.058.
   b. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 8,22-8,23%.
   c. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dengan target sebanyak 1,45%.
   d. Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 2,59%.
   e. Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 1,11%.
   f. Rasio kewirausahaan Provinsi, dengan target sebesar 3,88%.
   g. Rasio Pajak Daerah PDRB, dengan target sebesar 1,2%.
2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:
   a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
      - Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 5,7%.
      - PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.63,4-65,3 juta.
      - Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,18-5,66%.
   b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
      - Rasio Gini, dengan target sebesar 0,281.
      - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dengan target 60,01%.
      - Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 4,27-4,87%.
      - Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp.12.074 ribu.
   c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan

Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni:

- Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 77,48.
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, dengan target sebesar 44,16%.
- Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman, dengan target sebesar 10,57%.
- Prevalensi Stunting, dengan target sebesar 19,62%.
- Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 98,88%.

Prioritas pembangunan pada tahun 2026 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2025-2029, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2029 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.

   Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kualitas Pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/ pikiran/ ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,

terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 4.17
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,48
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,59
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,62
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,56
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,25
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,54
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH	103
	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,25
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	%	75
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	92,34
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	98,7

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

2. Prioritas Pembangunan 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.

   Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Wilayah ini dikenal dengan produk pertanian unggulan seperti beras, jagung, hortikultura, kopi, gambir, ternak sapi, hingga perikanan air tawar yang menyebar di berbagai nagari. Selain menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan

nasional serta menjadi fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun demikian, kontribusi sektor-sektor primer tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat masih belum optimal. Masih tingginya ketergantungan petani pada sistem tradisional, rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, belum kuatnya sistem rantai pasok dan logistik pangan, serta minimnya industrialisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah produk daerah belum maksimal. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali dan belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan mengancam ketahanan ekosistem jangka panjang. Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,81
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	6,42
	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	Rupiah	81.970.058
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	27,43
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	69,51
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	54,85
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,616

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan, yang produktif dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian akan dilakukan secara transformasional, dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi produk, dan keterhubungan ke pasar, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi daerah yang tumbuh stabil, berkeadilan, dan mampu mengangkat kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, serta masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam.

3. Prioritas Pembangunan 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan.

Sumatera Barat memiliki struktur sosial dan kultural yang unik melalui keberadaan nagari sebagai entitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berakar kuat dalam adat dan tradisi. Nagari tidak hanya menjadi satuan administratif terkecil, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan informal masyarakat Minangkabau. Dalam konteks pembangunan daerah, nagari/desa memiliki posisi strategis sebagai basis produksi, penyedia sumber daya, dan pelestari nilai-nilai lokal yang mendukung pembangunan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik. Namun, kenyataannya, banyak nagari/desa masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, minimnya produktivitas ekonomi lokal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa memperlebar jurang sosialekonomi yang berdampak pada migrasi penduduk usia produktif ke kota, melemahkan kekuatan produksi di perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan nagari/desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif atau sektoral, tetapi harus bersifat integratif, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. Nagari/desa harus difasilitasi menjadi “basis kemajuan”, yakni sebagai wilayah yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam kelembagaan, berdaya saing melalui pengelolaan potensi lokal, serta berdaya dalam membangun warganya. Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.19
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa
Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Desa Mandiri	%	8,38
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	%	39,38
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Tingkat Kemiskinan	%	4,92
	Rasio Volume Usaha operasi terhadap PDRB	rasio	1,28
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34
	Rasio kewirausaahan Provinsi	rasio	3,88
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/ nagari/ kelurahan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,25

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	25,25
	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	66
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	44,17
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	32.532

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Prioritas pembangunan ini bertujuan menciptakan hubungan sinergis antara kota dan desa/nagari/kota sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi pada jasa, perdagangan, dan teknologi, sedangkan nagari sebagai basis produksi pangan, budaya, dan inovasi lokal. Pembangunan desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan kota, tetapi sebagai kekuatan utama yang menopang ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan sehingga Pembangunan nagari/desa bukan semata-mata tentang mengejar status administratif “desa maju” atau “desa mandiri”, tetapi bagaimana menjadikan desa sebagai

pusat kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya, produktif, dan lestari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa kebangkitan desa adalah syarat utama untuk menciptakan Sumatera Barat yang berkeadilan dan berkemajuan, di mana kekuatan adat, budaya, dan potensi lokal dipadukan dengan inovasi dan teknologi modern untuk membangun masa depan.

4. Prioritas Pembangunan 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.

   Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi yang terletak di jalur pesisir barat Pulau Sumatera, dengan akses langsung ke Samudra Hindia. Wilayah ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, budaya yang khas, dan infrastruktur yang mulai terbangun seperti pelabuhan, jalan nasional, dan kawasan industri. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir masih tertumpu pada sektor konsumsi dan pertanian, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan masih tergolong rendah. Terbatasnya kawasan industri yang terintegrasi, rendahnya investasi swasta, minimnya inovasi industri berbasis teknologi, serta keterbatasan akses UMKM ke pasar ekspor dan digital

menjadi tantangan utama dalam membangun ekonomi daerah yang kuat. Dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat, diharapkan peran daerah ini dalam rantai pasok nasional dan regional semakin menguat, sehingga membuka peluang kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang kuat dan tahan krisis hanya dapat dicapai jika Sumatera Barat mampu mengelola sumber daya lokalnya menjadi kekuatan industri dan perdagangan yang terintegrasi dan berbasis inovasi. Transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah lokal menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi akan memainkan peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus akselerator ekosistem perdagangan dan bisnis yang sehat, kompetitif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	72,88
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	30,16
	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	11,47-11,61
	Tingkat Inflasi	Persen	2,45-3,55
	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Indeks	4.576
Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	8,22-8,23
	Aset Dana Pensiun/ PDRB	Persen	1,28
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Rupiah	4.129.523
	Total Kredit/PDRB	Persen	25,59
	Konsumsi listrik per kapita	kWh/kapita	749,41
	Intensitas energi primer	SBM/Rp. miliar	136,92
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	18,01-19,81
Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	39,85
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	59,72-61,33
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah	Persen	75,79

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
	Tinggi		
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan provinsi	Persen	34,50
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	16,5
Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level provinsi	Persen	11,24
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	Persen	3,60
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi	Persen	87,35

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertenian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri ke depan harus dikembangan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatan tingkat pendapatan masyarakat sehinnga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusal Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Prioritas Pembangunan 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.

   Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dan berkeadilan memastikan bahwa semua wilayah, baik kota maupun nagari terpencil, memiliki akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan jaminan keselamatan dari ancaman bencana. Bagi Sumatera Barat, yang memiliki kontur geografis kompleks dan rawan terhadap berbagai bencana geologi (gempa bumi, tsunami, longsor) serta

hidrometeorologi (banjir, kekeringan), pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang "pembangunan fisik," tetapi juga tentang daya tahan dan keberlanjutan. Masih banyak wilayah di Sumatera Barat yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur dasar. Jalan provinsi di beberapa daerah masih rusak atau belum terhubung dengan baik, ketersediaan air bersih belum merata, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan belum efisien. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan pariwisata dan industri kreatif belum diiringi oleh infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan ke objek wisata, fasilitas umum, dan konektivitas digital. Rendahnya mitigasi risiko bencana juga memperparah kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan peristiwa ekstrem. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan diarahkan tidak hanya untuk membangun konektivitas fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketangguhan terhadap bencana, efisiensi energi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Prinsip "*no one left behind*" menjadi landasan dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan adil.

Tabel 4.21
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target		Ket
		Satuan	Volume	
Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,16	
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	141,26-139,99	
	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	44,50	
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	55,94	
Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (kumulatif)	%	18,92	
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (tahunan)	%	30,01	
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,74	
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1,43	
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	70,74	
Sasaran 3 : Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,25	
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	Rata-rata	2,85	

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Pembangunan infrastruktur tidak lagi dipandang semata dari aspek konektivitas fisik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun infrastruktur yang berkeadilan, yang menjangkau daerah tertinggal, tangguh bencana, dengan sistem mitigasi dan peringatan dini, serta berkelanjutan, dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan prioritas ini, infrastruktur menjadi fondasi menuju Sumatera Barat yang maju, aman, inklusif, dan berdaya saing global.

6. Prioritas Pembangunan 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.

   Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekuatan identitas budaya dan religius yang sangat kuat. Nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang telah teruji menjaga harmoni sosial, tata kehidupan bermasyarakat, serta struktur keluarga yang tangguh dan inklusif. Nilai ini pula yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan sosial dalam pembangunan daerah.

   Namun, dalam dua dekade terakhir, arus globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai di tengah masyarakat telah menghadirkan tantangan baru. Mulai dari lunturnya tradisi dan budaya lokal di generasi muda, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga melemahnya fungsi keluarga dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial. Selain itu, eksklusivisme beragama, polarisasi sosial, serta meningkatnya intoleransi menjadi sinyal penting perlunya penguatan kembali pondasi nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menghidupkan kembali kekuatan budaya, agama, dan kearifan lokal sebagai penyangga utama harmoni masyarakat, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial. Sumatera Barat tidak hanya berupaya membangun fisik, tetapi juga karakter, spiritualitas, dan harmoni sosial warganya.

   Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
   pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.22
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target		Ket
		Satuan	Volume	
Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,14-61,24	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71,32-71,54	
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	72,96	
Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	80,15-80,92	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indeks	3.064	
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	85	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,353	
Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan	%	94,3	
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	58,63	
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,25	

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

7. Prioritas Pembangunan 7: Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM.

Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner yang luar biasa. Keindahan beberapa destinasi wisata alam di Sumatera Barat seperti Danau Maninjau, kemegahan Lembah Harau, potensi wisata bahari Mandeh, hingga kekayaan tradisi dan seni Minangkabau menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal dengan kekuatan kulinernya, seperti rendang yang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia, serta potensi ekonomi kreatif di bidang kriya, musik tradisional, dan fashion berbasis budaya. Namun demikian,

potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas wisata, rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, kurangnya promosi digital dan akses pasar, serta keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk naik kelas. Industri kreatif juga masih menghadapi hambatan dalam hal inkubasi bisnis, akses ke teknologi, dan pembiayaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lima tahun ke depan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini akan diintegrasikan dengan pengembangan UMKM, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah provinsi akan menjadi katalisator dalam mendorong transformasi pariwisata dan industri kreatif sebagai pilar ekonomi baru Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.23
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target		Ket
		Satuan	Volume	
Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRB Akomodasi Makan dan Minum Ditambah Jasa Lainnya)	Rasio	2,59	
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	1,45	
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	45,25	
Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional	%	1,11	

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya menjadi penggerak ekonomi baru, tetapi juga wahana pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Sumatera Barat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, keindahan alam, serta semangat kewirausahaan masyarakatnya memiliki semua syarat untuk menjadi destinasi unggulan nasional dan global. Dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, Sumatera Barat siap menjadikan sektor ini sebagai motor pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan.

8. Prioritas Pembangunan 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan layanan publik yang responsif, reformasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar komitmen administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan. Sumatera Barat memiliki tradisi pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi musyawarah, etika sosial, dan amanah dalam pengelolaan kepentingan bersama. Namun dalam praktiknya, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem birokrasi, masih adanya celah korupsi, lambatnya pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan terpercaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan pada transformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang digital, transparan, dan adaptif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, pelayanan yang cepat dan mudah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.24
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target		Ket
		Satuan	Volume	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73,91	
Sasaran 1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71,53	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,96	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,9	
	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	40,63	
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Return On Aset (ROA) BUMD	%	2,046	
	Rasio Pajak Daerah PDRB	Rasio	1,2	

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Pembangunan ekonomi tahun 2026 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu "Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif", yaitu:

1. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, dengan arah kebijakan antara lain:
    a. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, sistem jaringan dan sampul transportasi serta pusat pemerintahan.
    b. Pengembangan kawasan strategis daerah.
    c. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
    d. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
    e. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
    f. Percepatan penyediaan akses air bersih untuk masyarakat perdesaan.
    g. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan, dengan arah kebijakan antara lain:
    a. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
    b. Pendampingan kelompok usaha masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
    c. Pendampingan kewirausahaan hulu hilir (peningkatan kapasitas, bisnis proses, akses finansial, akses pasar).
    d. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
    e. Pembinaan pembangunan desa wisata.
    f. Pendampingan industri pengolahan perikanan.
    g. Pendampingan budidaya perikanan.

h. MoU dengan pasar atau badan usaha.

3. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
   a. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, kepala. sagu dan ikan).
   b. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar.
   c. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (*enterprenuer*).
   d. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
   e. Kemudahan perizinan.

Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam 6 prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan pada RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan

   Pembangunan Infrastruktur Jalan, yaitu membangun jalan yang menghubungkan dusun ke dusun, dusun dengan desa, desa dengan kecamatan sehingga pergerakan orang dan barang lancar dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Tabel 4.25
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	55,00
2	Indeks masyarakat digital indonesia	55,28
3	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	310
4	Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	10
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		
1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,0125
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)ds	9,81
Meningkatnya Desa Mandiri		
1	Persentase Desa Mandiri (%)	9,30
Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan		
1	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	46,94
2	RT dengan Akses Sanitasi Aman	76
3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,26
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	9,81
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan		
1	Indeks tutupan lahan (Indeks)	95,95
2	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,26
3	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	33,14
4	RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	76
Menurunnya risiko terhadap dampak bencana		

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	160,96

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan infrastruktur jalan difokuskan pada:

1. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembangunan jalan Trans Mentawai.
3. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, budaya, sistem jaringan dan simpul transportasi serta pusat pemerintahan.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*.
5. Pembangunan sistem layanan irigasi.
6. Penyediaan air baku.
7. Pengendalian abrasi sungai dan pantai.
8. Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
9. Revisi RTRW kabupaten.
10. Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
11. Penyediaan sistem informasi tata ruang.
12. Pengembangan kawasan strategis daerah
13. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
14. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
15. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
16. Pengembangan SPBE (e-goverment).
17. Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
18. Pengembangan kawasan permukiman.
19. Pembangunan SPAM di desa prioritas (Muara Siberut, Sioban, Tuapejat).
20. Fasilitasi pembangunan SPAM (Sikabaluan).
21. Percepatan penyediaan kases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
22. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
23. Pembangunan TPST Tuapejat.
24. Pembangunan TPS Kecamatan
25. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.

26. Pengelolaan persampahan.
27. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada berikut ini:

Tabel 4.26
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2026

No	Program Prioritas	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)	Perangkat Daerah
Pembangunan Infrastruktur Jalan				
1	Program Penyelenggaraan Jalan	27.791.633.000	113.778.402.991	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	28.302.7000	802.927.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Penataan Bangunan Gedung	359.787.000	4.091.761.716	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	886.500.000	3.227.058.157	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	440.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	424.630.800	644.420.800	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	301763900	301.763.900	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.043.236.000	2.240.460.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.897.920.000	9.747.135.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
10	Program Pengembangan Perumahan	560.000.000	17.760.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	200.000.000	3.335.700.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
12	Program Pengelolaan Persampahan	496.321.200	498.065.909	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
13	Program Pengelolaan Pelayaran	130.000.000	130.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
TOTAL		40.374.818.900	156.997.695.473	

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 13 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 156.997.695.473.

2. Pemerataan Jaringan Listrik

Pemerataan jaringan listrik untuk semua wilayah, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti BUMN (PT. PLN), Kementerian ESDM dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, juga kita dapat memberikan bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu serta memberikan dukungan pada penyediaan akses jalan untuk pengembangan dan perluasan transmisi listrik pada daerah-daerah yang masih belum dapat dijangkau PLN.

Tabel 4.27
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	310
2	Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	10

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai melalui fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pembukaan jalan dalam rangka membuka akses untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
2. Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman melalui fasilitasi listrik bagi keluarga miskin baik pendanaan APBD Provinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta.

Tabel 4.28
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pemerataan Jaringan Listrik				
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.062.999.800	3.939.511.910	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelenggaraan Jalan	27.791.633.000	113.778.402.991	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		29.854.632.800	117.717.914.901	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alkasi anggaran sebesar Rp.117.717.914.901.

3. Penyediaan Internet

   Penyediaan jaringan Internet, yaitu dengan menyediakan fasilitas internet untuk mendukung layanan dasar dan layanan publik yang kita alokasikan melalui APBD. Seiring dengan itu, tetap dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dan berkualitas agar beberapa *blank spot* dapat diatasi serta peningkatan kualitas sinyal dan data pada daerah yang telah terbangun.

Prioritas penyediaan listrik di Kepulauan Mentawai difokuskan pada optimalisasi pelayanan dasar dan pelayanan publik yang responsif, begitu juga untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, serta dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga terwujud pelayanan pemerintahan yang prima dan handal.

Tabel 4.29
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Penyediaan Internet Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	55,28
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,14

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penyediaan Internet pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada seluruh satuan pendidikan (TK, SD, SMP).
2. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada pemerintahan desa.
3. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada pusat layanan pemerintahan (kantor cabang/korwil, kecamatan, UPTD).
4. Penyediaan *wifi* gratis pada *spot* tertentu bagi masyarakat untuk menggali potensi, dan memberi ruang untuk berkreasi dan menjadi ruang imbal balik kepada pemerintah daerah.

Tabel 4.30
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Penyediaan Internet Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Penyediaan Internet				
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.043.236.000	2.240.460.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Pengelolaan Pendidikan	36.489.277.001	47.389.277.001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL		38.532.513.001	49.629.737.001	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.49.629.737.001.

4. Pembangunan Air Bersih

Pembangunan Air Bersih, yaitu optimalisasi SPAM yang sudah ada sehingga berfungsi dan dapat melayani kebutuhan air masyarakat, meningkatkan kualitas air. Untuk wilayah yang belum dapat di jangkau oleh SPAM, dapat melalui penyediaan air bersih berbasis masyarakat sehingga perlu tata kelola air bersih kepada masyarakat serta program penyediaan air bersih non perpipaan juga menjadi solusi jangka pendek.

Tabel 4.31
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Air Bersih Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		
1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,0125
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)	9,81

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus pada penyediaan air bersih pada 10 SPAM yang ada, selain tersedia juga dipastikan air yang mengalir berkualitas (layak dan aman) untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, juga menyediakan pembangunan air bersih berbasis masyarakat untuk membuka akses air bersih kepada masyarakat yang belum terlayani melalui sistem penyediaan air minum daerah yaitu dengan pembangunan Pamsimas dengan memastikan tata kelola dan keberlanjutan pengelolaannya oleh pemerintahan desa. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Air Bersih pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pengelolaan air bersih melalui badan profesional oleh BUMD/Perusda.
2. Optimalisasi SPAM yang ada dan memastikan ketersediaan dan kualitas air yang disalurkan.
3. Penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas) untuk wilayah yang belum dijangkau oleh SPAM.
4. Penyediaan air bersih non perpipaan untuk daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih.

Tabel 4.32
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Air Bersih Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Air Bersih				
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	886.500.000	3.227.058.157	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	283.027.000	802.927.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		1.169.527.000	4.029.985.157	

Program prioritas mendukung prioritas Pembangunan Air Bersih Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.029.985.157.

5. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa memperhatikan gender dan memperhatikan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus (penyandang disabilitas), dan berpihak pada masyarakat rentan/miskin/miskin ekstrem. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar di mana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Begitu juga dengan dalam hal pemerataan penguasaan bidang sains dasar, bahasa dan matematika. Ini membawa akibat pada keberlanjutan pendidikan yang terhambat pada masalah mutu. Kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah sehingga memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Di sisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing

sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan yang berkualitas dan representatif di setiap pulau besar. Memastikan tenaga kesehatan dan alat kesehatan tersedia dan merata disetiap layanan kesehatan. Memastikan layanan rujukan tidak mengalami kendala/hambatan melalui pengadaan ambulans laut. Pengembangan RSUD ke tipe C, dan pembangunan puskesmas untuk daerah yang masih kesulitan akses kesehatan seperti pada lokasi Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka dan Desa Silabu. Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka *stunting* daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*stunting*). *stunting* adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme karena pengasuhan dan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang belum lengkap, selain dari masalah rendahnya imunisasi lengkap dan sanitasi. Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan di jenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan ke

depan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, ramah pada penyandang disabilitas, tidak membeda-bedakan (gender) berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wirausaha (*enterprenuer*) bukan sekedar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wirausaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/ wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan ke depan.

Tabel 4.33
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2026
Meningkatnya Mutu Pendidikan		
1	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	L = 42,02 N=10,35
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.56
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,42
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)	13,09
Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat		
1	Usia Harapan Hidup	71,37
2	Angka Kematian Ibu	235
3	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	30
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	84,5
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	82,8
Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif		
1	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	99,32
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,24-8,34
3	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	51,22
4	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	15,64

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus penguatan layanan pendidikan dan kesehatan disertai dengan peningkatan produktivitas masyarakat khususnya masyarakat

miskin. Adapun arah kebijakan pada prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Penyediaan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
2. Beasiswa pendidikan berprestasi.
3. Pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
4. Pemberdayaan masyarakat miskin.
5. Perlindungan sosial secara menyeluruh bagi masyarakat miskin.
6. Akses layanan publik gratis bagi masyarakat miskin.

Tabel 4.34
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Sumber Daya Manusia				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	36.489.277.001	47.389.277.001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.680.607.683	52.088.443.404	Dinas Kesehatan/ RSUD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.790.639.979	7.918.469.979	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	70.900.000	70.900.000	Dinas Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Sosial	50.000.000	142.840.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Rehabilitasi Sosial	252.899.000	575.099.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.180.000	22.180.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Program Penanganan Bencana	24.921.000	156.921.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	646.928.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL		89.381.424.663	109.011.058.384	

Program prioritas mendukung prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.109.011.058.384.

6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

   Peningkatan pendapatan masyarakat daat dilihat dari meningkatnya produktivitas di setiap sektor ekonomi masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata.

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi (tren pertumbuhan ekonomi stagnan) sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan BUMD/BUMDes dan koperasi yang siap sebagai pelopor pembangunan ekonomi di daerah dan di desa, ini yang harus diseriusi dan dipastikan bertumbuh. BUMD fokus pada skala lebih besar dan BUMDes pada skala desa, keduanya mendorong peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi lokal. Begitu juga dengan koperasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan daerah dan desa, yaitu dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumber daya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerjasama/ kolaborasi di setiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/*experience* lebih bermakna.

Tabel 4.35
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	47,13
	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	201,59
	Proporsi jumlah UKM non pertanian	200,58
	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,372
Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi		
	ROA BUMD	0,4060
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,701
	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,872
	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	19,718
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,064
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,1649
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok		
	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	31,08
	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	47,25
	Total Kredit/PDRB	6,04
	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	0,1185
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	6,02
	Aset Dana Pensiun/PDRB	9,40
	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	10.501.288.876,24
Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.31
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	72,82
	Rasio Kewirausahaan	1,79
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	83.88
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah		
	Persentase retribusi terhadap PAD	0,872
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,1649
Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat		
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,064

Ket: target pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus tranformasi ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Adapun arah kebijakan pada prioritas Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pengembangan Sektor Produktif.
3. Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha
4. Penyediaan akses sarana dan prasarana pertanian.
5. Pengembangan Ekonomi Pedesaan
6. Akses Keuangan Inklusif

Tabel 4.36
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	Pagu P-RKPD 2026 (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Peningkatan Pendapatan Per Kapita				
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	93.880.000	93.880.000	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	499.437.500	3.523.745.030	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	24.536.000	2.859.192.961	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan
4	Program Penyuluhan Pertanian	84.882.000	84.882.000	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	132.000.000	530.150.000	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	124.000.000	124.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan
7	Program Pengembangan UMKM	465.000.000	1.657.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	199.999.900	235.899.900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.090.000	155.860.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
10	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	18.345.000	68.388.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
11	Program Pemasaran Pariwisata	452.000.000	452.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TOTAL		2.098.170.400	9.784.997.891	

Program prioritas mendukung prioritas Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 11 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.9.784.997.891.

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan proritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.37
Dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
				Pelaksanaan tugas Paskibraka
				Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembentukan Paskibraka
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota.
		Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
		Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.		
		Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.		
		Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan		
		Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan *stereotip* gender.		Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
		Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.	Transformasi pengarusutamaan HAM	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
		Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan bantuan hukum	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memastikan setiap kebijakan bersifat		Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan dan pemulihan saksi dan korban	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyediaan Alat Bantu
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Memperkuat komponen cadangan.	Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan	
		Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara.	Penguatan intelijen dan kontra intelijen	
		Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.	Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medanefektivitas menjaga kedaulatan NKRI.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar.	Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan *choke point*	
		Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.	Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
		Peningkatan profesionalisme dan	Transformasi tata kelola industri	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		kesejahteraan prajurit.	pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan	1. Pengembangan pangan akuatik. 2. Pengembangan pangan hewani. 3. Pengembangan pangan nabati. 4. Penguatan cadangan pangan. 5. Penjaminan mutu dan keamanan pangan. 6. Peningkatan produktivitas hutan. 7. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 8. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 9. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. *10.* Pemulihan luas lahan mangrove	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil.
				Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio	1. Pengembangan pangan nabati. 2. Peningkatan produktivitas hutan. 3. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 4. Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
		Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian.	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati. 3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati. 3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pemantauan Stok Pangan
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
				Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
		Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional	1. Peningkatan produktivitas hutan. 2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 3. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 4. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. 5. Pemulihan luas lahan mangrove	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
		Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID *Food* sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya	Penguatan satu data pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan		Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu	Pengembangan pangan nabati.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
				Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kot
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
		Memastikan kedaulatan pangan berbasis	Pengembangan pangan akuatik.	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)		
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal	Penguatan cadangan pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan	Penjaminan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro
		Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	1. Peningkatan produktivitas hutan. 2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. *3.* Penguatan pengelolaan hutan lestari. *4.* Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. *5.* Pemulihan luas lahan mangrove	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia,	Penguatan satu data pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan		
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Bendungan
				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Peningkatan Kanal Banjir
				Peningkatan Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi
				Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
				Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
		Pengelolaan risiko bencana daya rusak air	Pengelolaan risiko daya rusak air.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pembangunan Kanal Banjir
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi Unit Air Baku

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
		Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Tanggul Sungai
				Pembangunan Kanal Banjir
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Rehabilitasi Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
		Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim	Penguatan industri halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Pameran Dagang Nasional
				Pameran Dagang Lokal
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pameran Dagang Nasional
		Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Penguatan keuangan syariah	
		Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional	Penguatan dana sosial syariah	
		Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat	Digitalisasi sektor ekonomi	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
				Penyusunan Konten
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro	Digitalisasi sektor ekonomi	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
		Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing.	● Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (*AI, blockchain, metaverse*) ● Digitalisasi sektor ekonomi	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	● Penguatan SDM digital. ● Digitalisasi sektor strategis. ● Digitalisasi sektor ekonomi	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*)	Perluasan implementasi teknologi bersih	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan ekonomi sirkular industri	● Penerapan efisiensi sumber daya. ● Penguatan ekosistem daur ulang	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan efisiensi sumber daya	Penerapan efisiensi sumber daya	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan produk ramah lingkungan.	Pengembangan produk ramah lingkungan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Menguatkan ekosistem daur ulang.	Penguatan ekosistem daur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber	Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse,* dan *recycle*	Penanganan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* serta fasilitas pangolin lainnya	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*	Penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan *landfill mining*	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Perbaikan tata kelola persampahan	● Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar Retribusi. ● Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
		Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)	● Peningkatan produktivitas hasil hutan. ● Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Mengelola sumber daya genetik	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif	Pengendalian spesies asing invasif	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati	Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKeanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*)	Pengembangan pengelolaan keamanan hayati *(biosafety)*	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya		
		Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar,langka, dan terancam punah		
		Merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *public private*		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat		
		Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.		Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Analisis denda terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau	Penyediaan pasokan air berkelanjutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan air limbah	Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
				Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)
		Meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/ kota di Indonesia	Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	Pengelolaan risiko daya rusak air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan kualitas lahan	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
		Menurunkan laju deforestasi		
		Meningkatkan kualitas ekosistem gambut		
		Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		Menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
				Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
		Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Menindak tegas praktik pertambangan yang	Pengawasan dan pengamanan	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif	lingkungan hidup dan kehutanan	merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan	Penurunan laju deforestasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		merusak lingkungan		Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
		Melakukan pembangunan rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
		Efisiensi energi	Efisiensi energi	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
		Peningkatan transportasi berkelanjutan	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				PemenuhanfasilitasPelayananAngkutan pelabuhan Pengumpan lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		Peningkatan cadangan karbon	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Pencegahan pengurangan cadangan karbon	Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
		Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Pengembangan industri hijau	Pengembangan industri hijau	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		Pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular	● Penerapan efisiensi sumber daya. ● Penguatan ekosistem daur ulang	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau	Pengembangan industri hijau	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				oordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*		
		Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (c*oal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan		
		Menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
		Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (*carbon tax/carbon trading*, dst) di daerah
		Mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing	Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.	Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
		Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir	Rehabilitasi ekosistem karbon biru – mangrove dan lamun	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi	Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
		Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global	Penguatan data, informasi, dan IPTEK. keanekaragaman hayati	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan	Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Pembangunan Jalan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
	Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	pemerintah daerah		
				Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Rehabilitasi Jembatan
		Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
		Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		konektivitas orang, barang, dan informasi.		
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/ kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah.		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.	Integrasi layanan usaha	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
		Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi.	Formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
		Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan *start-up*.	● Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis Koperasi. ● Pengembangan koperasi sektor produksi skala besar	Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
				Peningkatan Produktivitas, Nilai ambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		Mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.	Pengembangan dan pemeliharaan basis data tunggal koperasi dan UMKM	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Pengembangan Sistem Pemasaran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas.		
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		Integrasi data ekonomi kreatif	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif
				Perlindungan Hasil Kreativitas
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka	● Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts. ● Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan. ● Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi ● dan gim. ● Penguatan ekosistem kuliner.	Perlindungan Hasil Kreativitas
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
		Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia.		Pengembangan Sistem Pemasaran
				Penyediaan Infrastruktur
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global.	● Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi. ● Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri Digital. ● Digitalisasi sektor ekonomi ● Digitalisasi sektor strategis.	Penyediaan Infrastruktur
				Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
				Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif
				Penyusunan Skema Insentif Daerah
		Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum).		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
		Mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.		Pengembangan Pendidikan
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
				Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
				Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global.		Penyusunan Skema Insentif Daerah
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
		Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger
		Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata.		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
		Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*)	Perluasan akses dan inovasi pembiayaan.	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
		Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi *bankable.*		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
		Menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif.		Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
				Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
		Memberikan bantuan peningkatan		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota.		
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
				Pemeliharaan Mebel Sekolah
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
				Penyediaan infrastruktur TIK
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Penataan Ruang/Sudut Baca
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang.	Penguatan pembelajaran berbasis teknologi digital	Penyediaan infrastruktur TIK

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Laboratorium
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pembangunan Fasilitas Parkir
				Pembangunan Kantin Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pengadaan Mebel PAUD
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pengadaan Perlengkapan PAUD
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		Revitalisasi pendidikan nonformal.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		Penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI).		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Penguatan tata kelola pendidikan.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kot
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif.		Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pelayanan antar Kerja
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
		Memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif	Mobilitas dan pelindungan tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
		Meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
		Melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		olahraga.	antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas.	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		Mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Kabupaten/Kota
				Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
		Perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima.	Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global.	Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Pemenuhan layanan pendidikan	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.	pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya.	
		Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya.	Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa
				Pembangunan Ruang Laboratorium
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*.	Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan penguatan bidang STEAM.	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				(TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya.	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
		Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio.	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting.	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin).	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain).	Pengendalian penyakit tuberkulosis. Pengendalian penyakit tidak	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
			menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria).	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Investasi pelayanan kesehatan primer. Penguatan layanan nggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit akses	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		Memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap.		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Regional/Regional Maintainance Center
		Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.		
		Memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	
		Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren.		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk).	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
		Membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*).		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi		Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan	Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		inovasi teknologi kesehatan.		
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan.	Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Penyediaan fasilitas pendukung keluarga.	Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga. Penguatan keluarga tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk mengoptimalkan fungsi pengasuhan keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
				Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Keluarga Berkualitas
		Penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan.	Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		Pemenuhan hak anak secara universal.	Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak.	Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan epemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko.	Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
				koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
		Penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan.	Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
			pada pemuda.	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan epemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan.	Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia.	Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut Usia.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete program*) secara berjenjang dan berkelanjutan.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri	Peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi.	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		strategis nasional.	Peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA. Peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif.	Berbasis Sumber Daya Alam
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru. Peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
				Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Membangun dari Desa dan dari	Peningkatan daya saing, produktivitas,	Pemenuhan layanan dasar dan	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
	Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan.	penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.	infrastruktur perdesaan	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa.	Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
		Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman,		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota		
		.		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
				Mendukung Pembangunan Puskesmas
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				Optimalisasi TPA/TPST/SPA
				Pembangunan TPA/TPST/SPA
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan.	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
				Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa		Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa.	Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
		.		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan).		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		potensi desa serta kawasan perdesaan		
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa		Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.	Transformasi pembangunan daerah lambat tumbuh	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi.	Fasilitasi pembangunan rumah baru layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		.		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		.		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro		Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
				Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen
		Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	Mendukung Basis Data Terpadu untuk pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara Berkesinambungan.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial
		Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar,dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		Penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain.	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
				Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan.		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		.		
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin *independensi*, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.	Pengelolaan dan audit keuangan partai politik.	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu.	Digitalisasi pelayanan publik.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
				Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
		Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.		Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
				Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi.		
		Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan		
		Menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.		
		Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		publik.		
		Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.		
		Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.		
		Penguatan budaya hukum		Fasilitasi Bantuan Hukum
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
				Kerjasama Pengawasan Internal
		Memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara.	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara.		
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pengelolaan *Assessment Center*
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta		Pembinaan Disiplin ASN
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
				Pengelolaan Promosi ASN
				Pengelolaan Mutasi ASN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
				Pengelolaan Data Kepegawaian
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		Transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik, melalui menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; digitalisasi pelayanan publik; Pengembangan talenta digital pelayanan publik; penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan perluasan akses pelayanan publik.	Digitalisasi pelayanan publik.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		.		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
		.		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		Reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, dan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan Perpajakan. Optimlaisasi *local taxing power.* Peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat. Optimalisasi kualitas belanja TKD. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan inovatif dan berkelanjutan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan	Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		sekolah.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba.		
		Meningkatkan kemampuan *surveillance* dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		
		Menutup semua akses ke situs perjudian *online*.	Penutupan akses ke situs perjudian *online*	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		.		
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		Meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		berbagai pihak.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.		
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung
				Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
		Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal.	Penjaminan produk halal.	Pengembangan Usaha Mikro
		Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman.	• Peningkatan kerukunan umat beragama. • Transformasi layanan penyelenggaraan ibadah haji.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata.	• Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan. • Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan.	Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.	Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
		Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		Merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilainilai luhur bangsa bagi generasi muda.	Pengelolaan terpadu cagar budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		.		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Mengalokasikan dana budaya dan	Pengelolaan terpadu festival seni	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia.	budaya daerah berkelas internasional.	Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara.	Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya.	Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas.	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		.		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Pemperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.	Pelindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan asyarakat dan komunitas adat.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia.	Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
		Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.	Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini.	Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana terpadu.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi	Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
		dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.	di daerah terdampak bencana.	
		Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
		Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
		Pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana.	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana	Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim.	● Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
		Meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.	● Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung. ● Penetapan dan penyelenggaraan rencana ● aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ) secara komprehensif dan sinergis. ● Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK). ● Peningkatan keselamatan dan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
			keamanan transportasi udara, laut, dan darat	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh Bappeda dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 4.38
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi TAPD

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	27-02-2025	Alisandre Zalukhu	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan bedah rumah wilayah Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Perhubungan	Usulan disetujui	6	unit	120.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2	27-02-2025	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi	Desa Sikakap, Desa Makalo, Desa Taikako, Desa Saumanganyak	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	8	Ekor	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
3	27-02-2025	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani/Ternak Lalatek Leleu	Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	10	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
4	27-02-2025	Manual Simamora	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan Bedah Rumah untuk Masyarakat Desa Bukit Pamewa	Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Perhubungan	Usulan disetujui	4	Unit	80.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
5	27-02-2025	Manual Simamora	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan Bedah Rumah untuk Masyarakat Desa Sipora Jaya	Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Perhubungan	Usulan disetujui	4	Unit	80.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
6	03-03-2025	Kristinus	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan pengadaan mesin ketam untuk Kelompok Kerajinan Loinak	Dusun Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	13	Unit	65.000.000	Pengembangan Usaha Mikro

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
7	03-03-2025	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simandaraingat	Dusun Malabbaet Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	8	Ekor	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
8	04-03-2025	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simatalu. (Rp.75.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	75.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas
9	04-03-2025	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab Puskesmas/ RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simalegi. (Rp.75.000.000)	Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	75.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
10	04-03-2025	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Rehap Polindes Saikoat Beserta Penerangan Desa Simatalu (Rp.250.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	250.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
11	04-03-2025	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Jalan Pertanian Arah SDN 28 Simatalu Panjang 200 Meter, Dusun Limu Desa Simatalu Kec. Siberut Barat. (Rp. 190.000.000)	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	1	Paket	250.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
12	04-03-2025	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak babi 14 pasang Rp 42.000.000	Dusun Nemnemleleu, Desa Sikakap Kecematan Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	19	Ekor	41.800.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
13	04-03-2025	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Bantuan Mesin Heler dengan Gudang	Dusun Bubuget, Desa Sinaka Kecematan Pagai	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	1	unit	150.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			pangan ternak, peralatan pertanian	Rp.150.000.000	Selatan						Pendukung Pertanian
14	04-03-2025	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan ternak Kelompok Pusarat Saina Rp. 45.000.000	Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	19	Ekor	41.800.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
15	04-03-2025	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Alat Pertanian Senso Kecil Kelompok Polaga Rp45.000.000	Desa Matobe Kecematan Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	15	unit	45.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
16	04-03-2025	Juni Arman, S. IP	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal Usaha di Sipora Utara dan Sipora Selatan (Rp.400.000.000)	Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	Paket	100.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
17	04-03-2025	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Perlengkapan Bengkel Kelompok BMS “MAJU TERUS” Dusun Nang_Nang Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara. (Rp.150.000.000)	Dusun Nang-nang Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	Paket	150.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
18	05-03-2025	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar,	Pengadaan Mobiler SMP N 2 Rp. 75.000.000	Dusun Guluk guluk Desa Saumanganyak Kecematan Pagai Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	2	unit	75.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			jalan lingkungan sekolah)								
19	05-03-2025	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Kelompok Tani Ronku Gulu2 Rp.45.000.000	Desa Saumanganyak Kecematan Pagai Utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	10	Ekor	22.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
20	06-03-2025	Kristinus	Perbaikan rumah tidak layak huni	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Keret Baga)	Desa Saibi Samukop	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	6	Unit	120.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
21	10-03-2025	Joni Kusma	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi sebanyak 10 ekor untuk kelompok TUNAS HARAPAN	Desa Simalegi kec, siberut barat	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	8	Ekor	115.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
22	11-03-2025	Juni Arman, S. IP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Modal usaha kebun Cabe kelompok Tani Raro Simalagak di Desa Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan (Rp.100.000.00)	Desa Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	1	Paket	100.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
23	11-03-2025	Juni Arman, S. IP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan Alat Perbengkelan Kelompok Bintang Montir Sipora Selatan (Rp.200.000.000)	Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	Paket	60.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
24	11-03-2025	Ibrani Sababalat,	Bantuan Modal	Modal Usaha	Desa Sioban	Dinas Koperasi,	Usulan	12	Orang	30.000.000	Pengembangan

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
		SH	Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Kelompok Kilibaget Rp. 5.000.000/org dan Bantuan Keranjang Jualan 12 buah	Kecematan Sipora Selatan	Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	disetujui				Usaha Mikro
25	11-03-2025	Juni Arman, S. IP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Modal Kerja Tani Cabe Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan (Rp. 200.000.000)	Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	8000	bks	140.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
26	11-03-2025	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilaim	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	2	Unit	20.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
27	11-03-2025	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Dusun Monga Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	2	Unit	20.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
28	11-03-2025	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Dusun Sao Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	2	Unit	20.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
29	11-03-2025	Ibrani Sababalat, SH	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pe	Pembangunan Jalan Pertanian di Dusun Bagat Lelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan	Dusun Bagat Lelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	1	Unit	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			meliharaan DAM parit pertanian								
30	12-03-2025	Wahyu Setiadi	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Usaha UMKM Rp.200.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	6	unit	60.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
31	12-03-2025	Wahyu Setiadi	Perbaikan rumah tidak layak huni	Rehab Rumah Rp. 400.000.000	Dusun Baleraksok Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Perhubungan	Usulan disetujui	6	unit	120.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
32	12-03-2025	Wahyu Setiadi	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan alat pertanian mesin senso (Lolo Simanoep) Rp. 120.000.000	Dusun Sabiret Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	17	unit	120.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
33	12-03-2025	Wahyu Setiadi	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Rehab Puskesmas Malakopa Rp. 200.000.000	Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	paket	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
34	12-03-2025	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Peremajaan Cengkeh Leleu Sabeu - Bosua dan Maileppet - Ailou- Leleu	Dusun Makalo Desa Makalo Kecematan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	40	ha	100.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			pertanian	Bukku Kelompok Tani Leleu Lagai Rp 135.000.000							
35	12-03-2025	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Bere Sigoiso dan Bea Sabeu Kelompok Tani Kabei Kere Rp. 135.000.000	Dusun Makalo Desa Makalo Kecematan Pagai Utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	24	ha	100.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
36	12-03-2025	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Cengkeh Leleu Bere Kelompok Tani Kuoba Kai Rp 135.000.000	Dusun Bere Desa Makalo Kecematan Pagai Utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	41	ha	100.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
37	13-03-2025	Joni Kusma	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan Pembangunan Pondok kecil-kecil untuk ibu-ibu UMKM Desa Sirilogui	Desa sirilogui, kec siberut utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	5	Unit	65.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
38	13-03-2025	Gerson	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan alat sulingan nilam (drom) untuk masyarakat di Dusun Bagan lelet	Dusun bagan lelet desa sioban kec, sipora selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	paket	35.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
39	13-03-2025	Gerson	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan berupa Freezer box untuk kelompok UMKM Desa Tuapejat	Desa Tuapejat kec. sipora utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	30	Unit	153.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
40	13-03-2025	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Pengadaan bibit ternak babi untuk	Dusun malabbaet desa sioban kec, sipora selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	20	Ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			pangan ternak, peralatan pertanian	masyarakat dusun malabbaet							Daerah Kabupaten/Kota Lain
41	13-03-2025	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak babi untuk masyarakat dusun takkuman	dusun takkuman desa sioban kec sipora selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	20	Ekor	44.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
42	14-03-2025	Hendrikus Erik	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan perbaikan jalan pertanian di Dusun Siguluguluk	Dusun siguluguluk desa saliguma kecamatan siberut tengah	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	1	paket	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
43	14-03-2025	Hendrikus Erik	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit kelapa untuk masyarakat desa maileppet	Desa maileppet kecamatan siberut selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	30	ha	100.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
44	14-03-2025	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Bio	Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	10	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
45	14-03-2025	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak,	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok	Dusun Pariok Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	10	Ekor	150.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			peralatan pertanian	Ternak Maju Bersama							Kabupaten/Kota Lain
46	14-03-2025	Alisandre Zalukhu	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan modal usaha untuk UMKM Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	paket	65.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
47	16-03-2025	Julius Tairarak, S. Pt	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian	Pembangunan jalan pertanian sepanjang 100 meter dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000	Dusun Sakaladat Desa Simalegi	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	200	meter	300.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
48	17-03-2025	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan ternak babi untuk kelompok Ternak TORO LAGGOK	Dusun Sioban dalam Desa Sioban kec sipora selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	11	Ekor	24.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
49	17-03-2025	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Mesin rumput Kelompok Tani Simalatcat	Dusun Belekroksok sara leleu, Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	19	unit	41.800.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
50	17-03-2025	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Kelompok Tani Onibaga	Dusun Palukkuek Desa Malakopa Kecematan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	19	unit	41.800.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
51	17-03-2025	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Mesin Pemotong Rumput Kelompok Tani Toro Gerat	Dusun Puru Pugat, Beleraksok Desa Malakopa Kevcematan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	17	unit	37.400.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
52	17-03-2025	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Pengadaan Kulkas Pendingin/Freze r Kelompok Usaha Durian Rp.300.000.000	Dusun Makukuet Desa Matobe Kecematan Sikakap	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	2	unit	30.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
53	17-03-2025	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Frezer Kelompok Korananta Rp.300.000.000	Desa Matobe Kec Sikakap	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	2	unit	30.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
54	17-03-2025	Isar Taileleu, S. PAK	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kecematan Pagai Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Perhubungan	Usulan disetujui	3	unit	135.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
55	17-03-2025	Safrijal Sageileppak	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pengadaan bantuan BBM untuk pasien rujukan di Puskesmas Taileleu	Desa Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	70.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
56	17-03-2025	Safrijal Sageileppak	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Pengadaan bantuan untuk UMKM Muara Siberut	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	Paket	100.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
57	17-03-2025	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan modal usaha Kelompok UMKM Baklo Masing masing anggota 30.000.000 terdiri dari 20 orang Rp 600.000.000	Desa Muara Siberut Kecematan Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	20	orang	100.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
58	17-03-2025	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal usaha Kelompok UMKM Orek Rp.600.000.000	Desa M.Siberut Kecematan Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	20	orang	100.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
59	17-03-2025	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal Usaha Kelompok UMKM Kole Rp. 600.000.000	Desa Maileppet Kec Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	30	orang	100.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
60	18-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin senso kecil merek STHILL untuk mengoptimalkan kegiatan peremajaan kelapa kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya, kecamatan pagai utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	6	Unit	30.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
61	18-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak,	Pengadaan bantuan mesin rumput merek STHILL untuk	Desa saumanganya, kecamatan pagai utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	13	UNIT	35.100.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			peralatan pertanian	mengoptimalkan kegiatan peremajaan kelapa Kelompok Tani RORO SIMERU							Pertanian
62	18-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin potong rumput merek sthill untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produkdi hasil pertanian kelompok Tani PETAK BERBAGI	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kec pagai utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	12	Unit	26.400.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
63	18-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan Sprayer Elektrik Knapsack Baterai 2in1 untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produksi hasil pertanian kelompok Tani PETAK BERBAGI	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kecamatan pagai utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	12	Unit	8.400.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
64	18-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak,	Pengadaan bantuan Mesin Thresher Kubota (perontok gaba)	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kec, pagai utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	1	Unit	20.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			peralatan pertanian	untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan hasil produksi pertanian kelompok Tani PETAK BERBAGI							Pertanian
65	18-03-2025	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	Unit	10.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
66	18-03-2025	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Bedah Rumah	Dusun Rokot Desa Matobek Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Perhubungan	Usulan disetujui	5	Unit	100.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
67	18-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pengadaan bantuan rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Bulasat	Desa Bulasat kecamatan pagai selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Perhubungan	Usulan disetujui	3	Unit	135.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
68	19-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pengadaan bantuan mesin meja kayu kombinasi serba guna potong dan ketam untuk UMKM KARONIET	Dusun biu-biu desa saumanganya kec pagai utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	paket	18.000.000	Pengembangan Usaha Mikro
69	19-03-2025	T. F Yohanes Pardede	Bantuan peralatan alat/mesin industri	Pengadaan bantuan Mesin	Dusun Biu-biu Desa Saumanganya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan	Usulan disetujui	1	unit	45.000.000	Pengembangan Usaha Mikro

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			kecil	Diesel Yanmar TF 155 untuk UMKM KARONIET	kecamatan pagai utara	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					
70	19-03-2025	James Sibarani	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Kandang Ayam 3bh dan Bibit ayam 15 rb Ekor dan Pakam ayam 750 karung kelompok Sumber usaha, tunas baru, boiler maju Rp 900.000.000	Desa Bukit Pamewa Kec Sipora Utara	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Usulan disetujui	1100	Ekor	120.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
71	19-03-2025	James Sibarani	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Bantuan alat ketam dan alat potong kayu Kelompok Perabot Maju Rp.75.000.000	Desa Betumonga Kec Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Usulan disetujui	1	paket	60.000.000	Pengembangan Usaha Mikro

Tabel 4.39
Daftar Calon Penerima Bantuan Hibah Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2026

NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	ALAMAT
Gereja Katolik St teresa	Dusun Puran, Desa Muara Sikabalauan, Kec. Siberut Utara
GPdI NAFIRI	Dusun Sinabak, Desa Sidomakmur, Kec. Sipora Utara
GKPM Parak Batu	Dusun Parak Batu, Desa Malakopa, Kec.Pagai Selatan
GKPM Jemaat Nehemia	Dusun Sikerene, Desa Saureinu, Kec.Sipora Selatan
GKPM Jemaat Kudus Matobe	Dusun Usut Ngaik, Desa Matobe, Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Bagat Lelet	Dusun Lelet, Desa Sioban, Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Wilayah III	Dusun Teiteipabobokat, Desa Sioban, Kec. Sipora Selatan
GKPM JEMAAT Sion Malabbaiet	Dusun Malabbaet, Desa Sioban, Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Malancan	Dusun Bunda, Desa Malancan, Kec. Siberut Utara
GKPM Mandiri Saumanganyak	Dusun Saumanganyak, Desa Saumanganyak, Kec. Pagai Utara
GKPM Jemaat Betlehem	Dusun Silaoinan Desa Saureinu Kec. Sipora Selatan
GPdI Peipei	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec. Siberut Barat Daya
GKPM Jemaat Tumalei	Dusun Tumalei Desa Silabu Kec. Pagai Utara
GPdI Nazaret Toloulaggo	Dusun Toloulaggo Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya
GKPM Jemaat Saureinu	Dusun Saureinu Desa Saureinu Kec. Sipora Selatan
GPdI Jemaat Batu Karang	Dusun Rokot Desa Matobe Kec. Sipora Selatan
GPdI Jemaat Elshadai Saureinu	Dusun Kaliou Desa Saureinu Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Malakopa	Dusun Malakopa Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan
GPdI Sangkakala	Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
GKPM Bethesda	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan
GKPM Jemaat August Lett Talopulei	Dusun Talopulei Desa Makalo Kec. Pagai Selatan
GKPM Pusat Nemnemleleu	Dusun Sibaibai Desa Sikakap Kec. Sikakap
GKPM Jemaat Estomihi	Dusun Masokut Desa Beriulou Kec Sipora Selatan
GKPM Jemaat Kanaan	Dusun Beriulou Desa Beriulou Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Eklesia Bukit Batu	Dusun Leleu Bukku Desa Taikako Kec. Sikakap
GKPM Jemaat Puro	Dusun Puro Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan
GKPM Jemaat Seay	Dusun Seay Lama Desa Sikakap Kec. Sikakap
GKLI Anugrah Tuapejat	Dusun Turonia Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara

NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	ALAMAT
GKLI Emmaus	Dusun Nemnemleleu Desa Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Muntei Sigoisok	Dusun Muntei Sigoisok Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan
GKPM Jemaat Mandiri Manganjo	Dusun Manganjo Desa Saumanganya Kec Pagai Utara
Gereja Katolik St. Petrus	Dusun Tuapejat Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara
GPdI Immanuel Malilimok	Dusun Malilimok Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya
Gereja Pimpinan Rohul Kudus	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec. Siberut Barat Daya
Sidang Sinode Am	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara
Convent Pendeta	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yayasan Aguslet NemnemLeleu Sikakap	Kecamatan Sikakap. Kab. Kepulauan Mentawai
GKPM Pancasila	Kota Padang. Propinsi Sumatera Barat
GKPM Jemaat Mandiri Pniel	Kecamatan Sipora Utara
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kab Kep Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
Baznas	Kecamatan Sipora Utara
Gamki	Kecamatan Sipora Utara

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan Tahun 2026

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan RKPD merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun 2026.

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 beserta pergeseran/alokasi anggaran sesuai urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diuraikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2026

NO	NAMA SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	26.623.600.725	31.511.512.999	4.887.912.274
2	SEKRETARIAT DPRD	23.972.279.823	26.341.474.276	2.369.194.453
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5.445.863.722	7.317.989.198	1.872.125.476
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	129.915.030.739	156.349.041.171	26.434.010.432
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.351.974.563	6.896.651.177	2.544.676.614
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.584.565.187	4.719.745.627	135.180.440
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.227.842.543	8.644.459.306	4.416.616.763
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.359.350.886	4.475.487.813	1.116.136.927
9	DINAS KESEHATAN	117.022.636.490	122.883.486.347	5.860.849.857
10	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	21.451.655.999	44.883.096.872	23.431.440.873
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.807.541.796	4.041.532.836	1.233.991.040
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.205.028.959	4.581.770.962	376.742.003
13	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	13.856.948.603	17.403.121.940	3.546.173.337
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.965.460.452	6.484.136.502	518.676.050
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.870.302.878	5.214.969.112	1.344.666.234
16	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.475.132.479	13.184.712.689	5.709.580.210
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.129.136.943	133.805.147.766	93.676.010.823
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,	5.936.975.471	6.887.743.699	950.768.228

NO	NAMA SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.691.279.386	4.383.658.935	692.379.549
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	236.939.435.771	249.260.694.591	12.321.258.820
21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.254.183.840	6.197.323.833	943.139.993
22	INSPEKTORAT	6.121.271.001	6.649.547.666	528.276.665
23	KECAMATAN PAGAI SELATAN	1.964.186.857	2.118.596.595	154.409.738
24	KECAMATAN PAGAI UTARA	1.866.265.045	2.172.024.812	305.759.767
25	KECAMATAN SIBERUT BARAT	1.636.707.947	1.764.690.583	127.982.636
26	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	1.650.605.991	1.691.459.116	40.853.125
27	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2.449.759.821	2.473.425.068	23.665.247
28	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	1.669.081.071	1.704.616.498	35.535.427
29	KECAMATAN SIBERUT UTARA	2.864.746.916	2.919.477.784	54.730.868
30	KECAMATAN SIKAKAP	2.934.339.419	3.239.160.154	304.820.735
31	KECAMATAN SIPORA SELATAN	2.739.264.669	2.850.624.489	111.359.820
32	KECAMATAN SIPORA UTARA	2.232.948.038	2.519.039.933	286.091.895
33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14.389.997.979	18.330.743.088	3.940.745.109
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.384.524.847	6.002.030.598	617.505.751
TOTAL		718.989.926.855	919.903.194.034	200.913.267.179

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**253.260.130.717,00**	**236.939.435.770,92**	**249.260.694.590,92**	**-3.999.436.126,08**							**260.464.390.034,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.760.130.717,00**	**235.839.435.770,92**	**247.860.694.590,92**	**-2.899.436.126,08**							**257.964.390.034,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.760.130.717,00**	**235.839.435.770,92**	**247.860.694.590,92**	**-2.899.436.126,08**							**257.964.390.034,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**186.478.032.967,25**	**199.350.158.770,00**	**200.071.417.590,00**	**8.690.071.916,75**							**195.168.104.884,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**186.478.032.967,25**	**199.350.158.770,00**	**200.071.417.590,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**195.168.104.884,00**	-
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	186.415.032.967,25	199.287.158.770,00	200.008.417.590,00	13.593.384.622,75			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai		195.130.104.884,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1900 Orang /bulan	1900 Orang /bulan	186.415.032.967,25	199.287.158.770,00	200.008.417.590,00	13.593.384.622,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN KHUSUS GURU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			195.130.104.884,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai		38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase TK Terakreditasi B Persentase PKBM Terakreditasi B Persentase SMP Terakreditasi B Persentase SD Terakreditasi B Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum**				**32,5 46 53 32 55 persen persen persen persen persen**	**32,5 32 46 55 53 persen persen persen persen persen**	**63.882.097.749,75**	**36.489.277.000,92**	**47.389.277.000,92**	**-1.485.812.599,75**							**62.396.285.150,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*APK SD/MI/Paket A APM SD /MI/ paket A*				100 persen 90 persen	100 persen 90 persen	31.880.693.850,00	19.971.900.600,92	24.083.071.504,92	-7.797.622.345,08			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas, Guru dan Siswa		31.831.355.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	1.765.000.000,00	0,00	0,00	-1.765.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	494.583.400,00	0,00	0,00	-494.583.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.659.773.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	13 Paket	816.000.000,00	276.008.205,00	1.967.758.405,00	1.151.758.405,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	568.090.000,00	340.102.000,00	188.102.000,00	-379.988.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.802.769.500,00	150.000.000,00	366.500.000,00	-1.436.269.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			969.807.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	250 Orang	2.544.304.600,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-1.194.304.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.676.337.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	155.793.395,92	158.016.899,92	8.016.899,92	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	380.566.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-255.566.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				135 Orang	135 Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				268 Orang	136 Orang	400.000.000,00	0,00	221.707.500,00	-178.292.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10 Dokumen	10 Dokumen	553.627.500,00	61.497.000,00	61.497.000,00	-492.130.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			403.627.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	486.370.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-386.370.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			187.298.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	10 Komunitas	405.742.350,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-155.742.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			305.870.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				5 Paket	5 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	130.000.000,00	100.000.000,00	50.202.000,00	-79.798.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	2 Ruang	1.825.000.000,00	0,00	808.740.500,00	-1.016.259.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				538 Orang	538 Orang	714.236.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	-469.236.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			714.236.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	6 Ruang	2.249.028.500,00	350.000.000,00	1.722.047.200,00	-526.981.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.549.028.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				14000 Peserta Didik	14000 Peserta Didik	15.125.376.000,00	16.318.500.000,00	16.318.500.000,00	1.193.124.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.125.376.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*APK SMP/MTS/ Paket B APM SMP /MTS/ Paket B*				100 persen 64 persen	100 persen 64 persen	26.399.528.899,75	11.546.156.000,00	17.569.537.846,00	-8.829.991.053,75			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		24.613.076.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	4.503.519.200,00	0,00	0,00	-4.503.519.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.503.519.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.470.850.200,00	0,00	0,00	-1.470.850.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.470.850.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	964.450.200,00	0,00	0,00	-964.450.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			964.450.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.277.528.200,00	0,00	0,00	-1.277.528.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.277.400.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	4 Unit	1.250.383.300,00	0,00	3.821.210.550,00	2.570.827.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.250.383.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	3.175.603.200,00	0,00	0,00	-3.175.603.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.175.603.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	15 Paket	501.837.000,00	0,00	551.651.000,00	49.814.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			501.837.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	8.136.875.000,00	7.838.260.000,00	7.838.260.000,00	-298.615.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.454.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	501.413.400,00	184.957.400,00	184.957.400,00	-316.456.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			207.633.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	400 Orang	697.291.400,00	700.222.400,00	1.628.516.000,00	931.224.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			797.291.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	73.298.000,00	73.298.000,00	-76.702.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	313.034.600,00	99.963.600,00	99.963.600,00	-213.071.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			149.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				68 Orang	68 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				34 Dokumen	34 Dokumen	288.352.000,00	199.591.000,00	253.055.150,00	-35.296.850,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			245.052.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.338.045.000,00	338.045.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	10 Komunitas	199.999.800,00	0,00	0,00	-199.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	281.519.600,00	199.863.600,00	199.863.600,00	-81.656.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			224.517.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	1.386.871.799,75	1.250.000.000,00	1.580.717.546,00	193.845.746,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			740.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*APK PAUD (5-6)*				57 persen	57 persen	3.554.865.000,00	3.195.876.700,00	3.860.259.950,00	305.394.950,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		3.904.843.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	20 Unit	0,00	0,00	224.107.250,00	224.107.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			349.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1050 Orang	1050 Orang	200.000.000,00	97.716.500,00	97.716.500,00	-102.283.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				110 Orang	110 Orang	800.000.000,00	134.430.200,00	234.250.200,00	-565.749.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	130.000.000,00	200.000.000,00	281.400.000,00	151.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	2.184.865.000,00	2.763.730.000,00	2.763.730.000,00	578.865.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.184.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10 Dokumen	10 Dokumen	140.000.000,00	0,00	116.520.000,00	-23.480.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				40 Peserta didik	40 Peserta didik	100.000.000,00	0,00	142.536.000,00	42.536.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan*				4,3 persen	4,3 persen	2.047.010.000,00	1.775.343.700,00	1.876.407.700,00	-170.602.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Guru dan Siswa		2.047.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				35 Orang	35 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	88.553.700,00	88.553.700,00	-61.446.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	90.000.000,00	75.000.000,00	56.377.000,00	-33.623.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	1.682.010.000,00	1.586.790.000,00	1.661.790.000,00	-20.220.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.682.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8 Dokumen	8 Dokumen	75.000.000,00	25.000.000,00	69.687.000,00	-5.313.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**0,00**							**400.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.500.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**-1.100.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.500.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**-1.100.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan**				**65 persen**	**65 persen**	**1.400.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.170.000.000,00**	**0,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan, Pelindungan, Pemajuan, Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*				100 persen	100 persen	525.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Cagar Budaya, Masyarakat		525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	525.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Lestarinya Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	875.000.000,00	700.000.000,00	670.000.000,00	-205.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Cagar Budaya, Masyarakat		875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	10 Objek	875.000.000,00	700.000.000,00	670.000.000,00	-205.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah sanggar yang dibina**				**5 persen**	**5 persen**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**600.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pelestarian Seni Tradisional*				100 persen	100 persen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	40 Orang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)**				**52 persen**	**52 persen**	**500.000.000,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan*				100 persen	100 persen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Cagar Budaya, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan*				100 persen	100 persen	350.000.000,00	0,00	230.000.000,00	-120.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Cagar Budaya, Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				10 Objek	10 Objek	350.000.000,00	0,00	230.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**73.246.043.934,00**	**77.432.470.896,00**	**79.634.400.141,00**	**-73.246.043.934,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	44.263.400,00	44.263.400,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	6 Dokumen	0,00	0,00	44.263.400,00	44.263.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS Terlaksananya pembayaran honor tenaga kerja dengan perjanjian kerja dengan Perjanjian (Kontrak)*				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	73.182.043.934,00	77.368.470.896,00	79.371.088.817,00	6.189.044.883,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	73.182.043.934,00	77.368.470.896,00	79.339.708.817,00	6.157.664.883,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	4 Dokumen	0,00	0,00	31.380.000,00	31.380.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	87.265.924,00	87.265.924,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	6.791.500,00	6.791.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	59.498.724,00	59.498.724,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	2 Laporan	0,00	0,00	18.475.700,00	18.475.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rekening air yang dibayarkan Rekening Listrik Yang dibayarkan*				1 Tahun	1 Tahun	64.000.000,00	64.000.000,00	84.800.000,00	20.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.000.000,00	64.000.000,00	84.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	46.982.000,00	46.982.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	3 Unit	0,00	0,00	21.732.000,00	21.732.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	25.250.000,00	25.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Visite Rate Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Prevalensi Malaria Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Prevalensi Stunting Angka Kematian Bayi (AKB)**				**14 1 15 250/100.000 100 23/1.000 2.6 Persen RSUD Puskesmas 100 KH Persen 1000 KH 1 Tahun**	**2.6 250/100.000 15 100 1 14 23/1.000 1 Tahun 100 KH Puskesmas Persen RSUD Persen 1000 KH**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan yang tersedia Jenis Alat Kesehatan yang tersedia Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang di rehab Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan Fungsinya Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi Jumlah Rumah Sakit yang direhabilitasi Jumlah Rumah Sakit Yang ditingkatkan Fungsinya tersedianya obat dan vaksin di pelayanan kesehatan*				100 Persen 1 Unit 2 Unit	100 Persen 1 Unit 2 Unit	6.975.926.000,00	7.485.756.000,00	7.775.367.935,90	799.441.935,90			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	2 Unit	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				100% Unit	100% Unit	256.632.000,00	0,00	0,00	-256.632.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Unit	10 Kec Unit	600.000.000,00	980.000.000,00	1.084.611.935,90	484.611.935,90	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100% Unit	100% Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	1276 Unit	0,00	290.024.000,00	390.024.000,00	390.024.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				100% Unit	100% Unit	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100% Paket	100% Paket	3.484.165.000,00	4.562.892.000,00	4.562.892.000,00	1.078.727.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100% Keluarga	100% Keluarga	20.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				100% Layanan	100% Layanan	50.000.000,00	1.081.400.000,00	1.081.400.000,00	1.031.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				100% Paket	100% Paket	465.129.000,00	371.440.000,00	371.440.000,00	-93.689.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Kegiatan Lanjut Yang ke pelayanan Kesehatan* *Jenis Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat yang dilajukan* *Jenis Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga* *Jenis Kegiatan Pelayanan Rumah sakit* *Jenis Kegiatan pengelolaan Surveilans Kesehatan* *Jenis Kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat* *Jenis Kegiatan upaya Promosi kesehatan yang Dilaksanakan* *Jenis layanan rujukan dan rujuk balik* *Jenis Penyakit Menular dan Tidak Menular Yang diilayani* *Jenis tanaman obat yang dikembangkan* *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar/ Sekolah* *Jumlah desa yang melakukan STBM* *Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan* *Jumlah Ibu yang mendapatkan Pelayanan dengan Jaminan Persalinan* *Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan* *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang* *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* *Jumlah pasien HIV Yang Terinfeksi yang ditangani* *Jumlah Pasien yang ditangani* *Jumlah penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan* *Jumlah penderita penyakit Diabetes melitus yang ditangani* *Jumlah penderita penyakit Hipertensi yang ditangani* *Jumlah Petugas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita* *Jumlah UKS dan Dokter Kecil yang dilatih Jenis kegiatan sanitasi yang dilaksanakan* *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir* *Persentase Kesembuhan TB* *Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat* *Tersedianya biaya Operasional IFK Tersedianya Obat dan BMHP*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	409.888.000,00	220.383.000,00	220.383.000,00	-189.505.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	441.595.000,00	225.728.000,00	191.579.500,00	-250.015.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	205.000.000,00	451.308.000,00	451.308.000,00	246.308.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	128.210.000,00	3.210.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	279.672.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-179.672.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100% Dokumen	100% Dokumen	120.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-95.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				100% Dokumen	100% Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100% Dokumen	100% Dokumen	193.368.000,00	433.653.000,00	433.653.000,00	240.285.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100% Dokumen	100% Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100% Dokumen	100% Dokumen	20.000.000,00	420.188.838,40	383.268.038,40	363.268.038,40	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100% Dokumen	100% Dokumen	20.105.700,00	207.123.000,00	207.123.000,00	187.017.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100% Dokumen	100% Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100% Dokumen	100% Dokumen	120.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-85.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100% Dokumen	100% Dokumen	500.000.000,00	212.258.000,00	168.038.836,00	-331.961.164,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100% Dokumen	100% Dokumen	5.948.600.000,00	6.105.583.200,00	6.105.583.200,00	156.983.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				100% Dokumen	100% Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				100% Dokumen	100% Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100% Dokumen	100% Dokumen	196.718.600,00	0,00	0,00	-196.718.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	100% Orang	150.000.000,00	147.520.000,00	79.476.000,00	-70.524.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	100% Orang	75.000.000,00	65.056.000,00	52.856.000,00	-22.144.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100% Orang	100% Orang	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				100% Dokumen	100% Dokumen	84.221.850,00	80.000.000,00	36.631.140,00	-47.590.710,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik																		
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100% Dokumen	100% Dokumen	350.000.000,00	188.560.000,00	942.549.000,00	592.549.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi**				**100 % (Persen)**	**100 % (Persen)**	**797.147.000,00**	**731.442.000,00**	**731.442.000,00**	**-797.147.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	797.147.000,00	731.442.000,00	731.442.000,00	-65.705.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100% Orang	100% Orang	797.147.000,00	731.442.000,00	731.442.000,00	-65.705.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Jumlah Apotik, Toko Obat, Industri Rumah Tangga, Pengelola Makanan Pangan, Depot Air Minum yang memiliki izin**				**15 Puskesmas**	**15 Puskesmas**	**327.942.000,00**	**325.489.111,02**	**325.489.111,20**	**-327.942.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	63.790.000,00	76.394.111,02	76.394.111,20	12.604.111,20			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100% Dokumen	100% Dokumen	63.790.000,00	76.394.111,02	76.394.111,20	12.604.111,20	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terbitnya sertifikat bagi industri rumah tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				100 Persen	100 Persen	108.764.000,00	117.946.000,00	117.946.000,00	9.182.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100% 0	100% 0	108.764.000,00	117.946.000,00	117.946.000,00	9.182.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumalah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*				100 Persen	100 Persen	155.388.000,00	131.149.000,00	131.149.000,00	-24.239.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100% Unit	100% Unit	155.388.000,00	131.149.000,00	131.149.000,00	-24.239.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk**				**100 Persen**	**100 Persen**	**139.349.800,00**	**70.900.000,00**	**70.900.000,00**	**-139.349.800,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyuluhan untuk hidup sehat di puskesmas*				15 Puskesmas	15 Puskesmas	139.349.800,00	70.900.000,00	70.900.000,00	-68.449.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100% Dokumen	100% Dokumen	139.349.800,00	70.900.000,00	70.900.000,00	-68.449.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**14.664.542.000,00**	**14.389.997.979,00**	**18.330.743.088,00**	**3.666.201.088,00**							**25.101.279.430,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.664.542.000,00**	**14.389.997.979,00**	**18.330.743.088,00**	**3.666.201.088,00**							**25.101.279.430,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**14.664.542.000,00**	**14.389.997.979,00**	**18.330.743.088,00**	**3.666.201.088,00**							**25.101.279.430,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.396.622.800,00**	**1.112.526.800,00**	**1.176.526.800,00**	**319.541.000,00**							**3.716.163.800,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	446.182.800,00	341.426.800,00	341.426.800,00	-104.756.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		445.363.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.820.000,00	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	315.566.800,00	315.606.800,00	315.606.800,00	40.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			315.567.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	104.796.000,00	0,00	0,00	-104.796.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			104.796.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2.652.970.000,00	470.800.000,00	534.800.000,00	-2.118.170.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		2.970.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	470.800.000,00	470.800.000,00	534.800.000,00	64.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			470.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.182.170.000,00	0,00	0,00	-2.182.170.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	297.470.000,00	300.300.000,00	300.300.000,00	2.830.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Barang Milik Daerah yang ada di RSUD		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	297.470.000,00	300.300.000,00	300.300.000,00	2.830.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Akreditasi Rumah Sakit** **Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk** **Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar** **Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**100 95/100000 B Madya % Penduduk**	**B 95/100000 Madya 100 Penduduk %**	**4.877.626.200,00**	**6.218.273.200,00**	**9.967.188.309,00**	**8.800.708.530,00**							**13.678.334.730,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*[deleted] Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar* *Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai Standar*				17 Layanan 6 SubKegiatan	17 Layanan 6 SubKegiatan	3.422.442.858,00	2.280.853.200,00	5.775.610.714,00	2.353.167.856,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		12.451.758.730,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				60 Unit	60 Unit	613.400.000,00	813.400.000,00	813.400.000,00	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				8 Paket	8 Paket	2.809.042.858,00	1.467.453.200,00	4.062.210.714,00	1.253.167.856,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.651.758.730,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan* *Persentase Penyediaan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan* *Persentase Persentase Penyediaan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan* *Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan*				100 % 2 SubKegiatan 80 % 84 %	100 % 2 SubKegiatan 80 % 84 %	1.455.183.342,00	3.937.420.000,00	4.191.577.595,00	2.736.394.253,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.226.576.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				10 Dokumen	10 Dokumen	1.455.183.342,00	3.937.420.000,00	4.191.577.595,00	2.736.394.253,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.226.576.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**6.390.293.000,00**	**7.059.197.979,00**	**7.187.027.979,00**	**1.316.487.900,00**							**7.706.780.900,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.390.293.000,00	7.059.197.979,00	7.187.027.979,00	796.734.979,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Sumber Daya Manusia Kesehatan		7.706.780.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	6.390.293.000,00	7.059.197.979,00	7.187.027.979,00	796.734.979,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.706.780.900,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MAPADDEGAT							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Masyarakat mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Visite Rate) Prevalensi Stunting RSUD menjadi BLUD Prevalensi TBC Persiapan UPTD Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) AKI (Angka Kematian Ibu) AKB (Angka Kematian Bayi)**				**1 15 100 14 2.6 250 23 RSUD (BLUD) Puskesmas (BLUD) Persen Persen 1 Tahun 100 ribu/KH 1000 KH**	**2.6 14 1 100 15 250 23 1 Tahun Persen RSUD (BLUD) Persen Puskesmas (BLUD) 100 ribu/KH 1000 KH**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	2.134.730.000,00	2.085.668.595,88	2.085.668.595,88	-49.061.404,12	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIOBAN							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting Cakupan Masyarakat mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Visite Rate) Prevalensi TBC Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD**				**15 100 14 1 23 250 2.6 Puskesmas Persen Persen RSUD 1000 KH 100 ribu/KH 1 Tahun**	**14 2.6 100 250 23 1 15 Persen 1 Tahun Persen 100 ribu/KH 1000 KH RSUD Puskesmas**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.616.362.500,00	1.581.627.752,80	1.581.627.752,80	-34.734.747,20	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BOSUA							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Masyarakat mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Visite Rate) Prevalensi Stunting Persiapan UPTD Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) AKB (Angka Kematian Bayi) AKI (Angka Kematian Ibu) RSUD menjadi BLUD Prevalensi Malaria**				**2.6 100 23 15 1 14 250 1 Tahun Persen /1000 KH Puskesmas RSUD Persen 100 ribu/KH**	**2.6 14 15 23 250 1 100 1 Tahun Persen Puskesmas /1000 KH 100 ribu/KH RSUD Persen**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	938.535.500,00	857.125.465,47	857.125.465,47	-81.410.034,53	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA SIBERUT							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Prevalensi Stunting Cakupan Masyarakat mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Visite Rate) Prevalensi Malaria Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD**				**15 250 100 23 2.6 1 14 Puskesmas 100 ribu/KH Persen 1000 KH 1 Tahun RSUD Persen**	**23 1 14 2.6 100 250 15 1000 KH RSUD Persen 1 Tahun Persen 100 ribu/KH Puskesmas**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.702.660.100,00	1.585.318.390,03	1.585.318.390,03	-117.341.709,97	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PEIPEI							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu (AKI) Cakupan Imunisasi Prevalensi Stunting Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Cakupan Masyarakat mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Visite Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD**				**14 250 2.6 1 23 15 100 Persen 100 ribu/KH 1 Tahun RSUD 1000 KH Puskesmas Persen**	**250 100 14 15 2.6 23 1 100 ribu/KH Persen Persen Puskesmas 1 Tahun 1000 KH RSUD**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**						**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.319.548.000,00	1.417.854.000,00	1.417.854.000,00	98.306.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Masyarakat mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Visite Rate) Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Prevalensi Stunting Prevalensi TBC Angka Kematian Ibu (AKI)**				**1 23 2.6 14 100 15 250 RSUD /1000 KH 1 Tahun Persen Persen Puskesmas 100 ribu/KH**	**2.6 23 1 15 14 100 250 1 Tahun /1000 KH RSUD Puskesmas Persen Persen 100 ribu/KH**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.368.970.250,00	1.265.091.039,95	1.265.091.039,95	-103.879.210,05	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Stunting Angka Kematian Ibu (AKI) Visite Rate Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Pelaksanaan SPM 12 Indikator Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD**				**2.6 14 1 23 250 15 100 1 Tahun Persen RSUD 1000 KH 100 ribu/KH Puskesmas Persen**	**23 14 250 2.6 1 100 15 1000 KH Persen 100 ribu/KH 1 Tahun RSUD Persen Puskesmas**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.553.206.000,00	1.653.699.761,74	1.653.699.761,74	100.493.761,74	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BETAET							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Malaria Prevalensi Stunting Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Angka Kematian Ibu (AKI) Visite Rate 2**				**2.6 23 100 15 1 14 250 1 Tahun 1000 KH Persen Puskesmas RSUD Persen 100 ribu/KH**	**23 100 14 15 1 250 2.6 1000 KH Persen Persen Puskesmas RSUD 100 ribu/KH 1 Tahun**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	842.900.000,00	1.216.355.583,66	1.216.355.583,66	373.455.583,66	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIKAKAP							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Angka Kematian Bayi (AKB) Visite Rate Prevalensi TBC Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD**				**100 250 23 1 15 14 26 Persen 100 ribu/KH 1000 KH RSUD Puskesmas Persen 1 Tahun**	**14 250 1 23 26 100 15 Persen 100 ribu/KH RSUD 1000 KH 1 Tahun Persen Puskesmas**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.866.200.000,00	1.924.880.256,37	1.924.880.256,37	58.680.256,37	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MALAKOPA							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Visite Rate Prevalensi Stunting Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Prevalensi TBC Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD**				**14 15 1 2.6 23 100 250 Persen Puskesmas RSUD 1 Tahun 1000 KH Persen 100 ribu/KH**	**23 250 2.6 14 1 100 15 1000 KH 100 ribu/KH 1 Tahun Persen RSUD Persen Puskesmas**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.125.997.000,00	1.331.237.500,00	1.331.237.500,00	205.240.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BULASAT							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi Stunting Visite Rate Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Cakupan Imunisasi Angka Kematian Ibu (AKI)**				**250 2.6 1 14 23 100 15 100 ribu/KH 1 Tahun RSUD Persen 1000 KH Persen Puskesmas**	**14 2.6 15 23 1 100 250 Persen 1 Tahun Puskesmas 1000 KH RSUD Persen 100 ribu/KH**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	909.490.000,00	1.162.377.650,94	1.162.377.650,94	252.887.650,94	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAREREIKET							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Visite Rate Prevalensi TBC Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Stunting**				**1 250 23 2.6 15 100 14 RSUD 100 ribu/KH 1000 KH 1 Tahun Puskesmas Persen Persen**	**2.6 100 1 15 250 23 14 1 Tahun Persen RSUD Puskesmas 100 ribu/KH 1000 KH Persen**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	655.802.800,00	898.755.994,00	898.755.994,00	242.953.194,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMATALU							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Stunting Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Malaria Visite Rate**				**2.6 250 14 100 15 1 23 1 Tahun 100 ribu/KH Persen Persen Puskesmas RSUD 1000 KH**	**1 15 23 14 250 100 2.6 RSUD Puskesmas 1000 KH Persen 100 ribu/KH Persen 1 Tahun**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	728.044.000,00	862.314.000,00	862.314.000,00	134.270.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIGAPOKNA							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Angka Kematian Ibu (AKI) Visite Rate Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Prevalensi TBC Prevalensi Stunting Angka Kematian Bayi (AKB)**				**23 100 14 15 1 2.6 250 1000 KH Persen Persen Puskesmas RSUD 1 Tahun 100 ribu/KH**	**15 250 2.6 1 100 14 23 Puskesmas 100 ribu/KH 1 Tahun RSUD Persen Persen 1000 KH**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**						**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.003.187.600,00	911.439.034,66	911.439.034,66	-91.748.565,34	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAUMANGANYA							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi dan BLUD Cakupan Imunisasi Prevalensi Stunting Jumlah Puskesmas Terakreditasi dan BLUD Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Visite Rate**				**100 250 15 2.6 14 23 1 Persen 100 ribu/KH Puskesmas 1 Tahun Persen /1000 KH RSUD**	**1 100 14 15 23 250 2.6 RSUD Persen Persen Puskesmas /1000 KH 100 ribu/KH 1 Tahun**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah operasional puskesmas yang dibayarkan*				100 Persen	100 Persen	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.281.520.000,00	1.328.719.253,39	1.328.719.253,21	47.199.253,21	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIBERUT							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	12 Dokumen	0,00	899.999.166,00	3.651.010.166,00	3.651.010.166,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT INSTALASI FARMASI							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.137.731.634,00**	**117.022.636.490,31**	**122.883.486.347,21**	**11.745.754.713,21**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**36.627.248.900,00**	**38.462.334.483,29**	**42.121.255.095,01**	**-36.627.248.900,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.651.322.900,00	30.976.578.483,29	34.345.887.159,11	4.694.564.259,11			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	286.754.000,00	361.754.000,00	361.754.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.361.288.048,00**	**10.081.795.243,00**	**10.518.813.202,00**	**89.638.711.952,00**							**97.000.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD*				100 Persen	100 Persen	27.065.500,00	27.065.500,00	27.065.500,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	27.065.500,00	27.065.500,00	27.065.500,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase realisasi keuangan ASN perangkat daerah*				100 persen	100 persen	6.719.608.048,00	9.419.884.943,00	9.856.902.902,00	3.137.294.854,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dinas PUPR		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	6.719.608.048,00	9.419.884.943,00	9.856.902.902,00	3.137.294.854,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran*				100 Persen	100 Persen	257.212.500,00	265.136.800,00	265.136.800,00	7.924.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.365.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-65.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.900.800,00	70.544.800,00	70.544.800,00	16.644.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.250.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	172.696.700,00	164.292.000,00	164.292.000,00	-8.404.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya operasional penunjang kegiatan*				100 persen	100 persen	146.460.000,00	151.765.000,00	151.765.000,00	5.305.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	ASN Dinas PUPR		90.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.680.000,00	101.275.000,00	101.275.000,00	9.595.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			90.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.780.000,00	50.490.000,00	50.490.000,00	-4.290.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*				100 Persen	100 Persen	210.942.000,00	217.943.000,00	217.943.000,00	7.001.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	137.992.000,00	134.993.000,00	134.993.000,00	-2.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	22.950.000,00	32.950.000,00	32.950.000,00	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Peningkatan perlindungan kawasan Permukiman Rawan Banjir Persentase luas layanan irigasi multikomoditas**				**56.63 6.46 persen persen**	**6.46 56.63 persen persen**	**650.000.000,00**	**283.027.000,00**	**702.952.000,00**	**1.450.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya cakupan layanan unit air baku Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi*				60 persen	1,8 Km 2 Persen	0,00	283.027.000,00	283.027.000,00	283.027.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	283.027.000,00	283.027.000,00	283.027.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya luas daerah irigasi dengan sistem irigasi primer dan sekunder kondisi baik*				4.10 persen	4.10 persen	650.000.000,00	0,00	419.925.000,00	-230.075.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3.3 KM	3.3 KM	650.000.000,00	0,00	419.925.000,00	-230.075.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase peningkatan kapasaitas yang terlayani melalui penyaluran air minum Kabupaten/Kota**				**64.65 persen**	**64.65 persen**	**2.788.576.000,00**	**886.500.000,00**	**3.227.058.157,00**	**18.361.424.000,00**							**21.150.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*				7.64 persen	7.64 persen	2.788.576.000,00	886.500.000,00	3.227.058.157,00	438.482.157,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih	Masyarakat		21.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				15.3 Liter/Detik	15.3 Liter/Detik	695.787.400,00	0,00	0,00	-695.787.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				-	3 Unit	0,00	0,00	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pembangunan Air Bersih				2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				145 SR	145 SR	1.092.788.600,00	0,00	0,00	-1.092.788.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST**				**0 persen**	**5 persen**	**0,00**	**0,00**	**440.000.000,00**	**18.000.000,00**							**18.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan yang dibangun dan/atau dikembangkan*				0 Ton	8,33 Ton	0,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				-	1 Ton/hari	0,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah domestik layak dan aman)**				**70.94 persen**	**70.94 persen**	**600.000.000,00**	**424.630.800,00**	**644.420.800,00**	**2.000.000.000,00**							**2.600.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan sistem air limbah domestik*				1.26 persen	1.26 persen	600.000.000,00	424.630.800,00	644.420.800,00	44.420.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				264 Rumah Tangga	264 Rumah Tangga	600.000.000,00	424.630.800,00	424.630.800,00	-175.369.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Bojakan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	219.790.000,00	219.790.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik**				**35.88 persen**	**35.88 persen**	**1.296.541.000,00**	**359.787.000,00**	**4.091.761.716,00**	**3.563.459.000,00**							**4.860.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki PBG dan SLF*				2.5 persen	2.5 persen	1.296.541.000,00	359.787.000,00	4.091.761.716,00	2.795.220.716,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		4.860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	110.966.000,00	3.842.940.716,00	2.842.940.716,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				30 Dokumen	30 Dokumen	296.541.000,00	248.821.000,00	248.821.000,00	-47.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan**				**21.20 persen**	**21.20 persen**	**116.344.054.300,00**	**27.791.633.000,00**	**113.878.377.991,00**	**-5.356.195.941,00**							**110.987.858.359,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang*				0.95 persen	0.95 persen	116.344.054.300,00	27.791.633.000,00	113.878.377.991,00	-2.465.676.309,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat		110.987.858.359,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	720.400.000,00	95.000.000,00	2.115.999.780,00	1.395.599.780,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				18,70 KM	18,70 KM	2.985.948.331,00	1.268.119.000,00	3.064.739.019,00	78.790.688,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			3.105.955.859,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				13.71 KM	13.71 KM	102.500.000.000,00	23.278.142.000,00	50.002.420.410,00	-52.497.579.590,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PINJAMAN DAERAH DARI LEMBAGA KEUANGAN BANK (LKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				13.99 KM	13.99 KM	5.237.319.969,00	0,00	36.840.996.110,00	31.603.676.141,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			75.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				27.70 KM	27.70 KM	320.586.000,00	0,00	0,00	-320.586.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			4.414.610.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan																		
			Panjang jembatan yang dibangun				210 Meter	210 Meter	4.579.800.000,00	3.150.372.000,00	21.854.222.672,00	17.274.422.672,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			8.967.292.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**64.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.117.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi terampil*				undefined undefined	undefined undefined	64.883.000,00	0,00	0,00	-64.883.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	64.883.000,00	0,00	0,00	-64.883.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan Terhadap RTRW**				**20 persen**	**20 persen**	**300.000.000,00**	**301.763.900,00**	**301.763.900,00**	**-100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Meningkatnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang*				20 persen	20 persen	186.492.000,00	301.763.900,00	301.763.900,00	115.271.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	186.492.000,00	301.763.900,00	301.763.900,00	115.271.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dan RDTR*				100 persen	100 persen	113.508.000,00	0,00	0,00	-113.508.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	113.508.000,00	0,00	0,00	-113.508.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.361.288.048,00**	**10.081.795.243,00**	**10.518.813.202,00**	**89.638.711.952,00**							**97.000.000.000,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya keandalan BMD*				100 Persen	100 Persen	210.942.000,00	217.943.000,00	217.943.000,00	7.001.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kabupaten Kepulauan Mentawai		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**129.405.342.348,00**	**40.129.136.943,00**	**133.805.147.766,00**	**4.399.805.418,00**							**239.115.858.359,00**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase peningkatan kapasaitas yang terlayani melalui penyaluran air minum Kabupaten/Kota**				**64.65 persen**	**64.65 persen**	**2.788.576.000,00**	**886.500.000,00**	**3.227.058.157,00**	**18.361.424.000,00**							**21.150.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM*				7.64 persen	7.64 persen	2.788.576.000,00	886.500.000,00	3.227.058.157,00	438.482.157,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih	Masyarakat		21.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00	840.500.000,00	1.091.058.157,00	91.058.157,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN							**20.962.286.243,00**	**21.451.655.999,00**	**44.883.096.872,00**	**23.920.810.629,00**							**13.213.499.238,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.297.725.403,00**	**13.149.470.601,00**	**33.794.064.474,00**	**19.496.339.071,00**							**6.872.963.840,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**14.297.725.403,00**	**13.149.470.601,00**	**33.794.064.474,00**	**19.496.339.071,00**							**6.872.963.840,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.744.603.679,25**	**12.999.161.799,00**	**12.805.945.363,00**	**-8.274.684.639,25**							**3.469.919.040,00**	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan adminsitrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	10.762.790.495,25	11.931.826.601,00	11.759.632.474,00	996.841.978,75			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		2.690.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	10.714.970.495,25	11.885.866.601,00	11.714.392.474,00	999.421.978,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	274.740.534,00	326.535.548,00	477.733.548,00	202.993.014,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		136.485.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	26.243.000,00	26.243.000,00	26.243.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen/Laporan	1 Dokumen/Laporan	0,00	145.361.000,00	296.559.000,00	296.559.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana* *Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	285.790.000,00	282.000.000,00	143.170.000,00	-142.620.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		92.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	285.790.000,00	282.000.000,00	143.170.000,00	-142.620.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			92.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**persentase kawasan permukiman yang tertata** **Persentase lingkungan pemukiman kumuh**				**45** **17 persen** **persen**	**17** **45 persen** **persen**	**1.249.098.200,00**	**560.000.000,00**	**17.760.000.000,00**	**-1.234.098.200,00**							**15.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	16.136.000,00	0,00	0,00	-16.136.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	16.136.000,00	0,00	0,00	-16.136.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupten/kota* *Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana*				100 persen	100 persen	28.600.400,00	0,00	0,00	-28.600.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	28.600.400,00	0,00	0,00	-28.600.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota* *Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana*				100 persen 67 unit	100 persen 67 unit	1.191.482.800,00	560.000.000,00	17.760.000.000,00	16.568.517.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				40 Unit Rumah	15 Unit Rumah	661.264.200,00	0,00	0,00	-661.264.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				45 Unit Rumah	6 Unit Rumah	530.218.600,00	560.000.000,00	17.760.000.000,00	17.229.781.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten* *Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana*				100 persen	100 persen	12.879.000,00	0,00	0,00	-12.879.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0 0	0 0	12.879.000,00	0,00	0,00	-12.879.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya kualitas kawasan permukiman**				**100 Persen**	**100 Persen**	**912.427.800,00**	**50.000.000,00**	**518.000.000,00**	**-857.427.800,00**							**55.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Meningkatnya kawasan permukiman yang tertata*				100 Persen	100 Persen	912.427.800,00	50.000.000,00	518.000.000,00	-394.427.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 0	16 0	867.271.000,00	0,00	0,00	-867.271.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	33.940.400,00	50.000.000,00	518.000.000,00	484.059.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	11.216.400,00	0,00	0,00	-11.216.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Kawasan Permukiman yang terakses listrik Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman Meningkatnya penyediaan PSU permukiman**				**20 100 65 Persen Persen persen**	**20 65 100 Persen persen Persen**	**1.135.438.907,75**	**200.000.000,00**	**3.335.700.000,00**	**2.975.524.932,25**							**4.110.963.840,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Meningkatnya permukiman yang didukung oleh PSU Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	1.135.438.907,75	200.000.000,00	3.335.700.000,00	2.200.261.092,25			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Masyarakat pada kawasan permukiman		4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				22 Lokasi	5 Lokasi	1.135.438.907,75	200.000.000,00	3.335.700.000,00	2.200.261.092,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			4.110.963.840,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.664.560.840,00**	**8.302.185.398,00**	**11.089.032.398,00**	**4.424.471.558,00**							**6.340.535.398,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**1.195.125.890,00**	**1.007.835.398,00**	**946.187.398,00**	**-248.938.492,00**							**1.050.535.398,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.744.603.679,25**	**12.999.161.799,00**	**12.805.945.363,00**	**-8.274.684.639,25**							**3.469.919.040,00**	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	274.740.534,00	326.535.548,00	477.733.548,00	202.993.014,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		136.485.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	40 Paket	151.830.084,00	123.019.548,00	123.019.548,00	-28.810.536,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			86.485.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen/ Laporan	1 Dokumen/ Laporan	77.148.000,00	0,00	0,00	-77.148.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	421.282.650,00	458.799.650,00	425.409.341,00	4.126.691,00			-	-	-		551.433.740,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	65.540.000,00	95.083.250,00	61.692.941,00	-3.847.059,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			81.299.240,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	229.890.150,00	175.158.400,00	175.158.400,00	-54.731.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			470.134.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**32.000.000,00**							**33.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00			-	-	-		33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**8.111.800,00**	**8.000.000,00**	**28.247.600,00**	**811.180,00**							**8.922.980,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.111.800,00	8.000.000,00	28.247.600,00	20.135.800,00			-	-	-		8.922.980,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				16 Badan Usaha	16 Badan Usaha	8.111.800,00	8.000.000,00	28.247.600,00	20.135.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.922.980,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000,00**	**30.003.000,00**	**30.003.000,00**	**21.000.000,00**							**22.000.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	1.000.000,00	30.003.000,00	30.003.000,00	29.003.000,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				5 MHA/ Dokumen	5 MHA/ Dokumen	1.000.000,00	30.003.000,00	30.003.000,00	29.003.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**50.250.000,00**	**0,00**	**-445.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	50.250.000,00	0,00	-500.000.000,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	50.250.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
6.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**160.605.856,00**	**496.321.200,00**	**498.065.909,00**	**133.087.522,00**							**293.693.378,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	160.605.856,00	496.321.200,00	498.065.909,00	337.460.053,00			-	-	-		293.693.378,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				16 Unit	16 Unit	999.600,00	20.004.000,00	20.004.000,00	19.004.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				9.843 Ton	9.843 Ton	159.606.256,00	476.317.200,00	478.061.909,00	318.455.653,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			271.693.378,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.469.434.950,00**	**7.294.350.000,00**	**10.142.845.000,00**	**4.673.410.050,00**							**5.290.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.744.603.679,25**	**12.999.161.799,00**	**12.805.945.363,00**	**-8.274.684.639,25**							**3.469.919.040,00**	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya pemenuhan adminsitrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	10.762.790.495,25	11.931.826.601,00	11.759.632.474,00	996.841.978,75			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		2.690.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	47.820.000,00	45.960.000,00	45.240.000,00	-2.580.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	274.740.534,00	326.535.548,00	477.733.548,00	202.993.014,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		136.485.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.983.250,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-13.983.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.779.200,00	21.912.000,00	21.912.000,00	132.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	421.282.650,00	458.799.650,00	425.409.341,00	4.126.691,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		551.433.740,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	125.852.500,00	188.558.000,00	188.558.000,00	62.705.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**4.400.000.000,00**	**6.897.920.000,00**	**9.747.135.000,00**	**750.000.000,00**							**5.150.000.000,00**	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				-	1 Laporan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.400.000.000,00	6.797.920.000,00	9.647.135.000,00	5.247.135.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	4.400.000.000,00	6.797.920.000,00	9.647.135.000,00	5.247.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**850.000.000,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**-850.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	850.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-720.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	0 Unit	850.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-720.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**4.786.619.920,25**	**5.384.524.847,00**	**6.002.030.598,00**	**1.215.410.677,75**							**5.127.281.212,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.786.619.920,25**	**5.384.524.847,00**	**6.002.030.598,00**	**1.215.410.677,75**							**5.127.281.212,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.786.619.920,25**	**5.384.524.847,00**	**6.002.030.598,00**	**1.215.410.677,75**							**5.127.281.212,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.918.793.438,00**	**5.234.530.847,00**	**5.511.561.398,00**	**3.987.774,00**							**3.922.781.212,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.799.594.038,00	5.060.524.847,00	5.332.370.598,00	1.532.776.560,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Satpol PP		3.776.381.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.799.594.038,00	5.060.524.847,00	5.270.030.598,00	1.470.436.560,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.726.381.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	62.340.000,00	62.340.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	85.899.400,00	72.926.000,00	53.110.800,00	-32.788.600,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		86.699.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	560.000,00	560.000,00	-9.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.999.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	900.000,00	600.000,00	600.000,00	-300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	47.065.400,00	30.586.400,00	30.586.400,00	-16.479.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			47.065.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	24.393.600,00	4.578.400,00	-3.421.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			8.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19.934.000,00	16.786.000,00	16.786.000,00	-3.148.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			19.934.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		26.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			26.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.300.000,00	77.080.000,00	102.080.000,00	68.780.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		33.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	16.030.000,00	48.310.000,00	73.310.000,00	57.280.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7.270.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**145.250.000,00**	**99.994.000,00**	**354.584.200,00**	**59.250.000,00**							**204.500.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	102.500.000,00	99.994.000,00	354.584.200,00	252.084.200,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		154.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 laporan	1 laporan	102.500.000,00	50.000.000,00	266.779.200,00	164.279.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			102.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	49.994.000,00	87.805.000,00	87.805.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	42.750.000,00	0,00	0,00	-42.750.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	42.750.000,00	0,00	0,00	-42.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**722.576.482,25**	**50.000.000,00**	**135.885.000,00**	**277.423.517,75**							**1.000.000.000,00**	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	722.576.482,25	50.000.000,00	135.885.000,00	-586.691.482,25			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				500 Orang	500 Orang	722.576.482,25	50.000.000,00	135.885.000,00	-586.691.482,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**5.213.958.523,25**	**4.227.842.542,52**	**8.644.459.305,52**	**3.430.500.782,27**							**6.927.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.213.958.523,25**	**4.227.842.542,52**	**8.644.459.305,52**	**3.430.500.782,27**							**6.927.700.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.213.958.523,25**	**4.227.842.542,52**	**8.644.459.305,52**	**3.430.500.782,27**							**6.927.700.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.183.203.523,25**	**3.897.799.543,00**	**4.367.191.345,52**	**144.496.476,75**							**3.327.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.904.158.523,25	3.688.434.543,00	3.906.171.346,00	1.002.012.822,75			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN		3.022.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.881.958.523,25	3.654.954.543,00	3.859.011.346,00	977.052.822,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22.200.000,00	33.480.000,00	47.160.000,00	24.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			22.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	89.252.000,00	75.957.000,00	133.043.199,52	43.791.199,52			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat		105.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.430.000,00	1.705.000,00	6.200.000,00	4.770.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.662.000,00	32.957.000,00	62.846.000,52	37.184.000,52	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	5.009.000,00	7.386.199,00	-3.113.801,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.660.000,00	36.286.000,00	56.611.000,00	7.951.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00			-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	57.000.000,00	57.000.000,00	63.900.000,00	6.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	63.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	132.093.000,00	76.408.000,00	264.076.800,00	131.983.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Masyarakat		135.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	36.711.400,00	29.585.000,00	34.556.800,00	-2.154.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	82.021.600,00	41.913.000,00	224.000.000,00	141.978.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12.660.000,00	4.910.000,00	5.520.000,00	-7.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.560.730.000,00**	**330.042.999,52**	**4.277.267.960,00**	**1.439.270.000,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	50.000.000,00	275.162.500,00	275.162.500,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				-	100 Orang	0,00	50.000.000,00	275.162.500,00	275.162.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya*				80 Persen	80 Persen	1.000.700.000,00	15.000.000,00	2.435.671.500,00	1.434.971.500,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				-	4 Unit	0,00	0,00	1.483.671.500,00	1.483.671.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				10 Kawasan	10 Kawasan	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	4 Kawasan	1.000.000.000,00	15.000.000,00	952.000.000,00	-48.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana*				100 Persen	100 Persen	510.030.000,00	255.042.999,52	747.031.000,00	237.001.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				200 Orang	200 Orang	211.542.750,00	89.155.000,00	276.981.000,00	65.438.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	200 Orang	298.487.250,00	165.887.999,52	470.050.000,00	171.562.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penanganan Pasca Bencana*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	10.000.000,00	819.402.960,00	769.402.960,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	10.000.000,00	819.402.960,00	769.402.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**470.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129.975.000,00**							**600.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran*				2 Kecamatan	2 Kecamatan	470.025.000,00	0,00	0,00	-470.025.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	470.025.000,00	0,00	0,00	-470.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**5.836.302.559,50**	**5.254.183.840,00**	**6.197.323.833,00**	**361.021.273,50**							**6.370.538.256,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.911.302.559,50**	**4.360.508.240,00**	**4.945.744.255,00**	**34.441.695,50**							**5.385.938.256,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4.911.302.559,50**	**4.360.508.240,00**	**4.945.744.255,00**	**34.441.695,50**							**5.385.938.256,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**3.495.880.559,50**	**4.010.508.240,00**	**4.048.704.255,00**	**217.131.476,50**							**3.713.012.036,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				2/1 dokumen/laporan	2/1 dokumen/laporan	4.594.000,00	660.000,00	1.410.000,00	-3.184.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		4.639.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.594.000,00	660.000,00	1.410.000,00	-3.184.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		4.639.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase gaji dan honor ASN yang terbayar*				100 persen	100 persen	3.309.680.559,50	3.841.884.040,00	3.801.507.283,00	491.826.723,50			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		3.525.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.287.480.559,50	3.830.784.040,00	3.779.307.283,00	491.826.723,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000,00	11.100.000,00	22.200.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor*				100 persen	100 persen	61.573.500,00	72.724.200,00	75.307.200,00	13.733.700,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		62.169.071,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.695.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	-885.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.721.950,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17.887.100,00	31.453.700,00	34.036.700,00	16.149.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.052.841,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.920.400,00	1.872.500,00	1.872.500,00	-47.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.939.640,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	39.071.000,00	37.588.000,00	37.588.000,00	-1.483.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			39.454.640,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar*				100 persen	100 persen	58.400.000,00	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		58.984.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.400.000,00	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			58.984.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah layak pakai*				100 persen	100 persen	61.632.500,00	36.840.000,00	112.079.772,00	50.447.272,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		62.219.025,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	5.225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-3.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.227.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	19.787.500,00	13.535.000,00	28.534.760,00	8.747.260,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			19.985.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.620.000,00	2.030.000,00	22.270.000,00	15.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.706.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	20.000.000,00	60.000.012,00	30.000.012,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**260.000.000,00**	**50.000.000,00**	**142.840.000,00**	**80.950.000,00**							**340.950.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-				-	-	0,00	0,00	92.840.000,00	92.840.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		75.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				-	75 Keluarga	0,00	0,00	92.840.000,00	92.840.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			75.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang dilatih*				01200 Persen	01200 Persen	260.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-210.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		265.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	120.000.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	-95.025.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			121.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	7 Lembaga	140.000.000,00	25.025.000,00	25.025.000,00	-114.975.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisoopinan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			144.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZAH yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**				**80 Persen**	**80 Persen**	**600.000.000,00**	**252.899.000,00**	**575.099.000,00**	**171.000.000,00**							**771.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial*				40 Persen	40 Persen	600.000.000,00	252.899.000,00	575.099.000,00	-24.901.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintah		771.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				-	201 Orang	0,00	216.500.000,00	216.500.000,00	216.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sotboyak Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			165.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	9 Orang	120.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	480.000.000,00	36.399.000,00	258.599.000,00	-221.401.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			404.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi Kebutuhan Dasar**				**80 Persen**	**80 Persen**	**130.422.000,00**	**22.180.000,00**	**22.180.000,00**	**51.804.220,00**							**182.226.220,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*terpenuhi Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial*				40 Persen	40 Persen	130.422.000,00	22.180.000,00	22.180.000,00	-108.242.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		182.226.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	130.422.000,00	22.180.000,00	22.180.000,00	-108.242.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			182.226.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**				**80 Persen**	**80 Persen**	**425.000.000,00**	**24.921.000,00**	**156.921.000,00**	**-46.250.000,00**							**378.750.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam*				60 Persen	60 Persen	415.000.000,00	20.011.000,00	117.011.000,00	-297.989.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam		368.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	252.500.000,00	20.011.000,00	117.011.000,00	-135.489.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			204.525.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	162.500.000,00	0,00	0,00	-162.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			164.125.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam*				60 Persen	60 Persen	10.000.000,00	4.910.000,00	39.910.000,00	29.910.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Korban bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam		10.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana																		
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	4.910.000,00	39.910.000,00	29.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**925.000.000,00**	**893.675.600,00**	**1.251.579.578,00**	**326.579.578,00**							**984.600.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**925.000.000,00**	**893.675.600,00**	**1.251.579.578,00**	**326.579.578,00**							**984.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Presentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**				**75 Persen**	**75 Persen**	**460.000.000,00**	**682.915.000,00**	**704.890.328,00**	**4.600.000,00**							**464.600.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Peran serta perempuan di bidang Politik, Ekonomi, sosial, dan budaya*				60 Persen	60 Persen	60.000.000,00	32.914.000,00	55.042.000,00	-4.958.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat		60.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				2 Lembaga	2 Lembaga	60.000.000,00	32.914.000,00	55.042.000,00	-4.958.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan*				1 lembaga 1 Lembaga	1 lembaga 1 Lembaga	400.000.000,00	650.001.000,00	649.848.328,00	249.848.328,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		404.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				3 Lembaga	3 Lembaga	400.000.000,00	650.001.000,00	649.848.328,00	249.848.328,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			404.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**				**54 Indeks**	**54 Indeks**	**200.000.000,00**	**32.424.100,00**	**82.424.000,00**	**52.000.000,00**							**252.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)*				52,50 Indeks	52,50 Indeks	200.000.000,00	32.424.100,00	82.424.000,00	-117.576.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi, Dunia Usaha, Media Massa Anak		252.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-	3 Lembaga	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	200.000.000,00	32.424.100,00	32.424.000,00	-167.576.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**				**54,85 Indeks**	**54,85 Indeks**	**255.000.000,00**	**158.336.500,00**	**429.265.250,00**	**-2.500.000,00**							**252.500.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*				52,50 Indeks	52,50 Indeks	200.000.000,00	33.336.500,00	254.265.250,00	54.265.250,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi, Dunia Usaha, Media Massa Anak		202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00	33.336.500,00	254.265.250,00	54.265.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			202.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PPA							**5.836.302.559,50**	**5.254.183.840,00**	**6.197.323.833,00**	**361.021.273,50**							**6.370.538.256,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**925.000.000,00**	**893.675.600,00**	**1.251.579.578,00**	**326.579.578,00**							**984.600.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**925.000.000,00**	**893.675.600,00**	**1.251.579.578,00**	**326.579.578,00**							**984.600.000,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**70 Persen**	**70 Persen**	**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	**35.000.000,00**	**5.500.000,00**							**15.500.000,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensih*				60 Persen	60 Persen	10.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPP		15.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				5 orang	5 orang	10.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**				**70 Persen**	**70 Persen**	**255.000.000,00**	**158.336.500,00**	**429.265.250,00**	**-2.500.000,00**							**252.500.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat layanan*				60 Persen	60 Persen	55.000.000,00	125.000.000,00	175.000.000,00	120.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Anak yang memerlukan perlindungan khusus		50.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	55.000.000,00	125.000.000,00	175.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN							**17.811.043.666,00**	**13.856.948.603,00**	**17.403.121.940,00**	**-407.921.726,00**							**24.027.304.737,05**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**459.374.000,00**	**93.880.000,00**	**93.880.000,00**	**-365.494.000,00**							**1.882.732.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**459.374.000,00**	**93.880.000,00**	**93.880.000,00**	**-365.494.000,00**							**1.882.732.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Perencanaan Penggangaran dan Evaluasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.442.677.365,00**	**12.856.213.103,00**	**9.804.629.529,00**	**-2.398.351.434,00**							**9.044.325.931,00**	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan monitoring di 43 Desa*				12 laporan	12 laporan	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		100.515.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.515.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Indek Ketahanan Pangan**				**55 persen**	**55 persen**	**438.974.000,00**	**93.880.000,00**	**93.880.000,00**	**1.343.243.000,00**							**1.782.217.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Alat untuk melihat keseimbangan antara ketersediaan pangan dan penggunaan pangan Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat*				1 dokumen 58 persen	1 dokumen 58 persen	358.974.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	-345.094.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		1.385.038.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				13 Laporan	2 Laporan	345.094.000,00	0,00	0,00	-345.094.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			1.177.022.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	13.880.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			208.016.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan cadangan pangan pemerintah*				100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		397.179.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20000 Ton	50 Ton	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			397.179.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.351.669.666,00**	**13.763.068.603,00**	**17.309.241.940,00**	**-42.427.726,00**							**22.144.572.737,05**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2.530.499.801,00**	**298.000.000,00**	**1.036.792.420,00**	**-1.493.707.381,00**							**247.600.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**132.000.000,00**	**530.150.000,00**	**-1.855.000.000,00**							**145.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	132.000.000,00	530.150.000,00	-1.469.850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap		145.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	2.000.000.000,00	132.000.000,00	530.150.000,00	-1.469.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			145.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**42.000.000,00**	**382.642.420,00**	**-53.000.000,00**							**47.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	100.000.000,00	42.000.000,00	382.642.420,00	282.642.420,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil		47.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				20 Kelompok	1 Kelompok	100.000.000,00	42.000.000,00	382.642.420,00	282.642.420,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			47.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**430.499.801,00**	**124.000.000,00**	**124.000.000,00**	**-374.899.801,00**							**55.600.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	200.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-195.000.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-195.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	230.499.801,00	119.000.000,00	119.000.000,00	-111.499.801,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11000 Ton	110 Ton	100.000.000,00	119.000.000,00	119.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	130.499.801,00	0,00	0,00	-130.499.801,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**14.821.169.865,00**	**13.465.068.603,00**	**16.272.449.520,00**	**1.451.279.655,00**							**21.896.972.737,05**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.442.677.365,00**	**12.856.213.103,00**	**9.804.629.529,00**	**-2.398.351.434,00**							**9.044.325.931,00**	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	11.215.977.765,00	12.349.682.103,00	8.935.532.479,00	-2.280.445.286,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		8.690.558.931,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	135 Orang/bulan	11.187.897.765,00	12.321.192.103,00	8.829.452.479,00	-2.358.445.286,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			8.590.478.931,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	28.080.000,00	28.490.000,00	106.080.000,00	78.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.080.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibayar* *Jumlah Bahan Logistik yang Tersedia* *Jumlah Barang Cetakan Tersedia* *Jumlah Komponen Listrik Tersedia* *Lancarnya administrasi perkantoran*				100 Persen 2 Paket 5 Paket 7 Paket	100 Persen 2 Paket 5 Paket 7 Paket	98.952.600,00	79.101.500,00	79.101.500,00	-19.851.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		226.752.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	42.091.600,00	24.464.500,00	24.464.500,00	-17.627.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			46.882.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.070.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	5.250.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	4.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45.611.000,00	41.587.000,00	41.587.000,00	-4.024.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya Tagihan Air Terbayarnya Tagihan Listrik Terkelolanya administrasi perkantoran Tersedianya 1 buah Printer*				100 Persen 12 bulan 1 Unit	100 Persen 12 bulan 1 Unit	97.400.000,00	417.000.000,00	677.258.550,00	579.858.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian		6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.400.000,00	417.000.000,00	417.000.000,00	329.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	260.258.550,00	250.258.550,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terkelolanya barang-barang milik daerah*				100 pe	100 pe	9.947.000,00	10.429.500,00	112.737.000,00	102.790.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.482.500,00	92.540.000,00	87.540.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.947.000,00	4.947.000,00	20.197.000,00	15.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**2.273.050.900,00**	**499.437.500,00**	**3.523.745.030,00**	**4.999.577.906,05**							**7.272.628.806,05**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Meningkanya Pendapatan Petani/Kelompok Tani*				85 Persen	85 Persen	998.720.500,00	499.437.500,00	3.523.745.030,00	2.525.024.530,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	KELOMPOK TANI/POKMAS		3.302.063.006,05	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	998.720.500,00	499.437.500,00	3.523.745.030,00	2.525.024.530,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			3.302.063.006,05	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Meningkatkan kesejahteran/ perekonomian masyarakat ternak* *Meningkatnya populasi ternak dan kesejahteraanan petani/ peternak* *Tersedianya hijauan pakan ternak*				100 persen 50 ha 85 persen	100 persen 50 ha 85 persen	1.274.330.400,00	0,00	0,00	-1.274.330.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Ternak Masyarakat		3.970.565.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				4106 Ekor	4106 Ekor	1.274.330.400,00	0,00	0,00	-1.274.330.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			3.970.565.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**764.720.800,00**	**24.536.000,00**	**2.859.192.961,00**	**3.180.230.200,00**							**3.944.951.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok/ Masyarakat Tani* *Peta Rencana induk Pengembangan Kawasan Pertanian*				100 Persen 1 Dokumen	100 Persen 1 Dokumen	96.562.200,00	24.536.000,00	671.991.000,00	575.428.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	96.562.200,00	24.536.000,00	671.991.000,00	575.428.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*meningkatkan pendapatan petani*				85 persen	85 persen	668.158.600,00	0,00	2.187.201.961,00	1.519.043.361,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani		3.944.951.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	5 Unit	668.158.600,00	0,00	2.187.201.961,00	1.519.043.361,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA SISA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			3.944.951.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**persentase Organisme Penggangu Tumbuhan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**107.518.800,00**	**0,00**	**0,00**	**113.416.200,00**							**220.935.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*tersedianya sarana dan prasaran penanganan dan pengendalian organisme penggagu tanaman, dan penyakit tanaman*				2 Paket	2 Paket	107.518.800,00	0,00	0,00	-107.518.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Kelompok Tani Perkebunan		220.935.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	5 Ha	107.518.800,00	0,00	0,00	-107.518.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			220.935.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelompok tani yang terbentuk**				**100 Persen**	**100 Persen**	**253.602.000,00**	**84.882.000,00**	**84.882.000,00**	**1.261.045.000,00**							**1.514.647.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelompok tani yang sudah terbentuk Terbayarnya Biaya Operasional Penyuluh selama satu tahun Terlaksananya Penas di Gorontalo*				1 Paket 37 Orang 40 Persen	1 Paket 37 Orang 40 Persen	253.602.000,00	84.882.000,00	84.882.000,00	-168.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.514.647.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				37 Orang	37 Orang	168.720.000,00	0,00	0,00	-168.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	84.882.000,00	84.882.000,00	84.882.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.514.647.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.406.464.948,00**	**4.205.028.959,00**	**4.581.770.962,00**	**175.306.014,00**							**4.777.105.741,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.406.464.948,00**	**4.205.028.959,00**	**4.581.770.962,00**	**175.306.014,00**							**4.777.105.741,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.406.464.948,00**	**4.205.028.959,00**	**4.581.770.962,00**	**175.306.014,00**							**4.777.105.741,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan tugas Layanan Perangkat Daerah**				**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**3.396.464.948,00**	**4.194.999.934,00**	**4.371.741.937,00**	**270.555.793,00**							**3.667.020.741,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan tugas Layanan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.982.000,00	10.982.000,00	982.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		10.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.982.000,00	10.982.000,00	982.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedia gaji PNS dan PPPK*				34 orang	12 bulan	2.992.144.948,00	3.680.708.959,00	3.857.450.962,00	865.306.014,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.003.164.985,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.969.464.948,00	3.658.028.959,00	3.834.770.962,00	865.306.014,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.980.464.985,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	22.680.000,00	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			22.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terbayarnya Kebutuhan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				100 %	12 Laporan	261.332.500,00	407.948.975,00	407.948.975,00	146.616.475,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		533.655.756,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.002.500,00	6.002.500,00	6.002.500,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	125.500.000,00	302.925.775,00	302.925.775,00	177.425.775,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.892.400,00	26.892.700,00	26.892.700,00	300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	102.937.600,00	72.128.000,00	72.128.000,00	-30.809.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			190.555.756,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan*				100 %	2 laporan	74.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-12.000.000,00			-	3. Penyediaan Jaringan Internet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		60.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	74.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet			60.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayarnya Kebutuhan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	58.987.500,00	33.360.000,00	33.360.000,00	-25.627.500,00			-	3. Penyediaan Jaringan Internet	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	58.987.500,00	33.360.000,00	33.360.000,00	-25.627.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	1.000.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-800.000.000,00			-	3. Penyediaan Jaringan Internet	-		1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				10 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Penyediaan Jaringan Internet			1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Profile Kependudukan**				**1 buku**	**1 buku**	**10.000.000,00**	**10.029.025,00**	**10.029.025,00**	**85.000,00**							**10.085.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Meningkatnya Kualitas Profile Kependudukan*				1 Buku	1 Buku	10.000.000,00	10.029.025,00	10.029.025,00	29.025,00			-	3. Penyediaan Jaringan Internet	-		10.085.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	10.029.025,00	10.029.025,00	29.025,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet			10.085.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**6.058.353.265,75**	**5.936.975.471,00**	**6.887.743.699,00**	**829.390.433,25**							**2.037.285.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.058.353.265,75**	**5.936.975.471,00**	**6.887.743.699,00**	**829.390.433,25**							**2.037.285.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4.436.356.255,75**	**5.097.671.471,00**	**5.998.439.699,00**	**1.562.083.443,25**							**1.021.175.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.595.050.455,75**	**4.477.421.471,00**	**4.667.358.039,00**	**-3.383.875.455,75**							**211.175.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Persentase Tertibnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				80 Persen	80 Persen	10.440.000,00	9.000.000,00	28.250.000,00	17.810.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dinas PMDP2KB		10.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	10.440.000,00	9.000.000,00	28.250.000,00	17.810.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.420.756.455,75	4.302.071.661,00	4.394.962.229,00	974.205.773,25			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dinas PMDP2KB		22.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.398.556.455,75	4.279.871.661,00	4.336.642.229,00	938.085.773,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22.200.000,00	22.200.000,00	58.320.000,00	36.120.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			22.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*				95 Persen	95 Persen	111.699.000,00	88.370.018,00	149.726.018,00	38.027.018,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Dan Masyarakat		99.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.515.000,00	999.000,00	999.000,00	-1.516.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.535.000,00	0,00	30.710.000,00	2.175.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	29.310.000,00	53.795.000,00	53.795.000,00	24.485.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11.313.000,00	14.150.018,00	14.150.018,00	2.837.018,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.026.000,00	19.426.000,00	50.072.000,00	10.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*				85 Persen	100 Persen	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN DPMDP2KB		42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*				2 Unit	100 Persen	14.355.000,00	40.179.792,00	56.619.792,00	42.264.792,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Dinas PMDP2KB		37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14.355.000,00	12.240.000,00	17.340.000,00	2.985.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	16.800.000,00	23.140.000,00	23.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	6 Unit	0,00	4.140.000,00	9.140.000,00	9.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	6.999.792,00	6.999.792,00	6.999.792,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**				**80 Persen**	**80 Persen**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**							**0,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Meningkatnya Kualitas Penataan Desa*				80 Persen	80 Persen	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1 Desa	1 Desa	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur Desa Dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				**80 Persen**	**80 Persen**	**140.805.800,00**	**120.000.000,00**	**480.830.580,00**	**-805.800,00**							**140.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				80 Persen	80 Persen	140.805.800,00	120.000.000,00	480.830.580,00	340.024.780,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur Desa dan BPD		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	25.000.000,00	30.000.000,00	80.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	129 Orang	10.325.800,00	0,00	210.732.608,00	200.406.808,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	13.503.800,00	0,00	0,00	-13.503.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	12.983.700,00	45.000.000,00	105.000.000,00	92.016.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				43 Dokumen	43 Dokumen	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				43 Desa	43 Desa	6.992.500,00	45.000.000,00	85.097.972,00	78.105.472,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**				**80 Persen**	**80 Persen**	**700.275.000,00**	**500.250.000,00**	**850.251.080,00**	**-30.275.000,00**							**670.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan*				80 Persen	80 Persen	700.275.000,00	500.250.000,00	850.251.080,00	149.976.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan		670.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				43 Lembaga	43 Lembaga	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	275.000,00	250.000,00	350.251.080,00	349.976.080,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				43 Dokumen	43 Dokumen	200.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**1.621.997.010,00**	**839.304.000,00**	**889.304.000,00**	**-732.693.010,00**							**1.016.110.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)**				**2,40 Persen**	**2,40 Persen**	**96.600.000,00**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**-24.600.000,00**							**72.000.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk*				80 Persen	1,14 Persen	96.600.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-45.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	54.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	-28.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	42.000.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-16.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi**				**80 Persen**	**61,50 11, 9 Persen Persen**	**1.091.197.010,00**	**412.854.000,00**	**462.854.000,00**	**-581.287.010,00**							**509.910.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Meningkatnya Kesadaran, Pengetahuan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*				80 Persen	80 Persen	609.985.360,00	190.000.000,00	210.000.000,00	-399.985.360,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		81.830.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	59.999.960,00	0,00	0,00	-59.999.960,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	354.704.800,00	150.000.000,00	170.000.000,00	-184.704.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	12 Laporan	81.830.000,00	0,00	0,00	-81.830.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			81.830.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	30.534.600,00	0,00	0,00	-30.534.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				43 Organisasi	43 Organisasi	82.916.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-42.916.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Ketersediaan alat dan Obat Kontrasepsi di Seluruh Fasilitas Pelayanan KB*				80 Persen	80 Persen	249.852.000,00	162.854.000,00	192.854.000,00	-56.998.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		256.352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	12 Laporan	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				500 Orang	353 Orang	236.352.000,00	143.954.000,00	173.954.000,00	-62.398.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			236.352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*				80 Persen	80 Persen	231.359.650,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-171.359.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		171.728.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				43 Unit	8 Unit	59.631.650,00	60.000.000,00	60.000.000,00	368.350,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				43 Kampung	43 Kampung	168.324.000,00	0,00	0,00	-168.324.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			168.324.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.404.000,00	0,00	0,00	-3.404.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.404.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**				**80 Persen**	**80 Persen**	**434.200.000,00**	**375.450.000,00**	**375.450.000,00**	**0,00**							**434.200.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*				80 Persen	80 Persen	91.000.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00	-58.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		91.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				43 Unit	43 Unit	91.000.000,00	0,00	0,00	-91.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			91.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	36 Kelompok	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)*				80 Persen	80 Persen	343.200.000,00	343.200.000,00	343.200.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		343.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	12 laporan	156.000.000,00	0,00	0,00	-156.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			156.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	52 laporan	187.200.000,00	343.200.000,00	343.200.000,00	156.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			187.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**5.933.192.785,25**	**5.965.460.452,00**	**6.484.136.502,00**	**550.943.716,75**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.933.192.785,25**	**5.965.460.452,00**	**6.484.136.502,00**	**550.943.716,75**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.933.192.785,25**	**5.965.460.452,00**	**6.484.136.502,00**	**550.943.716,75**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.808.283.785,25**	**3.148.301.452,00**	**3.406.765.502,00**	**-2.808.283.785,25**							**0,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.389.606.885,25	2.851.422.552,00	2.992.826.602,00	603.219.716,75			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	45 Orang/bulan	2.367.406.885,25	2.829.222.552,00	2.970.626.602,00	603.219.716,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	233.973.000,00	134.964.000,00	199.871.000,00	-34.102.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.990.000,00	7.175.000,00	7.175.000,00	-7.815.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	64.236.000,00	37.881.000,00	49.180.000,00	-15.056.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.997.000,00	22.902.000,00	22.902.000,00	-17.095.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	114.750.000,00	67.006.000,00	120.614.000,00	5.864.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	97.400.000,00	92.400.000,00	144.553.000,00	47.153.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	97.400.000,00	92.400.000,00	144.553.000,00	47.153.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	87.303.900,00	69.514.900,00	69.514.900,00	-17.789.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet	Aparatur Dinas Kominfo		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	70.003.900,00	60.134.900,00	60.134.900,00	-9.869.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	14 Unit	17.300.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00	-7.920.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Pemerintah Daerah (Survei)**				**80 persen**	**80 persen**	**473.523.000,00**	**773.923.000,00**	**836.911.000,00**	**-473.523.000,00**							**0,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				80 persen	80 persen	473.523.000,00	773.923.000,00	836.911.000,00	363.388.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet	Pemda dan masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	9 Laporan	400.000.000,00	602.000.000,00	664.988.000,00	264.988.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				8 0	8 Komunitas	35.523.000,00	0,00	0,00	-35.523.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				-	36 Permohonan	0,00	133.923.000,00	133.923.000,00	133.923.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE**				**2,6 indeks**	**2,6 indeks**	**2.651.386.000,00**	**2.043.236.000,00**	**2.240.460.000,00**	**-2.651.386.000,00**							**0,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan E-goverment Pemerintah Daerah*				50 persen	50 persen	2.651.386.000,00	2.043.236.000,00	2.240.460.000,00	-410.926.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet	Pemda dan masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	2.651.386.000,00	0,00	0,00	-2.651.386.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				-	1 Laporan	0,00	149.978.000,00	147.172.000,00	147.172.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet																		
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				-	36 Perangkat Daerah	0,00	1.893.258.000,00	2.093.288.000,00	2.093.288.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**4.626.231.571,00**	**3.870.302.878,00**	**5.214.969.112,00**	**588.737.541,00**							**7.157.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.527.850.971,00**	**3.605.302.978,00**	**4.889.069.212,00**	**361.218.241,00**							**5.257.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.527.850.971,00**	**3.605.302.978,00**	**4.889.069.212,00**	**361.218.241,00**							**5.257.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**2.774.216.570,75**	**3.140.302.978,00**	**3.232.069.212,00**	**582.783.429,25**							**3.357.000.000,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	2.577.985.570,75	2.960.982.978,00	3.012.749.212,00	434.763.641,25			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Pegawai ASN di Dinas Koperindakop		2.960.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.551.705.570,75	2.932.302.978,00	2.984.069.212,00	432.363.641,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			2.800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	4 Dokumen	26.280.000,00	28.680.000,00	28.680.000,00	2.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	92.821.000,00	95.420.000,00	135.420.000,00	42.599.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		286.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	32.771.000,00	33.122.000,00	47.122.000,00	14.351.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.848.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-2.648.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			26.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	12 Laporan	45.202.000,00	50.098.000,00	76.098.000,00	30.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	65.410.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	-19.510.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	-		71.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	3 Unit	65.410.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	-19.510.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			71.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya Skala Usaha UMKM**				**85 persen**	**85 persen**	**1.753.634.400,25**	**465.000.000,00**	**1.657.000.000,00**	**146.365.599,75**							**1.900.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Meningkatnya Usaha UMKM*				100 persen	15 persen	1.753.634.400,25	465.000.000,00	1.657.000.000,00	-96.634.400,25			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Usaha Mikro		1.900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				75 Unit Usaha	26 Unit Usaha	1.753.634.400,25	465.000.000,00	1.657.000.000,00	-96.634.400,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Matotonan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			1.900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**98.380.600,00**	**264.999.900,00**	**325.899.900,00**	**227.519.300,00**							**1.900.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**98.380.600,00**	**264.999.900,00**	**325.899.900,00**	**227.519.300,00**							**1.900.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisen**				**15 persen**	**15 persen**	**35.915.000,00**	**199.999.900,00**	**235.899.900,00**	**1.464.085.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan*				100 persen	100 persen	35.915.000,00	199.999.900,00	235.899.900,00	199.984.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	35.915.000,00	199.999.900,00	235.899.900,00	199.984.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**				**40 persen**	**40 persen**	**26.715.000,00**	**65.000.000,00**	**90.000.000,00**	**123.285.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok*				100 persen	1 Tahun	26.715.000,00	65.000.000,00	90.000.000,00	63.285.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Pedagang di Pasar Rakyat dan Toko Sembako		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	12 Laporan	26.715.000,00	65.000.000,00	90.000.000,00	63.285.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk**				**60 persen**	**60 persen**	**35.750.600,00**	**0,00**	**0,00**	**214.249.400,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Terlaksananya pelaksanaan metrologi legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan*				100 persen	100 persen	35.750.600,00	0,00	0,00	-35.750.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Mayarakat KKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8 Unit	8 Unit	35.750.600,00	0,00	0,00	-35.750.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**3.731.202.176,50**	**3.691.279.386,00**	**4.383.658.935,00**	**652.456.758,50**							**1.828.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.731.202.176,50**	**3.691.279.386,00**	**4.383.658.935,00**	**652.456.758,50**							**1.828.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**500.000.000,00**	**22.877.000,00**	**669.805.000,00**	**169.805.000,00**							**950.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya**				**70 persen**	**70 persen**	**500.000.000,00**	**0,00**	**646.928.000,00**	**300.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan*				70 persen	70 persen	500.000.000,00	0,00	646.928.000,00	146.928.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	16 Orang	200.000.000,00	0,00	203.316.000,00	3.316.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	443.612.000,00	143.612.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial**				**30 persen**	**30 persen**	**0,00**	**22.877.000,00**	**22.877.000,00**	**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja*				30 persen	30 persen	0,00	22.877.000,00	22.877.000,00	22.877.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	10 Laporan	0,00	22.877.000,00	22.877.000,00	22.877.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.231.202.176,50**	**3.668.402.386,00**	**3.713.853.935,00**	**482.651.758,50**							**878.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**-**	**100 Persen**	**3.131.310.176,50**	**3.623.628.386,00**	**3.669.079.935,00**	**-2.553.310.176,50**							**578.000.000,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan*				-	100 persen	2.795.602.176,50	3.351.079.386,00	3.371.090.935,00	575.488.758,50			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Aparatur DPMPTSP		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/12 Orang/bulan	32/12 Orang/bulan	2.773.402.176,50	3.308.479.386,00	3.323.930.935,00	550.528.758,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22.200.000,00	42.600.000,00	47.160.000,00	24.960.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran*				-	100 persen	193.156.000,00	140.074.000,00	170.163.000,00	-22.993.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Aparatur DPMPTSP		327.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.602.500,00	2.602.500,00	-2.397.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	76.792.800,00	68.547.800,00	68.547.800,00	-8.245.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.607.200,00	8.913.700,00	8.913.700,00	-5.693.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	15 Laporan	96.756.000,00	60.010.000,00	90.099.000,00	-6.657.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran*				-	100 persen	82.800.000,00	88.800.000,00	88.800.000,00	6.000.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Aparatur DPMPTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	82.800.000,00	88.800.000,00	88.800.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*				-	100 persen	59.752.000,00	43.675.000,00	39.026.000,00	-20.726.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Aparatur DPMPTSP		81.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	6 Unit	46.352.000,00	38.275.000,00	33.626.000,00	-12.726.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	8 Unit	13.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**				**95 persen**	**95 persen**	**49.892.000,00**	**22.129.000,00**	**22.129.000,00**	**100.108.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan*				95 persen	95 persen	49.892.000,00	22.129.000,00	22.129.000,00	-27.763.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Pelaku Usaha		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	49.892.000,00	22.129.000,00	22.129.000,00	-27.763.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**				**90 persen**	**90 persen**	**50.000.000,00**	**22.645.000,00**	**22.645.000,00**	**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase realisasi investasi*				90 persen	90 persen	50.000.000,00	22.645.000,00	22.645.000,00	-27.355.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Pelaku Usaha		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				3 Kegiatan Usaha	3 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	22.645.000,00	22.645.000,00	-27.355.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**3.356.946.779,75**	**2.807.541.796,00**	**4.041.532.836,00**	**684.586.056,25**							**3.402.607.874,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.356.946.779,75**	**2.807.541.796,00**	**4.041.532.836,00**	**684.586.056,25**							**3.402.607.874,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.310.946.779,75**	**2.756.476.796,00**	**3.990.471.336,00**	**679.524.556,25**							**3.332.607.874,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**				**35 Persen**	**35 Persen**	**1.000.000.000,00**	**99.755.000,00**	**978.855.996,00**	**-70.000.000,00**							**930.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai SNP Persentase Perpustakaan Sesuai SNP*				20 Persen	20 Persen	465.000.000,00	29.755.000,00	29.755.000,00	-435.245.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				16 Perpustakaan	16 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	100.000.000,00	29.755.000,00	29.755.000,00	-70.245.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat*				30 Persen undefined undefined	30 Persen undefined undefined	535.000.000,00	70.000.000,00	949.100.996,00	414.100.996,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		900.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	300.000.000,00	0,00	813.987.496,00	513.987.496,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			820.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				20 Lokus	20 Lokus	185.000.000,00	70.000.000,00	135.113.500,00	-49.886.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.310.946.779,75**	**2.656.721.796,00**	**3.011.615.340,00**	**91.661.094,25**							**2.402.607.874,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Acuan/Pedoman perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran*				90 Persen	90 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang menerima gaji Meningkatkan kesejahteraan ASN*				100 Persen 23 Orang/bulan	100 Persen 23 Orang/bulan	2.154.854.679,75	2.546.729.696,00	2.716.623.240,00	561.768.560,25			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		2.270.607.874,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.135.054.679,75	2.485.649.696,00	2.655.553.240,00	520.498.560,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.200.607.874,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000,00	61.080.000,00	61.070.000,00	41.270.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				90 Persen	90 Persen	84.807.600,00	65.152.100,00	210.152.100,00	125.344.500,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		87.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	14.982.000,00	0,00	0,00	-14.982.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	29.998.200,00	25.224.100,00	140.160.100,00	110.161.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	9.899.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	29.928.000,00	29.928.000,00	59.992.000,00	30.064.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				90 Persen	90 Persen	22.000.000,00	22.000.000,00	62.000.000,00	40.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	62.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*				90 Persen	90 Persen	34.284.500,00	22.840.000,00	22.840.000,00	-11.444.500,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	29.294.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-9.294.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	4.990.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	-2.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**46.000.000,00**	**51.065.000,00**	**51.061.500,00**	**5.061.500,00**							**70.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban**				**50 Persen**	**50 Persen**	**46.000.000,00**	**51.065.000,00**	**51.061.500,00**	**24.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya tata kelola arsip dinamis Tersedianya naskah dinas yang diciptakan dan digunakan*				25 Persen 60 Berkas	25 Persen 60 Berkas	46.000.000,00	25.099.000,00	25.095.500,00	-20.904.500,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				4 Berkas	4 Berkas	46.000.000,00	25.099.000,00	25.095.500,00	-20.904.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	25.966.000,00	25.966.000,00	25.966.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				54 Laporan	54 Laporan	0,00	25.966.000,00	25.966.000,00	25.966.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							**5.190.160.119,00**	**7.475.132.479,00**	**13.184.712.689,00**	**7.994.552.570,00**							**4.975.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.288.344.000,00**	**1.571.599.200,00**	**7.835.645.920,00**	**6.547.301.920,00**							**2.194.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**1.288.344.000,00**	**1.571.599.200,00**	**7.835.645.920,00**	**6.547.301.920,00**							**2.194.000.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah organisasi pemuda yang aktif undefined**				**15 undefined organisasi undefined**	**15 undefined organisasi undefined**	**250.000.000,00**	**400.862.800,00**	**1.683.772.800,00**	**200.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah unit usaha kreatif pemuda mandiri*				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	400.862.800,00	1.683.772.800,00	1.433.772.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	PEMUDA		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	30 Orang	250.000.000,00	400.862.800,00	1.683.772.800,00	1.433.772.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga Jumlah Prestasi Olahraga**				**10 undefined Cabang olahraga undefined**	**undefined 10 undefined Cabang olahraga**	**750.000.000,00**	**369.986.000,00**	**5.194.632.720,00**	**680.000.000,00**							**1.430.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga Terbayarnya hibah dana mengikuti PORDA/PORPROV/kEJURNAS Terbayarnya hibah operasional KONI Kabupaten Terbuatnya perencanaan penataan lapangan sepak bola didesa muntei dan maileppet*				0 Paket 1 kali 1 Paket 30 Orang	0 Paket 1 kali 1 Paket 30 Orang	750.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-530.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	PEMUDA		310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				3 Dokumen	3 Dokumen	750.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-530.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	4.324.647.720,00	4.324.647.720,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		610.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	4.324.647.720,00	4.324.647.720,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			610.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	0,00	149.986.000,00	649.985.000,00	649.985.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		510.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				-	1 Laporan	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				-	1 Lembaga	0,00	149.986.000,00	349.985.000,00	349.985.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.190.160.119,00**	**6.229.848.679,00**	**5.630.059.169,00**	**-3.845.160.119,00**							**345.000.000,00**	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.867.944.519,00	5.359.560.879,00	4.569.771.089,00	701.826.570,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Tenaga Non ASN		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	11.240.000,00	19.670.000,00	41.160.000,00	29.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	46.000.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00	504.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	46.000.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00	504.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	76.109.600,00	200.585.800,00	330.586.080,00	254.476.480,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Tenaga Non ASN		96.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	4.028.400,00	4.028.400,00	-3.971.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.108.000,00	150.050.000,00	225.050.000,00	186.942.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			76.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkinerja baik*				1 Dokumen	1 Dokumen	132.000.000,00	132.000.000,00	92.000.000,00	-40.000.000,00			-	3. Penyediaan Jaringan Internet	ASN dan Tenaga Non ASN		127.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	92.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet			127.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat*				undefined undefined	undefined undefined	68.106.000,00	87.702.000,00	87.702.000,00	19.596.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Tenaga Non ASN		82.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	52.996.000,00	45.002.000,00	45.002.000,00	-7.994.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.901.816.119,00**	**5.903.533.279,00**	**5.349.066.769,00**	**1.447.250.650,00**							**2.781.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**3.901.816.119,00**	**5.903.533.279,00**	**5.349.066.769,00**	**1.447.250.650,00**							**2.781.000.000,00**	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.867.944.519,00	5.359.560.879,00	4.569.771.089,00	701.826.570,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Tenaga Non ASN		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.856.704.519,00	5.339.890.879,00	4.528.611.089,00	671.906.570,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	76.109.600,00	200.585.800,00	330.586.080,00	254.476.480,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Tenaga Non ASN		96.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	30.001.600,00	46.507.400,00	101.507.680,00	71.506.080,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat*				undefined undefined	undefined undefined	68.106.000,00	87.702.000,00	87.702.000,00	19.596.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan Tenaga Non ASN		82.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	15.110.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	27.590.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			31.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**18.345.000,00**	**68.388.000,00**	**1.000.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	18.345.000,00	68.388.000,00	68.388.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	18.345.000,00	68.388.000,00	68.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**452.000.000,00**	**452.000.000,00**	**1.300.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	452.000.000,00	452.000.000,00	452.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	452.000.000,00	452.000.000,00	452.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**4.090.000,00**	**155.860.000,00**	**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	0,00	4.090.000,00	155.860.000,00	155.860.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60 Orang	60 Orang	0,00	4.090.000,00	155.860.000,00	155.860.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SEKRETARIAT DAERAH							**31.460.287.973,00**	**26.623.600.724,75**	**31.511.512.998,75**	**51.225.025,75**							**32.037.888.371,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.460.287.973,00**	**26.623.600.724,75**	**31.511.512.998,75**	**51.225.025,75**							**32.037.888.371,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.460.287.973,00**	**26.623.600.724,75**	**31.511.512.998,75**	**51.225.025,75**							**32.037.888.371,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**27.193.381.673,00**	**23.285.601.324,75**	**25.978.975.038,31**	**-470.249.002,00**							**26.723.132.671,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Renstra,Renja,Laporan Keuangan,LAKIP SKPFD*				20 Dokumen	20 Dokumen	10.700.000,00	0,00	0,00	-10.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		28.747.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.700.000,00	0,00	0,00	-10.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			28.747.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	10.338.475.197,00	12.583.320.432,00	13.575.413.706,00	3.236.938.509,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		10.340.149.477,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	10.220.905.197,00	12.366.112.332,00	12.874.958.606,00	2.654.053.409,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.214.149.477,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	117.570.000,00	217.208.100,00	700.455.100,00	582.885.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Aneka Alat Tulis Kantor*				12 bulan	12 bulan	2.131.628.800,00	1.563.245.225,00	2.825.490.264,56	693.861.464,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		2.144.865.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	797.437.300,00	728.485.225,00	875.225.225,00	77.787.925,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			570.773.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	119.374.000,00	144.374.000,00	177.493.459,56	58.119.459,56	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			119.374.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	322.910.000,00	335.310.000,00	995.195.580,00	672.285.580,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			662.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	891.907.500,00	355.076.000,00	777.576.000,00	-114.331.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			791.738.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				11 Unit	11 Unit	681.412.000,00	335.000.000,00	902.770.119,00	221.358.119,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		2.131.628.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	9.990.000,00	0,00	0,00	-9.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.202.317.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	671.422.000,00	335.000.000,00	902.770.119,00	231.348.119,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			929.311.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	3.121.850.000,00	625.550.000,00	534.629.464,00	-2.587.220.536,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		2.046.750.281,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	633.850.000,00	625.550.000,00	534.629.464,00	-99.220.536,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			544.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	2.488.000.000,00	0,00	0,00	-2.488.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.501.800.281,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				8 Unit	8 Unit	6.999.775.682,00	5.153.314.173,75	3.826.155.610,75	-3.173.620.071,25			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		5.880.439.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	348.997.491,00	854.704.261,75	609.499.005,75	260.501.514,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			379.897.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	4.958.616.191,00	2.857.000.000,00	1.795.056.693,00	-3.163.559.498,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.948.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	190.450.000,00	140.109.912,00	140.109.912,00	-50.340.088,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			195.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.501.712.000,00	1.301.500.000,00	1.281.490.000,00	-220.222.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.356.742.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	2.330.594.494,00	1.911.622.494,00	2.848.746.494,00	518.152.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		2.000.362.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	613.838.494,00	613.838.494,00	613.838.494,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			613.838.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			161.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	2 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.576.756.000,00	1.057.784.000,00	1.994.908.000,00	418.152.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.225.524.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	930.538.900,00	663.700.000,00	865.900.000,00	-64.638.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		978.321.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	493.555.000,00	352.700.000,00	454.900.000,00	-38.655.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			541.338.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	436.983.900,00	311.000.000,00	411.000.000,00	-25.983.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			436.983.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*				36 Dokumen	36 Dokumen	277.717.800,00	250.000.000,00	250.014.400,00	-27.703.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		575.504.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				36 Dokumen	36 Dokumen	116.000.000,00	104.320.000,00	104.334.400,00	-11.665.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			220.186.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	48.540.000,00	38.042.000,00	38.042.000,00	-10.498.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			104.952.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				36 Dokumen	36 Dokumen	52.278.000,00	50.078.200,00	50.078.200,00	-2.199.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			114.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.800,00	15.497.800,00	15.497.800,00	-4.502.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			51.040.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.900.000,00	42.062.000,00	42.062.000,00	1.162.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			84.461.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				12 Laporan	12 Laporan	370.688.800,00	199.849.000,00	349.854.980,00	-20.833.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		596.362.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	170.732.200,00	87.538.000,00	215.050.000,00	44.317.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			257.743.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	99.957.000,00	49.839.000,00	49.839.000,00	-50.118.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			189.052.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	99.999.600,00	62.472.000,00	84.965.980,00	-15.033.620,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			149.567.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang mendukung**				**100 persen**	**100 persen**	**3.197.827.900,00**	**2.062.999.800,00**	**3.939.511.910,44**	**371.378.000,00**							**3.569.205.900,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				100 Persen	100 Persen	220.000.000,00	290.000.000,00	594.915.200,00	374.915.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		424.884.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			98.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	329.893.200,00	299.893.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			129.817.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	100.000.000,00	105.022.000,00	-14.978.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			196.600.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.497.428.100,00	1.442.999.800,00	2.558.303.910,44	60.875.810,44			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD, MASYARAKAT		2.323.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	1.244.444.900,00	942.999.600,00	1.359.894.770,00	115.449.870,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.123.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.252.983.200,00	500.000.200,00	1.198.409.140,44	-54.574.059,56	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				15 Dokumen	15 Dokumen	460.399.800,00	310.000.000,00	471.630.000,00	11.230.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD, MASYARAKAT		770.536.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	158.907.400,00	97.538.800,00	132.738.800,00	-26.168.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			252.141.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	239.785.000,00	197.167.000,00	315.997.000,00	76.212.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			415.532.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	61.707.400,00	15.294.200,00	22.894.200,00	-38.813.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			102.862.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	314.662.800,00	294.662.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD, MASYARAKAT		49.999.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	314.662.800,00	294.662.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			49.999.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti**				**90 persen**	**90 persen**	**1.069.078.400,00**	**1.274.999.600,00**	**1.593.026.050,00**	**676.471.400,00**							**1.745.549.800,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*				2 Dokumen	2 Dokumen	218.911.200,00	225.003.400,00	320.874.850,00	101.963.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD,Masyarakat		357.545.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	132.911.200,00	132.911.200,00	228.782.650,00	95.871.450,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			271.894.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	86.000.000,00	92.092.200,00	92.092.200,00	6.092.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			85.651.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	188.000.000,00	220.000.000,00	342.150.000,00	154.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD,Masyarakat		432.039.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	43.000.000,00	47.854.000,00	4.854.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			88.366.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	102.136.000,00	57.136.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			114.561.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	132.000.000,00	192.160.000,00	92.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			229.112.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				12 Dokumen	12 Dokumen	632.169.600,00	800.000.000,00	900.005.000,00	267.835.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		887.058.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	248.967.800,00	217.118.000,00	217.118.000,00	-31.849.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			291.581.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	332.467.900,00	276.835.000,00	278.746.000,00	-53.721.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			370.229.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	80 Orang	50.733.900,00	306.047.000,00	404.141.000,00	353.407.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			225.248.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Pertanahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	29.997.600,00	29.996.200,00	29.996.200,00	-1.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD,Masyarakat		68.906.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.997.600,00	29.996.200,00	29.996.200,00	-1.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			68.906.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**25.453.496.223,00**	**23.972.279.823,00**	**26.341.474.276,00**	**887.978.053,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.453.496.223,00**	**23.972.279.823,00**	**26.341.474.276,00**	**887.978.053,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.453.496.223,00**	**23.972.279.823,00**	**26.341.474.276,00**	**887.978.053,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah**				**41 Orang**	**41 Orang**	**14.492.937.223,00**	**14.573.892.523,00**	**15.044.560.776,00**	**-14.492.937.223,00**							**0,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan*				41 Orang	41 Orang	3.671.187.273,00	4.324.481.273,00	3.885.106.226,00	213.918.953,00			-	-	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.516.777.273,00	4.173.671.273,00	3.734.296.226,00	217.518.953,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	154.410.000,00	150.810.000,00	150.810.000,00	-3.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah*				8 Laporan	8 Laporan	552.934.400,00	375.662.100,00	606.260.100,00	53.325.700,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.735.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00	-9.045.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.680.000,00	72.680.000,00	107.780.000,00	35.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	282.076.200,00	185.230.100,00	263.215.700,00	-18.860.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.119.200,00	39.750.000,00	51.130.400,00	-3.988.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	122.324.000,00	66.312.000,00	172.444.000,00	50.120.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah*				2 Paket	2 Paket	103.195.200,00	81.116.800,00	81.116.800,00	-22.078.400,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.280.000,00	36.280.000,00	36.280.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	66.915.200,00	44.836.800,00	44.836.800,00	-22.078.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 bulan	12 bulan	117.000.000,00	114.000.000,00	126.000.000,00	9.000.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00	114.000.000,00	126.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah yang dipeliharan*				48 Unit	48 Unit	492.047.000,00	225.740.000,00	315.730.000,00	-176.317.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	200.960.000,00	145.990.000,00	192.770.000,00	-8.190.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	83.032.000,00	40.500.000,00	55.500.000,00	-27.532.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	57.375.000,00	39.250.000,00	67.460.000,00	10.085.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.680.000,00	0,00	0,00	-150.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				20 Orang	20 Orang	9.531.892.350,00	9.452.892.350,00	9.452.892.350,00	-79.000.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	9.326.212.350,00	9.226.212.350,00	9.226.212.350,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	205.680.000,00	165.680.000,00	165.680.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				-	20 Orang	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*jumlah laporan layanan administrasi DPRD*				5 Laporan	5 Laporan	24.681.000,00	0,00	577.455.300,00	552.774.300,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				5 Laporan	5 Laporan	24.681.000,00	0,00	0,00	-24.681.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**25.453.496.223,00**	**23.972.279.823,00**	**26.341.474.276,00**	**887.978.053,00**							**0,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.453.496.223,00**	**23.972.279.823,00**	**26.341.474.276,00**	**887.978.053,00**							**0,00**	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	0,00	577.455.300,00	577.455.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.453.496.223,00**	**23.972.279.823,00**	**26.341.474.276,00**	**887.978.053,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.453.496.223,00**	**23.972.279.823,00**	**26.341.474.276,00**	**887.978.053,00**							**0,00**	
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Meningkatnya pelayanan dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah**				**16 Dokumen**	**16 Dokumen**	**10.960.559.000,00**	**9.398.387.300,00**	**11.296.913.500,00**	**-10.960.559.000,00**							**0,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*				16 Dokumen	16 Dokumen	1.099.187.000,00	764.756.000,00	1.113.133.000,00	13.946.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	201.555.000,00	194.180.000,00	194.180.000,00	-7.375.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	673.700.000,00	369.306.000,00	591.873.000,00	-81.827.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	223.932.000,00	201.270.000,00	327.080.000,00	103.148.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran*				5 Dokumen	5 Dokumen	625.562.000,00	581.108.100,00	581.108.100,00	-44.453.900,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	15.147.800,00	15.147.900,00	15.147.900,00	100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	15.147.800,00	15.147.800,00	15.147.800,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	193.504.800,00	180.216.800,00	180.216.800,00	-13.288.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	196.494.800,00	180.406.800,00	180.406.800,00	-16.088.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	205.266.800,00	190.188.800,00	190.188.800,00	-15.078.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				15 Laporan	15 Laporan	2.053.771.800,00	1.174.782.800,00	1.651.045.800,00	-402.726.000,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	3 Laporan	382.232.000,00	196.354.000,00	300.780.000,00	-81.452.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	390.756.000,00	196.354.000,00	300.450.000,00	-90.306.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	390.725.000,00	196.354.000,00	300.453.000,00	-90.272.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	380.360.000,00	196.354.000,00	304.377.000,00	-75.983.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3 Laporan	351.249.000,00	196.354.000,00	276.391.000,00	-74.858.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	158.449.800,00	193.012.800,00	168.594.800,00	10.145.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah laporan hasil peningkatan kapasitas dprd*				6 Laporan	6 Laporan	1.795.745.400,00	1.502.272.000,00	1.752.902.000,00	-42.843.400,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.302.344.000,00	1.202.272.000,00	1.452.902.000,00	150.558.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	26.151.400,00	0,00	0,00	-26.151.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	67.250.000,00	0,00	0,00	-67.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah laporan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				8 Laporan	8 Laporan	4.170.439.400,00	4.033.461.400,00	4.173.067.600,00	2.628.200,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	3 Laporan	860.595.000,00	805.542.000,00	1.164.303.000,00	303.708.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	3.309.844.400,00	3.227.919.400,00	3.008.764.600,00	-301.079.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah laporan hasil fasilitasi tugas DPRD*				8 Laporan	8 Laporan	1.215.853.400,00	1.342.007.000,00	2.025.657.000,00	809.803.600,00			-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.500.000,00	1.342.007.000,00	2.025.657.000,00	825.157.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	15.353.400,00	0,00	0,00	-15.353.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							**8.172.324.863,25**	**5.445.863.722,00**	**7.317.989.198,00**	**-854.335.665,25**							**9.321.940.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.172.324.863,25**	**5.445.863.722,00**	**7.317.989.198,00**	**-854.335.665,25**							**9.321.940.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**8.142.324.863,25**	**5.095.784.722,00**	**6.588.910.198,00**	**-1.553.414.665,25**							**8.909.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.227.628.463,25**	**4.879.984.722,00**	**5.569.535.198,00**	**651.371.536,75**							**7.879.000.000,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kesejahteraan ASN*				100 Persen	100 Persen	6.510.974.863,25	4.331.143.722,00	4.236.018.198,00	-2.274.956.665,25			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		7.030.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	6.488.774.863,25	4.308.943.722,00	4.173.818.198,00	-2.314.956.665,25	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000,00	22.200.000,00	62.200.000,00	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				85 Persen	85 Persen	171.428.350,00	128.000.000,00	427.100.000,00	255.671.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		199.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	5.000.000,00	37.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.415.550,00	40.000.000,00	104.600.000,00	56.184.450,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.012.800,00	8.000.000,00	22.000.000,00	13.987.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	263.000.000,00	163.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD*				undefined undefined	undefined undefined	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	opd		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*				85 Persen	85 Persen	298.550.000,00	298.550.000,00	353.950.000,00	55.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	298.550.000,00	298.550.000,00	353.950.000,00	55.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD*				85 Persen	85 Persen	196.675.250,00	122.291.000,00	452.467.000,00	255.791.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	91.670.000,00	105.591.000,00	106.041.000,00	14.371.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	5.970.000,00	6.700.000,00	256.426.000,00	250.456.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	64.035.250,00	10.000.000,00	90.000.000,00	25.964.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**				**100 persen**	**100 persen**	**659.696.400,00**	**115.800.000,00**	**464.375.000,00**	**70.303.600,00**							**730.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Tahapannya*				100 persen	100 persen	589.696.400,00	109.397.400,00	357.972.400,00	-231.724.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		630.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	44.732.600,00	17.364.600,00	24.170.600,00	-20.562.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	264.963.800,00	28.328.600,00	244.332.366,00	-20.631.434,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	280.000.000,00	63.704.200,00	89.469.434,00	-190.530.566,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase penyusunan perencanaan berbasis analisis data dan informasi pembangunan daerah*				100 persen	100 persen	70.000.000,00	6.402.600,00	6.402.600,00	-63.597.400,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				40 Orang	40 Orang	70.000.000,00	6.402.600,00	6.402.600,00	-63.597.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**100 Persen**	**100 Persen**	**255.000.000,00**	**100.000.000,00**	**555.000.000,00**	**45.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				85 Persen	85 Persen	85.000.000,00	40.000.000,00	465.000.000,00	380.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	15.000.000,00	20.902.200,00	-19.097.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	25.000.000,00	444.097.800,00	399.097.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*				85 Persen	85 Persen	85.000.000,00	30.000.000,00	51.900.000,00	-33.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	30.000.000,00	51.900.000,00	11.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Keselarasan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				85 Persen	85 Persen	85.000.000,00	30.000.000,00	38.100.000,00	-46.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	30.000.000,00	38.100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**30.000.000,00**	**350.079.000,00**	**729.079.000,00**	**699.079.000,00**							**412.940.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**350.079.000,00**	**729.079.000,00**	**382.940.000,00**							**412.940.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Penyusunan Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Disusun Berdasarkan Kebutuhan Perencanaan Daerah*				100 persen	100 persen	20.000.000,00	325.079.000,00	704.079.000,00	684.079.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		412.940.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	325.079.000,00	340.079.000,00	330.079.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				-	1 Dokumen	0,00	0,00	364.000.000,00	364.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			392.940.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**144.306.638.092,00**	**129.915.030.738,77**	**156.349.041.171,29**	**12.042.403.079,29**							**172.064.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**144.306.638.092,00**	**129.915.030.738,77**	**156.349.041.171,29**	**12.042.403.079,29**							**172.064.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**144.306.638.092,00**	**129.915.030.738,77**	**156.349.041.171,29**	**12.042.403.079,29**							**172.064.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**36.039.287.828,00**	**36.179.445.378,77**	**40.790.180.375,39**	**11.484.712.172,00**							**47.524.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Pesentase Peningkatan Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Laporan Tugas Layanan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	22.323.000,00	22.323.000,00	94.579.000,00	72.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		24.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	22.323.000,00	22.323.000,00	94.579.000,00	72.256.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			24.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu*				100 %	100 %	34.519.686.828,00	34.221.374.178,77	38.048.949.864,39	3.529.263.036,39			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		45.450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	61 Orang/bulan	34.485.196.828,00	33.752.294.178,77	37.658.109.864,39	3.172.913.036,39	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			45.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	34.490.000,00	469.080.000,00	390.840.000,00	356.350.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tercapainya Cakupan Layanan yang Disediakan, Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Administrasi dan Keteraturan Sarana dan Prasarana*				100 %	100 %	254.028.000,00	488.268.200,00	975.935.044,00	721.907.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		470.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20 Paket	13.300.000,00	23.175.000,00	82.614.644,00	69.314.644,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	14.188.000,00	79.188.000,00	186.465.000,00	172.277.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.208.000,00	165.854.000,00	202.628.000,00	171.420.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	4 Paket	18.970.000,00	43.689.200,00	81.038.400,00	62.068.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	158.362.000,00	158.362.000,00	414.189.000,00	255.827.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			155.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.237.150.000,00	1.119.150.000,00	1.062.900.000,00	-174.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	ASN		1.550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	1.237.150.000,00	969.150.000,00	969.150.000,00	-268.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			1.550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	150.000.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercapainya Kelancaran Kegiatan Operasional, terjaminnya Keamanan dan Keselamatan*				100 %	100 %	6.100.000,00	328.330.000,00	607.816.467,00	601.716.467,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	2 Unit	0,00	178.530.000,00	198.340.000,00	198.340.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	4 Unit	0,00	35.000.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10 Unit	6.100.000,00	114.800.000,00	372.076.467,00	365.976.467,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**				**30 %**	**30 %**	**107.567.350.864,00**	**92.517.482.760,00**	**112.686.132.646,90**	**15.597.649.136,00**							**123.165.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Sesuai dengan tahapannya*				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.312.057.800,00	1.777.230.800,00	777.230.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD dan Masyarakat		170.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	39.490.200,00	39.490.200,00	-10.509.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	38.997.200,00	38.997.200,00	-11.002.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	392.000.000,00	578.008.200,00	855.292.200,00	463.292.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	508.000.000,00	655.562.200,00	843.451.200,00	335.451.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan*				95 %	100 %	302.251.200,00	550.557.160,00	881.999.159,90	579.747.959,90			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				8 Dokumen	1 Dokumen	95.085.000,00	246.035.000,00	447.130.999,90	352.045.999,90	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				5 Dokumen	1 Dokumen	64.667.000,00	39.953.280,00	39.953.280,00	-24.713.720,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				5 Laporan	12 Laporan	82.632.200,00	57.199.880,00	57.199.880,00	-25.432.320,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				5 Dokumen	5 Dokumen	59.867.000,00	207.369.000,00	337.715.000,00	277.848.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK*				95 %	40 Dokumen	300.000.000,00	265.000.000,00	597.479.200,00	297.479.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		220.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				36 Dokumen	36 Dokumen	26.666.200,00	54.197.400,00	75.000.000,00	48.333.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	6 Laporan	73.826.400,00	49.348.200,00	51.257.800,00	-22.568.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	6 Laporan	96.333.200,00	95.684.200,00	270.544.200,00	174.211.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	103.174.200,00	65.770.200,00	200.677.200,00	97.503.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	105.965.099.664,00	90.389.867.800,00	109.429.423.487,00	3.464.323.823,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Masyarakat		122.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	6.217.291.664,00	1.850.000.000,00	8.994.117.887,00	2.776.826.223,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			2.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	99.747.808.000,00	88.539.867.800,00	100.435.305.600,00	687.497.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			120.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah**				**100 70 %**	**70 100 %**	**699.999.400,00**	**1.218.102.600,00**	**2.872.728.149,00**	**675.000.600,00**							**1.375.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Meningkatnya Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik*				100 %	100 %	699.999.400,00	1.218.102.600,00	2.872.728.149,00	2.172.728.749,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		1.375.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.450.900,00	52.568.400,00	70.501.100,00	58.050.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	49.999.800,00	54.991.200,00	494.346.749,00	444.346.949,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				36 Laporan	36 Laporan	425.000.000,00	510.000.000,00	864.952.000,00	439.952.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			725.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	62.480.400,00	470.597.400,00	1.202.471.700,00	1.139.991.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			475.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.068.400,00	60.000.000,00	94.702.800,00	19.634.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	74.999.900,00	69.945.600,00	145.753.800,00	70.753.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**3.293.137.639,00**	**4.351.974.562,50**	**6.896.651.177,00**	**3.603.513.538,00**							**2.333.700.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.293.137.639,00**	**4.351.974.562,50**	**6.896.651.177,00**	**3.603.513.538,00**							**2.333.700.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**3.293.137.639,00**	**4.351.974.562,50**	**6.896.651.177,00**	**3.603.513.538,00**							**2.333.700.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**-**	**100 %**	**1.574.228.239,00**	**2.646.806.845,00**	**3.619.871.607,00**	**-988.528.239,00**							**585.700.000,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu*				-	100 %	1.301.898.439,00	2.272.743.548,00	3.008.868.880,00	1.706.970.441,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		139.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	35 Orang/bulan	1.293.137.639,00	2.263.982.748,00	2.853.278.880,00	1.560.141.241,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8 Dokumen	8.760.800,00	8.760.800,00	155.590.000,00	146.829.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			9.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layaan yang Disediakan, Tingkat Kepatuhan Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	212.644.800,00	81.647.800,00	190.213.000,00	-22.431.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		83.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.973.000,00	0,00	0,00	-9.973.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	7 Paket	9.997.800,00	9.997.800,00	32.910.000,00	22.912.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	182.674.000,00	61.650.000,00	147.303.000,00	-35.371.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			62.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	0,00	249.990.497,00	247.482.227,00	247.482.227,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	16 Unit	0,00	249.990.497,00	247.482.227,00	247.482.227,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	100 %	24.925.000,00	24.925.000,00	88.002.500,00	63.077.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11 Laporan	24.925.000,00	24.925.000,00	88.002.500,00	63.077.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tercapainya Kelancaran Kegiatan Operasional, terjaminnya Keamanan dan Keselamatan*				-	100 %	34.760.000,00	17.500.000,00	85.305.000,00	50.545.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	OPD		78.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2 Unit	24.760.000,00	15.000.000,00	29.025.000,00	4.265.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			16.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	2 Unit	10.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			2.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	51.780.000,00	51.780.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**-**	**100 %**	**1.718.909.400,00**	**1.705.167.717,50**	**3.276.779.570,00**	**29.090.600,00**							**1.748.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Kuantitas dan Kualitas Layanan serta Realisasi Target PAD*				-	100 %	1.718.909.400,00	1.705.167.717,50	3.276.779.570,00	1.557.870.170,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Wajib Pajak		1.748.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 dokumen Dokumen	8 Dokumen	359.981.400,00	150.165.800,00	150.165.800,00	-209.815.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan Laporan	1 Laporan	94.200.000,00	137.999.830,00	140.038.000,00	45.838.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			140.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	53 Unit	313.910.400,00	166.070.700,00	1.648.584.700,00	1.334.674.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1 Obyek Pajak	21826 Obyek Pajak	200.038.200,00	535.066.127,50	591.140.810,00	391.102.610,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			540.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 dokumen Dokumen	12 Dokumen	99.668.200,00	51.369.200,00	59.354.200,00	-40.314.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 dokumen Dokumen	12 Dokumen	99.996.000,00	199.996.210,00	199.996.210,00	100.000.210,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				-	2 Dokumen	0,00	49.907.600,00	49.907.600,00	49.907.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			53.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 dokumen Dokumen	12 Dokumen	99.996.000,00	199.998.750,00	202.998.750,00	103.002.750,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan Laporan	12 Laporan	451.119.200,00	214.593.500,00	234.593.500,00	-216.525.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			215.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**34.504.541.281,75**	**4.584.565.187,00**	**4.719.745.627,00**	**-29.784.795.654,75**							**19.111.724.992,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**34.504.541.281,75**	**4.584.565.187,00**	**4.719.745.627,00**	**-29.784.795.654,75**							**19.111.724.992,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**34.504.541.281,75**	**4.584.565.187,00**	**4.689.745.627,00**	**-29.814.795.654,75**							**19.076.724.992,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan pelayanaan Administrasi perkantoran secara cepat dan tepat Persentase Layanan Kepegawaian yang terdigital**				**undefined 90 undefined persen**	**90 undefined persen undefined**	**34.096.296.481,75**	**4.144.852.787,00**	**4.140.450.427,00**	**-16.199.571.489,75**							**17.896.724.992,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Lancaranya kegiatan perkantoran,tersedianya Gaji dan Tunjangan serta tambahan Penghsilan ASN*				1 Tahun	1 Tahun	6.495.869.281,75	3.890.455.187,00	3.859.526.827,00	-2.636.342.454,75			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		3.851.174.992,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	6.445.031.281,75	3.870.655.187,00	3.839.726.827,00	-2.605.304.454,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.754.414.592,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-2.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			66.260.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.638.000,00	0,00	0,00	-28.638.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.500.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.260.000,00	5.260.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	2 Orang	0,00	0,00	5.260.000,00	5.260.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Kegiatan Perkantoran*				55 Jenis	55 Jenis	244.612.800,00	101.335.600,00	118.331.600,00	-126.281.200,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		271.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38.568.800,00	0,00	0,00	-38.568.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	65.931.000,00	65.020.600,00	65.020.600,00	-910.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	130.108.000,00	26.310.000,00	43.306.000,00	-86.802.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perkantoran*				4 Laporan	4 Laporan	27.309.510.000,00	113.910.000,00	118.180.000,00	-27.191.330.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		13.627.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	113.910.000,00	113.910.000,00	113.910.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	7 Laporan	0,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	27.195.600.000,00	0,00	0,00	-27.195.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.467.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpiliharanya barang milik Daerah*				12 Unit	12 Unit	46.304.400,00	39.152.000,00	39.152.000,00	-7.152.400,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		46.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.304.400,00	39.152.000,00	39.152.000,00	-7.152.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			46.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Kepegawaian yang terdigital**				**30 persen**	**30 persen**	**408.244.800,00**	**439.712.400,00**	**549.295.200,00**	**771.755.200,00**							**1.180.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Indeks Profesionalitas ASN Terpenuhinya Pemberhentian dan Informasi ASN Terpenuhunya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan*				3770 ASN 550 ASN 75 Persen	3770 ASN 550 ASN 75 Persen	49.879.800,00	12.647.000,00	12.647.000,00	-37.232.800,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				20 Dokumen	20 Dokumen	24.999.800,00	12.647.000,00	12.647.000,00	-12.352.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2325 PNS,1445 PPPK Dokumen	2325 PNS,1445 PPPK Dokumen	24.880.000,00	0,00	0,00	-24.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyaratan dalam penyesuaian ijazah dan pindahgolongan*				320 ASN	320 ASN	169.309.800,00	371.915.400,00	410.980.400,00	241.670.600,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	151.075.200,00	359.887.000,00	398.952.000,00	247.876.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			540.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				40 Dokumen	40 Dokumen	18.234.600,00	12.028.400,00	12.028.400,00	-6.206.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan tepenuhinya persyaratan dalam penyesuian Ijazah dan pindah golongan ruang ASN*				387 ASN	387 ASN	153.349.000,00	42.660.000,00	42.660.000,00	-110.689.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				51 Orang	51 Orang	153.349.000,00	42.660.000,00	42.660.000,00	-110.689.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah rekomendasi perbaikan kinerja yang di berikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	35.706.200,00	12.490.000,00	83.007.800,00	47.301.600,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				-	2 Dokumen	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				-	150 Orang	0,00	0,00	16.518.000,00	16.518.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	10 Orang	35.706.200,00	12.490.000,00	36.489.800,00	783.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**							**35.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**35.000.000,00**							**35.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				-	166 Orang	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**6.966.237.819,00**	**6.121.271.001,00**	**6.649.547.666,00**	**-316.690.153,00**							**10.255.820.153,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.966.237.819,00**	**6.121.271.001,00**	**6.649.547.666,00**	**-316.690.153,00**							**10.255.820.153,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.966.237.819,00**	**6.121.271.001,00**	**6.649.547.666,00**	**-316.690.153,00**							**10.255.820.153,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.444.221.627,00**	**5.461.856.626,00**	**5.690.133.291,00**	**1.550.512.534,00**							**6.994.734.161,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	4.257.306.466,00	4.823.621.034,00	4.951.897.699,00	694.591.233,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.124.040.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.153.266.466,00	4.775.871.034,00	4.904.147.699,00	750.881.233,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	104.040.000,00	47.750.000,00	47.750.000,00	-56.290.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			124.040.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standart*				100 Persen	100 Persen	212.892.000,00	45.087.000,00	45.087.000,00	-167.805.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		412.892.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	212.892.000,00	45.087.000,00	45.087.000,00	-167.805.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			412.892.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	534.085.400,00	254.664.000,00	354.664.000,00	-179.421.400,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		689.703.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.357.000,00	4.657.000,00	4.657.000,00	-46.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			71.357.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	130.846.400,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-100.846.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.846.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			17.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-10.005.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	308.382.000,00	200.012.000,00	300.012.000,00	-8.370.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	276.390.000,00	308.631.000,00	308.631.000,00	32.241.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		532.551.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	95.400.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	-55.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			115.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	180.990.000,00	268.781.000,00	268.781.000,00	87.791.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			416.651.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	163.547.761,00	29.853.592,00	29.853.592,00	-133.694.169,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		235.547.761,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	13.986.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	814.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.986.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	34.004.000,00	4.993.600,00	4.993.600,00	-29.010.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			54.004.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	28.000.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	-22.940.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			58.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	87.557.761,00	4.999.992,00	4.999.992,00	-82.557.769,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			107.557.761,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**				**70 Persen**	**75 Persen**	**1.237.787.200,00**	**604.456.367,00**	**604.456.367,00**	**1.446.068.800,00**							**2.683.856.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*				65 Persen	100 Persen	940.242.000,00	404.055.367,00	404.055.367,00	-536.186.633,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		2.024.242.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	73.918.000,00	9.944.367,00	9.944.367,00	-63.973.633,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			158.918.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	67.610.000,00	9.445.000,00	9.445.000,00	-58.165.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			157.610.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				131 Laporan	131 Laporan	222.888.000,00	100.006.000,00	100.006.000,00	-122.882.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			642.888.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				37 Laporan	37 Laporan	64.043.000,00	10.018.000,00	10.018.000,00	-54.025.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			84.043.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				22 Laporan	22 Laporan	300.477.000,00	249.610.000,00	249.610.000,00	-50.867.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			419.477.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	109.501.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	-104.528.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			309.501.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	101.805.000,00	20.059.000,00	20.059.000,00	-81.746.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			251.805.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Meningkatnya Kwalitas Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				67 Persen	100 Persen	297.545.200,00	200.401.000,00	200.401.000,00	-97.144.200,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		659.614.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	147.192.400,00	150.382.000,00	150.382.000,00	3.189.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			358.260.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	8 Laporan	150.352.800,00	50.019.000,00	50.019.000,00	-100.333.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			301.354.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kapabilitas APIP**				**3.00 3.30 Level Level**	**3.2 3.30 Level Level**	**284.228.992,00**	**54.958.008,00**	**354.958.008,00**	**293.001.000,00**							**577.229.992,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Meningkatnya kwalitas Kebijakan*				70 Persen	100 Persen	55.242.000,00	4.958.000,00	34.965.000,00	-20.277.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		139.242.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	55.242.000,00	4.958.000,00	34.965.000,00	-20.277.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			139.242.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*				75 Persen	100 Persen	228.986.992,00	50.000.008,00	319.993.008,00	91.006.016,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		437.987.992,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	54.010.000,00	5.013.000,00	275.006.000,00	220.996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			159.011.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				26 perangkat daerah	26 perangkat daerah	55.345.000,00	4.983.000,00	4.983.000,00	-50.362.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			119.345.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	71.099.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-36.099.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			91.099.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	48.532.992,00	5.004.008,00	5.004.008,00	-43.528.984,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			68.532.992,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIBERUT UTARA							**2.566.653.970,50**	**2.864.746.916,00**	**2.919.477.784,00**	**352.823.813,50**							**2.822.478.757,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.566.653.970,50**	**2.864.746.916,00**	**2.919.477.784,00**	**352.823.813,50**							**2.822.478.757,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.566.653.970,50**	**2.864.746.916,00**	**2.919.477.784,00**	**352.823.813,50**							**2.822.478.757,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.478.149.970,50**	**2.736.701.716,00**	**2.791.432.584,00**	**246.614.886,50**							**2.724.764.857,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Perencanaan, Pengangaran dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	17.050.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	-2.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan		18.755.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	17.050.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	-2.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.755.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.327.854.070,50	2.556.397.016,00	2.611.127.884,00	283.273.813,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan		2.560.639.367,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.254.654.070,50	2.489.197.016,00	2.543.927.884,00	289.273.813,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.480.119.367,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	73.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			80.520.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	87.715.900,00	105.424.700,00	105.424.700,00	17.708.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan		96.487.490,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2.412.500,00	2.412.500,00	2.412.500,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.653.750,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.059.000,00	31.909.800,00	31.918.800,00	-140.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.264.900,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.744.400,00	1.744.400,00	1.744.400,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.918.840,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	51.500.000,00	69.358.000,00	69.349.000,00	17.849.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			56.650.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	12.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	14.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara		12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	12.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				100 Persen	100 Persen	33.530.000,00	33.530.000,00	33.530.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kantor Camat Siberut Utara		36.883.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	19.520.000,00	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			21.472.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.287.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.124.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**12.355.000,00**	**11.255.000,00**	**11.255.000,00**	**1.595.500,00**							**13.950.500,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Meningkatnya Pelayanan E KTP*				100 Persen	100 Persen	12.355.000,00	11.255.000,00	11.255.000,00	-1.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		13.950.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	12.355.000,00	11.255.000,00	11.255.000,00	-1.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.950.500,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**30.964.000,00**	**26.364.200,00**	**26.364.200,00**	**3.096.400,00**							**34.060.400,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Mussrenbang Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan*				100 Persen	100 Persen	30.964.000,00	26.364.200,00	26.364.200,00	-4.599.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerintahan Desa se Kecamatan Siberut Utara		34.060.400,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	21.234.000,00	17.734.200,00	17.734.200,00	-3.499.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			23.357.400,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	9.730.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	-1.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.703.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Aduan yang ditindak lanjuti**				**90 Persen**	**90 Persen**	**28.435.000,00**	**75.476.000,00**	**75.476.000,00**	**2.843.000,00**							**31.278.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terciptanya warga masyarakat kecamatan yang cinta terhadap NKRI/bangsa dan Negara*				80 Persen	80 Persen	28.435.000,00	75.476.000,00	75.476.000,00	47.041.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Utara		31.278.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	19.250.000,00	71.491.000,00	71.491.000,00	52.241.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			21.175.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.185.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	-5.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.103.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Serapan APBDes**				**90 Persen**	**90 Persen**	**16.750.000,00**	**14.950.000,00**	**14.950.000,00**	**1.675.000,00**							**18.425.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya jumlah laporan keuangan dan terkelolanya aset Desa secara maksimal dan efisien*				80 Persen	80 Persen	16.750.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	-1.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pemerintahan Desa se Kecamatan Siberut Utara		18.425.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	16.750.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.425.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
		KECAMATAN SIBERUT TENGAH							**1.574.763.968,50**	**1.669.081.070,66**	**1.704.616.497,66**	**129.852.529,16**							**2.017.279.366,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.574.763.968,50**	**1.669.081.070,66**	**1.704.616.497,66**	**129.852.529,16**							**2.017.279.366,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.574.763.968,50**	**1.669.081.070,66**	**1.704.616.497,66**	**129.852.529,16**							**2.017.279.366,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.435.338.968,50**	**1.573.106.070,66**	**1.608.641.497,66**	**387.439.397,50**							**1.822.778.366,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan ,Perencanaan dan pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa*				100 Persen 90 persen	100 Persen 90 persen	15.750.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	-1.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		71.496.500,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 0	0 0	15.750.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	-1.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			71.496.500,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan adminsitrasi yang dilaksanakan Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen 2 layanan	100 Persen 2 layanan	1.360.213.968,50	1.485.884.070,66	1.521.419.497,66	161.205.529,16			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		1.596.310.866,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 0	11 0	1.268.763.968,50	1.443.964.070,66	1.479.499.497,66	210.735.529,16	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.450.310.866,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	91.450.000,00	41.920.000,00	41.920.000,00	-49.530.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			146.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Umum Persentase peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	53.375.000,00	64.272.000,00	64.272.000,00	10.897.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat Siberut Tengah		147.971.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.844.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.530.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			70.620.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.902.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36.720.000,00	47.617.000,00	47.617.000,00	10.897.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.605.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Layanan Operasional Perkantoran* *Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	6.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	2.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat dan ASN		7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan** **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah**				**B** **B Indek** **INDEKS**	**B** **B** **INDEKS** **Indek**	**16.200.000,00**	**11.850.000,00**	**11.850.000,00**	**1.900.000,00**							**18.100.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan /Dilaksanakan(Rekam E-KTP)* *Persentase Kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Pemerintah Kepada camat*				300 Jiwa 90 persen	300 Jiwa 90 persen	16.200.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-4.350.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		18.100.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	16.200.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	-4.350.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.100.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daera** **Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan**				**70** **80 persen** **Persen**	**80** **70 Persen** **persen**	**21.800.000,00**	**21.800.000,00**	**21.800.000,00**	**27.768.000,00**							**49.568.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan* *Meniningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*				90 persen B INDEKS	90 persen B INDEKS	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		49.568.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.368.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			14.200.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**						**76.825.000,00**	**38.325.000,00**	**38.325.000,00**	**9.355.000,00**							**86.180.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* *Persentase Kwalitas Masyarakat akan Nilai nilai Luhur Jiwa Kebangsaan*				100 Orang 100 Persen	100 Orang 100 Persen	76.825.000,00	38.325.000,00	38.325.000,00	-38.500.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	3 Desa di wilayah Kecamatan Siberut Tengah		86.180.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	76.825.000,00	38.325.000,00	38.325.000,00	-38.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			86.180.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**24.600.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**16.053.000,00**							**40.653.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Yang Diberi Pembinaan dan Pengawasan*				3 Desa	3 Desa	24.600.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat 3 Desa Diwilayah Kecamatan Siberut Tengah		40.653.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	24.600.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.653.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
		KECAMATAN SIBERUT BARAT							**1.584.097.756,00**	**1.636.707.947,00**	**1.764.690.583,00**	**180.592.827,00**							**1.937.466.756,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.584.097.756,00**	**1.636.707.947,00**	**1.764.690.583,00**	**180.592.827,00**							**1.937.466.756,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.584.097.756,00**	**1.636.707.947,00**	**1.764.690.583,00**	**180.592.827,00**							**1.937.466.756,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.496.395.956,00**	**1.579.999.947,00**	**1.653.215.583,00**	**214.680.800,00**							**1.711.076.756,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	29.087.500,00	19.950.000,00	32.975.000,00	3.887.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		53.550.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	29.087.500,00	19.950.000,00	32.975.000,00	3.887.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			53.550.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				13 Orang	13 Orang	1.346.217.956,00	1.436.165.147,00	1.465.267.783,00	119.049.827,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		1.469.107.756,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.185.097.956,00	1.343.215.147,00	1.287.697.783,00	102.599.827,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.195.097.756,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48 Dokumen Dokumen	48 Dokumen Dokumen	161.120.000,00	92.950.000,00	177.570.000,00	16.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			274.010.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	88.590.500,00	83.884.800,00	107.472.800,00	18.882.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		143.249.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.383.000,00	3.383.000,00	3.383.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.490.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.112.200,00	32.052.200,00	25.971.200,00	-6.141.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.070.200,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.600.300,00	1.606.600,00	1.606.600,00	6.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.758.800,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51.495.000,00	46.843.000,00	76.512.000,00	25.017.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			84.930.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	30.000.000,00	37.500.000,00	13.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemerataan Jaringan Listrik	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	30.000.000,00	37.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemerataan Jaringan Listrik			30.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Kecamatan Siberut Barat		15.170.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.170.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan mäsyarakat Layanan Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**27.900.000,00**	**15.025.000,00**	**29.150.000,00**	**7.175.000,00**							**35.075.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Data Layanan Publik*				400 Dokumen	400 Dokumen	27.900.000,00	15.025.000,00	29.150.000,00	1.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		35.075.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	27.900.000,00	15.025.000,00	29.150.000,00	1.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			35.075.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.836.800,00**	**12.933.000,00**	**21.645.000,00**	**24.868.200,00**							**45.705.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				30 Lembaga Kemasyarakat	30 Lembaga Kemasyarakat	20.836.800,00	12.933.000,00	21.645.000,00	808.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		45.705.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15.355.000,00	10.385.000,00	6.710.000,00	-8.645.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.215.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	5.481.800,00	2.548.000,00	14.935.000,00	9.453.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.490.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Wawasan Kebangsaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.240.000,00**	**7.225.000,00**	**25.630.000,00**	**67.650.000,00**							**75.890.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*				100 Orang	100 Orang	8.240.000,00	7.225.000,00	25.630.000,00	17.390.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		75.890.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	3.800.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	7.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.780.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	6.025.000,00	14.430.000,00	9.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.110.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa yang diselesaikan tepat waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**30.725.000,00**	**21.525.000,00**	**35.050.000,00**	**38.995.000,00**							**69.720.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumalh Dokumen Desa yang diverifikasi*				30 Dokumen	30 Dokumen	30.725.000,00	21.525.000,00	35.050.000,00	4.325.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		69.720.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	30.725.000,00	21.525.000,00	35.050.000,00	4.325.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			69.720.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA							**1.553.383.771,50**	**1.650.605.991,00**	**1.691.459.116,00**	**138.075.344,50**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.553.383.771,50**	**1.650.605.991,00**	**1.691.459.116,00**	**138.075.344,50**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.553.383.771,50**	**1.650.605.991,00**	**1.691.459.116,00**	**138.075.344,50**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**13 Dokumen undefined**	**13 Dokumen undefined**	**1.496.051.771,50**	**1.593.273.991,00**	**1.634.127.116,00**	**-1.496.051.771,50**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN*				13 Dokumen undefined	13 Dokumen undefined	37.640.000,00	31.190.000,00	31.190.000,00	-6.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	37.640.000,00	31.190.000,00	31.190.000,00	-6.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah yang diterima*				13 Dokumen undefined	13 Dokumen undefined	1.261.843.871,50	1.432.099.091,00	1.472.952.216,00	211.108.344,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.166.418.871,50	1.369.074.091,00	1.409.927.216,00	243.508.344,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	95.425.000,00	63.025.000,00	63.025.000,00	-32.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia*				4 Dokumen undefined	4 Dokumen undefined	160.596.900,00	111.984.900,00	111.984.900,00	-48.612.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.997.500,00	6.997.500,00	6.997.500,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	51.308.600,00	28.619.600,00	28.619.600,00	-22.689.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.300.800,00	2.300.800,00	2.300.800,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	99.990.000,00	74.067.000,00	74.067.000,00	-25.923.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Dokumen undefined	1 Dokumen undefined	14.971.000,00	0,00	0,00	-14.971.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	14.971.000,00	0,00	0,00	-14.971.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				4 Dokumen undefined	4 Dokumen undefined	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah*				4 Dokumen undefined	4 Dokumen undefined	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kantor Camat Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**18.460.000,00**	**18.460.000,00**	**18.460.000,00**	**-18.460.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat*				3 Dokumen undefined	3 Dokumen undefined	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	9.230.000,00	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ditingkat kecamatan dan desa**				**3 Dokumen undefined**	**3 Dokumen undefined**	**13.912.000,00**	**13.912.000,00**	**13.912.000,00**	**-13.912.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa*				3 Dokumen undefined	3 Dokumen undefined	13.912.000,00	13.912.000,00	13.912.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Dokumen Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen Lembaga Kemasyarakatan	13.912.000,00	13.912.000,00	13.912.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelesaian konflik diwilayah kecamatan yang ditangani/diselasaikan Persentase penyelesaian konflik diwilayah kecamatan yang ditangani/diselasaikan**				**1 Dokumen 2 Dokumen undefined undefined**	**1 Dokumen 2 Dokumen undefined undefined**	**14.010.000,00**	**14.010.000,00**	**14.010.000,00**	**-14.010.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				1 Dokumen undefined 2 Dokumen undefined	1 Dokumen undefined 2 Dokumen undefined	14.010.000,00	14.010.000,00	14.010.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	30 Orang	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan pembinaan dan pengawasan keuangan desa**				**3 Dokumen undefined**	**3 Dokumen undefined**	**10.950.000,00**	**10.950.000,00**	**10.950.000,00**	**-10.950.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan keuangan desa*				3 Dokumen undefined	3 Dokumen undefined	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Desa di Kecamatan Siberut Barat Daya		0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
		KECAMATAN SIBERUT SELATAN							**2.295.533.024,50**	**2.449.759.821,00**	**2.473.425.068,00**	**177.892.043,50**							**2.825.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.295.533.024,50**	**2.449.759.821,00**	**2.473.425.068,00**	**177.892.043,50**							**2.825.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.295.533.024,50**	**2.449.759.821,00**	**2.473.425.068,00**	**177.892.043,50**							**2.825.800.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.203.197.024,50**	**2.370.403.821,00**	**2.384.329.068,00**	**243.602.975,50**							**2.446.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan*				100 %	100 %	30.940.000,00	25.940.000,00	25.940.000,00	-5.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		37.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.940.000,00	25.940.000,00	25.940.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			37.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan*				23 Orang	23 Orang	2.005.476.524,50	2.198.303.321,00	2.212.228.568,00	206.752.043,50			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai		2.098.300.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.961.076.524,50	2.164.903.321,00	2.178.828.568,00	217.752.043,50	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.000.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	44.400.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00	-11.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			98.300.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Adminsitrasi Kinerja Aparatur Perangkat Daerah*				100 %	100 %	109.330.500,00	91.530.500,00	91.530.500,00	-17.800.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		236.500.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.577.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			8.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	43.883.500,00	39.873.500,00	39.873.500,00	-4.010.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			59.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.670.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	-690.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			8.500.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	59.200.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00	-13.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			161.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	22.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-1.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Penyediaan Jaringan Internet	ASN dan PPPK Kecamatan Siberut Selatan		12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Penyediaan Jaringan Internet			12.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang berhasil dipelihara*				2 Unit	2 Unit	35.450.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	-1.220.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		63.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	32.690.000,00	31.470.000,00	31.470.000,00	-1.220.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.640.000,00**	**12.660.000,00**	**12.660.000,00**	**46.360.000,00**							**61.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat*				undefined undefined	undefined undefined	14.640.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	-1.980.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		61.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	14.640.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	-1.980.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			61.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**32.118.000,00**	**28.273.000,00**	**38.013.000,00**	**55.882.000,00**							**88.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan*				10 Lembaga Kemasyarakat	10 Lembaga Kemasyarakat	32.118.000,00	28.273.000,00	38.013.000,00	5.895.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		88.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	15.318.000,00	13.933.000,00	23.673.000,00	8.355.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			27.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	16.800.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-2.460.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			61.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/ diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.848.000,00**	**19.833.000,00**	**19.833.000,00**	**139.152.000,00**							**165.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*				30 Orang	30 Orang	25.848.000,00	19.833.000,00	19.833.000,00	-6.015.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		165.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	11.088.000,00	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			120.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.760.000,00	8.745.000,00	8.745.000,00	-6.015.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			45.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**19.730.000,00**	**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**45.270.000,00**							**65.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Penetapan APBDes tepat waktu* *Persentase serapan APBDes diatas 90 persen*				100 Persen	100 Persen	19.730.000,00	18.590.000,00	18.590.000,00	-1.140.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pemerintahan Desa		65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.730.000,00	18.590.000,00	18.590.000,00	-1.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			65.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
		KECAMATAN SIPORA UTARA							**1.987.948.673,00**	**2.232.948.038,00**	**2.519.039.933,00**	**531.091.260,00**							**2.221.564.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.987.948.673,00**	**2.232.948.038,00**	**2.519.039.933,00**	**531.091.260,00**							**2.221.564.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.987.948.673,00**	**2.232.948.038,00**	**2.519.039.933,00**	**531.091.260,00**							**2.221.564.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan ,dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**1.868.242.273,00**	**2.152.495.038,00**	**2.375.345.333,00**	**143.322.027,00**							**2.011.564.300,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				75 Persen 95 Persen	95 Persen	28.125.200,00	19.752.000,00	49.503.000,00	21.377.800,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat dan Desa		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	28.125.200,00	19.752.000,00	49.503.000,00	21.377.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya KegiatanAdministrasi Keuangan*				100 Persen	100 Persen	1.679.228.673,00	1.960.660.038,00	2.128.441.933,00	449.213.260,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.723.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.661.948.673,00	1.943.380.038,00	2.055.971.933,00	394.023.260,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.673.564.300,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	17.280.000,00	17.280.000,00	72.470.000,00	55.190.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah*				100 Persen	100 Persen	82.878.400,00	87.479.000,00	114.096.400,00	31.218.000,00			-	-	-		135.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.980.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	-2.005.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.499.400,00	31.499.400,00	39.793.800,00	8.294.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.075.600,00	11.070.600,00	1.070.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.899.000,00	43.429.000,00	58.757.000,00	23.858.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urrusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	26.000.000,00	35.600.000,00	26.840.000,00	840.000,00			-	-	-		28.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	35.600.000,00	26.840.000,00	840.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran*				-	100 Persen	52.010.000,00	49.004.000,00	56.464.000,00	4.454.000,00			-	-	perangkat daerah		75.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	32.000.000,00	31.270.000,00	37.270.000,00	5.270.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	3.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	8 Unit	1.830.000,00	4.020.000,00	5.480.000,00	3.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.180.000,00	6.864.000,00	6.864.000,00	-8.316.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara**				**B** **100** **70** **B** **B Indeks** **Persen** **Persen** **Indek** **Indek**	**B Indek**	**14.998.800,00**	**13.498.800,00**	**26.997.600,00**	**10.001.200,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat*				-	1 Urusan	14.998.800,00	13.498.800,00	26.997.600,00	11.998.800,00			-	-	masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	14.998.800,00	13.498.800,00	26.997.600,00	11.998.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan**				**95** **70** **90** **92** **Persen** **persen** **Persen** **Persen**	**70 persen**	**39.815.800,00**	**36.327.200,00**	**64.970.000,00**	**10.184.200,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa*				-	95 Persen	39.815.800,00	36.327.200,00	64.970.000,00	25.154.200,00			-	-	masyarakat		50.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	19.816.000,00	16.446.000,00	27.366.000,00	7.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	19.999.800,00	19.881.200,00	37.604.000,00	17.604.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah kecamatan yang di selesaikan**				**-**	**100 persen**	**39.945.000,00**	**12.795.000,00**	**23.940.000,00**	**55.055.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 Persen 1 Urusan 2 Urusan 95 Persen	100 Persen	39.945.000,00	12.795.000,00	23.940.000,00	-16.005.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	masyarakat		95.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			70.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.945.000,00	12.795.000,00	23.940.000,00	8.995.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**95** **68** **92** **Persen** **Persen** **Persen**	**95 Persen**	**24.946.800,00**	**17.832.000,00**	**27.787.000,00**	**15.053.200,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi*				-	95 Persen	24.946.800,00	17.832.000,00	27.787.000,00	2.840.200,00			-	-	Aparatur Desa		40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	24.946.800,00	17.832.000,00	27.787.000,00	2.840.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
		KECAMATAN SIPORA SELATAN							**2.610.242.064,00**	**2.739.264.669,00**	**2.850.624.489,00**	**240.382.425,00**							**2.551.242.064,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.610.242.064,00**	**2.739.264.669,00**	**2.850.624.489,00**	**240.382.425,00**							**2.551.242.064,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.610.242.064,00**	**2.739.264.669,00**	**2.850.624.489,00**	**240.382.425,00**							**2.551.242.064,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.476.243.064,00**	**2.675.254.669,00**	**2.766.699.489,00**	**-500,00**							**2.476.242.564,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	16.800.000,00	31.500.000,00	1.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Meningkatnya serta Lancarnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Pembangunan di Desa		30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	16.800.000,00	31.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Penerima GAJI DAN TUNJANGAN PNS*				27 Orang	27 Orang	2.311.242.564,00	2.524.497.169,00	2.528.851.989,00	217.609.425,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya Tata kelola Keuangan Perangkat daerah yang Efektif dan efisien		2.311.242.064,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.286.242.564,00	2.495.697.169,00	2.472.691.989,00	186.449.425,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.286.242.064,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	28.800.000,00	56.160.000,00	31.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	90.000.500,00	75.957.500,00	140.347.500,00	50.347.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pemerataan Jaringan Listrik	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan efisien		90.000.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.999.500,00	4.554.500,00	4.554.500,00	-445.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pemerataan Jaringan Listrik			4.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	45.900.000,00	30.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.066.000,00	20.039.000,00	29.929.000,00	-10.137.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			40.066.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	29.935.000,00	41.364.000,00	59.964.000,00	30.029.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			29.935.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Tagihan Listrik Penerangan Bangunan Kantor*				3 REKENING	3 REKENING	24.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pemerataan Jaringan Listrik	Tersediasnya Sumber Daya Air dan Listrik kantor		24.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pemerataan Jaringan Listrik			24.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Darat Operasional Kantor*				4 Unit	4 Unit	21.000.000,00	28.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Tersedianya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Kantor		21.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	21.000.000,00	28.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			21.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**29.999.500,00**	**30.006.000,00**	**49.921.000,00**	**0,00**							**29.999.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya pembinaan Perempuan dan Keluarga di Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	25.165.000,00	10.165.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Meningkatnya pembinaan Perempuan dan keluarga		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	25.165.000,00	10.165.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				300 Orang	300 Orang	14.999.500,00	15.006.000,00	24.756.000,00	9.756.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penyediaan Jaringan Internet	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		14.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	14.999.500,00	15.006.000,00	24.756.000,00	9.756.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penyediaan Jaringan Internet			14.999.500,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Pasilitasi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**14.004.000,00**	**14.004.000,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat,Hukum Adat dalam Pembangunan*				200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	14.004.000,00	14.004.000,00	-996.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				22 Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	14.004.000,00	14.004.000,00	-996.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyrakat dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)*				20 KK	20 KK	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Terwujudnya Penumbuhan Keluarga yang berkarakter		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10 Keluarga	10 Keluarga	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Pancasila**				**100 Persen**	**100 Persen**	**58.999.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.999.500,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Meningkatnya Kesadaram Masyarakat akan Ideologi Kebangsaan*				400 Orang	400 Orang	58.999.500,00	0,00	0,00	-58.999.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakan Berlandaskan Pancasila Demokrasi dan HAM		0,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	58.999.500,00	0,00	0,00	-58.999.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**				**90 Persen**	**90 Persen**	**15.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya tata kelola Aset Desah*				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Terwujudnya PengelolaanKeuangan dan aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita			15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
		KECAMATAN PAGAI UTARA							**1.723.925.492,25**	**1.866.265.044,82**	**2.172.024.811,82**	**448.099.319,57**							**210.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.723.925.492,25**	**1.866.265.044,82**	**2.172.024.811,82**	**448.099.319,57**							**210.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.723.925.492,25**	**1.866.265.044,82**	**2.172.024.811,82**	**448.099.319,57**							**210.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.610.937.092,25**	**1.793.176.644,82**	**2.026.061.411,82**	**-1.400.937.092,25**							**210.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Persentasi Jumlah Kesejahteraan Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN*				100 Persen 90 Persen	100 Persen 90 Persen	1.478.433.492,25	1.671.097.044,82	1.836.726.811,82	358.293.319,57			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kantor Kecamatan		210.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.411.925.492,25	1.637.197.044,82	1.762.956.811,82	351.031.319,57	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	66.508.000,00	33.900.000,00	73.770.000,00	7.262.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			210.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*				80 persen	80 persen	120.503.600,00	110.079.600,00	177.334.600,00	56.831.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.693.600,00	55.320.600,00	55.350.600,00	-2.343.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.610.000,00	648.000,00	648.000,00	-6.962.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	55.200.000,00	54.111.000,00	70.336.000,00	15.136.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				80 persen	80 persen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	wilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah Rencana Pembangunan diwilayah Kecamatan** **Persentase Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**95** **95 persen** **persen**	**95** **95 persen** **persen**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**-13.500.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat diwilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan** **Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan**				**95** **70** **Persen** **persen**	**95** **70** **Persen** **persen**	**39.488.400,00**	**27.488.400,00**	**19.388.400,00**	**-39.488.400,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan*				95 Persen	95 Persen	39.488.400,00	27.488.400,00	19.388.400,00	-20.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	wilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	39.488.400,00	27.488.400,00	19.388.400,00	-20.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**57.800.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	57.800.000,00	57.800.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	0,00	0,00	57.800.000,00	57.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**92 Persen**	**92 Persen**	**60.000.000,00**	**32.100.000,00**	**55.275.000,00**	**-60.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*				92 Persen	92 Persen	60.000.000,00	32.100.000,00	55.275.000,00	-4.725.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	14.400.000,00	28.275.000,00	-1.725.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	17.700.000,00	27.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
		KECAMATAN PAGAI SELATAN							**1.781.938.449,25**	**1.964.186.857,00**	**2.118.596.595,00**	**336.658.145,75**							**1.907.521.679,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.781.938.449,25**	**1.964.186.857,00**	**2.118.596.595,00**	**336.658.145,75**							**1.907.521.679,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.781.938.449,25**	**1.964.186.857,00**	**2.118.596.595,00**	**336.658.145,75**							**1.907.521.679,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan peangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.667.530.449,25**	**1.896.651.857,00**	**2.019.045.595,00**	**165.027.379,75**							**1.832.557.829,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evalusi KInerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	36.520.000,00	32.845.000,00	34.125.000,00	-2.395.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		36.457.950,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	36.520.000,00	32.845.000,00	34.125.000,00	-2.395.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			36.457.950,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.486.568.449,25	1.749.727.857,00	1.783.561.595,00	296.993.145,75			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		1.622.871.559,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.402.138.449,25	1.689.819.857,00	1.660.309.595,00	258.171.145,75	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.556.373.679,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52 Dokumen	12 Dokumen	84.430.000,00	59.908.000,00	123.252.000,00	38.822.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			66.497.880,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	124.542.000,00	91.854.000,00	140.054.000,00	15.512.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		100.218.570,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	985.000,00	685.000,00	685.000,00	-300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			760.350,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	0,00	28.220.000,00	16.220.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.320.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.185.000,00	19.115.000,00	19.183.500,00	-7.001.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			21.217.650,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.765.000,00	940.000,00	940.000,00	-825.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.043.400,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	83.607.000,00	71.114.000,00	91.025.500,00	7.418.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			63.877.170,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	40.680.000,00	40.680.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		55.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	40.680.000,00	40.680.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			55.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.800.000,00	10.800.000,00	8.000.000,00	3.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		5.328.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	10.800.000,00	8.000.000,00	3.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.328.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	15.100.000,00	11.425.000,00	12.625.000,00	-2.475.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN Kecamatan Pagai Selatan		12.681.750,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.738.700,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	8 Unit	9.930.000,00	6.255.000,00	7.455.000,00	-2.475.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.943.050,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan**				**B Indeks**	**B Indeks**	**25.898.000,00**	**8.410.000,00**	**20.390.000,00**	**-16.562.900,00**							**9.335.100,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				100 Persen	100 Persen	25.898.000,00	8.410.000,00	20.390.000,00	-5.508.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		9.335.100,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	4 Laporan	25.898.000,00	8.410.000,00	20.390.000,00	-5.508.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.335.100,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**14.190.000,00**	**9.850.000,00**	**8.526.000,00**	**-3.256.500,00**							**10.933.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 Persen	100 Persen	14.190.000,00	9.850.000,00	8.526.000,00	-5.664.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		10.933.500,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00	7.450.000,00	6.126.000,00	-3.974.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			8.269.500,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	2 Laporan	4.090.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-1.690.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.664.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 Persen**	**100 Persen**	**29.160.000,00**	**13.550.000,00**	**19.910.000,00**	**-14.119.500,00**							**15.040.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	29.160.000,00	13.550.000,00	19.910.000,00	-9.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		15.040.500,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	13.090.000,00	4.800.000,00	11.160.000,00	-1.930.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.328.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	16.070.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	-7.320.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.712.500,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**45.160.000,00**	**35.725.000,00**	**50.725.000,00**	**-5.505.250,00**							**39.654.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu*				100 Persen	4 Desa	45.160.000,00	35.725.000,00	50.725.000,00	5.565.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	4 Desa di Kecamatan Pagai Selatan		39.654.750,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	45.160.000,00	35.725.000,00	50.725.000,00	5.565.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			39.654.750,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
		KECAMATAN SIKAKAP							**2.654.654.779,00**	**2.934.339.419,00**	**3.239.160.154,00**	**584.505.375,00**							**485.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.654.654.779,00**	**2.934.339.419,00**	**3.239.160.154,00**	**584.505.375,00**							**485.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.654.654.779,00**	**2.934.339.419,00**	**3.239.160.154,00**	**584.505.375,00**							**485.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**2.560.189.379,00**	**2.793.134.919,00**	**3.064.255.654,00**	**-2.149.689.379,00**							**410.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase Peningkatan Palayanan Aparatur*				100 persen 1 layanan 75 persen	100 persen 1 layanan 75 persen	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		22.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			22.500.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas ASN Perangkat Daerah yang diterima Persentasi Jumlah Kesejahteraan Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN*				100 persen 100 Persen 80 persen	100 persen 100 Persen 80 persen	2.451.914.779,00	2.646.431.519,00	2.811.162.254,00	359.247.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Sikakap		220.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang O rang/bulan	27 Orang O rang/bulan	2.345.654.779,00	2.555.771.519,00	2.655.502.254,00	309.847.475,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen Dokumen	15 Dokumen Dokumen	106.260.000,00	90.660.000,00	155.660.000,00	49.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			220.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*				4 kegiatan 70 persen	4 kegiatan 70 persen	90.174.600,00	122.603.400,00	191.756.400,00	101.581.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		117.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.942.500,00	1.942.500,00	1.942.500,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	36.992.100,00	63.829.000,00	102.982.000,00	65.989.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			42.800.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51.240.000,00	56.831.900,00	86.831.900,00	35.591.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			70.200.000,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	38.087.000,00	38.087.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		30.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	38.087.000,00	38.087.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Palayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah*				1 layanan 70 persen	1 layanan 70 persen	9.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sebagai penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 unit 8 Buah	3 unit 8 Buah	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	-3.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		11.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	-3.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			11.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sikakap**				**B** **1 Indek** **Laporan**	**1** **B Laporan** **Indek**	**5.240.000,00**	**5.240.000,00**	**5.240.000,00**	**18.760.000,00**							**24.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase terpenuhi dokumen kependudukan masyarakat*				1 Sub Kegiatan 60 persen	1 Sub Kegiatan 60 persen	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		24.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			24.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisifasi masyarakat dalam musyawarah Rencana Pembangunan di wilayah kecamatan**				**95 persen**	**95 persen**	**29.566.400,00**	**29.570.500,00**	**29.570.500,00**	**15.433.600,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Layanan Koordinasi Pemberdayaan Desa*				1 Sub Kegiatan 3 Laporan	1 Sub Kegiatan 3 Laporan	29.566.400,00	29.570.500,00	29.570.500,00	4.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		45.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.722.400,00	25.726.500,00	25.726.500,00	4.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			39.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**43.259.000,00**	**90.614.000,00**	**115.614.000,00**	**-37.259.000,00**							**6.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah*				1 Layanan	1 Layanan	43.259.000,00	90.614.000,00	115.614.000,00	72.355.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		6.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	40.282.000,00	80.284.000,00	105.284.000,00	65.002.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	2.977.000,00	10.330.000,00	10.330.000,00	7.353.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN SIKAKAP
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu**				**92 Persen**	**92 Persen**	**16.400.000,00**	**15.780.000,00**	**24.480.000,00**	**-16.400.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan keuangan desa Persentasi Jumlah dan Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kecamatan*				3 desa 80 persen	3 desa 80 persen	16.400.000,00	15.780.000,00	24.480.000,00	8.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kecamatan Sikakap		0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	16.400.000,00	15.780.000,00	24.480.000,00	8.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	KECAMATAN SIKAKAP
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**3.730.333.159,00**	**3.359.350.886,00**	**4.475.487.813,00**	**745.154.654,00**							**5.308.500.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**3.730.333.159,00**	**3.359.350.886,00**	**4.475.487.813,00**	**745.154.654,00**							**5.308.500.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**3.730.333.159,00**	**3.359.350.886,00**	**4.475.487.813,00**	**745.154.654,00**							**5.308.500.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Parsentase Kebutuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah**				**100 100 undefined Parsen Persen undefined**	**100 100 undefined Parsen Persen undefined**	**1.382.424.653,00**	**1.442.106.780,00**	**2.091.083.707,00**	**156.075.347,00**							**1.538.500.000,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah*				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.181.333.253,00	1.330.794.380,00	1.979.771.307,00	798.438.054,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	ASN DAN PPPK		1.254.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.181.333.253,00	1.330.794.380,00	1.890.611.307,00	709.278.054,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.254.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	12 Dokumen	0,00	0,00	89.160.000,00	89.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	152.591.400,00	72.487.400,00	72.487.400,00	-80.104.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		213.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	50.995.400,00	32.045.400,00	32.045.400,00	-18.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15.000.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	70.596.000,00	28.592.000,00	28.592.000,00	-42.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.500.000,00	14.825.000,00	14.825.000,00	-9.675.000,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit Unit	1 unit Unit	15.000.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	-6.875.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	9.500.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-2.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.001.522.080,00**	**800.000.000,00**	**977.000.000,00**	**718.477.920,00**							**1.720.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.001.522.080,00	800.000.000,00	977.000.000,00	-24.522.080,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.720.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				20 orang Orang	140 orang Orang	219.979.000,00	100.000.000,00	257.000.000,00	37.021.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				33 Orang	30 Orang	781.543.080,00	700.000.000,00	720.000.000,00	-61.543.080,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**699.375.946,00**	**690.000.000,00**	**690.000.000,00**	**50.624.054,00**							**750.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	699.375.946,00	690.000.000,00	690.000.000,00	-9.375.946,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				8 Dokumen Dokumen	8 Dokumen Dokumen	699.375.946,00	690.000.000,00	690.000.000,00	-9.375.946,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**70.971.600,00**	**27.184.000,00**	**57.344.000,00**	**109.028.400,00**							**180.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	70.971.600,00	27.184.000,00	57.344.000,00	-13.627.600,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	4 Laporan	70.971.600,00	27.184.000,00	57.344.000,00	-13.627.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**212.075.000,00**	**89.827.506,00**	**89.827.506,00**	**157.925.000,00**							**370.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	212.075.000,00	89.827.506,00	89.827.506,00	-122.247.494,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	70.776.000,00	26.986.106,00	26.986.106,00	-43.789.894,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	70.616.200,00	33.455.400,00	33.455.400,00	-37.160.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 0	0 0	70.682.800,00	29.386.000,00	29.386.000,00	-41.296.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**363.963.880,00**	**310.232.600,00**	**570.232.600,00**	**386.036.120,00**							**750.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	363.963.880,00	310.232.600,00	570.232.600,00	206.268.720,00			-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	70.906.000,00	33.186.000,00	33.186.000,00	-37.720.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	0 Orang	70.906.200,00	38.466.200,00	38.466.200,00	-32.440.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	71.632.920,00	38.580.400,00	38.580.400,00	-33.052.520,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	150.518.760,00	200.000.000,00	460.000.000,00	309.481.240,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**874.600.648.254,75**	**718.989.926.854,25**	**919.903.194.034,17**	**45.302.545.779,42**							**871.937.276.319,05**	

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan implementasi dari tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat prioritas pembangunan dan program unggulan daerah yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah hasil evaluasi sampai triwulan II tahun 2026. Tema pembangunan tahun 2026 adalah Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Tema pembangunan telah dijabarkan ke dalam program prioritas dan program unggulan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan. Pengimplementasian Perubahan RKPD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam dokumen penganggaran dalam bentuk Perubahan APBD yang akan didahului dengan penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan
3. Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa terkait pemulihan ekonomi.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan Perubahan RKPD tahun 2026 dapat terimplementasikan dengan baik, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani, meliputi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI